

**RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2010 - 2012**



**BAPPENAS**



World Bank



**SC-DRR**  
Safer Communities through  
Disaster Risk Reduction

**RENCANA AKSI NASIONAL  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
2010 - 2012**



**BAPPENAS**



# **RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2010 - 2012**



World Bank



SC-DRR

with Commitment through  
Disaster Risk Reduction





**Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SAMBUTAN**

Penyusunan Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2012 dilaksanakan dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, selain sebagai lanjutan berakhirnya pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009. Selain itu penyusunan RAN-PRB 2010-2012 merupakan kelanjutan komitmen Pemerintah terhadap Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Tahun 1999 yang menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk menjaga dan memperkuat realisasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana untuk mendukung dan penjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan, serta dalam penjabaran Kerangka Aksi Hyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Hyogo Framework for Action*) 2005-2015, yang menekankan bagi semua negara di dunia untuk menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai.

Berbagai kejadian bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, semakin mendorong dan memperkuat komitmen Pemerintah dalam melaksanakan perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif kearah upaya preventif. Bukti lain dari keseriusan Pemerintah terhadap upaya penanggulangan bencana adalah ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, khususnya pada prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 dilaksanakan melalui beberapa tahapan proses yang konsultatif dan partisipatif melalui koordinasi, konsultasi serta konsolidasi di antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah selama enam bulan terakhir. **Hasilnya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNPB No 5 Tahun 2010.**


Diharapkan dokumen RAN-PRB 2010-2012 akan menjadi dasar dan acuan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana sesuai yang diharapkan. Selanjutnya dari sisi Pemerintah, utamanya kementerian/lembaga, dokumen RAN-PRB 2010-2012 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga setiap tahun. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti RAN-PRB ini dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 ini, terutama kepada pihak UNDP dan Bank Dunia, yang telah mendukung pembiayaan penyusunan rancangan RAN-PRB ini.

Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama baik pemerintah maupun lembaga-lembaga nonpemerintah, yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bersama dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Jakarta, Januari 2010

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Armida S. Alisjahbana



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
(BNPB)**

**SAMBUTAN**

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2006-2009 telah berakhir masa berlakunya dan sebagai kelanjutannya disusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012, yang telah disahkan melalui Peraturan Kepala BNPB No. 5 tahun 2010. RAN-PRB disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun bersama oleh suatu forum yang mencakup Kementerian/Lembaga terkait di tingkat nasional, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, yang dikoordinasikan bersama oleh BNPB dan Bappenas.

Dokumen ini juga merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015, *Building the resilience of nations and communities to disaster* (Membangun ketangguhan bangsa dan masyarakat terhadap bencana).

Diharapkan program dan kegiatan dalam RAN-PRB 2010-2012 dapat dijadikan dasar dan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana. Bagi instansi pemerintah, terutama Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dan instansi-instansi pemerintah daerah yang bekerja dalam penanggulangan bencana, diharapkan RAN-PRB 2010-2012 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif Kementerian/Lembaga, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak-pihak lain yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RAN-PRB 2010-2012 dapat menjadi dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di luar pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan daerah.

Kepala

**Dr. Syamsul Maarif, M.Si.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAN-PRB) TAHUN 2010-2012

#### PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak dalam penjabaran kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dalam periode yang ditetapkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, dan memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan dalam implementasi rencana aksi. RAN-PRB menjadi dasar pelaksanaan yang kuat dan sistematis bagi prioritas yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam mengurangi risiko dari beragam ancaman bencana.

Dokumen RAN-PRB 2010-2012 memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait dalam penjabaran dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional, yang penyusunannya dilakukan proses koordinasi, konsultasi dan partisipasi sebagaimana kesepakatan global pengurangan risiko bencana dalam *Hyogo Framework for Action (HFA)* tahun 2005-2015.

RAN-PRB 2010-2012 merupakan kelanjutan RAN-PRB 2006-2009 yang disusun melalui koordinasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga/negara donor dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana.

RAN-PRB disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hierarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB).

## **KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA**

Berdasarkan data kejadian dan dampak bencana yang mengacu pada data historis selama dua dekade terakhir, menunjukkan terdapat beberapa ancaman bencana yang dominan di Indonesia, yaitu: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) tanah longsor/gerakan tanah; (4) letusan gunung api; (5) banjir; dan (6) kekeringan.

Untuk menghadapi ancaman bencana yang beragam dan semakin tinggi intensitasnya dalam lima tahun terakhir ini, diperlukan penilaian dan analisis risiko bencana. Penilaian atau analisis risiko bencana bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap bencana. Hasil analisis menjadi acuan dalam perumusan tindakan prioritas pengurangan risiko bencana. Salah satu komponen analisis risiko bencana adalah kemampuan kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, pusat, dan daerah dalam menangani bencana.

## **LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Pengurangan risiko bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Sebagai bagian dari komitmen bangsa dan negara Indonesia, maka landasan yang mendasari penyusunan RAN-PRB mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen penanggulangan bencana, diperlukan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Utamanya melalui pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam prioritas pembangunan nasional lima tahun ke depan, salah satunya adalah memasukkan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu aspek kebijakan dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan.

## **PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Terdapat beberapa pembelajaran dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana di Indonesia, di antaranya: reformasi kerangka peraturan dan kebijakan, reformasi kelembagaan, penguatan koordinasi dan jejaring, partisipasi masyarakat, pembelajaran



penanganan bencana alam, penggunaan penilaian kerusakan dan kerugian, proses pelaksanaan pemulihan pascabencana, dan pendanaan penanggulangan bencana yang lebih memadai.

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN PRB 2006-2009**

Untuk memperoleh gambaran kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan tahunan RAN-PRB 2006-2009 telah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2007-2008 yang dilakukan Bappenas pada 2008 lalu, telah dijadikan masukan utama dalam melihat gambaran menyeluruh implementasi RAN-PRB 2006-2009. Hasil evaluasi ini menjadi masukan dan saran terhadap proses penyusunan RAN-PRB 2010-2012.

Dalam evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009 tersebut, digunakan beberapa indikator penilaian, yaitu konsistensi, koordinasi, kapasitas, konsultasi, dan keberlanjutan.

Berdasarkan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009, telah dirumuskan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut baik yang bersifat umum maupun khusus, yang selanjutnya dijadikan masukan dan saran bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana.

### **GAMBARAN RAN-PRB 2010-2012**

Prioritas penanganan ancaman bencana dalam RAN-PRB 2010-2012 ini didasarkan atas penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini dan perkiraan ancaman bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana. Analisis risiko tersebut merupakan analisis yang didasarkan pada analisis ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan (*capacity*) dalam menangani bencana. Selanjutnya analisis ini akan memberikan gambaran atas kemungkinan terjadinya bencana pada beberapa tahun yang akan datang di Indonesia, terutama untuk tiga tahun ke depan.

Pendekatan penyusunan RAN-PRB 2010-2012 dikaitkan terhadap prioritas pengurangan risiko bencana yang tercantum di Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015, serta program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

RAN-PRB 2010-2012 ini merupakan gambaran secara menyeluruh rencana aksi dari semua *stakeholders* terkait, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat internasional, serta dunia usaha. RAN-

PRB 2010-2012 disajikan dalam bentuk matriks, yang dijabarkan dalam kelompok 5 (lima) prioritas HFA, dan diturunkan ke dalam 7 (tujuh) program utama dan 33 kegiatan prioritas.

### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI RAN-PRB 2010-2012**

Mekanisme pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012 merupakan satu kesatuan dengan Renas-PB yang memiliki jangka waktu lima tahun, sedangkan RAN-PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional dan berjangka waktu tiga tahun. Melalui koordinasi BNPB dan Bappenas setiap tahun, RAN-PRB 2010-2012 akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sedangkan bagi kalangan nonpemerintah, RAN-PRB merupakan komitmen berbagai pemangku kepentingan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan dalam periode tiga tahun. Mekanisme kegiatan tahunan baik dalam pelaksanaan maupun evaluasinya akan dikoordinasikan oleh Bappenas, BNPB, dan *Platform* Nasional yang mewakili kalangan nonpemerintah.

Pengaturan terhadap kelembagaannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa RAN-PRB akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sementara *Platform* Nasional, merupakan forum *multistakeholders* yang memiliki jejaring sehingga akan memperkuat pelaksanaan rencana aksi RAN-PRB ini. Masyarakat sipil akan dilibatkan dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintahan. Untuk dapat lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna pelaksanaan RAN-PRB ini, BNPB dan Bappenas akan membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan RAN-PRB. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian dilakukan melalui partisipasi masyarakat

Sumber pendanaan pelaksanaan RAN-PRB diperoleh dari APBN, dukungan swasta, dan lembaga donor internasional. Anggaran yang bersumber dari dana APBN dialokasikan secara reguler melalui anggaran dari setiap kementerian/lembaga untuk menjamin agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana sebagaimana tertuang dalam dokumen RAN-PRB 2010-2012 diperlukan arahan dan pedoman pelaksanaan dimaksud. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin pencapaian pelaksanaan prioritas, program, dan kegiatan yang ditetapkan dalam RAN-PRB 2010-2012.

Di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB akan dikombinasikan berbagai indikator dalam RAN-PRB ini. Terdapat tiga kelompok indikator yang dapat dipergunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini, yaitu indikator berdasarkan prioritas aksi HFA, indikator kinerja pelaksanaan pengurangan risiko bencana, dan indikator berdasarkan aspek 5-K (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan).

Ketiga kelompok indikator ini saling mengisi dan saling mendukung. Indikator HFA menekankan kepada penilaian hasil (*outcome*), indikator 5-K akan menekankan kepada prosesnya, sedangkan indikator kinerja lebih menekankan kepada keluaran (*output*).

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMBUTAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS .....</b>	i
<b>SAMBUTAN KEPALA BNPB .....</b>	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1 - 1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1 - 1
1.3. Lingkup Kegiatan.....	1 - 2
1.4. Kedudukan RAN-PRB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya .....	1 - 2
1.4.1. Tingkat Nasional .....	1 - 2
1.4.2. Tingkat Daerah .....	1 - 6
1.5. Metodologi Penyusunan RAN-PRB .....	1 - 7
1.6. Sistematika Penulisan .....	1 - 7
<b>BAB II. KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA</b>	
2.1. Jenis Bencana Di Indonesia dan Pengelompokkannya.....	2 - 1
2.2. Ancaman Bencana .....	2 - 2
2.2.1. Gempa Bumi dan Tsunami .....	2 - 2
2.2.2. Tanah longsor/ Gerakan Tanah .....	2 - 8
2.2.3. Letusan Gunung Api .....	2 - 10
2.2.4. Banjir .....	2 - 13
2.2.5. Kekeringan .....	2 - 16
2.3. Kerentanan .....	2 - 19
2.4. Kemampuan Menangani Bencana/Kapasitas .....	2 - 21

2.5.	Analisis Risiko Bencana .....	2 - 22
2.5.1.	Peta Risiko Gempa Bumi dan Tsunami .....	2 - 22
2.5.2.	Peta Risiko Letusan Gunung Api .....	2 - 24
2.5.3.	Peta Risiko Longsor .....	2 - 24
2.5.4.	Peta Risiko Banjir .....	2 - 25
2.5.5.	Peta Risiko Kekeringan .....	2 - 26

### **BAB III. LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

3.1.	Landasan Internasional .....	3 - 1
3.1.1.	Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .....	3 - 1
3.1.2.	Strategi Yokohama ( <i>Yokohama Strategy</i> ) .....	3 - 2
3.1.3.	Kerangka Aksi Hyogo ( <i>Hyogo Framework for Action</i> ) .....	3 - 3
3.1.4.	Kerangka Aksi Beijing .....	3 - 4
3.2.	Landasan Nasional .....	3 - 5
3.2.1.	Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	3 - 5
3.2.2.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .....	3 - 6
3.2.3.	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	3 - 7
3.2.4.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ....	3 - 7
3.2.5.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	3 - 8
3.2.6.	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana . ....	3 - 9
3.3.	Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim .....	3 - 10
3.4.	Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Pembangunan .....	3 - 11
3.4.1.	Bencana Alam dan Pengurangan Kemiskinan .....	3 - 11
3.4.2.	Aspek Pengurangan Risiko Bencana dalam Penataan Ruang .....	3 - 12
3.4.3.	Pengurangan Risiko Bencana dalam Pengembangan Wilayah Perkotaan .....	3 - 13

3.4.4. Aspek PRB dalam Pembangunan Bidang Pertanian.....	3- 14
3.4.5. Pengarusutamaan Gender dalam PRB.....	3 - 14

#### **BAB IV. PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

4.1. Reformasi Kerangka Peraturan dan Kebijakan .....	4 - 1
4.2. Reformasi Aspek Kelembagaan .....	4 - 4
4.3. Aspek Koordinasi dan Jejaring .....	4 - 5
4.4. Partisipasi Masyarakat Sipil .....	4 - 6
4.5. Pembelajaran Penanganan dan Praktik-praktik yang Baik dalam PRB .....	4 - 8
4.5.1. Pembelajaran Penilaian Kerugian dan Kerusakan Bencana .....	4 - 8
4.5.2. Praktik yang Baik dalam Penanganan PRB di Indonesia .....	4 - 12
4.5.3. Praktik yang Baik dalam Penanganan PRB di Negara Lain .....	4 - 15
4.6. Aspek Pendanaan .....	4 - 18

#### **BAB V. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB TAHUN 2006-2009**

5.1. Pengantar Evaluasi RAN-PRB 2006-2009 .....	5 - 1
5.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RAN PRB 2006-2009 .....	5 - 2
5.2.1. Konsistensi .....	5 - 2
5.2.2. Koordinasi .....	5 - 5
5.2.3. Kapasitas .....	5 - 6
5.2.4. Konsultasi .....	5 - 6
5.2.5. Keberlanjutan .....	5 - 7
5.3. Keberhasilan dan Kekurangan.....	5 - 7
5.3.1. Keberhasilan .....	5 - 7
5.3.2. Kekurangan .....	5 - 9
5.4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	5 - 9
5.4.1. Beberapa Rekomendasi Umum .....	5 - 9
5.4.2. Rekomendasi Berdasarkan Prioritas .....	5 - 11

<b>BAB VI. RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b>	
6.1. Prioritas Penanganan Berdasarkan Hasil Analisis Risiko Bencana .....	6 - 1
6.2. Pendekatan Penyusunan Prioritas, Program dan Kegiatan.....	6 - 1
6.3. RAN-PRB 2010-2012 .....	6 - 4
6.4. Pengelompokan Rencana Aksi Nasional PRB .....	6 - 9
6.5. Matriks Kegiatan RAN PRB yang belum Terindikasi dana dan Pelaksanaannya .....	6 - 10
 <b>BAB VII PELAKSANAAN</b>	
7.1. Mekanisme .....	7 - 1
7.2. Kelembagaan .....	7 - 2
7.3. Peran Serta Masyarakat.....	7 - 3
7.4. Pendanaan.....	7 - 4
 <b>BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAN PRB TAHUN 2010-2012</b>	
8.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi .....	8 - 1
8.2. Metodologi.....	8 - 2
8.2.1. Tahapan Proses Evaluasi dan Kerangka Kerja Logis .....	8 - 2
8.2.2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi .....	8 - 4
8.2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi .....	8 - 5
8.2.4. Kerangka Waktu .....	8 - 6
8.3. Indikator Evaluasi .....	8 - 7
8.3.1. Indikator Program Prioritas Berdasarkan HFA .....	8 - 7
8.3.2. Indikator Kinerja Pelaksanaan RAN-PRB .....	8 - 9
8.3.3. Indikator Pelaksanaan RAN-PRB Berdasarkan 5-K .....	8 - 10
8.4. Pelaksana dan Pembagian Peran .....	8 - 12
 <b>BAB IX PENUTUP</b> .....	9 - 1

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB).....	1 - 3
Gambar 1.2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana.....	1 - 4
Gambar 1.3. Posisi RAN-PRB terhadap UU 24 Tahun 2007 dan Platform Nasional .....	1 - 5
Gambar 2.1. Peta Zonasi Bahaya Gempa Indonesia .....	2 - 5
Gambar 2.2. Peta Bahaya Tsunami di Kabupaten/Kota Pesisir ...	2 - 8
Gambar 2.3. Peta Bahaya Gerakan Tanah Di Indonesia .....	2 - 10
Gambar 2.4. Peta Sebaran Gunung Api di Indonesia .....	2 - 12
Gambar 2.5. Peta Indeks Ancaman Bencana Banjir Indonesia .....	2 - 15
Gambar 2.6. Peta Indeks Ancaman Bencana Kekeringan Di Indonesia.....	2 - 18
Gambar 2.7. Peta Kerentanan Sosial Ekonomi Wilayah di Indonesia .....	2 - 20
Gambar 2.8. Peta Risiko Gempa Bumi Wilayah Indonesia .....	2 - 23
Gambar 2.9. Peta Risiko Tsunami Wilayah Indonesia .....	2 - 23
Gambar 2.10. Peta Risiko Letusan Gunung Api Wilayah Indonesia .....	2 - 24
Gambar 2.11. Peta Risiko Longsor Wilayah Indonesia.....	2 - 25
Gambar 2.12. Peta Risiko Banjir Wilayah Indonesia .....	2 - 26
Gambar 2.13. Peta Risiko Kekeringan Wilayah Indonesia .....	2 - 27
Gambar 4.1. Skema Penilaian Kebutuhan Pemulihan .....	4 - 10
Gambar 8.1. Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi RAN-PRB .....	8 - 4



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Keterkaitan RAN-PRB, RTRW, RAN PI dan RAN PK .....	1 - 6
Tabel 2.1. Kejadian Gempa Bumi di Indonesia dengan magnitudo di Atas 8 (PVMBG, 2008) .....	2 - 4
Tabel 2.2. Korban Jiwa Signifikan Beberapa Kejadian Gempa Bumi di Indonesia (PVMBG, 2008) .....	2 - 4
Tabel 2.3. Daftar Tsunami di Indonesia, Periode 1980- 2002 .....	2 - 7
Tabel 2.4. Kategori Kering-basah Berdasarkan Nilai SPI .....	2 - 18
Tabel 2.5. Jumlah dan persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Memiliki Risiko Bencana dengan Klasifikasi Tinggi .....	2 - 27
Tabel 4.1. Daftar Bencana Alam di Indonesia Pada Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir .....	4 - 9
Tabel 4.2. Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Indonesia .....	4 - 11
Tabel 5.1. Alokasi Program PRB dalam RKP .....	5 - 3
Tabel 5.2. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Alokasi Anggaran Pemerintah .....	5 - 4
Tabel 5.3. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Kontribusi Donor/NGO .....	5 - 5
Tabel 5.4. Pemetaan Peran Pelaku Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia .....	5 - 11
Tabel 6.1. Penjelasan Matriks RAN PRB .....	6 - 4
Tabel 6.2. Rekapitulasi Kegiatan RAN-PRB 2010-2012 .....	6 - 6
Tabel 8.1. Indikator untuk Prioritas Aksi HFA .....	8 - 8
Tabel 8.2. Evaluasi RAN-PRB Berdasarkan Aspek 5-K .....	8 - 11

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
AUSAID	: Australian Agency for International Development
AWS	: Automatic Weather Station
BAKORNAS PB	: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
BAKOSURTANAL	: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CBDRM	: Community-Based Disaster Risk Management
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DIBI	: Data dan Informasi Bencana Indonesia
DITJEN	: Direktorat Jenderal
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DMIS	: Disaster Management Information System
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRR	: Disaster Risk Reduction
DRRMP	: Disaster Risk Reduction Management Plan
EOC	: Emergency Operating Center
EWS	: Early Warning System
GIS	: Geographical Information System
GPS	: Global Positioning System
GTZ	: Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit
HFA	: Hyogo Framework for Action
HOPE	: Hospital Preparedness of Emergency and Disaster
IDEP	: Indonesian Development of Education and Permaculture
IFRC	: International Federation of Red Cross
ISDR	: International Strategy for Disaster Reduction
ITB	: Institut Teknologi Bandung
ITS	: Institut Teknologi 10 November Surabaya
JATENG	: Jawa Tengah

JATIM	: Jawa Timur
KALTIM	: Kalimantan Timur
KEMENEG LH	: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KEMENKOKESRA	: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEMDAGRI	: Kementerian Dalam Negri
KEM.	: Kementerian
KESDM	: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KOGAMI	: Komunitas Siaga Tsunami
KRB	: Kawasan Rawan Bencana
KSR	: Korps Sukarelawan Remaja
LAPAN	: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPND	: Lembaga Pemerintah Non-Departemen
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPBI	: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	: Non-Government Organizations
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
OXFAM	: Oxford Committee for Famine Relief
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PEM PROV	: Pemerintah Provinsi
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PIRBA	: Pusat Informasi Riset Bencana Alam
PMB	: Pusat Mitigasi Bencana
PMI	: Palang Merah Indonesia
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pusat Penanggulangan Krisis
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
PVMBG	: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
RAD-PRB	: Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
RAN-PRB	: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RISTEK	: Riset dan Teknologi

RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAR	: Search And Rescue
SATGANA	: Satuan Siaga Bencana
SATGAS	: Satuan Tugas
SATLAK	: Satuan Pelaksana
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standard Operating Procedure
SUMBAR	: Sumatera Barat
TAGANA	: Taruna Siaga Bencana
TEWS	: Tsunami Early Warning System
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TOT	: Training of Trainers
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UNAND	: Universitas Andalas
UNDP	: United Nations Development Programme
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children’s Fund
UN ISDR	: United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNOCHA	: United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNSYIAH	: Universitas Syiah Kuala
UNTWG	: United Nations Technical Working Group
UPN	: Universitas Pendidikan Nasional
USA	: United States of America
USAID	: United States Agency for International Development
UU	: Undang-Undang
VCA	: Vulnerability and Capacity Assessments
WFP	: World Food Programme

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman bencana
- Lampiran 2 Matriks induk kegiatan RAN-PRB 2010-2012
- Lampiran 3 Matriks kegiatan RAN-PRB 2010-2012 dari Kementerian dan Lembaga
- Lampiran 4 Matriks Usulan Kegiatan RAN-PRB 2010-2012





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kesadaran akan upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Sedangkan di tingkat nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan landasan dari Pengurangan Risiko Bencana.

Pada periode 2006-2009 Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB). RAN-PRB 2006-2009 tersebut disusun sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 (HFA 2005-2015) yang merupakan penjabaran dari lima kelompok prioritasnya. RAN-PRB tersebut disusun secara nasional melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat pusat dan daerah, baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Selain itu RAN-PRB juga disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. Ada tiga hal penting yang terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu :

- (1). Penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, melainkan pada keseluruhan manajemen risiko;
- (2). Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah; dan
- (3). Penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Dengan berakhirnya RAN-PRB 2006-2009 dan untuk menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, perlu disusun RAN-PRB untuk periode 2010-2012.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak karena memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya. RAN-PRB menjadi dasar pelaksanaan yang kuat dan



sistematis bagi prioritas yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah, serta mencakup beragam ancaman.

Dokumen ini diharapkan menghasilkan rencana aksi pengurangan risiko bencana yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti: perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program nasional lainnya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi PRB yang merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), adalah untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.

### **1.3. LINGKUP KEGIATAN**

Dokumen RAN-PRB 2010-2012 memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang penyusunannya melalui proses koordinasi dan partisipasi sebagaimana telah disepakati dalam kesepakatan *Hyogo Framework for Action*.

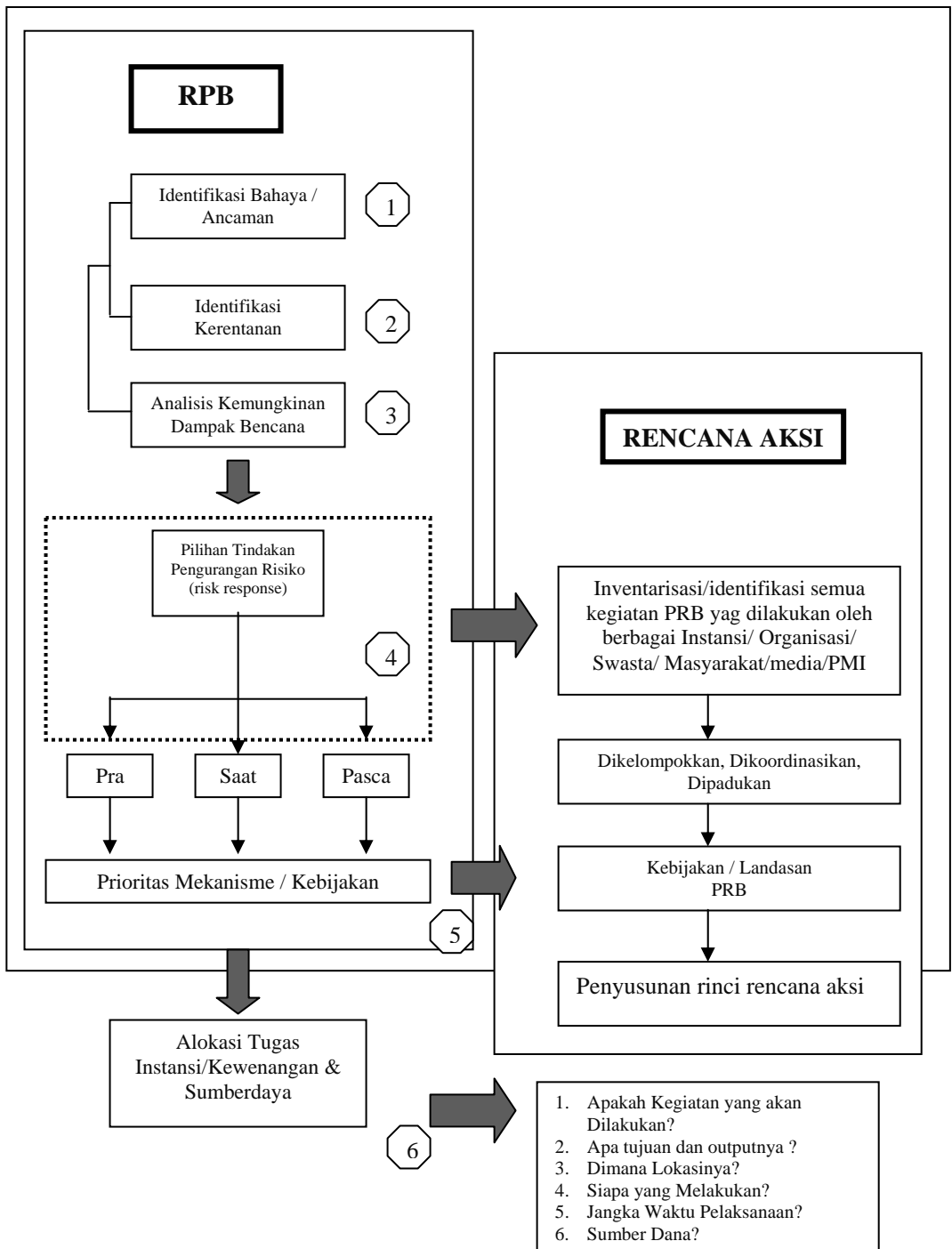
### **1.4. KEDUDUKAN RENCANA AKSI PRB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

#### **1.4.1. Tingkat Nasional**

RAN-PRB merupakan penjabaran dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dengan kerangka waktu RPB lima tahun sedangkan RAN-PRB tiga tahun.

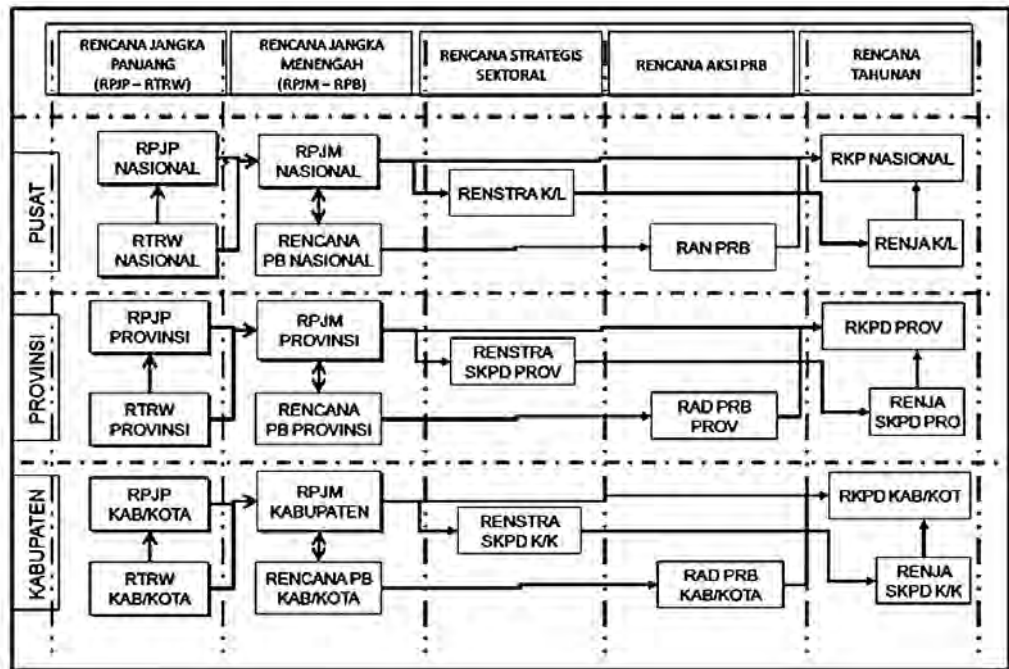
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kedudukan RPB dan RAN-PRB merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kerangka hukum (*legal framework*) sistem perencanaan di Indonesia.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 juga menjadi acuan bagi penyusunan RAN-PRB terutama untuk kawasan-kawasan rawan bencana.



**Gambar 1.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RA-PRB)**

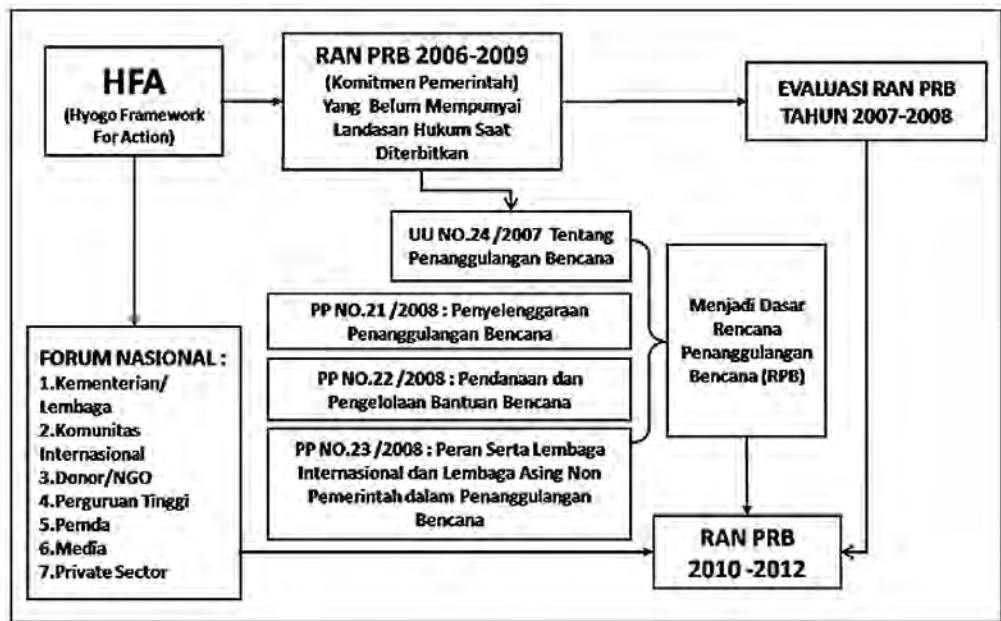
Terkait dokumen RPJPN, RPJMN, dan RTRWN, maka kedudukan RPB, RAN-PRB dapat dikerangkakan sebagaimana Gambar 1.2. Dalam kerangka tersebut, kedudukan RPB dan RAN-PRB adalah bentuk operasionalisasi dari RPJMN.



**Gambar 1.2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana**

Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22, dan 23 Tahun 2008 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi landasan hukum bagi penyusunan RAN-PRB. Pada saat yang sama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 jelas mengamanatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai kewajiban untuk menjamin tersusunnya RAN-PRB yang sifatnya lintas sektor dan lintas wilayah yang dilakukan oleh forum nasional (*national platform*) PRB.

Substansi RAN-PRB akan mengacu pada dua hal, pertama ada program yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan kelompok prioritas dari *Hyogo Framework for Action* (HFA).



Gambar 1.3. Posisi RAN-PRB terhadap UU 24 tahun 2007 dan Platform Nasional

Dalam kerangka perencanaan RAN-PRB terkait dengan beberapa kerangka kerja yang relevan (*other relevant action frame*) baik tingkat internasional maupun regional, di antaranya adalah aspek (1). tata ruang; (2). Lingkungan; (3). perubahan iklim; dan (4). pengurangan kemiskinan. Keempat aspek tersebut telah memiliki konsep Rencana Aksi Nasional dan saling berkaitan. Kaitan antara keempat aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Keterkaitan RAN-PRB, RTRW, RAN-PI dan RAN-PK**

Instrumen Kebijakan	Tata Ruang/ RTRWN	Perubahan Iklim	PRB dan PB	Strategi Pengurangan Kemiskinan	Skema Integrasi
Peraturan/ Perencanaan / Institusi	RTRWN 2007; RTRW Pulau; RTRW Prov; RTRW Kawasan strategis; BKTRN; Dep PU	RAN PI tengah dalam proses, namun membutuhkan dukungan kerangka hukum; KLH, Kehutanan, DKP, Pertanian, Bappenas	Peraturan PB: PP 21, 22, 23 th 2008, RPB dan RAN-PRB BNPB/BPBD, Bappenas, BPPT, LIPI	PRSSP di bawah koordinasi Menko Kesra; PU, Koperasi, MPDT	RPJP dan RPJM; RKP/Program Tahunan; Bappenas dan BNPB akan menjadi leading dalam koordinasi dengan berbagai para pihak
Intervensi Langsung (program dan proyek)	Perhatian khusus pada daerah rentan; proteksi daerah	LULU fs; Proteksi Hutan/Konser vasi/Management Air	Pemetaan daerah yang rawan/DRR Assesment untuk daerah yang rawan bencana, Pembuatan Sistem peringatan dini di area yang rawan bencana	Sosial/Sistem Hutan Kerakyatan, PNPMP	Koordinasi diantara program/proyek, Integrasi perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana dalam PNPMP
Peningkatan Kapasitas dan Penguatan	Peningkatan peran masyarakat dalam R&D, tata ruang. Peningkatan peran kontrol masyarakat dalam R & D	R&D: peningkatan dalam pendidikan, kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam Perubahan Iklim	R&D: peningkatan dalam pendidikan, kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana	Penguatan kapasitas CBO's	Integrasi penguatan masyarakat bersama CBO's

#### 1.4.2. Tingkat Daerah

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) merupakan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD). Kerangka waktu RPBD dan RAD-PRB sama dengan di tingkat nasional. Dalam Konteks ini proses

penyusunan RAD-PRB juga dilakukan setelah penyusunan RPBD. Dalam kaitannya dengan dokumen RPJPD dan RPJMD, kedudukan RPBD dan RAD-PRB adalah penjabaran dari dokumen perencanaan tersebut khususnya yang menyangkut penanggulangan risiko bencana.

Pada tingkat daerah dokumen yang dijadikan acuan adalah adanya RTRWP/K karena dokumen tersebut juga mengindikasikan kawasan-kawasan rawan bencana.

## **1.5. METODOLOGI PENYUSUNAN RAN-PRB**

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010–2012 merupakan forum *multi-stakeholders* utama untuk membangun konsesus dalam proses penyusunan RAN-PRB. Mekanisme penyusunan RAN-PRB ini, dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- (1). Pengumpulan Data (data sekunder dan data primer);
- (2). Diskusi/FGD Penyusunan Outline;
- (3). Penyusunan *Draft* RAN-PRB;
- (4). Konsultasi Publik (pemerintah/LPND dan masyarakat/swasta);
- (5). Penyusunan *Draft* Final RAN-PRB;
- (6). Legalitas RAN-PRB melalui Keputusan Kepala BNPB.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan rencana aksi ini dibagi ke dalam sembilan bab. Pada bagian akhir dokumen ini dilampirkan matriks RAN-PRB yang dilaksanakan pemerintah, maupun nonpemerintah.

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab 1 menjelaskan perlunya penyusunan RAN-PRB 2010-2012, mengingat masa berlaku RAN-PRB 2006-2009 sudah berakhir. Selain itu memuat maksud dan tujuan penyusunan dokumen rencana aksi, lingkup kegiatan, serta hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya.

### **BAB 2 : KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA**

Bab 2 menjelaskan lima jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Ancaman kebencanaan, kerentanan, dan kapasitas penanganan bencana juga dielaborasi bab ini.

### **BAB 3 : LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Bab 3 menjelaskan kebijakan kerangka regulasi, pedoman atau berbagai komitmen lainnya yang menjadi landasan, baik pada level internasional, regional maupun nasional.

### **BAB 4: PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Bab 4 menyampaikan beberapa pembelajaran dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pembelajaran yang dielaborasi yaitu terkait reformasi kerangka peraturan dan kebijakan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan turunan lainnya, termasuk di dalamnya reformasi kelembagaan untuk penanganan pengurangan risiko bencana.

### **BAB 5 : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB TAHUN 2006 - 2009**

Bab 5 menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang pelaksanaan evaluasi 2006-2009. Evaluasi yang telah dilakukan dianalisis dari aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Selanjutnya dijelaskan berbagai keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan hingga pemberian rekomendasi dan upaya tindak lanjutnya.

### **BAB 6 : RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA TAHUN 2010 - 2012**

Bab 6 menyajikan rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana untuk 2010-2012. Terdapat penjelasan prioritas penanganan pengurangan risiko bencana yang didasarkan kepada hasil analisis risiko bencana. Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam rencana aksi didasarkan kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008. Gambaran matriks RAN-PRB secara lengkap dilampirkan. Terdapat dua jenis matriks yaitu matriks induk RAN-PRB dan matriks rinci RAN-PRB yang dikelompokkan berdasarkan ancaman bencana, aspek geografis (provinsi) dan pelaksana program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan nonKementerian/Lembaga (non KL).

### **BAB 7 : PELAKSANAAN**

Bab 7 diuraikan tentang pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang diawali dengan gambaran mekanisme penyusunan RAN-PRB. Setelah itu diberikan informasi terkait kelembagaannya. Selanjutnya dijelaskan aspek partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana, serta gambaran aspek pendanaannya.

## **BAB 8 : PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Bab 8 menjelaskan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB tahun 2010-2012. Bagian pertama menjelaskan tentang maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Berikutnya berisikan metodologi dan indikator yang diterapkan dalam pemantauan dan evaluasi.

## **BAB 9 : PENUTUP**

Pada bab 9 disampaikan kata penutup yang memberikan informasi umum mengenai proses penyusunan RAN-PRB, beserta langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pihak lainnya.









▲ 搜救隊在現場進行救護工作。



▲ 搜救隊在河上進行救護工作。

# BAB 2 KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA

## 2.1. JENIS BENCANA DI INDONESIA DAN PENGELOMPOKKANNYA

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) dalam Bab I Pasal 1, mengelompokkan bencana ke dalam bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas, dan teror.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menegaskan, yang dimaksud dengan ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. BNPB sebagai badan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana mengidentifikasi jenis ancaman bencana sebagai berikut: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) letusan gunung api; (4) banjir; (5) tanah longsor/gerakan tanah; (6) kebakaran hutan dan lahan; (7) kekeringan; (8) gelombang ekstrem; (9) cuaca ekstrem (angin puting beliung, topan, dan badai tropis); (10) erosi; (11) abrasi; (12) epidemi dan wabah penyakit; (13) kebakaran hutan; (14) kegagalan teknologi; dan (15) konflik sosial.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia dilanda berbagai bencana baik skala besar maupun skala kecil. BNPB mendokumentasikan berbagai jenis bencana yang melanda Indonesia, yaitu aksi teror/sabotase, angin topan, banjir, tanah longsor karena banjir, epidemik, gelombang pasang/abrasi, gempa bumi, hama tanaman, kebakaran hutan, kegagalan teknologi, kekeringan, konflik sosial, letusan gunung api, dan tanah longsor.

Sementara itu, jenis bencana skala besar yang terjadi dalam lima tahun terakhir di Indonesia adalah:

- (1). Gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada Desember 2004 yang menelan korban 165.708 jiwa dan kerugian harta benda Rp 4,45 triliun;
- (2). Gempa bumi yang menerjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 yang menelan korban 5.667 jiwa dan rumah rusak 156.662 buah, dengan kerugian harta benda Rp 3,134 triliun;
- (3). Gempa dan tsunami di Pangandaran yang terjadi Juli 2006 menelan korban 658 jiwa dan kerugian harta benda Rp 137,8 miliar;
- (4). Bencana Banjir Jakarta pada Februari 2007 yang menggenangi 145.774 rumah dan mengakibatkan kerugian Rp 967 miliar.

Bencana alam dapat dibedakan antara bencana yang tidak dapat diprediksi, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan bencana yang dapat diprediksi, seperti longsor dan banjir. Sementara itu, bencana sosial biasanya terjadi karena perilaku dan pola hidup yang tidak terkontrol ketika aktivitas masyarakat berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Bencana sosial seringkali terkait adanya ancaman keamanan dan keterjaminan mata pencaharian maupun yang terkait aspek SARA. Bencana ini umumnya melanda masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan atau pada lingkungan yang memiliki tingkat strata sosial sangat rendah. Jenis bencana lainnya adalah bencana non-alam, contohnya adalah epidemi dan wabah penyakit seperti kejadian luar biasa demam berdarah *dengue*, flu burung, dan flu babi.

## **2.2. ANCAMAN BENCANA**

Data kejadian dan dampak bencana menunjukkan terdapat beberapa ancaman bencana yang dominan di Indonesia, yaitu (1) gempa bumi dan tsunami; (2) tanah longsor/gerakan tanah; (3) letusan gunung api; (4) banjir; dan (5) kekeringan.

### **2.2.1. Gempa bumi dan Tsunami**

Gempa bumi diakibatkan aktivitas zona penunjaman yang terdapat di laut dan sesar aktif yang terdapat di darat maupun di laut. Daerah rawan gempa bumi di Indonesia tersebar pada daerah yang terletak dekat zona penunjaman maupun sesar aktif. Daerah di Indonesia yang terletak dekat zona penunjaman adalah pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, pantai utara

dan timur Sulawesi dan pantai utara Papua. Sedangkan daerah di Indonesia yang terletak dekat dengan zona sesar aktif adalah daerah sepanjang Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Beberapa sesar aktif yang telah dikenal di Indonesia antara lain adalah Sesar Sumatera, Cimandiri, Lembang, Baribis, Opak, Busur Belakang Flores, Palu-Koro, Sorong, Ransiki, sesar aktif di daerah Banten, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan sistem sesar aktif lainnya yang masih belum terungkap.

Peristiwa gempa bumi yang terjadi di Indonesia tercatat di beberapa daerah. Seperti pada 1629 di Kepulauan Maluku (PVMBG, 2008), di Flores (1992 dan 1996), Kerinci (Pulau Sumatera, 1995), Banyuwangi (Pulau Jawa, 1994), Liwa (1994), Halmahera (1995), Biak dan Papua Jaya (1996), Bengkulu (2000). Semua gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Gempa bumi yang paling besar yang terjadi 4 tahun ini terjadi di Aceh (Desember 2004,  $M_w=9.3$ ); gempa bumi yang disertai tsunami di Nias (Maret 2005,  $M_w=8.7$ ); di Yogyakarta (Mei 2006,  $M_w=6.3$ ); di Pangandaran (Juli 2006,  $w=7.2$ ); gempa bumi disertai tsunami di Bengkulu (September 2007,  $M_w=8.4$ ), di Manokwari (Januari 2009,  $M_w=7.3-7.6$ ); dan terakhir gempa bumi di Jawa Barat ( $M_w=7,3$ ) dan di Sumatera Barat ( $M_w=7,3$ ) pada September 2009. Menurut Supartoyo, dkk (2009), bencana gempa bumi atau gempa bumi merusak (*destructive earthquake*) di Indonesia selama 2000 hingga 2008 setiap tahun berkisar antara 5 hingga 12 kejadian.

Tercatat beberapa peristiwa gempa bumi dengan magnitude di atas 8  $M_w$  di Indonesia (Tabel 2.1.), Sedangkan Tabel 2.2. menggambarkan jumlah korban jiwa yang signifikan dari beberapa kejadian bencana gempa bumi di Indonesia.

Tabel 2.1. Kejadian gempa bumi di Indonesia dengan *magnitude* di atas 8 (PVMBG, 2008)

No.	Tahun	Magnitude (Mw)	MMI	Daerah
1.	1833	8,8	IX	Bengkulu & Sumatera Barat
2.	1998	8,3	IX	Mangole & Taliabu,
3.	2004	9	VIII	Maluku
4.	2005	8,7	VIII	Aceh & Sumatera Utara
5.	2007	8,4	VIII	Pulau Nias Bengkulu

Tabel 2.2. Korban jiwa signifikan beberapa kejadian gempa bumi di Indonesia (PVMBG, 2008)

No.	Tahun	Magnitude (Mw)	MMI	Korban Jiwa (org)	Daerah
1.	1896	-	VIII	250	Pulau Timor
2.	1926	7,8	IX	354	Sumatera Barat
3.	1943	-	IX	213	Yogyakarta & Jawa Tengah
4.	1994	7	IX	1207	Liwa, Lampung
5.	2000	7,9	X	100	Bengkulu
6.	2005	8,7	VIII	lebih 1.000	Pulau Nias
7.	2006	6,2	VIII	lebih 5.700	Yogyakarta
8.	2009	7,9	X	lebih 1.000	Padang

Peta zonasi potensi bahaya (*hazard*) gempa bumi untuk Indonesia telah dikembangkan berdasarkan kompilasi pemetaan keberadaan lempeng tektonik serta patahan-patahan dangkal, sejarah kejadian gempa bumi, pencatatan instrumental Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), serta analisis bahaya gempa secara probabilistik. Peta zonasi gempa ini juga didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI-03-1726-2002) untuk bangunan gedung yang selanjutnya disempurnakan lebih jauh dengan hasil kajian terkini (2009) oleh Pusat Mitigasi Bencana-Institut Teknologi Bandung untuk Pulau Sumatera dan beberapa kawasan lainnya dengan acuan dasar 10% kemungkinan terjadi gempa bumi yang sama atau lebih besar dalam kurun waktu 50 tahun ke depan, atau

setara dengan periode ulang gempa 500 tahun. Peta zonasi gempa ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. dengan distribusi intensitas besarnya percepatan (getaran) gempa di permukaan tanah dalam rasio terhadap percepatan gravitasi bumi ( $g$ ), yang selanjutnya dinyatakan dalam tiga klasifikasi intensitas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Peta zonasi gempa ini telah dicoba disederhanakan untuk diklasifikasikan berdasarkan kabupaten dan kota.



Gambar 2.1. Peta zonasi bahaya gempa Indonesia

Dari peta zonasi bahaya gempa bumi Indonesia, terlihat bahwa hampir seluruh kawasan di Indonesia berpotensi mengalami gempa bumi di masa mendatang dengan intensitas gempa yang bervariasi dari rendah sampai tinggi. Gempa berintensitas tinggi berpotensi terjadi di kawasan sepanjang daratan pantai barat Sumatera dan kawasan selatan Jawa, seluruh Nusa Tenggara, sebagian Pulau Papua bagian tengah sampai utara, kepulauan Maluku, serta Sulawesi bagian tengah sampai utara. Sedangkan potensi gempa dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kawasan Pulau Sumatera sepanjang bagian tengah ke arah timur, Pulau Jawa bagian tengah ke arah utara, Papua bagian tengah ke arah Selatan, dan Sulawesi Tengah ke arah selatan. Potensi gempa dengan intensitas rendah diperkirakan hanya di Provinsi Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara, Papua bagian



selatan, dan kawasan Pulau Kalimantan. Peta zonasi gempa Indonesia ini dapat digunakan sebagai acuan umum untuk masukan potensi bahaya gempa dalam suatu kajian risiko bencana gempa di kabupaten-kabupaten dan kota-kota di Indonesia.

Gempa dangkal dan besar yang terjadi di bawah laut dapat membangkitkan tsunami. Tsunami adalah gelombang panjang yang timbul karena perubahan dasar laut atau perubahan badan air yang terjadi secara tiba-tiba dan impulsif, akibat gempa bumi, erupsi gunung api bawah laut, longsoran bawah laut, atau runtuhnya gunung es bahkan akibat terjangan benda-benda angkasa ke permukaan laut.

Selain dapat dibangkitkan oleh gempa, tsunami disebabkan oleh fenomena geofisi seperti gempa bumi, gunung api, longsoran di bawah laut dan dampak meteor. Berdasarkan *database* tsunami yang terintegrasi, paling sedikit 1963 kejadian tsunami dari tahun 1628 hingga 2005 (ITDB/WRL, 2005). Dari 110 bencana tsunami terjadi di Indonesia, 100 kejadian di antaranya disebabkan oleh gempa bumi, 9 kejadian disebabkan letusan gunung berapi dan 1 kejadian disebabkan tanah longsor. Data historis tsunami di Indonesia pada periode 1960 sampai dengan 1998 telah dikompilasi oleh Latief, dkk (2000) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Kejadian tsunami yang menyebabkan besarnya korban jiwa di antaranya tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 yang menyebabkan korban meninggal lebih dari 250.000 jiwa dan tsunami Selat Sunda (Krakatau) terjadi pada tahun 1883 akibat meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami setinggi 36 meter di kawasan Selat Sunda dan menewaskan kurang lebih 36.000 jiwa.

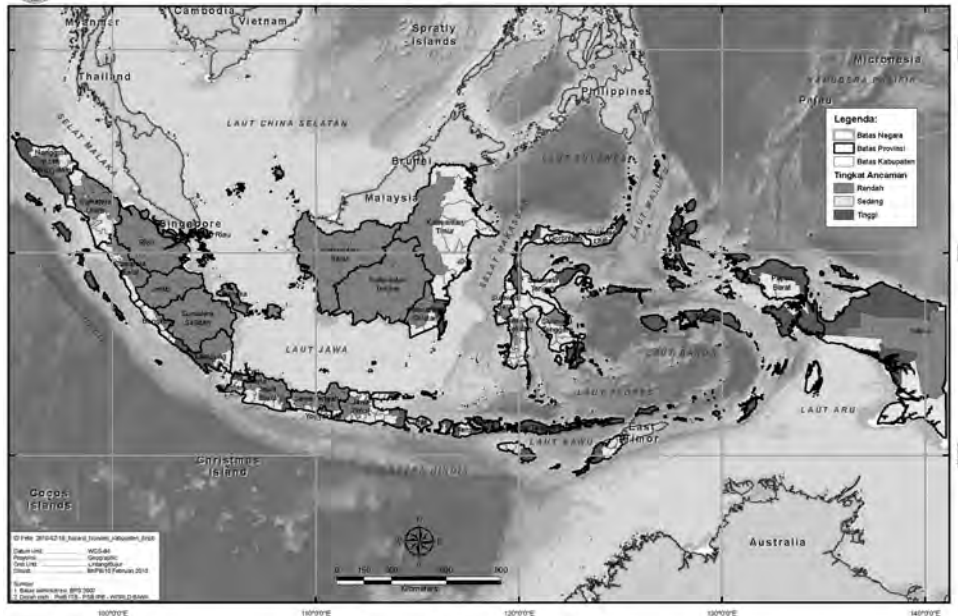
Peta zonasi potensi bahaya (*hazard*) tsunami untuk Indonesia telah dikembangkan berdasarkan kompilasi sejarah tsunami kemudian diasimilasikan dengan data hasil simulasi sehingga didapatkan potensi bahaya tsunami disepanjang pantai (Gambar 2.2). Beberapa wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng, antara lain barat Sumatera, selatan Jawa, Nusa Tenggara, utara Papua, Sulawesi dan Maluku, serta timur Kalimantan merupakan wilayah yang rawan terhadap tsunami.

Tabel 2.3. Daftar tsunami di Indonesia, periode tahun 1980- 2002  
(dimodifikasi dari Latief, 2000)

Tanggal/Jam	M/Dp	Waktu (menit)	Tinggi (m)	Korban	Lokasi
1961-03-16/13:45	6.3	no		2/6	NTT: Midle Flores
1964-04-02/01:11U	7.0			110/479	Sumatra:
1965-01-24/ 00:11U	7.5/33	2?		71	Maluku: Seram Sea, Sanana
1967-04-11/05:09	4.9/51			58/100	S. Sulawesi; Tinambung
1967-04-12/-	6.5		Big		N Sumatera: Sigli
1968-08-14/22:14U	7.3/23		8-10	392	C Sulawesi; Tambu
1969-02-23/00:36U	6.1/13		10	64/97	S. Sulawessi: Majene
1975-01-15/09:42	5.9		-	0	Maluku: Banda Naera
1975-03-05/-	6.5	1	1.2	0	Maluku: Sula Island, Sanana
1975-07-30/09:17	6.1	no			NTT: Timor: Kupang
1977-08-19/06:08U	7.0/33	3		316	NTB; Sumbawa Is.
1977-08-27/07:12	6.8	no		2/25	NTT; Flores: Atauro Is
1979-07-18/night	LS	1.5		620	NTT: Flores: Lomblen,
1979-12-17/19:58U	6.6			27/200	NTB: Sumbawa, Bali, Lombok
1982/03/12/-	5.8				Maluku: Ambon
1982-08-19/-	5.2				N. Sulawesi; Tomini Bay
1982-12-25/-	5.6	1?		13/400	NTT; Larantuka, (Landslide)
1983-03-12/00:54	5.8/33			0	Maluku; Ambon
1984-01-08/-	5.9				S. Sulawesi: Mamuju
1987-11-26/01:43U	5.8/28	1		83/108	NTT; East Flores Pantar Is.
1989-07-14/20:42	6.2	0		7	NTT; Alor Is
1989-07-31/17:07	6.3	0?		2-3	NTT; Flores: Maumere
1992-06-20/-	6.2	0			N Sulawesi: Kwandang
1991-07-04/11:43	6.2	?		23/181	NTT; Alor Is: , Kalabahi
1992-12-12/05:29U	7.5	3	11.2-26.2	1952/2126	NTT: Flores, Babi Is.
1994-01-21/02:24U	7.2			7	Maluku: Halmahera
1994-06-02/18:17U	7.2		19.1	238/400	E. Jawa: Banyuwangi
1995-05-14/-			4	8	Timor: Eastern part
1996-01-01/16:05L	7.8		3/63	9	C. Sulawesi:, Palu
1996-02-17/05:59U	8.0		13.7	107	Papua Jaya: Biak Is.
1998-11-28/23:11L	7.7		2.75	34	Maluku: Tabona, Taliabu



## PETA INDEKS ANCAMAN BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA



Gambar 2.2. Peta bahaya tsunami di kabupaten/kota pesisir

### 2.2.2. Tanah Longsor/ Gerakan Tanah

Istilah tanah longsor (*landslide*) antara lain didefinisikan sebagai pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor atau longsoran sering disamakan dengan gerakan tanah oleh masyarakat awam karena merupakan salah satu jenis gerakan tanah akibat terganggunya kestabilan tanah dari penyusun lereng. Istilah gerakan tanah akan digunakan dalam pembahasan paragraf-paragraf selanjutnya.

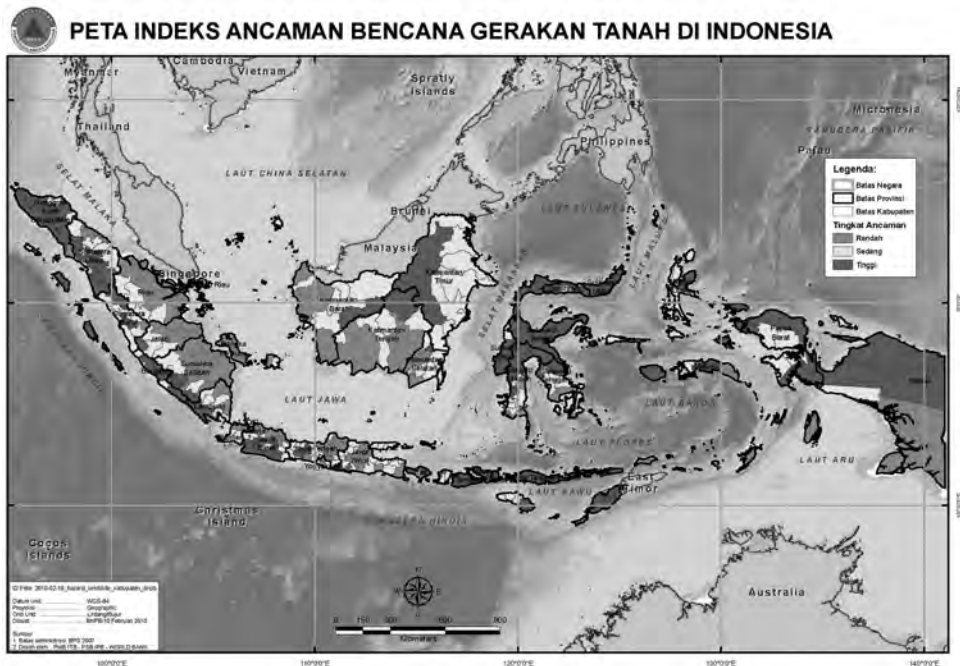
Gerakan tanah dapat terjadi akibat adanya gangguan kestabilan pada lereng. Lereng bersifat stabil apabila gaya yang bekerja untuk mempertahankan kestabilan pada lereng (yaitu gaya penahan gerakan massa tanah/ batuan) lebih dominan daripada gaya - gaya penggerak massa tanah/ batuan pada lereng. Gaya penahan gerakan terutama didukung oleh kekuatan batuan, sedangkan gaya penggerak massa tanah/batuan dapat berupa pengaruh gravitasi, kenaikan tekanan air pori dalam tanah ataupun getaran. Di samping dipicu curah hujan, kejadian gerakan tanah dapat juga dipicu getaran gempa bumi. Beberapa kejadian gempa bumi di Indonesia yang memicu terjadinya gerakan tanah, antara lain gempa bumi Palolo (2005), gempa bumi Bantul (2006), gempa bumi

Solok (2007), gempa bumi Muko-Muko (2007), gempa bumi Painan (2007), dan lain-lain.

Jenis gerakan tanah menurut Varnes (1978) dibagi menjadi lima, yaitu, runtuhan, robohan, longsoran, pancaran lateral, dan aliran. Sedangkan berdasarkan kecepatannya, gerakan tanah dapat dibagi menjadi enam, yaitu, amat sangat cepat, sangat cepat, cepat, menengah, lambat, dan sangat lambat. Sedangkan PVMBG (2007) mengklasifikasikan gerakan tanah menjadi enam, yaitu, longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

Kejadian gerakan tanah di Indonesia dapat dikatakan setiap tahun pasti terjadi dan beberapa di antaranya mengakibatkan bencana. Kejadian gerakan tanah di Bohorok Sumatera Utara (2005), Banjarnegara (2006) dan Karanganyar (2007) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang signifikan. Beberapa contoh kejadian gerakan tanah dalam dekade terakhir ini adalah kejadian gerakan tanah berjenis utama aliran bahan rombakan di Desa Walahir, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 21 April 2004, yang mengakibatkan 15 korban jiwa, 21 rumah roboh dan 22 lainnya rusak berat, lebih dari 60 Ha sawah dan 85 Ha perkebunan rusak. Kejadian lain yaitu longsohnya timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Leuwigajah, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 pukul 2 pagi saat kebanyakan penduduk tidur. Tidak kurang dari 70 rumah diterjang oleh longsoran ini yang menewaskan 123 penduduk di dalamnya. Gerakan tanah di Bukit Pawinihan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 4 Januari 2006 telah mengakibatkan lebih dari 58 korban jiwa. Pada tahun yang sama, gerakan tanah di desa Kemiri, Suci, dan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah menelan 98 korban jiwa dan menerjang lebih dari 140 rumah. Kejadian gerakan tanah pada bulan Februari 2009 yang memutuskan jalur kereta api selatan Jawa di Kabupaten Garut, Jawa Barat telah memberikan kerugian secara tidak langsung terhadap faktor sosial dan ekonomi di wilayah ini. Dari kejadian ini semua, potensi kejadian bencana longsoran di wilayah Tanah Air sangat perlu mendapatkan perhatian.

Penilaian bahaya gerakan tanah pada tingkat nasional dilakukan dengan melakukan penilaian bahaya gerakan tanah secara relatif untuk setiap kabupaten/kota, yaitu dengan melakukan penilaian kembali luas setiap zona kerentanan terhadap luas yang terdapat di wilayah kabupaten/kota secara proporsional (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Peta Bahaya Gerakan Tanah di Indonesia

### 2.2.3. Letusan Gunung api

Gunung api adalah tempat keluarnya magma, gas atau material cairannya dari dalam bumi ke permukaan bumi. Material yang keluar ke permukaan bumi membentuk kerucut raksasa seperti terpancung yang terlihat sebagai sebuah gunung api. Pada umumnya di bagian puncak berbentuk kubah atau bukit atau lubang besar yang disebut kawah dan kadang-kadang terisi air dan membentuk sebuah danau.

Indonesia memiliki 129 gunung api aktif yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku, atau sekitar 13% dari sebaran gunung api aktif dunia. Berdasarkan sejarah aktivitas gunung api pada masa lampau, gunung api di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- (1). Gunung api aktif tipe A, yaitu gunung api yang pernah meletus minimal sekali setelah tahun 1600, sebanyak 80 gunung api;
- (2). Gunung api tipe B, yaitu gunung api aktif yang catatan sejarah letusan tidak ditemukan setelah tahun 1600 tetapi masih memperlihatkan aktivitasnya seperti *sofatara* (hembusan belerang) dan *fumarola* (hembusan air panas), sebanyak 28 gunung api;
- (3). Gunung api aktif tipe C, yaitu gunung api yang tidak pernah tercatat aktivitasnya, baik letusan maupun *sofatara* dan *fumarola* (hembusan air panas). Gunung api tipe ini di beberapa gunung api aktif tipe C tersebut masih memperlihatkan kegiatan masa lampau berupa lapangan *sofatara/fumarola* pada tingkat lemah, sebanyak 21 gunung api.

Berdasarkan kejadian letusan gunung api di masa lampau, Indonesia memiliki sejarah beberapa letusan yang berdampak signifikan, yaitu:

- (1). Pada 1815 Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dan mengeluarkan sekitar  $1,4 \times 10^{11}$  ton abu dan material vulkanik. Sebagian material vulkanik tersebut membentuk lapisan di atmosfer yang memantulkan sinar matahari dan menimbulkan gelombang hawa dingin. Gelombang hawa dingin tersebut membuat 1816 menjadi "tahun tanpa musim panas" dan menyebabkan gagal panen hampir di seluruh dunia serta kelaparan yang meluas;
- (2). Pada 1883 Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda meletus dan letusannya diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, kira-kira 13.000 kali kekuatan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dalam Perang Dunia II. Letusan Gunung Krakatau ini mengakibatkan runtuhnya sebagian tubuh gunung tersebut dan memicu terjadinya tsunami di wilayah Selat Sunda dan sekitarnya hingga mencapai Jakarta. Kejadian tsunami tersebut mengakibatkan 36.000 korban jiwa.

Berdasarkan data dari PVMBG (2006) tercatat beberapa kejadian letusan gunung api lainnya yang mengakibatkan korban jiwa besar, antara lain, adalah :

- (1). Letusan Gunung Kie Besi di Kabupaten Maluku Utara pada 22 September 1760 mengakibatkan 2.000 korban jiwa;

- (2). Letusan Gunung Galunggung di Jawa Barat pada 1822 mengakibatkan 4.011 korban jiwa dan letusan Gunung Papandayan pada 1772 mengakibatkan 2.951 korban jiwa;
- (3). Letusan Gunung Kelud di Jawa Timur pada 1919 mengakibatkan 5.190 korban jiwa dan letusan pada 1966 mengakibatkan 210 korban jiwa;
- (4). Letusan Gunung Colo di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah pada 23 Juli 1983 yang mengakibatkan hancurnya sumbat lava serta membumihanguskan sekitar 2/3 wilayah Pulau Una-Una tempat lokasi Gunung Colo;
- (5). Letusan Gunung Merapi 928 di Yogyakarta, mengakibatkan Kerajaan Mataram hancur, letusan 1930 mengakibatkan 1.369 jiwa meninggal dunia dan letusan pada 1972 lebih dari 3.000 jiwa meninggal dunia.

Penilaian bahaya gunung api pada tingkat nasional dilakukan dengan penilaian bahaya gunung api secara relatif untuk setiap kabupaten/kota di sekitarnya, terutama didasarkan pada distribusi KRB dan lingkaran bahaya abu vulkanik (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Peta sebaran Gunung api di Indonesia

Potensi aktivitas gunung api pada masa datang yang perlu mendapat perhatian adalah Gunung Merapi, Semeru, Soputan, Karangetang, Ibu, Talang, Batur, dan Lokon. Gunung Merapi di Yogyakarta mempunyai perulangan letusan cukup pendek

berdasarkan sejarah letusannya yaitu pada 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Letusan tersebut memiliki pola yang sama yaitu pertumbuhan kubah lava, kubah lava runtuh dan menghasilkan awan panas yang melanda daerah sekitarnya pada jarak tertentu.

Kawah gunung api yang berpotensi mengakibatkan bencana yang perlu mendapat perhatian pada masa akan datang adalah kawah Gunung Ijen di Kabupaten Situbondo dan Gunung Dempo. Gunung Ijen terletak di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Gunung Ijen merupakan gunung api aktif yang mempunyai keunikan danau kawahnya karena airnya paling asam di dunia. Letusan terbesar Gunung Ijen terjadi pada tahun 1817 mengakibatkan danau kawahnya menghasilkan aliran lumpur yang mengarah ke utara (Kecamatan Asembagus), ke timur (Desa Wongsorejo) dan ke selatan (Desa Genteng) dan merusakkan 3 desa dan 90 rumah. Tidak ada korban jiwa pada letusan tersebut. Sedangkan kawah Gunung Dempo berpotensi untuk mematikan ikan di sungai yang berhulu di G. Dempo.

#### **2.2.4. Banjir**

Banjir merupakan bahaya alam yang setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu curah hujan dan kondisi topografi. Curah hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan banjir apabila terjadi pada wilayah yang cukup tinggi dan mampu menyalurkan atau mendistribusikan air di wilayah itu.

Banjir sering terjadi di Indonesia yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Masalah ini mulai muncul sejak manusia bermukim dan melakukan berbagai kegiatan di kawasan yang berupa dataran banjir (*flood-plain*). Kondisi lahan di kawasan ini pada umumnya subur serta menyimpan berbagai potensi dan kemudahan sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi untuk dibudidayakan. Oleh karena itu, di kota-kota besar serta pusat-pusat perdagangan dan kegiatan-kegiatan penting lainnya seperti kawasan industri, pariwisata, prasarana perhubungan dan sebagainya sebagian besar tumbuh dan berkembang di kawasan ini.

Pada prinsipnya masalah bencana banjir disebabkan dua hal, yaitu:

- (1). Peristiwa alam atau kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan atau dihindari manusia sehingga bersifat probabilistik; dan



- (2). Kegiatan/aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi dan memperbesar intensitas atau tingkat keparahan bencana sehingga bersifat deterministik karena dapat dikendalikan/dikontrol. Banjir yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan gabungan antara buruknya kondisi jaringan drainase mikro dan makro karena berbagai sebab (kurang memadainya dimensi dan kemiringan saluran drainase karena sampah dan sedimentasi, dan sebagainya) dengan meluapnya aliran sungai melebihi palung sungai karena tingginya intensitas hujan dan pendangkalan sungai karena sedimentasi dan sumbatan sampah atau sebab lainnya (air pasang).

Di seluruh Indonesia, terdapat 5.590 sungai induk, dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta ha. Banjir pada dasarnya disebabkan tiga hal. *Pertama*, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. *Kedua*, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. *Ketiga*, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada *catchment area*, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Masalah banjir cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama disebabkan oleh adanya perubahan watak banjir serta pesatnya pembangunan berbagai kegiatan manusia di dataran banjir. Luas dataran banjir pada Pelita I baru meliputi 250.000 ha, namun pada Pelita V telah berkembang menjadi 750.000 ha. Perkembangan tersebut sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di daerah dataran banjir.

Di Indonesia, kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Ujungpandang, Ambon, masing-masing terletak di dataran banjir satu atau beberapa sungai. Demikian pula daerah pertanian/irigasi yang luas dan subur sebagian terletak pada dataran banjir, contohnya di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Bencana Banjir Bengawan Solo/Brantas akibat meluapnya Bengawan Solo/Brantas hampir terjadi setiap musim hujan. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan melanda 14 kabupaten yang dilewatinya. Demikian

halnya dengan bencana banjir Ciliwung yang diakibatkan meluapnya Sungai Ciliwung hampir terjadi setiap musim hujan. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan melanda 5 kabupaten/kota yang dilewatinya.

Peta daerah rawan banjir skala nasional telah diterbitkan oleh BAKOSURTANAL di dalam Atlas Nasional Indonesia (2008), tetapi tanpa klasifikasi tingkat ancamannya. Peta tersebut hanya membedakan daerah rawan dan tidak rawan banjir saja. Untuk keperluan penilaian risiko bencana banjir, diperlukan peta ancaman bencana (*hazard*) dengan klasifikasi tingkat ancaman. Peta indeks ancaman bencana banjir Indonesia disajikan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Peta indeks Ancaman Bencana Banjir Indonesia

Gambar 2.5. menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai tingkat ancaman bencana banjir sedang dan tinggi dan hanya sebagian kecil daerah di Sumatera, Jawa bagian selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara yang mempunyai tingkat ancaman bencana banjir yang rendah.

### 2.2.5. Kekeringan

Negara kepulauan Indonesia yang terletak di khatulistiwa dan di antara dua benua dan dua samudra memiliki iklim yang unik serta rentan terhadap perubahan iklim regional dan global. Kejadian *el niño* dahsyat pada 1997 serta beberapa kejadian setelahnya, membawa peningkatan risiko kekeringan iklim yang berdampak pada pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor kehidupan lainnya. Untuk menyamakan persepsi di pusat dan daerah akan sebuah pendekatan analisis terhadap risiko bencana iklim kekeringan maka perlu diadakan sebuah kajian analisa risiko bencana kekeringan.

Kekeringan diartikan sebagai berkurangnya persediaan air di bawah normal bersifat sementara baik di atmosfer dan di permukaan. Penyebab terjadinya kekeringan adalah menurunnya curah hujan pada periode yang lama (beberapa dasarian) disebabkan oleh interaksi atmosfer dan laut serta akibat ketidakteraturan suhu permukaan laut seperti akibat yang ditimbulkan oleh fenomena *el niño*. Kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat alamiah di mana intervensi manusia atas penyebab bencana kekeringan sangat minimal. Dalam hal ini manusia dan aktivitasnya menerima dampak dari kekeringan tersebut. Kekeringan membawa akibat serius pada pola tanam, pola pengairan, pola pengoperasian irigasi serta pengelolaan sumber daya air di permukaan lainnya. Diperlukan sebuah penanganan strategis seperti manajemen kekeringan (pengelolaan kekeringan) untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

Kekeringan merupakan kejadian biasa dan menggambarkan iklim yang senantiasa berulang, meskipun sering disalahartikan sebagai kejadian acak dan sangat jarang. Dalam kenyataannya terjadi pada semua jenis iklim meskipun karakteristiknya sangat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Kekeringan merupakan penyimpangan temporer dan sangat berbeda dengan kegersangan (*aridity*) yang lebih bersifat permanen di mana curah hujan yang turun senantiasa kecil seperti contohnya di NTT. Kekeringan harus selalu diperhitungkan secara relatif terhadap kondisi rata-rata jangka panjang dari neraca antara curah hujan dan evapotranspirasi di suatu wilayah, di mana kondisi seperti ini disebut normal.

*El niño* merupakan fenomena alam global yang ditandai dengan memanasnya suhu permukaan laut (*Sea Surface Temperature/SST*) di perairan wilayah *Equatorial Pasific* atau anomali suhu permukaan laut di wilayah tersebut bernilai positif. Fenomena *el niño* dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tinggi rendahnya nilai anomali positif suhu permukaan laut (*SSTA*), yaitu:

- (1). *El niño* Lemah (*Weak el niño*);
- (2). *El niño* Sedang (*Moderate el niño*);
- (3). *El niño* Kuat (*Strong el niño*).

Dalam 15 tahun terakhir, *el niño* kuat (*Strong el niño*) terjadi pada tahun 1997 yang berdampak hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami curah hujan yang sangat kurang (Bawah Normal), sedangkan fenomena alam *el niño* yang terakhir terjadi pada 2002 adalah *el niño* lemah (*Weak el niño*). Kejadian *el niño* akan berdampak kuat terhadap wilayah Indonesia apabila fenomena tersebut bersamaan dengan Dipole Mode Positif.

Dari 43 kejadian kekeringan di Indonesia, hanya enam kejadian yang tidak berkaitan dengan kejadian *el niño*. Namun, dampak kejadian *el niño* terhadap keragaman hujan di Indonesia beragam menurut lokasi. Pengaruh *el niño* kuat pada wilayah yang dipengaruhi sistem *monsoon* kuat, pengaruh *el niño* lemah pada wilayah yang dipengaruhi sistem equatorial lemah, dan tidak jelas pada wilayah yang pengaruh lokal yang kuat.

Peta ancaman bencana kekeringan di Indonesia (Gambar 2.6) berdasarkan perhitungan indeks kekeringan yang paling sederhana yaitu menggunakan SPI (*Standardized Precipitation Index*) yang dihitung dari data pengamatan curah hujan global yang dikeluarkan GPCP (*Global Precipitation Climatology Centre*) dengan rentang waktu dari 1951-2007. SPI adalah indeks yang menunjukkan besarnya penyimpangan curah hujan dari nilai normalnya yang dapat dibagi menjadi tujuh kelas kategori seperti terlihat dalam Tabel 2.4. SPI dapat dihitung untuk skala waktu 3 bulanan, 6 bulanan, 12 bulanan, dst. yang berkaitan dengan fenomena dan dampak kekeringan tertentu.



Gambar 2.6. Peta indeks Ancaman Bencana Kekeringan di Indonesia

Peta ancaman kekeringan dibuat berdasarkan frekuensi kejadian SPI dengan kategori Sangat Kering dan Ekstrem Kering. Untuk mengakomodasi fenomena kekeringan jangka maupun jangka menengah (seperti yang disebabkan oleh *el niño*), maka indeks ancaman bencana kekeringan dihitung berdasarkan kombinasi SPI 3 bulan dan 6 bulan.

Tabel 2.4. Kategori Kering-Basah Berdasarkan Nilai SPI

Nilai SPI	Kategori
2.0+	Ekstrem Basah
1.5 to 1.99	Sangat Basah
1.0 to 1.49	Agak Basah
-.99 to .99	Mendekati Normal
-1.0 to -1.49	Agak Kering
-1.5 to -1.99	Sangat Kering
-2 and less	Ekstrem Kering

Peta indeks ancaman bencana kekeringan menunjukkan bahwa ancaman bencana kekeringan terdapat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Tingkat ancaman bencana kekeringan yang tinggi secara cukup dominan terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan

Jawa. Di wilayah lain lebih banyak daerah dengan tingkat ancaman sedang. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa kekeringan (*drought*) berbeda dengan kondisi iklim kering (*aridity*). Ancaman bencana kekeringan pada umumnya akan lebih tinggi pada daerah-daerah dengan variasi curah hujan yang besar, tetapi bukan daerah beriklim kering. Sebaliknya, untuk daerah-daerah dengan iklim yang setengah kering (*semi-arid*) seperti beberapa daerah di Nusa Tenggara, tingkat ancaman bencana kekeringan relatif rendah karena penyimpangan dari kondisi kering yang biasa dialami mungkin tidak terlalu besar.

### 2.3. KERENTANAN

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ditemukan istilah kerentanan. Dalam ilmu sosial, kerentanan (*vulnerability*) merupakan kebalikan dari ketangguhan (*resilience*), kedua konsep tersebut laksana dua sisi mata uang. Konsep ketangguhan merupakan konsep yang luas, termasuk kapasitas dan kemampuan merespons dalam situasi krisis/konflik/darurat (*emergency response*). Kerentanan, ketangguhan, kapasitas, dan kemampuan merespons dalam situasi darurat, bisa diimplementasikan baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan institusi (pemerintah maupun LSM).

Kerentanan wilayah dan penduduk terhadap ancaman meliputi kerentanan fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi. Kerentanan sosial ekonomi dapat bersifat generik berlaku untuk semua jenis ancaman. Sementara itu kerentanan fisik bersifat spesifik sesuai dengan jenis ancaman.

Kerentanan yang bersifat generik dapat digunakan untuk semua ancaman, terkait dengan aspek sosial ekonomi wilayah dan penduduk di suatu wilayah. Indikator kerentanan sosial ekonomi terkait dengan tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, densitas dan penyebaran penduduk, lama pendidikan formal, tingkat pengangguran, beban tanggungan, dan indikator sosial ekonomi lainnya.

Data menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan (data BPS tahun 2008 sebesar 37.168.300 penduduk miskin), tidak meratanya penyebaran penduduk (58,3% di Pulau Jawa dan Madura pada tahun 2008), rendahnya lama pendidikan formal (rata-rata 7,47 tahun). Data lainnya adalah usia harapan hidup orang Indonesia baru mencapai 68,7 tahun, angka kematian bayi pada 2005 adalah 32 kematian per 1000 kelahiran.

Kerentanan sosial dan ekonomi yang digunakan dalam penghitungan indeks kerentanan pada setiap jenis *hazard* relatif sama dengan indikator utama di antaranya, pendapatan asli daerah, laju pertumbuhan ekonomi, dan densitas populasi. Peta kerentanan sosial ekonomi yang bersifat generik untuk semua jenis bencana di seluruh wilayah Indonesia disajikan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Peta Kerentanan Sosial Ekonomi Wilayah di Indonesia

Kerentanan sosial ekonomi penduduk terhadap bencana meliputi aspek ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, PDRB), dan aspek sosial (kependudukan seperti densitas dan jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, tenaga kerja). Peta kerentanan sosial ekonomi wilayah Indonesia menunjukkan bahwa komponen densitas penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penentu kerentanan wilayah.

Kerentanan fisik bersifat spesifik tergantung jenis bencana. Indikator kerentanan fisik untuk masing-masing jenis *hazard* menggunakan indikator yang spesifik. Sebagai contoh adalah penggunaan indikator *tsunami code* untuk tsunami, indikator *building code* untuk gempa bumi, indikator penduduk yang tinggal di area yang tidak aman untuk ancaman letusan gunung api. Secara umum wilayah Indonesia memiliki kerentanan fisik yang tinggi karena pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi prasyarat yang dibutuhkan wilayah yang memiliki potensi ancaman yang tinggi seperti Indonesia. Indikator kerentanan fisik terkait dengan jenis ancaman

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi memiliki kerentanan yang relatif tinggi dalam menghadapi ancaman bencana. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya upaya pengurangan risiko bencana baik melalui peningkatan ketanggungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau pengurangan kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat.

#### **2.4. KEMAMPUAN MENANGANI BENCANA/KAPASITAS**

Salah satu komponen analisis risiko bencana adalah kemampuan kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, pusat, dan daerah dalam menangani bencana. Dengan demikian komponen analisis risiko bencana ini menilai kapasitas seluruh lembaga penanggulangan bencana seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam PB, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Saat ini telah terbentuk sejumlah BPBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yakni di Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Sumatra Barat, NTT dan Maluku. Sementara di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk di Cilacap, Alor, Sikka, Kota Kupang dan Kota Palu, Kabupaten Muko-Muko dan Bengkulu Utara.

Saat ini sejumlah Perguruan Tinggi telah memiliki Pusat Studi Bencana (PSB) dan sejenisnya antara lain di Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Andalas (Unand), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Syiahkuala (Unsyiah). Sementara di tingkat masyarakat terdapat sejumlah Masyarakat Madani/LSM yang memiliki fokus kegiatan dalam hal kebencanaan di antaranya Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Perkumpulan Masyarakat Peduli Bencana (PMPB) di NTT, Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) di Sumatra Barat, dan sejumlah LSM yang memiliki kegiatan terkait dengan bencana. Di tingkat nasional telah diprakarsai pembentukan *Platform Nasional (PLANAS)* yang dideklarasikan pada 20 November 2008, Konsorsium Pendidikan



Kebencanaan, dan Simposium yang mengarah kepada forum tentang Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

Terdapat beberapa isu pokok yang perlu segera ditangani terkait dengan kapasitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana di antaranya:

- (1). Belum tersosialisasinya Peraturan Perundangan terkait PB;
- (2). Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penanganan kebencanaan;
- (3). Masih minimnya daerah yang memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan RAD-PRB;
- (4). Masih terbatasnya upaya pengarusutamaan PRB dalam perencanaan pembangunan seperti RTRW dan pengarusutamaan dalam pembangunan sektoral; dan
- (5). Belum terintegrasinya PRB dalam pendidikan dan pelatihan kepegawaian/aparat.

## **2.5. ANALISIS RISIKO BENCANA**

Penilaian atau analisis risiko bencana bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap bencana. Hasil analisis menjadi acuan dalam perumusan tindakan prioritas pengurangan risiko bencana.

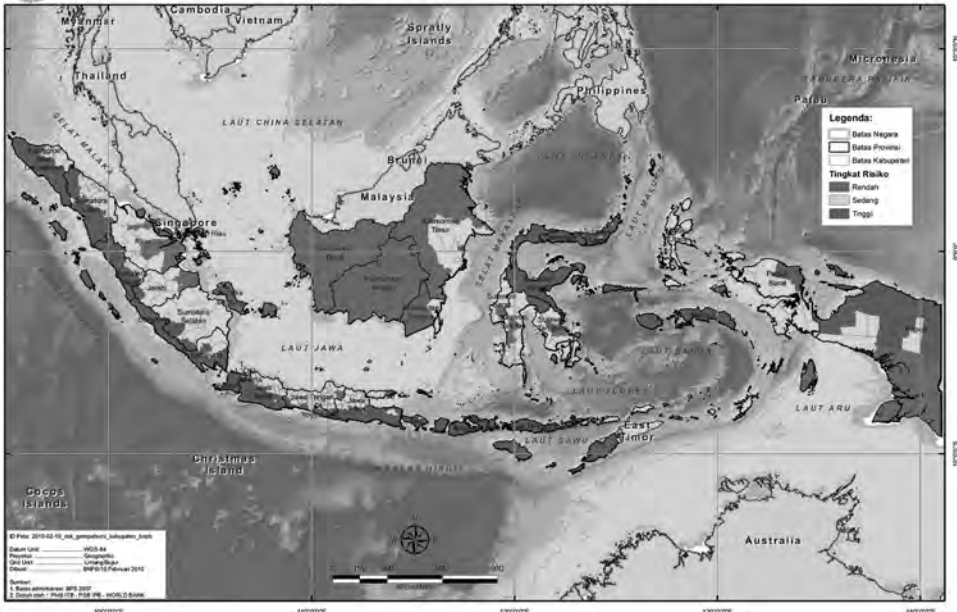
### **2.5.1. Peta Risiko Gempa bumi dan Tsunami**

Peta risiko gempa bumi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia disajikan pada Gambar 2.8. Peta tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi berada di wilayah barat Pulau Sumatera, wilayah selatan Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi bagian tengah dan utara, serta sebagian wilayah Papua.

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap tsunami disajikan pada Gambar 2.9. Peta tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap tsunami adalah kota dan kabupaten bagian barat Provinsi Sumatera Barat, sebagian wilayah selatan Pulau Jawa, Aceh bagian utara, dan Lampung.



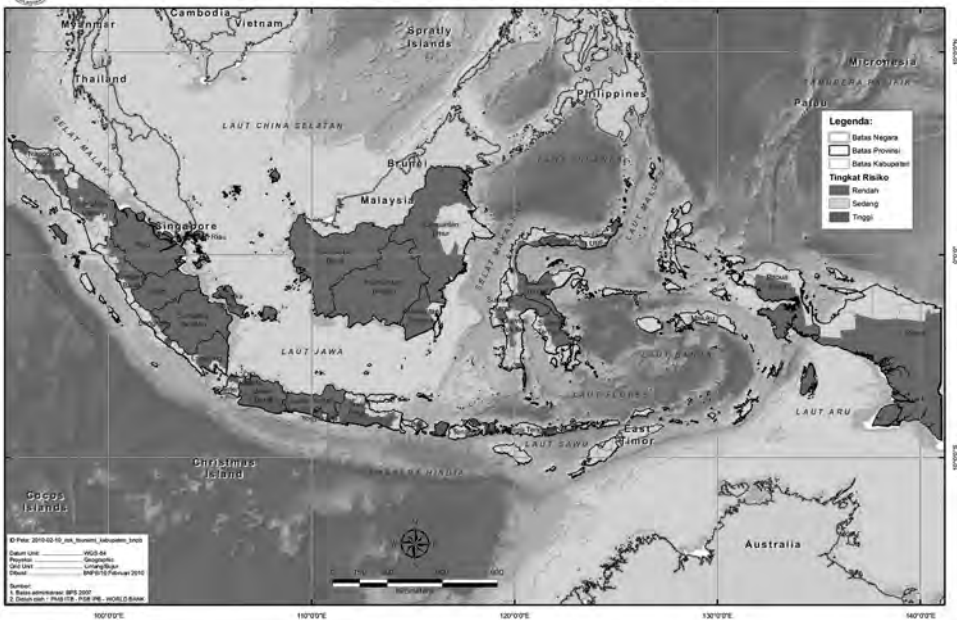
### PETA INDEKS RISIKO BENCANA GEMPABUMI DI INDONESIA



Gambar 2.8. Peta Risiko Gempa bumi Wilayah Indonesia



### PETA INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA



Gambar 2.9. Peta Risiko Tsunami Wilayah Indonesia

### 2.5.2. Peta Risiko Letusan Gunung api

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap letusan gunung api disajikan pada Gambar 2.10. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap letusan gunung api berada di Pulau Jawa. Namun terdapat juga banyak kabupaten yang memiliki risiko tinggi yang terdapat di Pulau Sumatera, sebagian wilayah di NTB dan NTT, dan Sulawesi bagian utara.



Gambar 2.10. Peta Risiko Letusan Gunung api Wilayah Indonesia

### 2.5.3. Peta Risiko Longsor

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap longsor disajikan pada Gambar 2.11. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap longsor menyebar di wilayah bagian barat Pulau Sumatera, wilayah bagian selatan Jawa Barat, sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat, Sulawesi bagian tengah dan bagian utara, wilayah Pulau Kalimantan bagian timur, Nusa Tenggara Barat bagian barat, dan Sulawesi bagian tengah dan tenggara, serta di sebagian Provinsi Maluku.



Gambar 2.11. Peta Risiko Longsor Wilayah Indonesia

#### 2.5.4. Peta Risiko Banjir

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap banjir disajikan pada Gambar 2.12. Peta tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir menyebar di lima pulau besar di Indonesia. Jakarta Utara dan Jakarta Barat merupakan wilayah di DKI Jakarta berisiko tinggi terhadap banjir, demikian pula Indramayu yang sudah dikenal sebagai wilayah banjir di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 18 Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang berisiko tinggi terhadap banjir, seperti Sidoarjo dan Bojonegoro. Kabupaten/kota lainnya yang berisiko tinggi menyebar di antaranya di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Papua.



Gambar 2.12. Peta Risiko Banjir Wilayah Indonesia

### 2.5.5. Peta Risiko Kekeringan

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap kekeringan disajikan pada Gambar 2.13. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap kekeringan berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa, jumlah kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap kekeringan berada di Provinsi Jawa Tengah (25 kabupaten/kota), Provinsi Jawa Barat (15 Kabupaten/kota), Provinsi Jawa Timur (14 kabupaten/kota), sedangkan di Pulau Sumatera, wilayah yang berisiko tinggi terhadap kekeringan terutama terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Riau.



Gambar 2.13. Peta Risiko Kekeringan Wilayah Indonesia

Pemetaan wilayah Indonesia menurut tingkat risiko untuk enam jenis bencana disajikan pada Tabel 2.5. Data Kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi disajikan pada lampiran 1

Tabel 2.5. Jumlah dan persentase Kabupaten/kota di Indonesia yang Memiliki Risiko Bencana dengan Klasifikasi Tinggi

No	Jenis Bahaya	Klasifikasi Risiko Tinggi	
		Total	% Jumlah Kab/Kota
1	Gempa bumi	184	40
2	Gerakan Tanah	154	34
3	Kekeringan	152	33
4	Banjir	174	38
5	Gunung api	79	17
6	Tsunami	60	13

Tabel 2.5. menunjukkan besar dan luasnya risiko bencana di Indonesia. Dari enam jenis bencana yang dianalisis, satu dari dua kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi. Empat dari sepuluh kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap longsor, kekeringan, dan banjir. Lebih dari 15 persen kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gunung api, sementara itu hampir seperenam kabupaten/kota memiliki risiko tinggi terhadap tsunami. Dibandingkan dengan beberapa pulau besar lainnya, Pulau Jawa merupakan yang paling tinggi risikonya terhadap berbagai bencana.

Hasil analisis risiko bencana dengan unit analisis kabupaten/kota, hendaknya ditindaklanjuti dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui upaya-upaya antara lain, melalui Dokumen Petunjuk Pelaksana (Juklak) RT/RW, Dokumen Peraturan Daerah (Perda) RT/RW kabupaten/kota, izin lokasi, izin peruntukan lahan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat layak fungsi (khusus untuk bangunan gedung) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan karakteristik potensi bencana.

Hasil analisis indeks risiko serta peta risiko bencana hendaknya semakin mendorong semua pihak untuk meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana di seluruh sektor, yaitu pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana hendaknya bersinergi saling mengisi, melengkapi, dan menguatkan seluruh komponen program pengurangan risiko bencana.



Hand Tool (H)



Hand Tool (H)





# BAB 3

## LANDASAN

### PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia maka landasan yang mendasari penyusunan RAN-PRB mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 3.1. LANDASAN INTERNASIONAL

Sejak lebih dari dua dekade lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui beberapa resolusinya secara aktif menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan berkelanjutan. Beberapa resolusi internasional dan regional yang menjadikan landasan bagi upaya pengurangan risiko bencana.

##### 3.1.1. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Upaya pengurangan risiko bencana merupakan isu lintas wilayah dan sektoral dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pada 30 Juli 1999 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menerbitkan Resolusi Nomor 63 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa dekade 1990 menjadi Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional (*International Decade for Natural Disaster Reduction/IDNDR*).

Dalam resolusi ini direkomendasikan agar PBB memfokuskan tindakan bagi pelaksanaan strategi internasional pengurangan risiko bencana. Dua sasaran utama strategi internasional pengurangan risiko bencana tersebut adalah:

- (1). Mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi, dan lingkungan;
- (2). Mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen risiko bencana dengan memberlakukan integrasi strategi pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari resolusi tersebut, Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi Nomor 56/195 Tanggal 21 Desember 2001 yang menetapkan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional dalam rangka mendorong agar upaya-upaya berkelanjutan pengurangan risiko bencana menjadi agenda tahunan negara-negara yang meratifikasi resolusi tersebut.

Selanjutnya pada 22 Desember 2005 diterbitkan Resolusi Nomor 60/195 tentang Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*). Dalam resolusi ini PBB mengingatkan negara-negara di dunia bahwa pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan serta mendorong seluruh negara untuk membuat komitmen yang kuat terhadap Deklarasi Hyogo, Kerangka aksi Hyogo, dan Strategi Yokohama.

*International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)* adalah suatu pendekatan global untuk mengurangi risiko bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mengurangi kehilangan kesempatan akan kehidupan, kerugian di sektor sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Fokus ISDR adalah:

- (1). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya PRB;
- (2). Mewujudkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya PRB;
- (3). Mendorong kerja sama antarkomponen dalam rangka PRB;
- (4). Meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk PRB.

### **3.1.2. Strategi Yokohama (*Yokohama Strategy*)**

Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman; Pedoman untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi terhadap Bencana Alam dan Rencana Aksi (*The Yokohama Strategy for a Safer World; Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action*) yang diadopsi pada 1994 memberikan suatu panduan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Tinjauan terhadap kemajuan dalam pelaksanaan Strategi Yokohama menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana yang diperkuat dengan suatu pendekatan yang lebih proaktif dalam memberikan informasi, memotivasi, dan melibatkan masyarakat di semua aspek pengurangan risiko bencana dalam komunitas lokal. Penekanan lainnya adalah pada aspek

kelangkaan sumber daya yang dialokasikan khusus dari anggaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pengurangan risiko, baik pada tingkat nasional maupun regional atau melalui kerjasama internasional dan mekanisme finansial.

Kesenjangan dan tantangan khusus yang diidentifikasi dari Strategi Yokohama terhadap tinjauan pelaksanaan yang masih cukup relevan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan kerangka aksi 2005-2015, yaitu;

- (1). Tata kelola, kelembagaan, kerangka kerja legal dan kebijakan;
- (2). Identifikasi risiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini;
- (3). Pengembangan pengetahuan dan pendidikan;
- (4). Pengurangan faktor-faktor risiko mendasar;
- (5). Kesiapsiagaan untuk respons dan pemulihan yang efektif.

### **3.1.3. Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*)**

Konferensi sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana diselenggarakan di Kobe, Hyogo, Jepang pada 18-22 Juni 2005 menghasilkan suatu Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Konferensi mengadopsi lima prioritas aksi, yaitu:

- (1). Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
- (2). Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini;
- (3). Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat;
- (4). Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar;
- (5). Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respons yang efektif di semua tingkat.

Kerangka Aksi Hyogo ditindaklanjuti beberapa negara dan kawasan, termasuk Indonesia. Negara-negara Kepulauan Pasifik menetapkan *Framework for Action 2005-2015: An Investment for Sustainable Development in Pacific Island Countries*; kawasan Afrika membentuk *Africa Advisory Group on Disaster Risk Reduction* dan menetapkan *African Regional Platform on National Platform for Disaster Risk Reduction*.

#### 3.1.4. Kerangka Aksi Beijing

Konferensi Asia pertama tentang pengurangan risiko bencana diadakan di Beijing, China pada 27-29 September 2005. Konferensi diikuti 385 peserta dari 42 negara di Asia dan Pasifik Selatan, 13 Badan PBB dan organisasi internasional dalam rangka mengimplementasikan hasil dari konferensi negara-negara di dunia tentang pengurangan risiko bencana, yaitu Kerangka Aksi Hyogo. Pada akhir konferensi dicapai suatu kesepakatan yang tertuang didalam Kerangka Aksi Beijing untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia (*Beijing Action for Disaster Risk Reduction in Asia*).

Lembaga-lembaga regional yang mempunyai peran terkait dengan pengurangan risiko bencana diimbau untuk melakukan tugas-tugas di bawah ini sesuai dengan mandat, prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Tugas-tugas tersebut adalah:

- (1). Meningkatkan program-program regional, termasuk program untuk kerja sama teknis, pengembangan kapasitas, pengembangan metodologi dan standar untuk monitoring dan penjagaan bahaya dan kerentanan, pertukaran informasi dan mobilisasi sumber daya secara efektif, bertujuan untuk mendukung upaya-upaya nasional dan regional guna mencapai tujuan-tujuan kerangka aksi ini;
- (2). Melakukan dan mempublikasikan penjajagan *baseline* tingkat regional dan subregional tentang status pengurangan risiko bencana, sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dan sesuai dengan mandat mereka;
- (3). Melakukan koordinasi dan menerbitkan kajian berkala tentang kemajuan dalam kawasan dan tentang hambatan dan dukungan yang diperlukan, dan membantu negara, jika diminta, dalam penyiapan ringkasan nasional berkala tentang program dan kemajuannya;
- (4). Membangun atau memperkuat pusat-pusat kerja sama regional khusus yang sudah ada sebagaimana mestinya, untuk melakukan penelitian, pelatihan, pendidikan dan peningkatan kapasitas dibidang pengurangan risiko bencana; dan
- (5). Mendukung pengembangan mekanisme regional dan kapasitas untuk peringatan dini terhadap bencana, termasuk tsunami.

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan HFA pada tingkat Regional Asia dilakukan pertemuan 2 tahunan yang dihadiri oleh pejabat setingkat

menteri. (Asia Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction – AMM DRR) yang telah diselenggarakan antara lain :

- (1). AMM-DRR I diadakan di Beijing, China;
- (2). AMM-DRR II diadakan di New Delhi, India;
- (3). AMM-DRR III diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia; dan
- (4). AMM-DRR IV diadakan di Incheon, Korsel.

Sebagai puncak pertemuan yang membahas PRB ini adalah Global Platform yang diselenggarakan di Genewa, yakni yang pertama pada 2007 dan pertemuan kedua pada 2009.

## **3.2. LANDASAN NASIONAL**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas, terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Kondisi alam Indonesia memiliki berbagai potensi dari segi geografis, geologis, hidrologis dan demografis. Kondisi tersebut menyebabkan kerawanan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Perencanaan pengurangan risiko bencana harus berdasar pada pemenuhan hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, dan harta bendanya serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu.

### **3.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan agar :

- (1). Tercipta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarpelaku pembangunan, baik di tingkat pusat maupun dengan daerah;
- (2). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan, penanggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- (3). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta
- (4). Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Undang-undang SPPN ini mengatur tahapan perencanaan pembangunan nasional yang meliputi:

- (1). Penyusunan rencana;
- (2). Penetapan rencana;
- (3). Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4). Evaluasi perencanaan.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ lembaga dan perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang menghasilkan RPJP, RPJM; dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perencanaan ini disusun melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat. Secara diagramatis sinkronisasi dan koordinasi dari perencanaan ini telah digambarkan pada Bab I, RPB dan RAN-PRB harus mengikuti kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

### **3.2.2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Pengelolaan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap, dan pascabencana. Materi muatan undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya:

- (1). Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- (2). Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh BNPB dan BPBD;
- (3). Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- (4). Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- (5). Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana agar tidak terjadi

penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana;

- (6). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang dilaksanakan.

**3.2.3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang** Mengingat Indonesia berada pada kawasan rawan bencana yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa, maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Penataan ruang harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan agar terwujud keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Strategi implementasi penyelenggaraan penataan ruang sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana:

- (1). Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan kelengkapan dari rencana detail tata ruang;
- (2). Penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penganan sanksi;
- (3). Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tata ruang.

**3.2.4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan upaya mitigasi bencana yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik. Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 secara jelas mengatur bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus



diintegrasikan dalam rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan mitigasi bencana ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

### **3.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Sampai saat ini telah terbit tiga Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

- (1). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan
- (3). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta ketiga Peraturan Pemerintah tersebut di atas merupakan salah satu upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) bagi penyusunan RPB, RAN-PRB dan RAD-PRB.

Pasal 33 sampai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Pada tahap prabencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dibedakan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diamanatkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana, terdiri dari rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana. RAN-PRB disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB. RAN-PRB ditetapkan kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga

yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

### **3.2.6. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)**

Penyusunan rencana nasional penanggulangan bencana diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu lima tahun, yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional serta BPBD provinsi untuk tingkat provinsi dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

- (1). Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- (2). Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- (3). Analisis kemungkinan dampak bencana;
- (4). Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- (5). Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- (6). Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pengurangan risiko bencana dalam hal ini merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan bencana. Dengan demikian, rencana aksi pengurangan risiko bencana merupakan penjabaran lebih rinci dari kebijakan dan strategi rencana penanggulangan bencana untuk aspek pengurangan risiko bencana. Hal ini jelas terlihat dalam kerangka koordinasi perencanaan penanggulangan bencana yang digambarkan pada Bab Pendahuluan.

Pada kondisi saat ini, rencana penanggulangan bencana nasional baru mulai dilaksanakan sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan pertimbangan bahwa RAN-PRB 2006-2009 akan segera berakhir, maka penyusunan RAN-PRB periode 2010-2012 dilakukan secara paralel dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana nasional (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014). Namun, kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam RAN-PRB tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan yang digariskan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana.

### 3.3. PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan yang dapat dikatakan “*secara langsung atau tidak langsung berasal dari kegiatan manusia yang merubah komposisi atmosfer dan yang teramati selama periode waktu tertentu, yang menambah pada variabilitas iklim alamiah*”. Secara khusus, Panel AntarPemerintah untuk Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) mendefinisikan “perubahan iklim” sebagai “*sebuah perubahan pada keadaan iklim yang dapat diidentifikasi melalui perubahan-perubahan pada rerata dan/atau variabilitas dari sifat-sifatnya, dan yang berlangsung untuk waktu yang lama, biasanya dalam beberapa dasawarsa atau bahkan lebih lama lagi*”. Kedua definisi ini sangat relevan dan penting untuk diingat.

Penyebab perubahan iklim di masa lampau tidak selalu jelas, tetapi secara umum berkaitan dengan perubahan-perubahan pada arus laut, aktivitas matahari, letusan gunung berapi, dan faktor-faktor alam lainnya. Akan tetapi, selama beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan suhu global yang sangat cepat. Hal ini dapat terlihat dari indikasi peningkatan rata-rata suhu udara dan air laut global, meluasnya salju dan lapisan es yang mencair serta meningkatnya rata-rata tinggi permukaan laut secara global.

Secara umum konsekuensi yang muncul dari perubahan iklim dapat diperkirakan sebagai berikut ini:

- (1). Banyak terjadi gelombang panas yang dapat mempertinggi jumlah kematian, terutama di kalangan kelompok rentan, seperti para lanjut usia, anak-anak kecil, atau mereka yang sakit kronis, terisolasi secara sosial;
- (2). Meningkatnya kekeringan di beberapa daerah yang dapat menyebabkan degradasi lahan, kerusakan tanaman pangan atau berkurangnya panen, meningkatnya kematian hewan ternak dan meningkatnya risiko kebakaran hutan;
- (3). Meningkatnya frekuensi curah hujan tinggi di beberapa daerah yang akan memicu banjir dan tanah longsor, dengan potensi korban jiwa serta kerugian aset yang lebih besar;
- (4). Meningkatnya jumlah dan intensitas siklon yang sangat kuat (topan dan badai) yang akan mempengaruhi wilayah-wilayah di kawasan pesisir pantai, dengan potensi korban jiwa serta kerugian aset yang lebih besar lagi;

- (5). Meningkatnya permukaan air laut (*sea level rise*), yang berpadu dengan badai-badai di pesisir pantai, yang akan meningkatkan dampak-dampak gelombang badai dan banjir sungai serta menghancurkan sistem-sistem penghidupan dan perlindungan masyarakat.

### **3.4. PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN**

Seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, penanganan bencana tidak lagi menekankan aspek tanggap darurat, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko bencana, maka diperlukan upaya mengarusutamakan penanggulangan bencana. Utamanya, yaitu pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan, salah satunya adalah memasukkan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu aspek kebijakan dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan.

#### **3.4.1. Bencana Alam dan Pengurangan Kemiskinan**

Walaupun fenomena alam tidak membedakan apakah terjadi di negara maju atau di negara berkembang, namun konsekuensinya dapat sangat berbeda. Contohnya pada 1998, 95% kematian karena bencana alam di seluruh dunia terjadi di negara-negara berkembang. Di sini bencana alam mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk dan prospek pembangunan ekonomi negara. Sebaliknya, di negara maju bencana alam umumnya hanya berdampak marjinal pada perekonomian.

Perkembangan ekonomi cukup terkait erat dengan bencana alam. Jika tidak menyiapkan diri menghadapi bencana alam, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan tidak tercapai jika terjadi bencana alam. Pemerintah perlu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap bencana alam. Selain itu, untuk mengurangi penderitaan penduduk miskin karena bencana, maka kondisi penduduk miskin perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Di wilayah-wilayah yang rawan bencana alam, kondisi penduduk paling miskin perlu diketahui. Perhatian khusus dibutuhkan untuk memantau kondisi penduduk miskin dan penduduk yang tidak beruntung lainnya. Selanjutnya dilakukan upaya perbaikan perumahan dan permukiman serta lahan atau tempat mencari nafkah guna mengurangi kerentanan terhadap bencana.

Dengan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan perumahan dan permukiman perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan, baik bencana akibat kejadian alam maupun akibat perbuatan manusia (seperti kebakaran yang sering terjadi di perumahan padat penduduk). Kebijakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana perlu diarahkan pada perumusan dan penerapan standar bangunan yang tahan bencana khususnya di wilayah yang rentan terhadap bahaya alam dan di permukiman yang padat penduduk serta membantu dan mendorong masyarakat untuk membangun perumahan dan permukiman yang tahan terhadap bencana.

#### **3.4.2. Aspek Pengurangan Risiko Bencana dalam Penataan Ruang**

Setelah suatu bencana alam terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya alam tidak menyebabkan bencana lagi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan RTRW yang ada dengan menambahkan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata ruang itu. Informasi tentang bahaya alam (dan juga bahaya karena hasil perbuatan manusia) perlu dipetakan. Pemetaan bahaya ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terbangun dan yang dicadangkan untuk dibangun di kemudian hari.

Di wilayah yang sudah terbangun, peta bahaya perlu dibuat untuk menunjukkan wilayah yang struktur bangunan dan prasarananya perlu diperkuat agar tahan terhadap bencana. Di wilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi permukiman, perdagangan, pendidikan, dan lain-lainnya. Tsunami dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat mencekam setelah kejadian tsunami di Aceh pada 2004 dan gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Namun, bahaya-bahaya lain, seperti badai, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain-lain juga harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya dan dalam menentukan aspek mitigasi dalam RTRW.

Unsur penting dari pengurangan risiko selain penentuan zonasi, adalah penerapan standar konstruksi dan penegakan peraturan terkait. Jika informasi mitigasi dan bahaya telah tersedia dan masyarakat telah dilatih untuk melaksanakan rekonstruksi secara aman, penting untuk memastikan bahwa standar-standar tata

ruang dan tata bangunan diterapkan. Ini membutuhkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada dan untuk mengawasi konstruksi di lapangan agar sesuai dengan rencana tata ruang itu. Pemetaan bahaya untuk membuat keputusan lokasi yang aman adalah sesuatu yang penting, dan masyarakat yang akan menghuni kawasan itu harus didengar pendapatnya.

Insentif untuk pengurangan risiko perlu diberikan oleh pemerintah. Mitigasi bencana memerlukan pembiayaan di muka, sedang manfaatnya baru datang kemudian secara tidak pasti, maka insentif yang tepat waktu untuk investasi mitigasi merupakan kunci. Insentif itu dapat berupa subsidi langsung untuk mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan penduduk untuk tindakan mitigasi atau pengurangan pajak terkait dengan investasi mitigasi. Insentif-insentif seperti itu akan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam melakukan mitigasi bencana. Dengan upaya-upaya itu maka penataan ruang akan memberikan kontribusi besar dalam pengurangan risiko bencana di negara yang berpotensi banyak bencana ini.

### **3.4.3. Pengurangan Risiko Bencana dalam Pengembangan Wilayah Perkotaan**

Perkembangan kota-kota di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain, akan terus berlangsung dengan pesat. Kota-kota besar akan tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi yang diharapkan tumbuh minimal 7% per tahun, setidaknya sampai 2014. Perkembangan kota itu perlu diimbangi dengan upaya-upaya pencegahan bencana yang masif karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak pada wilayah rawan gempa. Berbagai upaya pengurangan kerentanan fisik dari bangunan dan struktur di kota-kota besar perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan kota skala besar yang akibatnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat yang sama pemerintah perlu meningkatkan kemampuan penduduk kota, khususnya mereka yang paling rentan, untuk siap menghadapi bencana apapun yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Kota-kota besar pantai mempunyai berbagai risiko bahaya terkait dengan perubahan iklim. Pemerintah kota-kota besar pantai perlu melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak merusak jika terjadi bencana akibat perubahan iklim itu. Kenaikan

permukaan laut merupakan proses yang kemungkinan besar akan terjadi. Untuk itu kota-kota besar perlu membatasi perkembangan yang mengarah ke laut, sebaliknya mendorong pembangunan ke arah daratan yang tentunya juga harus tidak rawan bencana.

#### **3.4.4. Aspek PRB dalam Pembangunan Bidang Pertanian**

Perencanaan pembangunan sektor pertanian perlu mempertimbangkan karakteristik dari fenomena alam yang menjadi penyebab bencana karena hanya dengan cara itulah perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat. Perencanaan pembangunan sektor pertanian juga harus mempertimbangkan dampak bencana pada asal dan tujuan serta mekanisme pengangkutan hasil produksi pertanian. Pembangunan sektor pertanian juga harus mempertimbangkan dampak bencana pada kehidupan sosial masyarakat.

Informasi yang lebih terperinci mengenai dampak bencana dan kemungkinan terjadinya di kemudian hari akan sangat bermanfaat untuk mencegah kerugian yang diderita di suatu daerah jika suatu bencana alam terjadi. Hal itu juga memungkinkan dilakukannya perkiraan mengenai penurunan produksi pada masa mendatang sehingga dampak negatif bencana dapat dikendalikan.

Berkurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan di sektor pertanian ini juga berbeda menurut jenis kelamin sehingga perlu memperkirakan pengaruhnya secara khusus pada kaum wanita. Informasi tentang hilangnya pekerjaan dan pendapatan karena bencana yang mempengaruhi sektor pertanian perlu dijadikan pertimbangan dalam memperkirakan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan untuk memberikan masukan dalam merencanakan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekaligus dapat mempekerjakan tenaga kerja yang menganggur.

#### **3.4.5. Pengarusutamaan Gender dalam PRB.**

Mengintegrasikan pertimbangan gender dalam tindakan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana secara keseluruhan memerlukan kebijakan pemerintah untuk memperluas peluang ekonomi, sosial dan politik bagi wanita dalam masyarakat. Beberapa upaya yang perlu diterapkan untuk meningkatkan peran wanita dalam penanggulangan bencana adalah antara lain:

- (1). Mengenalkan cara-cara mengutamakan gender dalam program-program pengurangan risiko bencana;
- (2). Membuka peluang peran kepemimpinan wanita dalam organisasi penanggulangan bencana;
- (3). Menjamin akses yang setara bagi pria dan wanita terhadap upaya pengurangan risiko bencana, termasuk hak-hak mendapatkan bantuan pemulihan;
- (4). Meningkatkan akses wanita untuk mendapatkan informasi manajemen risiko bencana;
- (5). Melakukan upaya penyadaran publik terhadap perspektif gender dalam pengurangan risiko bencana; dan
- (6). Melakukan kajian terhadap aspek-aspek gender dalam penanggulangan bencana.









1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



# **BAB 4**

## **PEMBELAJARAN**

### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **4.1. REFORMASI KERANGKA PERATURAN DAN KEBIJAKAN**

Reformasi kerangka perundangan penanggulangan bencana digerakkan di tingkat internasional dan nasional. Secara nasional, reformasi peraturan dan perundangan dipicu berbagai bencana besar yang terjadi secara beruntun sejak akhir 2004, seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tsunami di Pangandaran, Jawa Barat. Bahkan sampai saat ini berbagai bencana besar terjadi secara beruntun seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Keempat jenis bencana yang terakhir ini (banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan) dapat dikatakan terjadi rutin setiap tahun dan cenderung menjadi lebih intensif karena dipicu perubahan iklim global.

Komitmen global untuk memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana tercantum di HFA 2005-2015 dengan lima prioritas aksi utama merupakan dasar bagi advokasi terhadap isu pentingnya pengurangan risiko bencana di Indonesia, termasuk pengarusutamaan kedalam sistem perencanaan pembangunan. RAN-PRB 2006-2009, yang disusun Bappenas dan Bakornas PB, merupakan suatu dokumen perencanaan terkait aspek PRB yang diterbitkan untuk membuktikan komitmen Indonesia dan sebagai pendorong reformasi kerangka peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasca peristiwa tsunami 2004 masyarakat sipil telah mengadvokasi lahirnya reformasi peraturan perundangan penanganan bencana. DPR dengan menggunakan hak inisiatifnya dan didukung aktor-aktor kunci nonpemerintah berhasil menetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengubah paradigma penanganan bencana dari semula hanya ditangani pemerintah secara sentralistis, sektoral, dan lebih memfokuskan pada upaya responsif, menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan yang didesentralisasikan di segala tingkatan secara multisektor serta penekananan pada pengurangan risiko bencana.

Bidang penataan ruang pada saat yang hampir bersamaan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan payung hukum dalam upaya mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana. Walaupun dalam Undang-undang tersebut belum secara eksplisit menyebutkan bagaimana penataan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan terutama di kawasan lindung dan strategis, pada Pasal 6 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa “penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana”.

Di bidang kelautan dan perikanan, terbitnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur aspek mitigasi bencana yang secara spesifik dicantumkan dalam Bab X. Pengaturan dimulai dari penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir selain melibatkan semua *stakeholders* juga harus memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkup luas wilayah.

Ditetapkannya peraturan dan perundangan di atas, mendorong aktor-aktor kunci di aspek kebencanaan, termasuk organisasi nonpemerintah, Palang Merah Indonesia, Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri berupaya memberikan partisipasi secara aktif dalam merealisasikan perubahan paradigma penanggulangan bencana. Keterlibatan aktor-aktor kunci ini tercermin dari aktifnya penyelenggaraan koordinasi yang intensif dan solid melalui serangkaian lokakarya dan seminar untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran (*lessons learned*) dan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana. Kegiatannya adalah:

- (1). Penyusunan kebijakan dan peraturan turunan dari Undang-undang Penanggulangan Bencana;
- (2). Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
- (3). Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan sampai dengan di tingkat lokal;
- (4). Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan kebencanaan; serta
- (5). Implementasi pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap

bencana dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mendasari bencana.

Kebijakan dan payung hukum terkait pengurangan risiko bencana sebagai turunan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut:

- (1). Menjamin ketersediaan sumber daya dan kontinuitas PRB. Seluruh sumber daya merupakan investasi bagi pembangunan berkelanjutan. Melalui RAN-PRB pemerintah akan memberikan komitmennya dalam mendorong semua pemangku kepentingan di semua tingkatan untuk melakukan investasi sumber daya yang memadai bagi PRB;
- (2). Pemerintah memandang bahwa pengkajian risiko bencana merupakan suatu isu utama dalam menyusun kebijakan bagi pengurangan risiko bencana, termasuk dalam aspek pengembangan kelembagaan dan kapasitas teknis dalam PRB;
- (3). Mengatur sistem peringatan dini guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Terselenggaranya sistem peringatan dini yang efektif akan sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk yang menghadapi risiko mampu dan mau untuk menerima, memahami dan bertindak untuk melindungi diri. Diperlukan peraturan agar dapat memobilisasi semua sumber-sumber utama dan aktor-aktor utama guna mengembangkan sistem peringatan dini yang diperlukan, termasuk para politisi, ilmuwan, penyedia informasi dan penduduk yang menghadapi risiko bencana;
- (4). Memberikan dasar bagi pepaduan PRB ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal dalam upaya mengubah pola pikir, sikap dan perilaku dalam upaya mengurangi risiko bencana serta menjadikan upaya pengurangan risiko bencana menjadi budaya masyarakat;
- (5). Menjamin pengutamaan PRB ke dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan pemahaman, pengetahuan dan keahlian yang memadai dari para pembuat kebijakan, para praktisi dan komunitas yang menghadapi bencana;
- (6). Menggalakkan sinkronisasi PRB dan adaptasi perubahan iklim mulai dari tingkat nasional sampai dengan komunitas guna membantu meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang berkesinambungan. Adaptasi perubahan iklim dan PRB merupakan isu pembangunan yang mempunyai tujuan sama dalam membangun ketangguhan masyarakat;
- (7). Sebagai suatu negara hukum, maka apapun yang telah dan akan dilaksanakan untuk PRB harus dapat dipertanggung jawabkan

secara hukum. Disamping itu segala urusan PB dan PRB, termasuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan PB, akan semakin mudah diselesaikan melalui jalur hukum dengan makin tumbuhnya keyakinan masyarakat akan keberadaan hukum positif;

- (8). Undang-undang tentang kebencanaan di Indonesia masih relatif baru dan belum lengkap sehingga diperlukan upaya untuk penyempurnaan agar hukum dan kebijakan tidak menjadi hambatan dan kendala bagi penyelenggaraan PRB.

## **4.2. REFORMASI ASPEK KELEMBAGAAN**

Di samping Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peraturan lain yang merupakan tonggak reformasi kelembagaan penanggulangan bencana adalah:

- (1). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3). Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengacu pada peraturan di atas telah dibentuk kelembagaan formal di tingkat pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pengganti dari Bakornas PB melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2008. BNPB terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Unsur Pengarah terdiri dari sepuluh anggota yang diwakili oleh pejabat eselon 1 dari instansi terkait dan sembilan anggota masyarakat profesional. Adanya unsur pengarah dan pelaksana dalam BNPB mencerminkan penyelenggaraan PB yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Melalui serangkaian pertemuan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan telah berhasil dibentuk kelembagaan pengurangan risiko bencana di Indonesia yang dikenal dengan *Platform* Nasional Pengurangan Risiko Bencana, atau disingkat dengan PLANAS-PRB. PLANAS-PRB diresmikan bulan November 2008 yang merupakan suatu forum multipemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi nonpemerintah, lembaga donor internasional, media, perguruan tinggi, dan lembaga usaha. PLANAS-PRB merupakan wadah multi pemangku kepentingan yang dapat memberikan advokasi PRB pada berbagai tingkatan. Selain itu, PLANAS-PRB juga membantu dalam koordinasi, memberikan rekomendasi kebijakan dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan yang terkait PRB melalui serangkaian proses yang melibatkan partisipasi multipemangku kepentingan.

Pembentukan PLANAS-PRB dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan konsultasi publik. Pembentukan dan pengaturan PLANAS-PRB dilakukan para pihak yang menjadi anggota Platform Nasional. PLANAS-PRB mendapat perhatian dan apresiasi dari UN-ISDR dalam pertemuan internasional *Platform Global* yang kedua di Genewa (Swiss) Juni 2009. *Platform* PLANAS-PRB ini menjadi contoh bagi pembelajaran pembentukan forum PRB di dunia internasional.

Forum pengurangan risiko yang lain misalnya Forum Mitigasi Bencana yang dimotori Kementerian Kelautan dan Perikanan yang di bentuk pada 2008 dengan anggota terdiri dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah terkait dan beberapa organisasi nonpemerintah serta lembaga donor internasional. Forum ini dipandang sebagai suatu bentuk reformasi kelembagaan sebagai wadah koordinasi dan partisipasi berbagai institusi dalam aspek mitigasi bencana. Juga Forum Perguruan Tinggi untuk PRB yang beranggotakan 33 Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Di tingkat pemerintah daerah, reformasi kelembagaan PB didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi maupun BPBD kabupaten/kota dibentuk menggantikan kelembagaan PB yang selama ini bersifat *ad hoc*. Saat ini, telah dibentuk BPBD di 23 provinsi dan di 49 kabupaten/kota. Pembentukan BPBP provinsi dan kabupaten/kota baik melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Forum daerah untuk PRB juga sudah terbentuk antara lain di Yogyakarta, NAD, Sumbar, dan NTT, di samping forum lokal seperti Forum Merapi, Forum Bengawan Solo, dan lain-lain.

### **4.3. ASPEK KOORDINASI DAN JEJARING**

Sejak proses penyusunan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM, Lembaga Nonpemerintah Internasional (INGO), UN/PBB, Pemerintah dan unsur Palang Merah. Dari koalisi ini berhasil didorong penetapan undang-undang tersebut yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan dan sistem penanggulangan bencana di Indonesia.



Pada Hari Peringatan Pengurangan Risiko Bencana Internasional tahun 2006 telah di inisiasi pembentukan Konsorsium Pendidikan Kebencanaan Indonesia (*CDE=Consorsium Disaster Education*) oleh 22 LSM, baik nasional maupun internasional. Konsorsium Pendidikan Kebencanaan Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar anggota yang telah aktif serta mereka yang tertarik untuk bekerja sama dalam pendidikan bencana.

PLANAS-PRB yang bertindak sebagai penganjur PRB di berbagai tataran menjadi suatu jejaring lintas pelaku di tingkat nasional yang memfasilitasi pertukaran informasi, program dan kegiatan PRB yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk memonitor keterkaitannya dengan Kerangka Aksi Hyogo (HFA). Selain itu PLANAS-PRB dapat mendorong pencarian kiat-kiat adaptasi, pelaksanaan dan penguatan komitmen terhadap HFA serta melaksanakan konsensus dan konsultasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tantangan PLANAS-PRB adalah memastikan apakah dapat berfungsi seperti diharapkan serta menjaga keanggotaannya secara aktif dalam menggalakkan upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Mengingat PLANAS-PRB baru dibentuk, maka diperlukan upaya untuk membangun mekanisme koordinasi dengan forum-forum yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. PLANAS-PRB juga perlu memprioritaskan program kerja, termasuk mengupayakan pengutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan nasional.

#### **4.4. PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat sipil mengintegrasikan diri, menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengurangan risiko. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan di antaranya adalah:

- (1). Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan;
- (2). Kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas;
- (3). Proses penyadaran masyarakat; dan
- (4). Kegiatan peringatan dini.

Beberapa hal penting terkait dengan partisipasi masyarakat sipil, adalah:

- (1). Karakteristik Indonesia ditinjau dari berbagai aspek seperti geografi, geologi, hidrologi, demografi adalah negara yang rawan bencana;

- (2). Salah satu komponen bencana adalah kerentanan yang melekat pada karakteristik masyarakat, termasuk kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang besar, dan kerusakan lingkungan, sehingga gejala alam yang ekstrem cenderung menimbulkan dampak negatif dan merusak secara meluas;
- (3). Konsekuensi kejadian bencana juga terbukti selalu berakibat kepada kelompok masyarakat yang paling lemah dan paling miskin.

Partisipasi hak dan kewajiban masyarakat sipil sudah banyak dilakukan dalam bentuk keikutsertaannya menentukan kebutuhan, solusi, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pengurangan risiko bencana melalui forum yang berbasis masyarakat. Selain itu, telah dilaksanakan pelatihan dan kesiapsiagaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Daerah yang banyak melakukan upaya pengurangan risiko bencana adalah daerah yang sudah mengalami dan berpotensi terjadinya bencana. Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana cukup meningkat di daerah tersebut. Di tingkat nasional berbagai kelompok pemangku kepentingan secara kolaboratif mengadakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana ini.

Tantangan dalam memastikan adanya partisipasi masyarakat dan desentralisasi di tingkat lokal adalah sulitnya mendapatkan informasi dan data dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga usaha terkait pengurangan risiko bencana. Kesulitan tersebut disebabkan oleh kurangnya data dan informasi yang lengkap, tidak mutakhir, dan sering berbeda antarberbagai sumber.

Pendelegasian kewenangan di tingkat lokal juga sering membingungkan pelaku pengurangan risiko bencana dalam mengintegrasikan kegiatannya ke dalam rencana tersebut. Kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha masih belum jelas karena penyebaran informasi yang selama ini dilakukan masih bersifat berita bukan informasi mengenai pengurangan risiko bencana. Untuk mengatasinya perlu dilakukan upaya koordinasi pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data secara berkala oleh pihak yang terkait. Standardisasi, ketersediaan, dan kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi tersebut merupakan komponen dasar dalam penyusunan pengurangan risiko bencana. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi perlu dilakukan kerja sama dengan media untuk memberikan pemahaman mengenai PRB kepada masyarakat.

## **4.5. PEMBELAJARAN PENANGANAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

### **4.5.1. Pembelajaran Penilaian Kerugian dan Kerusakan Bencana**

Dalam beberapa tahun terakhir bencana alam terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami, angin puting beliung, kekeringan, dan lain-lain. Pada setiap kejadian bencana selalu menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda serta kerusakan fasilitas-fasilitas umum, sosial, ekonomi maupun infrastruktur. Kondisi ini membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat yang terkena bencana.

Kegiatan penanganan bencana selalu diawali dengan tanggap darurat yang fokus pada penyelamatan jiwa. Masa tanggap darurat biasanya selama satu hingga tiga bulan, kecuali kejadian bencana di Aceh pada 2004 yang berlangsung enam bulan. Setelah itu dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga dua tahun.

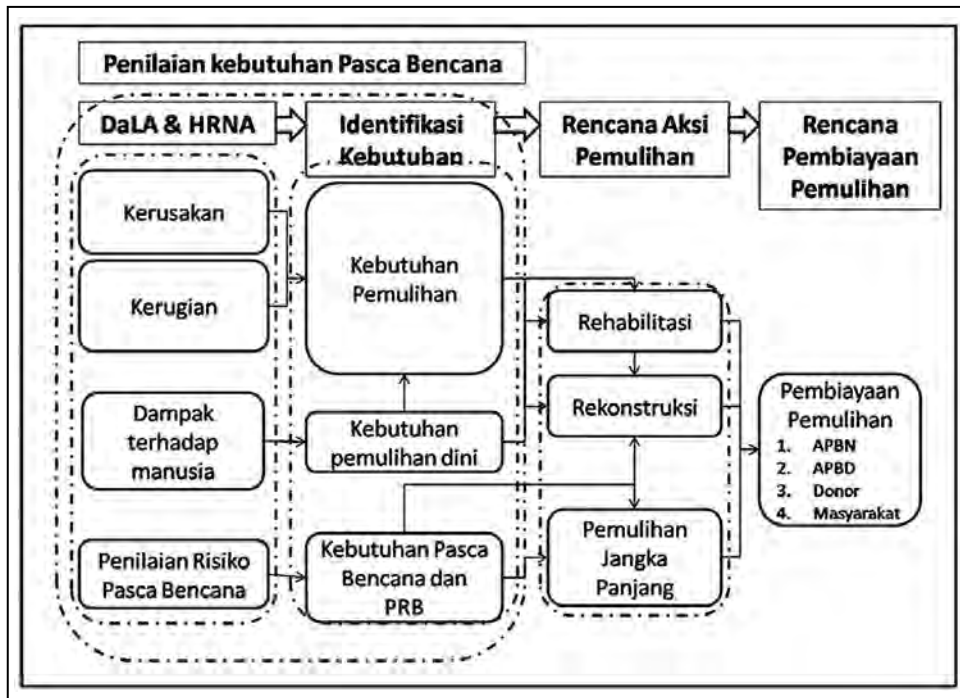
Masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sangat berbeda dengan beberapa daerah lainnya, dimana kejadian bencananya sangat besar sehingga pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Badan ini mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kehadiran BRR dalam rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia dan dunia luar. Kejadian bencana yang luar biasa tersebut memberikan pesan moral lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengubah paradigma dalam penanganan bencana yang tidak hanya berupa respons tetapi lebih kepada pengurangan risiko bencana.

Tabel 4.1. Daftar Bencana Alam di Indonesia pada Kurun Waktu 5 tahun Terakhir

| No | Jenis/lokasi  | Provinsi            | Waktu Kejadian               |
|----|---|---------------------|------------------------------|
| 1  | Gempa bumi di Alor dan Nabire                                   | NTT dan Papua Barat | November 2004                |
| 2  | Gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, Disusul gempabumi Nias | Aceh dan Sumut      | Desember 2004 dan Maret 2005 |
| 3  | Gempa bumi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah                        | DIY dan Jateng      | Mei 2006                     |
| 4  | Tsunami Pangandaran   | Jabar               | Juli 2006                    |
| 5  | Gempa bumi di Bengkulu dan Sumatera Barat                       | Bengkulu dan Sumbar | Maret 2007                   |
| 6  | Semburan lumpur panas Porong Sidoarjo, hingga kini              | Jawa Timur          | Mulai Maret 2007             |
| 7  | Gempa bumi Bengkulu dan Sumatera Barat                          | Bengkulu dan Sumbar | September 2007               |
| 8  | Gempa bumi di selatan Jawa Barat                                | Jawa Barat          | 2 September 2009             |
| 9  | Gempa bumi di Sumatera Barat                                    | Sumbar              | 30 September 2009            |

Penanganan pascabencana di Yogyakarta mencatat pengalaman lain. Berbeda dengan di Aceh yang dalam penanganannya melalui pembentukan BRR tetapi sudah memasukan faktor pengurangan risiko bencana. Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan selama dua tahun terfokus pada empat hal yaitu : perumahan dan pemukiman, pemulihan sarana dan prasarana, revitalisasi perekonomian serta dukungan peraturan. Skema koordinasi dan pelibatan masyarakat diungkap dengan jelas, sehingga dapat mengurangi berbagai konflik yang ada dalam masyarakat.

Di beberapa kejadian bencana, seperti gempa di Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, banjir di Jakarta selalu dilakukan perkiraan kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assessment*) dengan menggunakan metoda ECLAC (*European Commission for Latin America and Caribbean*) yang menjadikan dasar penyusunan rencana pemulihan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Gambar 4.1.).



Gambar 4.1. Skema Penilaian Kebutuhan Pemulihan

Metoda ECLAC digunakan untuk memperkirakan dampak bencana terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, yang kemudian dituangkan kedalam dampak kerugian langsung dan kerugian tidak langsung terhadap kondisi makroekonomi wilayah yang terkena bencana. Ada tiga tujuan dari penilaian tersebut yaitu:

- (1). Menilai kerusakan yang terjadi pada prasarana dan sarana publik dan nonpublik;
- (2). Menilai kerugian yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat, daerah dan negara;
- (3). Menilai pengaruh kerusakan terhadap kelembagaan pemerintahan, sekaligus mengantisipasi risiko terjadinya konflik, pelanggaran hukum dan penyimpangan.

Dari berbagai kejadian bencana, proses pelaksanaan pemulihannya meliputi tiga 3 fase besar yaitu fase tanggap darurat, fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dan fase pemulihan jangka panjang berkelanjutan. Pengalaman dari Penilaian Kerusakan dan Kerugian disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.  
Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Indonesia

| NO       | SEKTOR/<br>SUBSEKTOR          | Gempa Bumi DIY - Jateng<br>Mei 2006 (Milyar Rp) |                 | Banjir dan Longsor Jateng-<br>Jatim Januari 2008<br>(Milyar Rp) |                   | Gempa Bumi Jabar - Jateng<br>September 2009<br>(Milyar Rp) |               | Gempa Bumi Sumbar<br>September 2009<br>(Milyar Rp) |                 |
|----------|-------------------------------|---|-----------------|---|-------------------|--|---------------|--|-----------------|
|          |                               | Kerusakan                                       | Kerugian        | Kerusakan   | Kerugian          | Kerusakan  | Kerugian      | Kerusakan  | Kerugian        |
| <b>1</b> | <b>PERUMAHAN</b>              | <b>13,915.00</b>                                | <b>1,382.00</b> | <b>333.32</b>   | <b>-</b>          | <b>8,060.77</b>  | <b>133.73</b> | <b>13,450.00</b>                                   | <b>1,960.00</b> |
| 1        | Perumahan                     |   |                 | 282.75  | -                 |  |               |  |                 |
| 2        | Prasarana Permukiman          |   |                 | 50.57   | -                 |  |               |  |                 |
| <b>2</b> | <b>INFRASTRUKTUR</b>          | <b>397.00</b>                                   | <b>154.00</b>   | <b>418.37</b>   | <b>-</b>          | <b>2.71</b>  | <b>4.26</b>   | <b>930.10</b>                                      | <b>32.80</b>    |
| 1        | Transportasi                  | 90.00   |                 | 273.29  | -                 | 0.05   |               | 327.60   | 19.70           |
| 2        | Energi                        | 225.00  | 150.00          | 0.71  | -                 | 0.45   | 4.26          | 46.30  | 6.00            |
| 3        | Pos dan Telekomunikasi        |   |                 | -   | -                 |  |               | 33.60  | 19.70           |
| 4        | Air dan Sanitasi              |   |                 | 0.68  | -                 |  |               | 556.20   | 7.10            |
| 5        | Infrastruktur Sumber Daya Air | 82.00   | 4.00            | 143.70  | -                 | 2.22   |               |  |                 |
| <b>3</b> | <b>SOSIAL</b>                 | <b>3,906.00</b>                                 | <b>77.00</b>    | <b>49.93</b>  | <b>3.08</b>       | <b>402.67</b>  | <b>11.34</b>  | <b>1,454.10</b>                                    | <b>72.30</b>    |
| 1        | Kesehatan                     | 1,569.00  | 21.00           | 7.67  | -                 | 12.46  |               | 569.10   | 42.40           |
| 2        | Pendidikan                    | 1,683.00  | 56.00           | 39.40   | 3.08              | 153.42   | 11.34         | 563.70   | 25.00           |
| 3        | Agama                         | 654.00  |                 | 2.86  | 0.0004            | 236.79   |               | 304.20   | 3.10            |
| 4        | Lembaga Sosial                |   |                 | -   | -                 |  |               | 17.10  | 1.80            |
| <b>4</b> | <b>EKONOMI</b>                | <b>4,348.00</b>                                 | <b>4,676.00</b> | <b>165.90</b>   | <b>800,996.67</b> | <b>0.10</b>  |               | <b>773.80</b>                                      | <b>1,519.00</b> |
| 1        | Pertanian                     | 66.00   | 640.00          | 150.84  | 782.19            |  |               | 56.10  | 223.00          |
| 2        | Perikanan                     |   |                 | 14.09   | 17.30             |  |               |  |                 |
| 3        | Peternakan                    |   |                 |   |                   |  |               |  |                 |
| 4        | Perindustrian                 | 4,063.00  | 3,899.00        |   |                   |  |               | 10.90  | 114.80          |
| 5        | Perdagangan                   | 184.00  | 120.00          | 0.96  | 1.51              | 0.10   |               | 567.80   | 574.70          |
| 6        | Pariwisata                    | 36.00   | 18.00           |   |                   |  |               | 68.00  | 230.20          |
| <b>5</b> | <b>LINTAS SEKTOR</b>          | <b>185.00</b>                                   | <b>110.00</b>   | <b>3.95</b>   |                   | <b>174.65</b>  |               | <b>660.60</b>                                      | <b>14.00</b>    |
| 1        | Lingkungan Hidup              |   | 110.00          |   |                   |  |               | 0.10   | 0.10            |
| 2        | Pemerintahan                  | 137.00  |                 |   |                   | 174.65   |               | 660.50   | 13.90           |
| 3        | Keuangan dan Perbankan        | 48.00   |                 |   |                   |  |               |  |                 |
|          | <b>Nilai Total</b>            | <b>22,751.00</b>                                | <b>6,399.00</b> | <b>971.47</b>   | <b>800,999.75</b> | <b>8,640.90</b>  | <b>149.32</b> | <b>17,268.60</b>                                   | <b>3,598.10</b> |

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa kerusakan pada infrastruktur menempati ranking tertinggi, sehingga diperlukan kerja sama dan pelibatan departemen terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan lain-lain.

Dari semua kejadian bencana diatas, terdapat beberapa isu dalam penilaian kerusakan dan kerugian, yaitu :

- (1). Penilaian kerusakan dan kerugian sering dilakukan dalam waktu yang sangat singkat karena harus segera disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksinya;
- (2). Sumber dan keakurasian data sering sulit diperoleh;
- (3). Pemahaman terhadap kriteria dan nilai kerusakan serta kerugian setiap sektor belum seragam, sehingga diperlukan verifikasi jenis kerusakan serta validasi nilai kerusakan berdasarkan satuan harga yang mengacu pada peraturan di tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah;

- (4). Data yang terkumpul pada saat tanggap darurat hanya data fisik (rusak total/berat, rusak sedang, rusak ringan) sedangkan data sosial-ekonomi berupa data sekunder;
- (5). Kajian dampak ekonomi belum akurat karena tidak tersedianya *baseline data* bencana; dan
- (6). Koordinasi pengumpulan data menjadi tantangan karena sebagian besar SKPD di daerah sedang melaksanakan kegiatan tanggap darurat.

#### **4.5.2. Praktik yang baik dalam Penanganan PRB di Indonesia**

Berbagai pengalaman dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan internasional dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi program-program sejenis di Indonesia. Di bawah ini akan dibahas beberapa pengalaman penerapan PRB di Indonesia.

##### **1. Pengalaman Perencanaan di Sumatera Barat**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya. Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat terkena bencana, melindungi dari dampak bencana dan melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks perencanaan, Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan rencana pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Adapun yang sudah dilakukan di antaranya menyusun dan mensahkan sebuah Perda yang memang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana, yaitu Perda Provinsi No.5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melakukan revisi RTRW dengan menyesuaikan dengan perubahan yang ada serta memperhitungkan berbagai faktor yang belum diperhitungkan selama ini seperti kerentanan, hazard, peta geologi dan sebagainya, membentuk BPBD Propinsi yang merupakan implementasi dari Perda No 5 Tahun 2007 tentang Perda Penanggulangan Bencana. Pemda Sumatera Barat juga telah melakukan Kebijakan di Bidang Penganggaran dengan mengalokasikan dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran. Selain itu pemerintah Sumatera

Barat telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Semua pengalaman dalam perencanaan dari Sumatera Barat merupakan pengalaman berharga untuk menjadi *lesson learn* bagi daerah lain di tanah air kita.

## **2. Proyek RADIUS (Risk Assessment for Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters) di Kota Bandung**

Bandung sebagai kota yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan juga kota yang memiliki ancaman kegempaan tingkat menengah dikombinasikan dengan kondisi perkembangan dan pembangunannya menyebabkan risiko bencana gempa bumi yang cukup besar. Antara 1999-2000 telah dilaksanakan upaya perencanaan pengurangan risiko terhadap gempa bumi, melalui Proyek RADIUS (*Risk Assessment for Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters*) yang disponsori oleh Sekretariat UN-IDNDR, serta kesiapan berbagai fasilitas kesehatan, sistem pengadaan air, listrik, telekomunikasi, infrastruktur, dan lain-lain. Rencana tindak yang dibuat diharapkan akan meningkatkan kemampuan sektor-sektor vital di Kota Bandung melalui perencanaan tanggap darurat yang lengkap dan terintegrasi. Beberapa kegiatan PRB yang direkomendasikan Proyek RADIUS telah diadopsi pihak pengambil keputusan di Kota Bandung antara lain dengan memasukkan beberapa aspek PRB ke dalam pembangunan jangka menengah dalam RTRW untuk periode 20 tahun (2010-2030), dengan memanfaatkan peta-peta bahaya yang telah dihasilkan sebagai masukan dalam penetapan peraturan bangunan.

## **3. Kesiapsiagaan Masyarakat di Gunung Merapi**

Gunung Merapi terletak di dua propinsi yaitu Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah. Ancaman Gunung Merapi bisa terjadi kapan saja dan sudah beberapa kali terjadi. Masyarakat yang didukung DREAM UPN kemudian berinisiatif untuk membentuk Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat dengan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya adalah advokasi, pelatihan, gladi, sampai pada bagaimana meningkatkan kesadaran akan hidup bersama bencana.

Inisiatif tersebut terus berkembang dengan berbagai pengalaman penanganan yang sudah ada hingga saat ini dan terus dikembangkan menjadi budaya siaga bencana dan menjadi bagian kehidupan mereka sehari - hari. Kiprah masyarakat dalam kesiapsiagaan di lereng gunung Merapi mengembangkan . Hingga



saat ini pengalaman penanganan bencana oleh masyarakat dari Gunung Merapi telah di replikasi di beberapa daerah misalnya di Gunung Kelud, Jawa Timur, Gunung Tambora dan banyak lagi.

#### **4. Peringatan Dini Mencegah Kekurangan Makanan di NTT**

Bagian Timur Nusa Tenggara memiliki tiga-bulan musim hujan dan sembilan bulan musim kemarau. Kondisi seperti ini telah berlangsung lebih dari 100 tahun, masyarakat kekurangan pangan hal ini disebabkan oleh musim kemarau kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan iklim yang menyebabkan kegagalan panen. PMPB (Perhimpunan Masyarakat Peduli Bencana) dan Yayasan PIKUL melakukan inisiatif pengurangan risiko berbasis masyarakat dengan fokus petani di pedesaan dengan fokus membangun sistem keamanan pangan dan mata pencaharian untuk mencegah kekurangan makanan. Inisiatif ini berlangsung 305 tahun dan kemudian masuk menjadi program di Kabupaten Sikka. Dengan kegiatan tersebut mereka berhasil mengatasi kekurangan pangan dengan mekanisme yang telah mereka bangun sendiriyaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk mengembangkan indikator dan memonitor keamanan pangan dan mata pencaharian, membuat sistem peringatan dini dengan penyiapan stik makanan serta melakukan advokasi kepada pemerintah. Kegiatan cocok tanam dengan menggunakan kearifan masyarakat seperti sistem menanam di sela bebatuan, melakukan analisis risiko dengan sistem kalender serta penyimpanan makanan. Kunci keberhasilan dari kegiatan ini adalah kombinasi baik ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan adat.

#### **5. Pengalaman Pembangunan Rumah Tahan Gempa dari Yogyakarta**

Pembangunan rumah paska Gempa di Yogyakarta merupakan salah satu pengalaman rehabilitasi dan rekonstruksi yang didalamnya mengandung upaya mengurangi risiko bencana. Pembangunan perumahan yang dilaksanakan diawali dengan pembangunan shelter (rumah sementara) yang bertujuan untuk menampung korban, namun setelah masa tanggap darurat selesai masyarakat harus segera memiliki rumah. Provinsi DIY kemudian membangun rumah tahan gempa. Bangunan tersebut mengandung beberapa prinsip diantaranya adalah yakni kuda-kuda, pondasi, kolom, balok, sloof, yang semua itu bisa membuat rumah tahan akan gempa pada kekuatan tertentu. Pada tahap rekonstruksi tahun 2006, Provinsi DIY telah membangun 570 unit rumah per hari dan selama 253 hari telah berhasil menyiapkan 144.034 unit rumah.

## **6. Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Demak**

Kabupaten Demak yang memiliki daerah pesisir rawan terhadap ancaman bahaya erosi, banjir pasang, dan gelombang pasang. Pertanian sebagai sektor utama bagi perekonomian Kabupaten Demak juga terkena dampak intrusi air laut yang berdampak negative terhadap pertanian dan terganggunya tambak-tambak ikan di daerah pesisir.

Guna mengatasi masalah tersebut, beberapa kegiatan PRB yang bersifat adaptif terhadap kondisi di atas telah dikembangkan dalam bentuk rencana tindak pengelolaan pesisir yang terintegrasi (*Integrated Coastal Zone Management/ICZM*) sejak 2003, yang didukung Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Demak, masyarakat setempat dan NGO donor dari Jepang.

Rencana tindak ICZM tersebut terbagi menjadi empat kegiatan strategis sebagai berikut:

- (1). Proses rehabilitasi dari ekosistem pesisir, terutama mangrove, dan implementasi dari langkah-langkah penanggulangan perlindungan pesisir.
- (2). Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove bagi ekosistem pesisir.
- (3). Rehabilitasi sarana dan infrastruktur pedesaan, termasuk sarana sosial, publik, dan pendidikan
- (4). Mengembangkan kesempatan usaha mandiri melalui beberapa inisiatif..

### **4.5.3. Praktik yang baik dalam Penanganan PRB di Negara Lain**

#### **1. Pengalaman Argentina**

Argentina telah menginisiasi pembentukan Platform Nasional di antara Negara Amerika Latin lainnya, dengan memasukkan tiga tujuan strategis dari HFA, yaitu: integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, membangun ketahanan dalam menghadapi bencana, dan memasukkan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko ke dalam program-program kesiapsiagaan; tanggap darurat, dan pemulihan. Salah satu alat yang telah digunakan Argentina dalam kegiatan PRB di negaranya adalah membuat model solidaritas yang dijuluki Inisiatif Helm Putih (*White Helmet Initiative*) sebagai suatu kelompok

bantuan kemanusiaan yang juga telah telah diakui oleh PBB, dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan; memberikan bantuan pada saat bencana di tahap mitigasi dan pencegahan. Pola *White Helmet* dalam memobilisasi relawan setempat secara intensif, dan juga penekanan pada pengelolaan bencana secara komprehensif dapat dilihat sebagai strategi yang baik guna memitigasi kemiskinan dan menghilangkan kelaparan serta gizi buruk, yang bagi sebagian penduduk merupakan faktor kerentanan utama yang dihadapi dalam keadaan darurat.

## **2. Pengalaman Bangladesh**

Pemerintah Bangladesh, negara yang terus menerus menghadapi ancaman banjir dan siklon, telah melakukan suatu pendekatan PRB yang proaktif. Caranya melalui pendefinisian ulang pengelolaan lingkungan yang berisiko dan menanggapi ancaman secara langsung, dalam bentuk program 5 tahunan pemerintah untuk Pengurangan Risiko Bencana bagi Masyarakat Termiskin melalui Pengembangan Mata pencaharian yang Berkelanjutan (*Reducing Disaster Risks of the Poorest through Sustainable Livelihood Development*). Program ini ditekankan pada pembangunan ketahanan pangan untuk penduduk yang sangat miskin dan rentan bencana dalam bentuk *Disaster Resistant Sustainable Livelihoods/DRSL*, menggunakan pendekatan berbasis pengembangan mata pencaharian untuk melakukan mitigasi dan pengelolaan bencana pada tingkat masyarakat yang sangat praktis dan efektif.

Melalui *Bangladesh Disaster Preparedness Centre (BDPC)*, program *Reducing Disaster Risks of the Poorest through Sustainable Livelihood Development*, merupakan perpaduan yang menarik dari upaya Pemerintah (*Ministry of Food and Disaster Management Bangladesh* mengeluarkan dana langsung untuk proyek rehabilitasi korban banjir) dan NGO yang telah berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi penduduk.

## **3. Pengalaman Filipina**

*Program Integrating Disaster Risk Reduction in Urban Planning dari Makati City*, suatu unit pemerintahan di Metro Manila, yang berisiko tinggi terhadap gempa bumi, melalui kerja sama dengan *Earthquakes and Megacities Initiative (EMI)* dan didukung oleh *German Disaster Reduction Committee (DKKV)* dan *German Federal Foreign Office*, telah menginisiasi urban redevelopment planning project yang bertujuan mengurangi risiko bencana gempa bumi, meliputi:

- (1). Pendekatan proaktif, sistematis, pragmatik, dan konkret untuk mengurangi risiko gempa dengan memasukkan PRB ke dalam tata guna lahan dan pembangunan sosio-ekonomi.
- (2). Proses perencanaan yang *locally-driven* dan inklusif, yang melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* setempat.
- (3). Dukungan yang kuat dan jelas dari pemerintah kota.
- (4). Investasi jangka panjang dalam PRB yang dapat direplikasi unit pemerintahan lainnya.

#### **4. Pengalaman Iran**

Sesudah *Great Manjil Earthquake* pada 1990, *International Institute of Earthquake and Engineering and Seismology (IEES)* di Teheran memulai pekerjaan dengan institusi teknik lainnya dalam mengembangkan sebuah penelitian masalah-masalah strategis yang berskala nasional secara multidisipliner dan rencana mitigasi untuk pengurangan risiko gempa.

Sebagai hasilnya, *Iran Earthquake Mitigation Program (IERMP)* telah diimplementasikan oleh *IEES, Building and Housing Research Centre, Geophysics Institute of Teheran University, dan Geological Survey of Iran* dengan dukungan dari Komite Gempa Bumi dari Dewan Riset Iran (*Earthquake Committee of the Iran Research Council*) serta Iran's National IDNDR committee.

Secara singkat beberapa aksi PRB melalui IERMP yang termasuk ke dalam wilayah kebijakan pembangunan adalah:

- (1). Mengubah pendekatan dari kegiatan tanggap kerusakan akibat gempa bumi ke pemahaman cara-cara dalam mengurangi risiko kerusakan struktur dan jaringan vital yang rentan sebelum gempa bumi terjadi.
- (2). Menetapkan dana khusus pemerintah untuk perkuatan bangunan publik yang penting, termasuk sekolah, rumah sakit, infrastruktur publik dan fasilitas jaringan vital.
- (3). Menyediakan dana insentif untuk sektor swasta dan komersil yang tertarik pada perbaikan struktur mereka yang sudah ada.
- (4). Mendorong industrialisasi yang lebih baik pada bidang konstruksi untuk menjamin kualitas pengawasan yang lebih baik.

#### **5. Pengalaman Vietnam**

Vietnam telah memformulasikan rencana strategis 20 tahun untuk PRB, termasuk menetapkan strategi-strategi bagi penduduk delta Sungai *Mekong* untuk hidup berdampingan dengan banjir. Berbagai

kegiatan PRB telah dilakukan, mulai dari relokasi penduduk rentan ke daerah yang lebih aman sampai dengan perubahan kalender panen. Upaya-upaya usaha yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif dan mendorong lebih lanjut pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerjasama ke arah tersebut. Usaha-usaha PRB di Vietnam telah melibatkan berbagai tenaga ahli baik dalam dan luar negeri serta lintas sektor, bahkan lintas kementerian.

Provinsi-provinsi di Vietnam yang rawan banjir diharuskan membuat perencanaan tata guna lahan yang tepat dan harus memperhitungkan jadwal panen yang cocok dengan kejadian banjir. Pendekatan tersebut merupakan contoh pendekatan yang sangat baik dengan memanfaatkan kombinasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan inisiatif di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pengurangan risiko banjir dan pada saat yang bersamaan meningkatkan produksi setempat, kehidupan berkelanjutan dan pembangunan.

#### **4.6. ASPEK PENDANAAN**

Hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009 mengindikasikan kurangnya dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan pengurangan risiko bencana, sehingga banyak sasaran RAN-PRB 2006-2009 yang belum tercapai. Namun demikian, sudah banyak mengalami perubahan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengubah paradigma dari responsif menuju pengurangan risiko. Keadaan ini mendorong bergesernya pendanaan dari respons (*spending*) menjadi pendanaan pengurangan risiko bencana yang sifatnya investasi (*investment*). Kenaikan alokasi anggaran dari APBN terkait PRB dari RKP 2007 ke 2008 diilustrasikan sebagai berikut:

- (1). Penguatan kelembagaan di nasional dan daerah terkait mitigasi dan sistem peringatan dini meningkat dari Rp 49,8 miliar menjadi Rp 1,028 triliun;
- (2). Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dari Rp 94 miliar, meningkat menjadi Rp 127,3 miliar ;
- (3). Pengarusutamaan PRB dalam tata ruang yang awalnya belum ada dana yang dialokasikan, meningkat menjadi Rp 277 miliar ;
- (4). Sedangkan total dana untuk pencegahan bencana (*disaster preparedness*) yang masuk dalam kegiatan pengurangan risiko bencana pada tahun 2007 adalah Rp 78 miliar.

Sehubungan dengan itu dukungan dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012, sangat diperlukan baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun pendanaannya guna dapat melanjutkan kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Aspek pendanaan PRB ini akan terus ditingkatkan antara lain, melalui upaya meningkatkan komitmen pemerintah dengan mengalokasikan dana PB dalam APBN/APBD. Sebagaimana direkomendasikan dalam global forum kedua di Genewa, yaitu 1% dari APBN/APBD dialokasikan untuk Dana PB yang 10% nya dialokasikan untuk kegiatan PRB.









# **BAB 5**

## **HASIL EVALUASI**

### **PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL**

### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

### **TAHUN 2006-2009**

#### **5.1 PENGANTAR EVALUASI RAN-PRB 2006-2009**

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2006-2009. RAN-PRB merupakan dokumen kebijakan pertama tentang pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pada waktu penyusunan RAN-PRB ini belum ada landasan peraturan yang menjadi acuan. Upaya penyusunannya semata-mata merujuk langsung kepada Kerangka Kerja Aksi Hyogo atau *Hyogo Framework for Action* (HFA) yang merupakan komitmen global dalam rangka pengurangan risiko bencana pada tingkat internasional. Langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengurangan risiko bencana.

Setahun setelah peluncuran dokumen *HFA*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana (Bakornas PB)---sekarang menjadi BNPB, menyusun dokumen RAN-PRB 2006-2009. Peluncuran dokumen RAN-PRB dilaksanakan pada 24 Januari 2007 di Jakarta, dihadiri para pihak, baik dari pusat maupun daerah. Langkah dan upaya ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap Resolusi PBB Nomor 63 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan *HFA* dan *Beijing Action*. Penyusunan RAN-PRB ini bertujuan mengubah paradigma dalam penanganan bencana yang selama ini lebih bersifat responsif dalam menangani bencana menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif sehingga bencana alam itu selain mungkin dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi), juga risikonya dapat dikurangi atau malah ditiadakan.

Untuk memperoleh gambaran kemajuan dan permasalahan pelaksanaan untuk kegiatan tahunan RAN-PRB ini dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2007-2008 dijadikan sebagai masukan utama dalam melihat gambaran menyeluruh dari implementasi RAN-PRB 2006-2009. Di samping itu, untuk memperoleh gambaran RAN-PRB 2006-2009 dikaji dan dianalisis berbagai dokumen dan laporan lainnya yang relevan. Hasil evaluasi ini

menjadi masukan dan saran terhadap proses penyusunan RAN-PRB selanjutnya.

Dalam evaluasi ini digunakan beberapa aspek penilaian, yaitu konsistensi, koordinasi, kapasitas, konsultasi, dan keberlanjutan. Penjelasan secara definitif adalah sebagai berikut :

- (1). *Aspek Konsistensi*, yaitu proses penelaahan kesesuaian antara perencanaan yang tercantum dalam kebijakan RAN-PRB dengan rencana kerja yang disusun oleh para pihak yang terlibat.
- (2). *Aspek Koordinasi*, yaitu suatu interaksi dan komunikasi antarpara pihak dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan RAN-PRB;
- (3). *Aspek Kapasitas*, yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan yang didayagunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan RAN-PRB;
- (4). *Aspek Konsultasi*, yaitu keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Berbagai media komunikasi dan informasi yang dapat digunakan dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kegiatan PRB. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai forum untuk menyerap aspirasi dan masukan pada saat sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan setelah peristiwa bencana;
- (5). *Aspek Keberlanjutan* dalam kerangka kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

## **5.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB 2006-2009**

Hasil evaluasi lima aspek pelaksanaan RAN-PRB yaitu koordinasi, kapasitas, dan konsultasi.

### **5.2.1. Konsistensi**

- (1). Konsistensi antara dokumen perencanaan kementerian/ lembaga (K/L) sebagai hasil proses Musrenbang Nasional dengan dokumen perencanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007, 2008, dan 2009;
- (2). Alokasi pendanaan dalam RKP 2007-2009 menunjukkan berorientasi PRB, sebagaimana secara umum dapat dilihat pada Tabel 5.1.
- (3). Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang dikelompokkan ke

dalam 5 program utama dalam RAN-PRB, diperoleh gambaran sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2;

- (4). Perbandingan program dalam RAN-PRB dengan kontribusi Donor dan NGO dalam jangka waktu 2007-2009 tidak semua program utama tersedia datanya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 5.3.
- (5). Terdapat *missing link* yang mengaitkan antara analisa risiko dengan matriks program karena lemahnya visi dan misi rencana aksi sehingga RAN-PRB masih seperti media informasi atau daftar aktivitas kegiatan PRB yang dilakukan berbagai lembaga dan belum menjadi sarana kolaborasi atau integrasi program/kegiatan PRB antarlembaga;
- (6). Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan secara umum telah konsisten. Namun, ada beberapa para pihak yang kurang berperan aktif, dan ada juga yang sangat aktif, yang meskipun tidak tercantum dalam RAN-PRB, tetapi melaksanakan kegiatan;
- (7). Kurangnya dukungan di bidang pengembangan *science, engineering*, dan manajemen risiko kebencanaan (terutama pada pengembangan peta *hazard* nasional, *risk assessment*, dan *action planning*);
- (8). Beberapa para pihak tidak merujuk kepada RAN-PRB, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan PRB.
- (9). Untuk memperoleh pemetaan persandingan antara kebijakan PRB dengan berbagai perencanaan dan penganggaran pada instansi kementerian/lembaga dan Donor/NGO dapat diperhatikan pada 3 tabel berikut ini;

Tabel 5.1. Alokasi Program PRB dalam RKP

| Tahun           | Prioritas Nasional dan Fokus Kegiatan  | Budget (Juta Rp) |
|-----------------|--|------------------|
| <b>RKP 2007</b> | Prioritas VII: Mitigasi dan PB (Fokus 3,4 dan 5)   | 221,80           |
| <b>RKP 2008</b> | Prioritas VIII: PB, PRB, dan Penanggulangan Penyakit (Fokus 2,3 dan 4)   | 1.433,00         |
| <b>RKP 2009</b> | Prioritas II: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Ketangguhan Ekonomi yang Didukung oleh Pengembangan Pertanian (Fokus 5) | 1.736,40         |

Sumber : Diolah dari RKP 2007-2009 oleh Tim P3B Bappenas, 2009

Tabel 5.2. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Alokasi Anggaran Pemerintah

| No | PROGRAM UTAMA RAN-PRB  | 2007              |                     | 2008              |                   | 2009              |                   |
|----|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |  | Usulan            | Alokasi             | Usulan            | Alokasi           | Usulan            | Alokasi           |
| 1. | Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini   | 2,290.30          | 76,650.20           | 2,131.26          | 65,460.53         | 3,186.18          | 120,075.62        |
| 2. | Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini   | 79,108.04         | 85,218.99           | 62,306.33         | 79,781.69         | 66,605.76         | 74,970.91         |
| 3. | Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat | 2,199.40          | 19,497.30           | 2,502.10          | 30,564.36         | 3,649.33          | 16,201.69         |
| 4. | Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana   | 127,385.93        | 127,385.93          | 93,161.39         | 93,161.39         | 47,855.40         | 47,855.40         |
| 5. | Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif  | 138,564.14        | 2,176,622.12        | 128,177.11        | 518,235.07        | 38,867.49         | 441,735.77        |
|    | <b>Total</b>   | <b>349,547.82</b> | <b>2,485,374.56</b> | <b>288,278.20</b> | <b>787,837.76</b> | <b>160,164.17</b> | <b>700,839.42</b> |

Sumber : Diolah dari berbagai data para pihak oleh Tim P3B Bappenas, 2009

Tabel 5.3. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Kontribusi Donor/NGO

| NO | PROGRAM UTAMA RAN-PRB  | 2007            |                   | 2008             |                   | 2009             |                   |
|----|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |  | Usulan          | Alokasi           | Usulan           | Alokasi           | Usulan           | Alokasi           |
| 1. | Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini   | -               | 212,587.22        | 3,000.00         | 25,314.18         | -                | 73,901.06         |
| 2. | Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini   | -               | 2,500.00          | 16,500.00        | 34,015.30         | -                | 36,450.00         |
| 3. | Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat | 7,400.00        | 33,600.00         | 4,630.00         | 34,630.00         | 59,400.00        | 59,400.00         |
| 4. | Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana   | -               | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| 5. | Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif   | 2,000.00        | 182,441.14        | 18,771.72        | 22,522.29         | -                | --                |
|    | <b>Total</b>   | <b>9,400.00</b> | <b>431,128.36</b> | <b>32,901.72</b> | <b>116,481.77</b> | <b>59,400.00</b> | <b>169,751.06</b> |

Sumber : Diolah dari berbagai data para pihak oleh Tim P3B Bappenas, 2009

### 5.2.2. Koordinasi

- (1). Pemetaan koordinasi pelaksanaan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan RAN-PRB dapat dikelompokkan ke dalam dua kuadran, yaitu berkomitmen dan melaksanakan kegiatan PRB, serta berkomitmen dan tidak melaksanakan kegiatan PRB;
- (2). Mekanisme koordinasi yang baik telah menghasilkan pelaksanaan kegiatan PRB yang saling mendukung, melengkapi, dan menghindari terjadinya tumpang tindih program/kegiatan PRB antarpara pihak.

### 5.2.3. Kapasitas

- (1). **Kapasitas Kelembagaan.** Dalam kurun waktu tahun 2007-2009, masih sangat sedikit para pihak yang fokus dalam melaksanakan kegiatan PRB. Terdapat keberagaman aturan, mekanisme, dan tindak lanjut dalam menyusun perencanaan sampai pelaksanaan. Beberapa K/L memiliki unit khusus atau struktur yang menangani kegiatan PRB, tetapi ada K/L yang tidak memiliki unit khusus atau struktur pelaksanaan kegiatan PRB;
- (2). **Kapasitas SDM.** Hasil evaluasi menunjukkan masih terbatasnya kapasitas SDM baik secara kuantitas maupun secara kualitas. SDM pada tingkat K/L dan Pemda yang menangani kegiatan PRB hanya mengandalkan yang ada di unit khusus/struktural. Pada donor/komunitas internasional/NGO berperan secara variatif seperti unit khusus, koordinator, dan *implementing agency*. SDM di perguruan tinggi lebih banyak mengandalkan kepada tenaga-tenaga pengajar/dosen yang latar belakangnya terdiri dari berbagai disiplin keilmuan;
- (3). **Kapasitas Pendanaan.** Keterbatasan kemampuan pendanaan dari berbagai para pihak menyebabkan minimnya kegiatan PRB yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan K/L yang berasal dari APBN dan PHLN. Sumber pendanaan donor/komunitas internasional/NGO berasal dari dana internal dan mengupayakan bantuan dana dari sumber lain. Sumber pendanaan perguruan tinggi sangat mengandalkan pada kerja sama dan bantuan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama untuk melaksanakan kegiatan PRB. Pendanaan untuk pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Pemda berasal dari APBN, APBD maupun kerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Pada anggaran APBD, belum ada nomenklatur untuk kegiatan PRB, tetapi secara substansi program/kegiatan dalam APBD sudah terakomodasi.

### 5.2.4. Konsultasi

- (1). Media partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui forum pertemuan yang diadakan untuk mengakomodasi permasalahan dan pengawasan. Terdapat fasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan RAN-PRB, misalnya dalam penyusunan rencana kontijensi;
- (2). Adanya ketersediaan akses informasi dan kemudahan akses informasi publik dalam mendukung PRB melalui media elektronik dan cetak seperti, film, video, radio, TV, buku,

brosur, pamflet, *leaflet*, dan stiker. Selain itu, melalui *website* dan internet. Banyak kegiatan teknis yang dipergunakan untuk menyebarluaskan PRB melalui seminar, konferensi, sosialisasi, dialog publik, *workshop* dan bentuk kegiatan lainnya.

#### 5.2.5. Keberlanjutan

- (1). Untuk mendukung kesinambungan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan pengurangan risiko bencana pasca tahun 2009, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010. Prioritas yang mendukung kepada kebijakan PRB mengacu pada prioritas lima RKP Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim. Kebijakan ini merupakan landasan perencanaan tahunan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai arahan kebijakan pembangunan;
- (2). Seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, maka pemerintah telah mempersiapkan rancangan RPJMN 2010-2014. Di dalam konsep kebijakan ini diusulkan pengutamaan arah kebijakan yang terkait dengan isu pengurangan risiko bencana. Kerangka kebijakan ini sangat penting dan strategis bagi penanganan kebencanaan di Indonesia khususnya sebagai payung kebijakan pengurangan risiko bencana.

### 5.3. KEBERHASILAN DAN KEKURANGAN

Hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB, terlihat adanya keberhasilan dan kekurangan.

#### 5.3.1. Keberhasilan

Beberapa hal yang sudah dicapai dari hasil kegiatan pelaksanaan evaluasi RAN-PRB 2006-2009 adalah sebagai berikut :

- (1). Upaya yang dilakukan dalam rangka penyusunan RAN-PRB menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meresponss komitmen global terkait dengan pengurangan risiko bencana;
- (2). Manfaat yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB, yaitu laporan yang tajam, teliti, komprehensif, menunjukkan komitmen kuat pemerintah yang serius dengan adanya RAN-PRB. Selain itu, memberikan *feedback* kepada pihak-pihak yang berkepentingan, memungkinkan perbaikan



dan *updating* RAN-PRB periode berjalan dan pijakan bagi RAN-PRB selanjutnya. Mengupayakan untuk mengadvokasi bahwa PRB adalah urusan bersama;

- (3). Aspek analisis dalam kegiatan evaluasi RAN-PRB dengan menggunakan aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dalam evaluasi RAN-PRB dinilai sangat menarik dari lensa pemerintah sebagai regulator dan fasilitator;
- (4). Membuat perencanaan merupakan sesuatu hal yang sulit, tetapi lebih sulit lagi membuat evaluasi seperti yang telah dilakukan terhadap RAN-PRB. Bappenas sebagai lembaga perencana sudah baik membuat RAN-PRB ini. Bappenas harus mendorong agar RAN-PRB mempunyai produk hukum yang kuat dengan melibatkan para pihak yang lebih nyata;
- (5). Adanya harapan yang cukup banyak dari para akademisi supaya perguruan tinggi dapat dijadikan mitra yang potensial bersama pemangku kepentingan lainnya dalam PRB;
- (6). Dengan adanya RAN-PRB berarti sudah ada pemetaan kegiatan. Daftar kegiatan yang tercantum dalam RAN-PRB disandingkan dengan implementasi pada setiap para pihak maka dapat dinilai bagus dan sudah dijelaskan dalam dokumen evaluasi RAN-PRB;
- (7). Dokumen evaluasi sudah memenuhi criteria HFA, dan hal ini bisa dikaji-silang. Hasil evaluasi HFA yang disusun dapat juga ditambahkan ke dalam dokumen evaluasi RAN-PRB;
- (8). Setelah dilakukan evaluasi RAN-PRB ini ada refleksi keberhasilan terhadap implementasi kebijakan RAN-PRB;
- (9). Dalam evaluasi dapat dilakukan ekstrapolasi terhadap peristiwa bencana, misalnya jika tsunami terjadi lagi di Aceh, maka apakah korbannya berkurang dibandingkan tahun 2004. Analisis ekstrapolasi ini dapat ditambahkan ke dalam pelaksanaan evaluasi RAN-PRB;
- (10). Pelibatan para pihak sudah banyak untuk isu pengurangan risiko bencana. Untuk RAN-PRB banyak dibantu beberapa donor terkait. Untuk RAN-PRB harus dioptimalkan dari berbagai sumber dana;
- (11). Instrumen pemerintah dalam rangka kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan kepada RPJMN yang merupakan milik bersama;
- (12). Platform Nasional dapat menjadi Komite Pengarah yang berfungsi untuk membahas dan menyusun RAN-PRB.

### 5.3.2. Kekurangan

Kekurangan yang masih ada dari proses pelaksanaan kegiatan evaluasi RAN-PRB dapat digambarkan sebagai berikut :

- (1). Pada saat penyusunan RAN-PRB 2006-2009, belum terdapat payung hukum atau kerangka regulasi yang menjadi landasan dalam proses penyusunan tersebut;
- (2). Di dalam dokumen RAN-PRB 2006-2009 masih tampak hanya daftar-daftar kegiatan pengurangan risiko bencana yang berasal dari berbagai para pihak;
- (3). Antara evaluasi RAN-PRB terdahulu dengan HFA *reporting* menunjukkan, tidak adanya kaitan antara laporan kemajuan dan kendala pelaksanaan HFA. Sedangkan hasil HFA *report* bisa dimasukkan untuk menggambarkan kondisi masing-masing subprioritas;
- (4). Dilihat dari metodologinya, disarankan agar evaluasi RAN-PRB ini tidak saja fokus kepada kegiatan yang tercantum di dalam RAN-PRB, melainkan pada dampaknya di masyarakat. Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan RAN-PRB tahun ini masih belum menjangkau pada aspek dampak karena pelaksanaan kegiatan evaluasi pengurangan risiko bencana masih terus berjalan sesuai dengan kerangka waktu RAN-PRB 2006-2009. Dokumen evaluasi RAN-PRB ini pada prinsipnya belum sampai pada dampak tingkatan. Evaluasi dampak terhadap masyarakat memang sulit dilaksanakan untuk tingkat nasional perlu indikator perkiraan;
- (5). Masyarakat memiliki agenda atau kegiatan untuk melihat risiko bencana di daerahnya, tetapi hal ini tidak tercantum di dalam dokumen evaluasi RAN-PRB;

## 5.4 . REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan deskripsi hasil evaluasi dapat dirumuskan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut baik yang bersifat umum maupun khusus.

### 5.4.1. Beberapa Rekomendasi Umum

Terdapat beberapa rekomendasi yang bersifat umum dari hasil evaluasi RAN-PRB antara lain :

- (1). Hendaknya RAN-PRB menjadi dokumen strategis dan menjadi basis perencanaan bagi para pihak dalam melakukan penyusunan kegiatan pengurangan risiko bencana serta penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat

- maupun di daerah. Dengan demikian, dokumen tersebut dapat dijadikan barometer dalam mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan pengurangan risiko bencana;
- (2). Dokumen RAN-PRB dirasakan masih perlu menjabarkan lebih dalam tentang risiko bencana secara nasional yang dihadapi, kemudian disusun prioritas program/kegiatan serta tidak hanya menulis ulang HFA sehingga para pihak dapat menyesuaikan tidak hanya merupakan daftar kegiatan dan komitmen;
  - (3). Pembentukan *National Platform* hendaknya dapat dilakukan melalui proses yang partisipatif dan konsultatif dengan melibatkan berbagai lapisan para pihak antara lain K/L, donor/komunitas internasional/NGO, perguruan tinggi, pemerintah daerah, media massa, sektor swasta serta kelompok-kelompok sosial lainnya yang mempunyai komitmen dan perhatian terhadap isu pengurangan risiko bencana di Indonesia;
  - (4). Hendaknya *National Platform* dapat menjadi Komite Pengarah yang berfungsi untuk membahas dan menyusun RAN-PRB sehingga nantinya RAN-PRB itu merupakan subsistem RPB;
  - (5). Mendorong terbentuknya pelebagaan evaluasi yang dibentuk secara khusus pada masing-masing para pihak pelaksana RAN-PRB sehingga mendorong para pihak untuk 'mengisi' RAN di samping juga ikut melakukan 'self-evaluation' dengan merujuk pada laporan evaluasi ini;
  - (6). Mendukung untuk penggunaan metodologi *impact* dan *stock opname* yang dilakukan melalui sensus pada evaluasi RAN-PRB berikutnya sehingga hasil yang didapatkan tidak hanya fokus pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen RAN-PRB melainkan pada dampaknya yang ada di masyarakat luas;
  - (7). Pentingnya penetapan Hari Penanggulangan Bencana di Indonesia, seperti penetapan 26 Desember sebagai Hari Kesiapsiagaan Tsunami sehingga akan semakin rutinnya dilaksanakan kegiatan PRB dalam masyarakat;
  - (8). Hendaknya RAN-PRB 2010-2012 merupakan turunan dari RPB dan menjadi rujukan utama bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB;
  - (9). Pelaksana program/kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia terdiri dari berbagai para pihak, antara lain, kementerian/lembaga, donor/komunitas internasional, NGO, perguruan tinggi, media massa dan korporat. Secara umum dan proritas, pemetaan aktor pelaku pengurangan risiko bencana dapat digambarkan, pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Pemetaan Peran Pelaku Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia

| Kementerian/<br>Lembaga   | Donor/<br>Komunitas<br>Internasional  | NGO   | Perguruan<br>tinggi   | Media Massa   | Korporat   |
|---|---|---|---|---|--|
| Membuat dan memfasilitasi berbagai kerangka kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan PRB di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai arahan strategis bagi semua para pihak | Mendorong peran dan kiprah dunia internasional dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan PRB di Indonesia sehingga dapat diperoleh akses dan membangun kerja sama yang sinergis pada tingkat global | Mengawal dan melakukan pendampingan pelaksanaan program/kegiatan PRB sampai pada tingkat bawah melalui pendekatan berbasis masyarakat | Mengembangkan kajian akademis dari berbagai disiplin keilmuan terhadap program/kegiatan PRB | Melakukan penyebarluasan informasi mengenai program/kegiatan PRB secara masif dan terstruktur kepada seluruh lapisan sosial | Mendukung kebijakan PRB melalui program perusahaan yang dialokasikan dari keuntungan, seperti keberadaan program CSR |

#### 5.4.2. Rekomendasi Berdasarkan Prioritas

Terdapat beberapa rekomendasi yang didasarkan pada hasil evaluasi RAN-PRB, yaitu :

##### 1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.

- (1). Diperlukannya percepatan penyusunan kebijakan turunan dan pedoman teknis yang merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PRB;
- (2). Perlu memasukkan urusan penanggulangan bencana menjadi urusan wajib bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah agar konsisten dengan Undang-undang PB. Segera merumuskan pedoman, ketentuan-ketentuan/persyaratan teknis, SNI secara kelembagaan untuk proses PRB oleh daerah, serta sosialisasinya ke daerah untuk realisasi Undang-undang PB;
- (3). Perlunya keseriusan K/L dalam mengintegrasikan program/kegiatan PRB ke dalam salah satu prioritas kebijakan kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (4). Mendorong komitmen donor/komunitas internasional/ NGO dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PRB dengan memperhatikan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional;

- (5). Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah dalam penyusunan program/kegiatan PRB pada masing-masing instansi melalui beberapa bentuk kegiatan antara lain, pelatihan manajemen bencana, pengolahan data bencana, TOT serta mendirikan program studi lanjut atau pascasarjana mitigasi/manajemen bencana dan menjadikan kegiatan mitigasi/manajemen bencana sebagai profesi yang setara dan lain sebagainya;
- (6). Pentingnya Rencana Penanggulangan Bencana yang berupa rencana induk dengan landasan regulasi yang kuat, dapat menjadi acuan program/kegiatan PRB termasuk oleh lembaga BPBD di daerah;
- (7). Perlu dirintis suatu proses/mechanisme kontrol dan jaminan kualitas terhadap aktivitas komponen-komponen dalam PRB secara lebih profesional karena PRB merupakan suatu investasi;
- (8). Pentingnya penyelenggaraan kegiatan PRB yang berbasis masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan, misalnya kelompok kerja masyarakat dan kelompok belajar masyarakat;
- (9). Perlu disusun panduan dalam penyusunan RAD-PRB seperti halnya rencana tata ruang wilayah dalam rangka menunjukkan tingkat komitmen dan perencanaan antara pusat dan daerah.

## **2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.**

- (1). Meningkatkan penguasaan pengembangan aplikasi pengkajian risiko bencana pada seluruh para pihak di tingkat pusat dan daerah melalui riset secara terpadu untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- (2). Percepatan terhadap proses pelaksanaan agar setiap daerah melakukan kajian risiko dan menyusun DRRMP sesuai arahan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007;
- (3). Mengembangkan inovasi dan mengintensifkan kegiatan pengembangan dan pengenalan terhadap berbagai sistem peringatan dini yang berbasis teknologi tepat guna dalam rangka kesiapsiagaan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat nasional dan lokal;
- (4). Mengoptimalkan kegiatan pemetaan dan sosialisasi program/kegiatan RAN-PRB terutama pada daerah rawan bencana;
- (5). Meningkatkan peran BNPB dalam analisis risiko bencana

dan perlunya segera menyusun pedoman yang tepat untuk analisis risiko bencana, karena pemangku kepentingan lainnya (K/L, donor/NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat) menggunakan metodologi yang berbeda-beda;

- (6). Meningkatkan profesionalisme dan penguatan kapasitas aparatur di tingkat pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem peringatan dini ;
- (7). Perlunya pelaksanaan standardisasi yang dilakukan para pihak terhadap sistem evakuasi yang aman, identifikasi jalur penyelamatan, pelatihan dan dilengkapi dengan simulasi dalam menghadapi risiko regional darurat;
- (8). Perlunya prioritas dalam pengembangan peringatan bencana seperti peta rawan bencana sebagai acuan secara nasional dan dikembangkan secara terintegrasi dengan mengintegrasikan komponen-komponen/data yang ada di berbagai K/L untuk menjadi input dasar bagi daerah dalam pengembangan peta risiko bencana di daerah. Hal ini merupakan konsensus nasional;
- (9). Pentingnya keberadaan koordinator secara nasional untuk berbagai kegiatan yang memerlukan dukungan dari berbagai K/L. Pembentukan Komite Teknis Nasional dalam penyusunan pedoman, contohnya Tim Penyusun Pedoman Analisis Risiko Bencana Alam (TPPARBA). Perlu TC lainnya seperti, Peta Rawan Bencana, *Building Codes*, serta pedoman-pedoman atau ketentuan-ketentuan teknis lainnya sehingga instansi terkait di K/L dapat terus berkoordinasi untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan RAN-PRB yang sudah dirumuskan dalam rangka identifikasi risiko bencana;
- (10). Perlunya penerapan dan peningkatan ilmu dan teknologi kajian risiko untuk berbagai elemen atas risiko dengan karakteristik yang spesifik dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemetaan risiko.

### **3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.**

- (1). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap aparatur dan masyarakat dalam merespons dan memahami aplikasi teknologi informasi terhadap risiko bencana;
- (2). Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah dan terstruktur;

- (3). Menciptakan variasi dalam pendidikan publik tentang risiko bencana melalui peta maupun pengembangan data dan informasi bencana untuk mengetahui grafik perkembangan bencana;
- (4). Pengarusutamaan PRB ke dalam pendidikan formal dan nonformal melalui formulasi kurikulum pendidikan sesuai dengan karakteristik multidisiplin ilmu dan lokalitas daerah masing-masing;
- (5). Banyaknya harapan dari para akademisi supaya perguruan tinggi dapat dijadikan mitra yang potensial bersama pemangku kepentingan lainnya dalam PRB;
- (6). Perguruan tinggi di daerah perlu didorong untuk melakukan analisis risiko bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Analisis risiko bencana sebaiknya dibuat oleh orang yang kompeten yaitu dari akademisi perguruan tinggi;
- (7). Perlu didukung beberapa hal dalam rangka penguatan kelembagaan di bidang pendidikan antara lain, di perguruan tinggi pada jenjang S2 diperlukan mata kuliah mengenai kebencanaan. Adanya asosiasi profesi di daerah yang akan mengembangkan teknologi penilaian risiko di daerahnya masing-masing. Hal ini harus dimulai dari sekarang karena hasilnya akan terlihat pada beberapa tahun ke depan;
- (8). Mengembangkan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penelitian yang berbasis pengurangan risiko bencana melalui pembentukan lembaga riset kebencanaan di Indonesia;
- (9). Meningkatkan kepedulian publik terhadap isu pengurangan risiko bencana melalui keterlibatan media massa dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengetahuan publik terhadap penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia.

#### **4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana**

- (1). Mempercepat penyusunan dokumen strategi nasional dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara nasional pada kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2). Perlunya upaya-upaya strategis penguatan kapasitas dalam meminimalkan dampak, membangun cadangan pangan, penganekaragaman sumber produksi, penganekaragaman sumber pemasukan, membangun jaringan dukungan sosial

serta adaptasi pascakejadian;

- (3). Pengarusutamaan konsep pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan program-program pemerintah, pembangunan daerah dan masyarakat, seperti RPJMD, RKPD, RTRW, di tingkat provinsi/kabupaten/kota, peraturan-peraturan, *building codes*, pedoman, atau Manual Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Tahan Gempa;
- (4). Meningkatkan mekanisme pengawasan pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang, *building codes*, dan hal-hal lain yang mengacu pada pengurangan risiko bencana;
- (5). Mengkaji ulang tata ruang berbasis risiko bencana setelah dilakukan kegiatan kajian risiko, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis ancaman dan risiko ;
- (6). Secara spesifik perlunya prioritas terhadap bangunan publik (rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya) yang aman terhadap berbagai bahaya (gempa, tsunami, dan lain sebagainya).

**5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif**

- (1). Meningkatkan kapasitas kepemimpinan lokal, serta meningkatkan kesadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, gladi tsunami, rencana kontijensi, kegiatan CBDRM, kesiapsiagaan melalui pengetahuan dan menyiapkan rumah tahan gempa, dan lain sebagainya;
- (2). Meningkatkan koordinasi antarperangkat pemerintah daerah dalam menangani bencana lintas daerah melalui kesepakatan atau kerja sama penanganan bencana antar daerah serta standardisasi kapasitas teknis para pelaku tanggap darurat melalui kerja sama dengan pusat operasional daerah-daerah rawan bencana;
- (3). Perlu sosialisasi yang terkoordinasi dan komunikasi risiko secara lebih intensif untuk keperluan perumusan rencana aksi kesiapsiagaan dan respons darurat yang lebih efektif di daerah untuk instansi pemerintah dan komunitas terkait;
- (4). Pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di setiap tingkatan;



- (5). Perlunya membentuk dan mengoperasionalkan *platform* atau forum pengurangan risiko bencana baik di pusat maupun daerah yang mendampingi pelaksanaan rencana aksi;
- (6). Perlunya mekanisme khusus untuk penyaluran dana pada tahap tanggap darurat untuk menghindari keterlambatan dan adanya kesalahan prosedur;
- (7). Meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara membangun institusi kelembagaan penanganan bencana di tingkat daerah dan peningkatan SDM.





# **BAB 6**

## **RENCANA AKSI**

### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **6.1. PRIORITAS PENANGANAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS RISIKO BENCANA**

Prioritas penanganan ancaman bencana dalam RAN-PRB 2010-2012 ini didasarkan atas penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini dan perkiraan ancaman bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana. Analisis risiko tersebut merupakan analisis yang didasarkan pada analisis *hazard*/ancaman, kerentanan dan kemampuan menangani bencana/kapasitas. Selanjutnya analisis ini akan memberikan gambaran atas kemungkinan terjadinya bencana pada beberapa tahun yang akan datang di Indonesia, terutama untuk tiga tahun ke depan.

Berdasarkan penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini dan hasil analisis risiko bencana tersebut, beberapa ancaman bencana yang dominan di Indonesia, yaitu :

- (1). Gempa bumi dan tsunami;
- (2). Banjir;
- (3). Tanah longsor/gerakan tanah;
- (4). Letusan gunung api; dan
- (5). Kekeringan/kebakaran hutan.

#### **6.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pendekatan penyusunan RAN-PRB 2010-2012 dikaitkan terhadap prioritas yang tercantum di HFA serta program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

##### **1. Kelompok Prioritas**

Kelompok prioritas yang dimaksud adalah lima prioritas aksi yang terdapat dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA) atau Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 tentang Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana. Adapun lima prioritas aksi tersebut adalah :

- (1). Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan;

- (2). Identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini;
- (3). Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan;
- (4). Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana;
- (5). Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat.

Kelompok prioritas ini selanjutnya akan menjadi acuan dari program.

## 2. Program

Program-program yang terdapat dalam matriks RAN-PRB 2010-2012 merupakan program-program yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun program-program tersebut adalah:

- (1). Penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan;
- (2). Perencanaan penanggulangan bencana;
- (3). Penelitian, pendidikan dan pelatihan;
- (4). Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- (5). Pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6). Peringatan dini;
- (7). Kesiapsiagaan.

## 3. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks RAN-PRB 2010-2012 juga merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- (1). Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya;
- (2). Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- (3). Melakukan analisis risiko bencana;
- (4). Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana;
- (5). Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan;
- (6). Pengamatan gejala bencana;
- (7). Melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana;

- (8). Pengambilan keputusan status ancaman bencana;
- (9). Penyebarluasan informasi peringatan bencana;
- (10). Pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana;
- (11). Pengembangan budaya sadar bencana;
- (12). Pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana;
- (13). Penyelenggaraan penyuluhan, dan diklat;
- (14). Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- (15). Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan PB;
- (16). Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- (17). Melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA yang berpotensi menimbulkan bencana;
- (18). Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang;
- (19). Pengelolaan lingkungan hidup;
- (20). Pengaturan pembangunan dan tata bangunan;
- (21). Pembangunan sarana dan prasarana;
- (22). Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- (23). Perencanaan keterlibatan dalam PB;
- (24). Peningkatan komitmen terhadap pelaku PB;
- (25). Penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- (26). Penyusunan mekanisme kesiapan dan PRB;
- (27). Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- (28). Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- (29). Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- (30). Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- (31). Penyiapan lokasi evakuasi;
- (32). Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- (33). Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Komponen/kolom matriks RAN-PRB 2010-2012 terdiri dari kelompok prioritas, program, kegiatan, sasaran, lokasi, pendanaan, dan pelaksana/koordinator.

### 6.3. RAN-PRB 2010-2012

RAN-PRB 2010-2012 ini merupakan gambaran secara menyeluruh rencana aksi dari semua para pihak, baik pemerintah, NGO/LSM, masyarakat internasional, PMI, media maupun swasta. RAN-PRB 2010-2012 disajikan dalam bentuk matriks dengan delapan kolom, yaitu:

- (1). Nomor;
- (2). Kegiatan;
- (3). Sasaran;
- (4). Lokasi;
- (5). Indikator kinerja;
- (6). Pendanaan;
- (7). Sumber Pendanaan;
- (8). Pelaksana.

Kolom-kolom di atas merupakan penjabaran dari 5 (lima) prioritas HFA dan 7 (tujuh) program yang mengacu kepada Kerangka Aksi Hyogo dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007,

Tabel 6.1. Penjelasan Matriks RAN-PRB

| Nomor Kolom | PENJELASAN  |
|-------------|---|
| 1           | Nomor<br>Nomor menunjukkan jumlah kegiatan dalam satu program   |
| 2           | Kegiatan<br>Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang juga didasarkan atas UU 24/2007 dan PP 21/2008 serta kelompok prioritas HFA       |
| 3           | Sasaran<br>Sasaran merupakan perolehan yang diharapkan dari setiap program dan setiap kegiatan.   |
| 4           | Lokasi<br>Lokasi menunjukkan tempat di mana akan dilaksanakan suatu kegiatan (provinsi/kabupaten/kota)  |
| 5           | Indikator Kinerja<br>Hasil diperoleh dari setiap program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang direncanakan                                     |
| 6           | Indikasi Kebutuhan Pendanaan<br>Anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010, 2011, 2012 secara indikatif                              |
| 7           | Sumber Pendanaan<br>Sumber pendanaan menjelaskan anggaran kegiatan berasal dari APBN atau sumber pendanaan lainnya (hibah, loan, masyarakat). |
| 8           | Pelaksana<br>Instansi yang melaksanakan kegiatan (kementerian/lembaga, LSM, swasta, media, universitas dan masyarakat)                        |

RAN-PRB 2010-2012 ini disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap tiga kelompok para pihak pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh :

- (1). Bappenas dan BNPB untuk kelompok kementerian/lembaga;
- (2). Convergence Group untuk kelompok donor internasional; dan
- (3). *Platform* Nasional untuk kelompok nonpemerintah.

RAN-PRB 2010-2012 dalam bentuk matriks secara lengkap disajikan pada Lampiran 2.

Ringkasan (intisari) RAN-PRB 2010-2012, dapat diinformasikan sebagai berikut :

- (1) Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RAN-PRB 2010-2012 adalah 654 kegiatan, dengan usulan pendanaan untuk 2010 sebesar Rp 16,427 triliun, untuk 2011 sejumlah Rp 11,753 triliun dan Rp 12,599 triliun pada 2012;
- (2) Kegiatan yang paling banyak dilakukan dengan 68 kegiatan adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, dengan total biaya pada 2010 sebesar Rp 267,257 miliar; 2011 sebesar Rp 327,578 miliar dan Rp 346,750 miliar untuk 2012. Bisa dimengerti bahwa urusan pengurangan risiko saat ini belum tersosialisasi baik, sehingga penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas serta kemampuan menjadi sebuah prioritas. Hal ini relevan dengan rekomendasi evaluasi HFA di mana sosialisasi PRB dan peningkatan kapasitas menjadi sangat penting;
- (3) Kegiatan yang paling sedikit dilaksanakan dengan tiga kegiatan adalah pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dan penyiapan lokasi evakuasi;
- (4) Usulan pendanaan untuk kegiatan nonfisik atau bersifat umum lebih besar dari kegiatan fisik, namun demikian dari matriks tersebut menggambarkan bahwa ada semangat untuk meletakkan pengurangan risiko dalam berbagai kegiatan para pihak. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat baik bila di lihat dari jumlah para pihak yang terlibat pada RAN-PRB 2006-2009 dan sekaligus komitmen para pihak untuk meletakkan investasi dalam PRB yang cukup besar.

Rekapitulasi kegiatan RAN-PRB 2010-2012 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.



Tabel 6.2. Rekapitulasi Kegiatan RAN-PRB 2010-2012

| No   | Kegiatan   | Jumlah Kegiatan | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                | Koordinasi   |
|--|--|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
|  |  |                 | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012        |  |
| (1)  | (2)  | (3)             | (4)                          |                |                | (5)  |
| <b>PRIORITAS 1 : PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>    |  |                 |                              |                |                |  |
| <b>Program A : Penguatan Peraturan perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>   |  |                 |                              |                |                |  |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya      | 60              | 204,463                      | 393,458        | 255,261        | BNPB, BAPPENAS, KEMDAGRI   |
| <b>Program B: Perencanaan penanggulangan bencana</b>   |  |                 |                              |                |                |  |
| 1  | Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana                              | 18              | 37,681                       | 36,635         | 42,450         | BNPB, BPPT, LIPI, KESDM, Kem. PU   |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana                                      | 26              | 38,657                       | 45,400         | 52,866         | BNPB, KLH, LIPI, KEMDAGRI, KESDM.  |
| 3  | Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana                       | 11              | 46,966                       | 53,844         | 59,164         | BNPB, Kem. Kelautan & Perikanan, LIPI, KEMDAGRI, Kem. Kehutanan, KESDM, Kem.PU |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan               | 39              | 41,687                       | 37,078         | 38,792         | BNPB, BAPPENAS, KEMDAGRI, Kem. Keuangan  |
|  |  |                 | <b>164,991</b>               | <b>172,956</b> | <b>193,272</b> |  |
| <b>PRIORITAS 2: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |                 |                              |                |                |  |
| <b>Program C : Penelitian, Pendidikan, dan pelatihan</b>   |  |                 |                              |                |                |  |
| 1  | Pengembangan budaya sadar bencana                                      | 22              | 63,482                       | 75,182         | 83,310         | BNPB, Kem.Sosial, Kem. Diknas, LIPI, Kem. Kesehatan, Kem. Kominfo              |
| 2  | Pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana | 10              | 53,425                       | 62,455         | 71,785         | BNPB, BMKG, LIPI, BPPT, Kem. Ristek,   |
| 3  | Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan                  | 68              | 267,257                      | 327,578        | 346,750        | BNPB, Kem. Diknas, Kem. Sosial, Kem. Kominfo                                   |
|  |  |                 | <b>384,165</b>               | <b>465,215</b> | <b>502,345</b> |  |

| No   | Kegiatan   | Jumlah Kegiatan | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                  |                  | Koordinasi  |
|--|--|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|---|
|  |  |                 | Th 2010                      | Th 2011          | Th 2012          |   |
| (1)  | (2)  | (3)             | (4)                          |                  |                  | (5)   |
| <b>PRIORITAS 3 : PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>   |  |                 |                              |                  |                  |   |
| <b>Program D: Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>  |  |                 |                              |                  |                  |   |
| 1  | Pengenalan dan pemantauan risiko bencana   | 22              | 723,693                      | 730,563          | 739,395          | BNPB, BMKG, KESDM, KLH, Kem. Kelautan & Perikanan, LAPAN, Kem. PU   |
| 2  | Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana                                     | 21              | 3,070,187                    | 80,742           | 115,425          | BNPB, Kem. PU, Kem. Kesehatan, KESDM, Kem. Kelautan & Perikanan   |
| 3  | Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana                       | 26              | 58,994                       | 56,711           | 64,077           | BNPB, BMKG, KESDM, LIPI, Kem. Ristek, Kem. Kehutanan, Kem. PU, Bakosurtanal, Kem. Kelautan & Perikanan      |
| 4  | Melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana | 6               | 156,900                      | 194,550          | 223,100          | KLH, Kem. PU, Kem. Kehutanan, Kem. Pertanian  |
| 5  | Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang  | 3               | 61,000                       | 72,000           | 84,000           | Kem. PU, KEMDAGRI, BAPPENAS, Kem. Kehutanan   |
| 6  | Pengelolaan lingkungan hidup   | 30              | 2,059,138                    | 1,394,651        | 1,310,687        | KLH, Kem. Kehutanan, KESDM, Kem. Pertanian  |
| 7  | Pengaturan pembangunan dan tata bangunan   | 9               | 139,517                      | 214,968          | 251,712          | Kem. PU, KEMDAGRI   |
| 8  | Pembangunan sarana dan prasarana   | 65              | 7,179,855                    | 4,737,526        | 5,330,460        | Kem. PU, Kem. Perhubungan, KESDM, Kem. Kehutanan, Kem. Pertanian, Kem. Kelautan & Perikanan, Kem. Kesehatan |
|  |  |                 | <b>13,449,283</b>            | <b>7,481,712</b> | <b>8,118,856</b> |   |
| <b>PRIORITAS 4 : IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |  |                 |                              |                  |                  |   |
| <b>Program E : Peringatan dini</b>   |  |                 |                              |                  |                  |   |
| 1  | Pengamatan gejala bencana  | 23              | 69,244                       | 75,962           | 79,706           | BNPB, Bakosurtanal, BMKG, BPPT, Kem. Kehutanan, KESDM, LAPAN, LIPI, KLH                                     |
| 2  | Melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana   | 20              | 29,609                       | 35,993           | 40,536           | BNPB, Bapeten, BMKG, BPPT, LAPAN dan LIPI, KESDM  |

| No   | Kegiatan   | Jumlah Kegiatan | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                | Koordinasi   |
|--|--|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
|  |  |                 | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012        |  |
| (1)  | (2)  | (3)             | (4)                          |                |                | (5)  |
| 3  | Pengambilan keputusan status ancaman bencana                       | 4               | 28,500                       | 34,100         | 39,200         | BNPB, BMKG, KESDM, KEMDAGRI  |
| 4  | Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana                | 38              | 92,724                       | 97,825         | 108,533        | BNPB, BMKG, KLH, Kem. Kominfo, LAPAN, KESDM, Kem.PU, Kem. Kelautan & Perikanan               |
| 5  | Pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana                      | 6               | 60,265                       | 72,515         | 84,515         | BNPB, BMKG, KESDM, Kem.PU, Kem.Kesehatan, Kem.Kelautan & Perikanan, KEMDAGRI, Kem. Kehutanan |
|  |  |                 | <b>280,342</b>               | <b>316,395</b> | <b>352,490</b> |  |
| <b>PRIORITAS 5 : PENGUATAN KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA PADA SEMUA TINGKATAN MASYARAKAT</b> |  |                 |                              |                |                |  |
| <b>Program F : Peningkatan Partisipasi dan kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>              |  |                 |                              |                |                |  |
| 1  | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat                | 20              | 42,321                       | 38,292         | 48,707         | BNPB, Kem. Sosial, KESDM, Kem. Diknas, LIPI, Kem.Kominfo, KEMDAGRI                           |
| 2  | Perencanaan keterlibatan dalam penanggulangan bencana              | 11              | 16,381                       | 18,601         | 21,594         | Kemenko Kesra, BNPB, Kem.Sosial, BAPPENAS, Kem. Pertahanan                                   |
| 3  | Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana        | 20              | 33,697                       | 35,914         | 39,617         | Kemenko Kesra, BNPB, KEMDAGRI, Kem. Sosial, Kem. Kominfo, Kem                                |
| 4  | Penguatan ketahanan sosial masyarakat                              | 15              | 81,207                       | 82,282         | 84,115         | Kemenko Kesra, Kem. Sosial, Kem. Pertanian, KEMDAGRI, BNPB                                   |
|  |  |                 | <b>173,606</b>               | <b>175,089</b> | <b>194,033</b> |  |
| <b>Program G: kesiapsiagaan</b>  |  |                 |                              |                |                |  |
| 1  | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana    | 17              | 31,142                       | 34,102         | 37,286         | Kemenko Kesra, BNPB, KEMDAGRI  |
| 2  | Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana | 9               | 30,245                       | 36,145         | 42,145         | BNPB, KEMDAGRI, Kem. Sosial, Kem. Ristek, Kem. Kelautan & Perikanan, BPPT, KESDM             |

| No                | Kegiatan   | Jumlah Kegiatan | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                   |                   | Koordinasi   |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                   |  |                 | Th 2010                      | Th 2011           | Th 2012           |  |
| (1)               | (2)  | (3)             | (4)                          |                   |                   | (5)  |
| 3                 | Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini                                   | 7               | 26,500                       | 31,800            | 36,800            | BNPB, BPPT, KESDM, BMKG, Kem. Ristek   |
| 4                 | Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar                                    | 8               | 250,198                      | 299,477           | 350,510           | Kemenko Kesra, BNPB, Kem. Sosial, Kem. Diknas, Kem. Kesehatan, KEMDAGRI, Kem. PU     |
| 5                 | Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat              | 7               | 246,596                      | 294,200           | 339,200           | BNPB, KEMDAGRI, Kem. Sosial, Kem. Pertahanan, KESDM, Kem. Kelautan & Perikanan, LIPI |
| 6                 | Penyiapan lokasi evakuasi  | 3               | 675,500                      | 1,438,171         | 1,450,171         | BNPB, Kem. PU, Kem. Perhubungan, KESDM, Kem. Sosial, Kem. Kesehatan                  |
| 7                 | Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana           | 6               | 200,100                      | 240,100           | 280,100           | BNPB, Kem. Pertahanan, Kem. Sosial, Kem. Kesehatan                                   |
| 8                 | Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana | 4               | 405,514                      | 480,814           | 560,900           | BNPB, Kem. Sosial, Kem. PU, Kem. Pertahanan, Kem. Perhubungan                        |
|                   |  |                 | 1,865,795                    | 2,854,810         | 3,097,112         |  |
| <b>TOTAL DANA</b> |  |                 | <b>16,618,149</b>            | <b>11,962,113</b> | <b>12,821,514</b> |  |

#### 6.4. PENGELOMPOKAN RENCANA AKSI NASIONAL PRB

RAN-PRB 2010-2012 antara lain dapat dikelompokkan berdasarkan pelaksanaannya yaitu Kementerian/Lembaga. Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

- (1). Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RAN-PRB 2010-2012 yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga adalah 323 kegiatan, dengan usulan pendanaan untuk 2010 sebesar Rp 10,556 triliun; untuk 2011 sejumlah Rp 10,782 triliun dan Rp 11,835 triliun untuk 2012;

- (2). Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana merupakan program yang paling banyak dilaksanakan Kementerian/Lembaga di antara program lainnya, dengan 105 kegiatan. Usulan pendanaan untuk 2010 sebesar Rp 7,663 triliun, untuk 2011 sebesar Rp 6,665 triliun dan pada 2012 sebesar Rp 7,298 triliun;
- (3). Kegiatan yang paling sedikit dilaksanakan Kementerian/Lembaga dalam RAN-PRB 2010-2012 dengan 1 kegiatan saja adalah kegiatan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat dan kegiatan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- (4). Beberapa K/L belum menentukan secara pasti lokasi kegiatan/wilayah dari rencana kegiatan yang diusulkannya termasuk beberapa kegiatan juga belum terdapat indikasi pendanaannya.

Seluruh kegiatan RAN-PRB 2010-2012 ini berdasarkan kementerian/ lembaga disajikan pada Lampiran 3.

## **6.5. MATRIKS KEGIATAN PRB YANG BELUM TERINDIKASI DANA DAN PELAKSANAANNYA**

Hasil evaluasi terhadap usulan kegiatan RAN-PRB yang disampaikan K/L, pemerintah daerah, LSM, dan kelompok donor, banyak kegiatan yang semestinya penting untuk dilaksanakan pada periode 2010-2012, tetapi belum diagendakan mengingat belum menjadi rencana strategis (renstra) dari masing-masing stakeholders tersebut. Untuk itu Sub Bab ini dimaksudkan menampung :

- (1). Usulan Pemerintah daerah terhadap kegiatan PRB di wilayahnya, yang belum terindikasikan oleh kementerian/ lembaga karena belum ada dalam Renstranya;
- (2). Hasil diskusi FGD baik dalam forum K/L, PLANAS, Convergence Group, maupun forum LSM lainnya terindikasi banyak kegiatan PRB yang semestinya dilakukan dalam periode 2010-2012 tetapi belum tercantum dalam matriks RAN-PRB 2010-2012.

Mengatasi dua kondisi diatas, maka diperlukan rencana aksi untuk mengakomodasikan kegiatan PRB yang belum terindikasi dana dan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada semua para pihak, termasuk para donor untuk melaksanakan kegiatan tersebut apabila dianggap penting dan pendanaannya telah diperoleh.

Matriks RAN-PRB 2010-2012 untuk kegiatan tersebut selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.









## **BAB 7**

# **PELAKSANAAN**

RAN-PRB 2010-2012 secara garis besar berisi prioritas penanganan, rencana aksi, mekanisme pelaksanaan, kelembagaan, indikator keberhasilan, pedoman pemantauan dan evaluasi serta sumber pendanaannya.

Dokumen ini menghasilkan rencana aksi pengurangan risiko bencana dari berbagai lembaga/instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang terintegrasi dalam suatu matriks rencana aksi. Rencana ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RTRW, perubahan iklim (RAN-PI), dan pengurangan kemiskinan (RAN-PK) dan lain-lain. RAN-PRB yang disusun dengan tujuan mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan program pengurangan risiko, merupakan penjabaran rencana nasional penanggulangan bencana yang mengacu kepada RPJM dan Renstra dari masing-masing kementerian/lembaga.

### **7.1. MEKANISME**

RAN-PRB 2010-2012 disusun sebagai upaya memberikan komitmen dan pengurangan risiko di tingkat nasional, komitmen global dalam PRB sesuai dengan HFA 2005-2015 serta berbagai komitmen internasional lainnya.

Berikut adalah mekanisme pelaksanaannya:

- (1). RAN-PRB 2010-2012 merupakan satu kesatuan dengan Renas-PB yang memiliki jangka waktu lima tahun, sedangkan RAN-PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional dan berjangka waktu tiga tahun;
- (2). Melalui koordinasi BNPB dan Bappenas setiap tahun, rencana tahunan RAN-PRB 2010-2012 dibuat. Selanjutnya dalam koordinasi sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana tahunan ini akan dimasukkan sebagai bagian dari RKP dan Rencana Kerja dari kementerian/lembaga yang terkait dengan program pengurangan risiko bencana. Rencana Kerja Pemerintah merupakan acuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan APBN. Karena itu, bagi kementerian/lembaga, RAN-PRB mempunyai kekuatan agar programnya konsisten dengan RAN-PRB 2010-2012;

- (3). Sedangkan bagi nonpemerintah yang meliputi PMI, media, swasta, dan LSM, RAN-PRB merupakan sebuah komitmen program PRB yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun mendatang; dan
- (4). Mekanisme kegiatan tahunan baik dalam pelaksanaan maupun evaluasinya akan dikoordinasikan Bappenas, BNPB, dan PLANAS.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam matriks rencana aksi ini dilakukan oleh lembaga/instansi terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyelenggaraan perencanaan tahunan dikoordinasikan BNPB dan Bappenas, sedangkan koordinasi pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan BNPB.

## 7.2. KELEMBAGAAN

Pengarusutamaan PRB dalam proses perencanaan pembangunan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RAN-PRB 2010-2012 disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi unsur pemerintah, nonpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang dikoordinasikan BNPB dan Bappenas. Legalisasi RAN-PRB ditetapkan melalui Keputusan Kepada BNPB. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB sedangkan implementasinya dilakukan oleh seluruh lembaga/institusi terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah sesuai dengan matriks rencana aksinya.

Dalam melaksanakan rencana aksi ini bentuk pengaturan terhadap kelembagaannya adalah:

- (1). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RAN-PRB akan ditetapkan kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2). PLANAS merupakan *multistakeholders* yang memiliki jejaring sehingga akan memperkuat pelaksanaan rencana aksi ini. Para pihak yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga internasional, lembaga lokal, dan organisasi sosial lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.
- (3). Dalam memberdayakan PLANAS sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan RAN-PRB secara "*peer-process review*", Panitia Pengarah RAN-PRB yang sudah dibentuk untuk proses penyusunan RAN-PRB

2010-2012 berkewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB tersebut dilaksanakan secara berkala dan sistematis di dalam mekanisme PLANAS. Selain itu, masukan-masukan spesifik dari para pakar lintas disiplin yang tergabung dalam Dewan Pengarah BNPB dan BPBD terkait pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012 akan dihimpun secara sistematis melalui proses komunikasi berkala antara Panitia Pengarah RAN-PRB dan Dewan Pengarah BNPB di tingkat pusat, sedangkan pada tingkat daerah, Dewan Pengarah BPBD akan memberikan masukan bagi proses sejenis melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB.

- (4). BNPB, Bappenas dan PLANAS membentuk sekretariat tim koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian RAN PRB dengan membentuk tim pengarah dan tim teknis.

### **7.3. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah:

- (1). Menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2). Melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- (3). Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Konsep penanggulangan bencana telah mengalami perubahan cukup mendasar. Pemaknaan terhadap bencana yang secara konvensional dianggap sebagai kejadian yang tidak dapat dicegah, kemudian mengalami pergeseran. Bencana dianggap dapat diprediksi sebelumnya sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengurangan risikonya. Rentang waktu dan fokus bantuan awalnya hanya berorientasi pada saat tanggap darurat bencana, kemudian dengan paradigma baru pelaksanaan penanganan bencana pada RAN-PRB 2010-2012 menjadi konsep penanggulangan berbasis masyarakat.

Perubahan yang sangat mendasar dari RAN-PRB ini terlihat bahwa manajemen bencana bukan saja pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab setiap orang. Pengarusutamaan partisipasi sangat ditekankan karena pada dasarnya masyarakat lebih memahami kondisi dan bagaimana memperlakukan lingkungannya dengan kearifan yang mereka miliki.

Masyarakat yang semula diposisikan sebagai objek pasif menjadi subjek aktif dan dengan kesadaran diri bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan yaitu pengembangan budaya sadar bencana, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan serta peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat.

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat akan mengarah kepada:

- (1). Melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama masyarakat di kawasan rawan bencana secara mandiri;
- (2). Menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan masyarakat di kawasan rawan bencana pada pihak luar;
- (3). Penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan di kawasan rawan bencana, dan
- (4). Pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya.

Upaya penanggulangan bencana saat ini sudah menjadi perhatian banyak kalangan baik lembaga nonpemerintah, lembaga sosial, media, perusahaan, perguruan tinggi, PMI, PKPU, lembaga donor dan lembaga-lembaga internasional.

#### **7.4. PENDANAAN**

Pendanaan dan pengelolaan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pendanaan pelaksanaan RAN-PRB diperoleh dari APBN, dukungan swasta, dan lembaga donor baik regional maupun internasional. Anggaran yang berasal dari dana APBN dialokasikan secara rutin melalui anggaran dari setiap kementerian/ lembaga untuk menjamin agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penganggaran untuk implementasi RAN-PRB ini bukan merupakan dana "on top" dari renstra kementerian/ lembaga, tetapi dapat dimungkinkan menjadi instrumen untuk pengarusutamaan anggaran yang terkait dengan kepentingan pengurangan risiko bencana. Mekanisme pendanaan yang berasal dari anggaran nonpemerintah diatur sesuai aturan dari masing-masing lembaga atau instansinya.

Pendanaan yang berasal dari APBN dalam rangka penanggulangan bencana mengacu kepada sistem penganggaran yang diatur melalui keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Artinya pelaksanaan program/kegiatan dalam matriks RAN-PRB 2010-2012 harus disesuaikan dengan nomenklatur anggaran yang terkait dengan penanggulangan bencana dari masing-masing kementerian/lembaga mengacu kepada dokumen RKP.

Perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif diharapkan akan mampu mengurangi risiko dari setiap kejadian bencana. Bagi Indonesia yang terletak di kawasan dengan risiko bencana besar yang tinggi, maka perlu dibangun ketahanan fiskal dan keuangan yang bertumpu pada adanya strategi pembiayaan yang bervariasi sesuai dengan frekuensi dan tingkat keseriusan bencana. Risiko bencana yang relatif kecil, sering terjadi dan dapat diprediksi seperti banjir, longsor dan kekeringan dapat dibiayai dari sumber-sumber dana cadangan yang dianggarkan secara rutin. Sedangkan untuk mengantisipasi risiko bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami, maka kombinasi antara penyiapan dana siaga yang diakumulasi dari pencadangan dari anggaran secara rutin (dan dikelola di luar anggaran), serta adanya menggunakan sumber pembiayaan bencana diluar anggaran seperti skema asuransi bencana menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kemitraan pemerintah dengan swasta dalam mengalihkan sebagian risiko ke pasar keuangan. Dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, pengembangan strategi pembiayaan risiko serta asuransi risiko bencana merupakan bagian dari agenda utama pembangunan pengurangan risiko bencana.





01/28/2006 11



01/28/2006 11





## **BAB 8**

# **PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB 2010-2012**

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana sebagaimana tertuang dalam dokumen RAN-PRB 2010-2012 diperlukan arahan dan pedoman pelaksanaan dimaksud. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin pencapaian pelaksanaan prioritas, program, dan kegiatan yang terdapat dalam RAN-PRB 2010-2012. Hasil pelaksanaan kegiatan ini akan dapat memberikan masukan, saran dan rekomendasi bagi berbagai para pihak untuk melakukan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Selain itu, dari hasil pemantauan dan evaluasi ini juga dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan dalam rangka penyusunan RAN-PRB selanjutnya. Kegiatan pemantauan penyelenggaraan PRB diperlukan sebagai upaya untuk memantau terus-menerus proses pelaksanaan PRB di Indonesia. Sedangkan kegiatan evaluasi penyelenggaraan PRB dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PRB.

Di dalam penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini tidak terlepas dari beberapa kerangka regulasi dan pedoman lainnya, di antaranya:

- (1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- (2). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- (3). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (4). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (5). Kerangka Aksi Hyogo beserta indikatornya.

### **8.1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan RAN-PRB 2010-2012 ini dilakukan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan

dampak bencana. Tujuan penyelenggaraan RAN-PRB ini pun mengacu kepada kerangka regulasi yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia.

Sejalan dengan itu, di dalam Kerangka Aksi Hyogo, terdapat tiga tujuan strategis dalam rangka PRB, yaitu:

- (1). Integrasi yang lebih efektif akan pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan pada semua tingkat dengan penekanan khusus pada pencegahan, penanganan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pengurangan risiko kerentanan terhadap bencana;
- (2). Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat, terutama pada tingkat masyarakat sehingga secara sistematis dapat meningkatkan ketahanan terhadap bahaya; dan
- (3). Perpaduan sistematis dalam perancangan konsep pendekatan pengurangan risiko ke dalam pelaksanaan program kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat, tanggapan, dan proses pemulihan dalam rangka rekonstruksi masyarakat yang terkena dampak.

Di samping itu, maksud pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2010-2012 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari kelompok prioritas, program, dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam perencanaan para pihak terkait. Hal lain yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012 dari aspek efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan, indikator, dan sasaran kinerja keluaran untuk setiap kegiatan.

## **8.2. METODOLOGI**

### **8.2.1. Tahapan Proses Evaluasi dan Kerangka Kerja Logis**

Tahapan, alur dan proses dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB tahun 2010-2012 dalam kerangka kerja logis dapat dibagi ke dalam tiga tahapan sebagai berikut:

#### **(1). Basis Evaluasi**

Rujukan atau referensi utama atas dokumen RAN-PRB didasarkan kepada HFA sebagai bentuk komitmen global dalam rangka pengurangan risiko bencana di Indonesia. Selain itu, rujukan utama lainnya didasarkan kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Basis evaluasi secara langsung didasarkan kepada dokumen RAN-PRB ini.

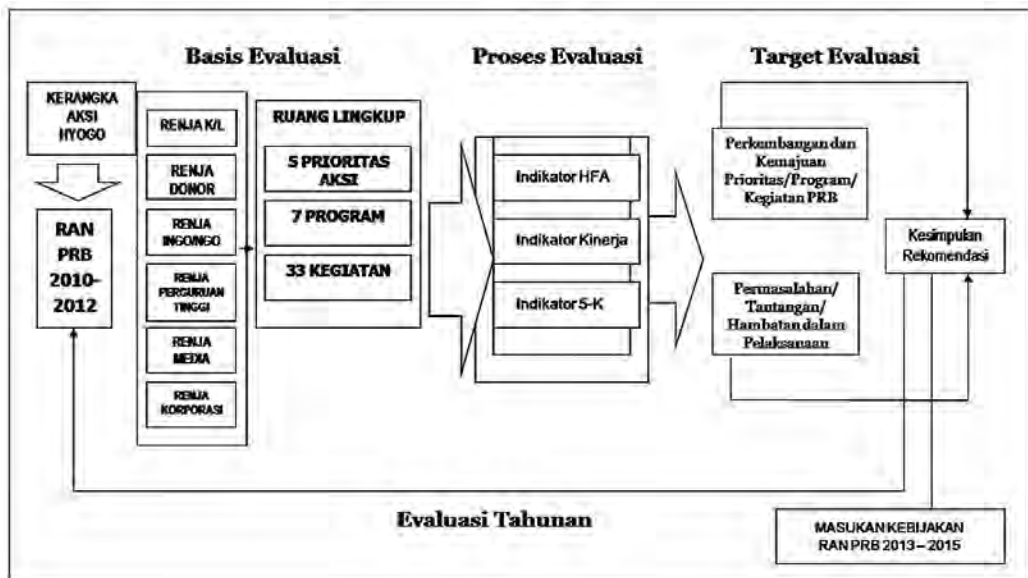
**(2). Proses Evaluasi**

Selanjutnya, basis evaluasi tersebut akan dievaluasi dengan melihat pada evaluasi kinerja yang terdiri dari efektifitas, efisiensi, *input*, *output*, *benefit* dan *outcome*. Kemudian akan dilakukan penilaian dan analisis pelaksanaan RAN-PRB dengan menggunakan lima aspek evaluasi beserta indikatornya yang terdiri dari aspek konsistensi, koordinasi, kapasitas, konsultasi dan keberlanjutan. Selain itu, akan dinilai juga dari perspektif indikator kemajuan yang terdapat dalam HFA.

**(3). Target Evaluasi**

Dari hasil proses evaluasi ini diharapkan tercapai target evaluasi yang fokus kepada kemajuan pelaksanaan RAN-PRB dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Pada akhir pelaksanaan kegiatan evaluasi akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana. Evaluasi itu diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan RAN-PRB 2013-2015.

Dari ketiga tahapan proses pemantauan dan evaluasi yang sudah dijelaskan di atas, kerangka kerja logis untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB dapat dilihat pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1. Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi RAN-PRB

### 8.2.2 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB terdiri dari ruang lingkup berdasarkan prioritas aksi dalam HFA, program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait penanggulangan bencana.

(1). Kelompok Prioritas

Kelompok prioritas yang dimaksud adalah lima prioritas aksi yang terdapat dalam *Hyogo Framework for Action* atau Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 tentang Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana.

(2). Program

Program-program yang terdapat dalam matriks Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 merupakan program-program yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(3). Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 juga merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

### 8.2.3 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Beberapa teknik pengumpulan data dan informasi baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2010-2012, diuraikan sebagai berikut:

- (1). **Peninjauan terhadap dokumen perencanaan**, antara lain perencanaan kementerian/lembaga, komunitas internasional, *Nongovernmental Organization/International Non-Governmental Organization* (NGO/INGO), perguruan tinggi, media massa dan perusahaan;
- (2). **Peninjauan terhadap regulasi** yang terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia yang diterbitkan oleh berbagai para pihak terkait;
- (3). **Peninjauan terhadap laporan** para pihak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Beberapa bentuk laporan atau publikasi yang dijadikan sebagai sumber tinjauan, antara lain laporan tahunan lembaga, buku, majalah, *newsletter*, komik, dan lain-lain;
- (4). **Konsultasi** dengan para pihak terkait melalui proses dialog dan wawancara mendalam secara terstruktur dengan menggunakan instrumen yang sudah dirancang dan didesain sesuai dengan tujuan dan maksud konsultasi;
- (5). **Rapat/Forum Koordinasi** melalui berbagai pertemuan dengan para pihak yang melaksanakan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam rangka memperoleh kemajuan, permasalahan, hambatan, kendala dan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana;
- (6). **Diskusi Kelompok Terarah/Lokakarya** dalam rangka mendiskusikan dan mengkaji secara seksama dalam sebuah forum mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Kegiatan FGD atau Lokakarya ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan yang terdapat dalam dokumen RAN-PRB;

- (7). **Observasi** yaitu proses kunjungan dan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang terkait pengurangan risiko bencana. Melalui proses ini akan didapatkan informasi riil di lapangan sehingga diperoleh gambaran pelaksanaan yang menyangkut kemajuan pelaksanaan kegiatan dan berbagai permasalahan dalam implementasi;
- (8). **Survei** adalah suatu pendekatan kuantitatif dalam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana. Untuk teknik *sampling* dan berbagai prosedur dalam pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik survei yang akan dilakukan.

#### 8.2.4. Kerangka Waktu

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB mengacu kepada prosedur dan kewenangan pada masing-masing instansi. Adapun prosedur umum yang dapat digunakan adalah:

- (1). Pimpinan masing-masing lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB kepada kepala BNPB dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat dua bulan setelah tahun berjalan berakhir;
- (2). Kepala BNPB bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB;
- (3). Kepala BNPB dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan hasil evaluasi RAN-PRB guna penyusunan rancangan RAN-PRB berikutnya;
- (4). Evaluasi pelaksanaan RAN-PRB dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (5). Evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program;
- (6). Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan transparan.

### **8.3. INDIKATOR EVALUASI**

Di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB akan dikombinasikan berbagai indikator dalam RAN-PRB ini. Terdapat tiga kelompok indikator yang dapat dipergunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini, yaitu indikator berdasarkan prioritas aksi HFA, indikator kinerja pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan indikator berdasarkan aspek 5K (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan).

Ketiga kelompok indikator ini saling mengisi dan saling mendukung. Indikator HFA menekankan kepada penilaian hasil (outcome), Indikator 5K lebih menekankan kepada prosesnya sedangkan indikator kinerja lebih menekankan kepada keluaran (output). Dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tahapannya. Dengan demikian hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB ini dapat diperoleh dari analisis yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Unit analisis pemantauan dan evaluasi dilakukan sampai pada tingkat kegiatan, sesuai dengan penjabaran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berjumlah 33 kegiatan yang dikelompokkan ke dalam tujuh program dan lima prioritas aksi HFA.

#### **8.3.1. Indikator Program Prioritas Berdasarkan HFA**

Hasil dari indikator Prioritas Aksi HFA, dapat dijadikan alat analisis untuk melihat pada masing-masing lima prioritas dalam dokumen RAN-PRB. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.



Tabel 8.1. Indikator untuk Prioritas Aksi HFA

| NO | PRIORITAS AKSI   | INDIKATOR   |
|----|--|---|
| 1  | Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan basis kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kerangka kerja kebijakan dan hukum untuk pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dengan tanggung jawab dan kapasitas yang terdesentralisasikan di semua tingkat</li> <li>2. Tersedianya sumber daya yang khusus dan memadai untuk melaksanakan perencanaan-perencanaan dan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana di semua tingkat administratif</li> <li>3. Terjaminnya partisipasi masyarakat dan desentralisasi melalui delegasi kewenangan dan sumber daya ke tingkat daerah</li> <li>4. Berfungsinya satu <i>platform</i> multisektoral di tingkat nasional untuk pengurangan risiko bencana</li> </ol>  |
| 2  | Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pengkajian risiko di tingkat nasional dan daerah yang didasarkan pada data tentang bahaya dan informasi tentang kerentanan dan mencakup pengkajian risiko untuk semua sektor kunci</li> <li>2. Terbangunnya sistem untuk memantau, menyimpan dan menyebarkan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan kunci</li> <li>3. Sistem-sistem peringatan dini untuk semua bahaya utama yang menjangkau ke komunitas-komunitas</li> <li>4. Pengkajian risiko di tingkat nasional dan daerah mempertimbangan risiko-risiko regional/lintas batas dengan mempertimbangkan kerja sama regional dalam pengurangan risiko.</li> </ol>   |
| 3  | Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketangguhan di semua tingkat                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya informasi tentang bencana yang relevan dan terjangkau di semua tingkat untuk semua pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem pertukaran informasi, dll).</li> <li>2. Kurikulum sekolah, bahan-bahan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang relevan mencakup konsep dan praktik tentang pengurangan risiko bencana dan pemulihan bencana.</li> <li>3. Metode-metode dan alat-alat bantu penelitian untuk pengkajian multirisiko serta analisis biaya manfaat dikembangkan dan diperkuat</li> <li>4. Tersedianya strategi kesadaran masyarakat untuk seluruh negeri untuk mendorong budaya ketangguhan terhadap bencana yang menjangkau komunitas perkotaan dan pedesaan.</li> </ol> |

| NO | PRIORITAS AKSI   | INDIKATOR   |
|----|--|---|
| 4  | Mengurangi faktor-faktor risiko mendasar                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan risiko bencana merupakan satu tujuan tak terpisahkan dalam kebijakan dan perencanaan yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam dan tata guna lahan serta adaptasi perubahan iklim.</li> <li>2. Kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan pembangunan sosial sedang dijalankan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko</li> <li>3. Kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan sektor ekonomi dan produktif telah dijalankan untuk mengurangi kerentanan aktivitas-aktivitas ekonomi</li> <li>4. Perencanaan dan pengelolaan permukiman penduduk memadukan elemen-elemen pengurangan risiko bencana, termasuk penerapan aturan-aturan mendirikan bangunan.</li> <li>5. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.</li> <li>6. Tersedia prosedur-prosedur untuk mengkaji dampak risiko yang ditimbulkan proyek-proyek pembangunan besar, khususnya proyek-proyek prasarana</li> </ol> |
| 5. | Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif di semua tingkat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan, kapasitas dan mekanisme teknis dan kelembagaan yang kuat untuk pengelolaan risiko bencana yang menggunakan perspektif pengurangan risiko bencana.</li> <li>2. Rencana-rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana-rencana kontinjensi tersusun di semua tingkat administratif dan dilakukan pelatihan dan simulasi rutin untuk menguji coba dan mengembangkan program-program respons bencana.</li> <li>3. Adanya cadangan dana dan mekanisme kontinjensi untuk mendukung respons dan pemulihan yang efektif jika diperlukan.</li> <li>4. Adanya prosedur-prosedur untuk pertukaran informasi yang relevan selama peristiwa-peristiwa bahaya dan bencana dan untuk melakukan tinjauan kembali pascaperistiwa</li> </ol>   |

### 8.3.2. Indikator Kinerja Pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012

Untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana seperti tertuang dalam dokumen rencana aksi ini maka disusun dan didesain suatu indikator kinerja. Indikator kinerja ini disusun untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan hingga tingkat kegiatan yang dilakukan instansi terkait. Pengelompokan

indikator kinerja ini disesuaikan dengan ruang lingkup dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2010-2012. Indikator kinerja RAN-PRB 2010-2012 untuk setiap pelaksanaan kegiatan didasarkan kepada matriks RAN-PRB untuk masing-masing instansi pelaksanaannya.

### 8.3.3. Indikator Pelaksanaan RAN-PRB Berdasarkan 5-K

Untuk mengevaluasi implementasi pengurangan risiko bencana dalam perspektif yang lebih luas digunakan indikator berdasarkan aspek 5-K yang terdiri dari konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Indikator 5-K ini dapat mempertajam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana seperti yang tertuang dalam dokumen RAN-PRB ini. Melalui evaluasi ini akan diperoleh kondisi dan situasi yang lebih konkret pelaksanaan kebijakan dokumen RAN-PRB.

Penjelasan indikator pelaksanaan RAN-PRB berdasarkan aspek 5-K yaitu sebagai berikut:

- (1). **Konsistensi** pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana dari aspek prioritas aksi, program, dan kegiatan dengan melihat kepada dokumen RAN-PRB Tahun 2010-2012;
- (2). **Koordinasi** antara lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang menghasilkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran;
- (3). **Konsultasi** yang dilakukan dalam rangka menghimpun berbagai masukan, saran, dan kritik dari masyarakat penerima manfaat sebagai upaya partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana;
- (4). **Kapasitas** institusi pelaksana kebijakan pengurangan risiko bencana yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah baik dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pendanaan, aspek personel, maupun aspek pengendalian pengurangan risiko bencana;
- (5). **Keberlanjutan** dalam kerangka kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Berdasarkan rumusan lima aspek evaluasi yang disebutkan di atas, maka disusun beberapa indikator evaluasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap

pelaksanaan kebijakan RAN-PRB, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Evaluasi RAN-PRB Berdasarkan Aspek 5-K

| ASPEK<br>EVALUASI | INDIKATOR  |
|-------------------|--|
| KONSISTENSI       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya konsistensi perencanaan dalam RAN-PRB dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah</li> <li>2. Kuantitas kegiatan dalam RAN-PRB yang tercantum dalam perencanaan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah</li> <li>3. Adanya kesesuaian antara perencanaan dalam RAN-PRB dengan perencanaan pada masing-masing institusi pelaksana pengurangan risiko bencana</li> </ol>   |
| KOORDINASI        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tingkat koordinasi perencanaan yang lebih baik dan lebih terarah antarberbagai lembaga pelaksana pengurangan risiko bencana yang terlibat dalam kebijakan RAN-PRB</li> <li>2. Terwujudnya tingkat koordinasi penganggaran yang lebih baik dan lebih konkret antar berbagai lembaga pelaksana pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Terwujudnya tingkat koordinasi pelaksanaan yang lebih sinkron dan lebih harmonis antar berbagai lembaga pelaksana pengurangan risiko bencana</li> </ol>  |
| KONSULTASI        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya partisipasi masyarakat melalui penyampaian masukan, saran, kritik dan keluhan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam RAN-PRB yang dilakukan oleh berbagai lembaga pelaksana</li> <li>2. Adanya media komunikasi dan informasi bagi masyarakat untuk penyampaian aspirasi dalam upaya mengawal dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan RAN-PRB</li> <li>3. Adanya ketersediaan dan kemudahan akses informasi publik melalui media elektronik dan cetak, <i>website</i> dan internet, kotak pos pengaduan masyarakat dalam rangka mendorong penyebarluasan pelaksanaan kebijakan dalam RAN-PRB</li> </ol>                                     |
| KAPASITAS         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kapasitas kelembagaan pelaksana yang memadai dalam melaksanakan kebijakan RAN-PRB</li> <li>2. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan personalia yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Terpenuhinya kapasitas pendanaan yang cukup untuk dipergunakan pada kegiatan pengurangan risiko bencana</li> <li>4. Adanya sumber pendanaan yang lebih beragam dan saling mendukung masing-masing institusi yang melakukan kegiatan RAN-PRB</li> <li>5. Terpenuhinya kapasitas pelaksana pengurangan risiko bencana dalam hal pengendalian dan pengawasan</li> </ol> |
| KEBERLANJUTAN     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya berbagai kebijakan pengurangan risiko bencana baik dalam jangka menengah dan panjang</li> <li>2. Terciptanya manajemen <i>exit</i> strategi program dan kegiatan bagi pelaksana kebijakan pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Terumuskan berbagai masukan kebijakan dalam rangka penyusunan dokumen RAN-PRB untuk periode selanjutnya.</li> </ol>   |

#### 8.4. PELAKSANA DAN PEMBAGIAN PERAN

Pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAN-PRB akan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana dan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan nasional. Secara umum, gambaran pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1). Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PRB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dengan melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional;
- (2). Pimpinan masing-masing lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait melakukan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB untuk melihat pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) bagi masing-masing prioritas aksi, program dan kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).

Di dalam pemantauan dan evaluasi ini melibatkan para pihak yang menjalankan kegiatan RAN-PRB. Adapun para pihak yang terlibat dalam rencana aksi ini adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas internasional, NGO nasional, NGO internasional, perguruan tinggi, media massa dan perusahaan. Dari berbagai institusi tersebut secara garis besar dikelompokkan ke dalam institusi pemerintah dan institusi nonpemerintah. Peran dari institusi pemerintah secara prinsip adalah memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Selain itu, institusi pemerintah juga dapat memberikan payung hukum terkait pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan dari institusi nonpemerintah dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana berupa masukan dalam rangka perbaikan arahan dan strategi dalam perumusan kebijakan selanjutnya.





## BAB 9

### PENUTUP

Pelaksanaan RAN-PRB tahun 2006-2009 telah selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya RAN-PRB tersebut, meski masih banyak hal yang harus disempurnakan. Keadaan ini tercermin dari pelaksanaan penanggulangan bencana pada lima tahun terakhir ini yang masih berorientasi kepada tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi, serta minimnya upaya pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma ke arah tindakan pengurangan risiko bencana dibandingkan dengan tindakan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi dalam penanggulangan bencana sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tinggal memelihara momentum ini agar lebih kondusif dalam pelaksanaannya.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sangat mendukung kegiatan PRB karena ada keterkaitan yang kuat antara penggunaan ruang dengan besarnya risiko bencana.

Sejalan dengan itu dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih baik dan berorientasi kepada PRB yang sekaligus mengurangi risiko bencana, perlu disusun RAN-PRB yang baru dengan jangka waktu tiga tahun dari tahun 2010-2012, sebagai penjabaran dari Renas PB Tahun 2010-2014. Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 adalah sebagai kelanjutan dari RAN-PRB 2006-2009 yang pelaksanaannya sudah berakhir dan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah perlu disusun RAD-PRB bagi provinsi dan kabupaten/kota yang rawan bencana agar RAN-PRB 2010-2012 berjalan efektif.

Dalam pelaksanaannya, RAN-PRB ini perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yang merupakan rincian dari matriks RAN-PRB 2010-2012. Rencana tahunan akan menjadi bagian dari RKP yang merupakan acuan dari pelaksanaan APBN. Peran serta seluruh para pihak terkait dengan PRB sangat penting dimulai dari tahap perencanaan, penyediaan dana dan terutama dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pandangan PRB sebagai investasi, serta tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi sebagai biaya (*cost*) betul-betul dapat diimplementasikan. Risiko terjadinya bencana pun akan menjadi sangat berkurang.



## SEKAPUR SIRIH

Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 didasarkan atas 2 (dua) hal, *Pertama*, untuk menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007. *Kedua*, RAN-PRB disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. RAN-PRB 2010-2012 menjadi dasar penyelenggaraan pengurangan PRB sebagai penjabaran dari Renas PB. Dokumen ini merupakan rencana aksi pengurangan risiko bencana yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan lain seperti : perencanaan tata ruang, program penanganan perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program nasional lainnya.

Penyusunan Buku RAN-PRB 2010-2012 dilakukan dalam kurun waktu Agustus-Desember 2009 melalui berbagai tahapan kegiatan, antara lain FGD, pengumpulan data, konsultasi publik baik di daerah maupun nasional.

Pada tahap awal penyusunan, tim melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kementerian/Lembaga untuk menjaring masukan program dan kegiatan di masing-masing K/L yang terkait dengan program PRB. Berikutnya adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap tiga kelompok para pihak pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh : (1) Bappenas dan BNPB untuk kelompok kementerian/lembaga; (2) UNDP untuk kelompok donor internasional yang tergabung dalam *convergence group* dan UNTWG; dan (3) PLANAS untuk kelompok nonpemerintah dan unsur Palang Merah.

Proses selanjutnya adalah melakukan konsultasi publik yang diselenggarakan di 7 wilayah yaitu, Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Banjarmasin, Kupang dan Medan. Konsultasi publik daerah dilakukan berdasarkan kelompok regional dengan tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan tingkat ancaman (*hazard*) yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Konsultasi publik nasional merupakan kegiatan akhir dari rangkaian konsultasi publik dengan mempertemukan semua pihak pemangku kepentingan antara lain, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, para donor dan lembaga nonpemerintah lainnya.

Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 difasilitasi UNDP yang dikoordinasikan Kristanto Sinandang dan World Bank melalui koordinasi

Dr. Iwan Gunawan. Sebagai penanggung jawab di tingkat pemerintah adalah melalui Bappenas yang dikoordinasikan oleh Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan BNPB melalui Ir. Sugeng Tri Utomo DESS, Deputi Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Ditingkat pelaksanaan, RAN-PRB 2010-2012 ini dilakukan oleh Tim penyusun terdiri dari Prof. Dr. Ikhwanuddin Mawardi (koordinator), Ir. Kuswiyanto, M.Si, Ir. Siti Agustini M.App. Econ, Dra. Hening Parlan, Ir. Doddy Virgo Sinaga, Ir. Dian Verdiana, Sugiantoro, ST dan Khairullah S.Ag, M.Si Untuk penyelesaian Bab 2 dan peta risiko bencana dibantu oleh Tim PSB-IPB yang dikoordinasikan Dr. Euis Sunarti dan Tim PMB-ITB melalui koordinasi Dr. Wayan Sengara.



LAMPIRAN 1. DAFTAR KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI  
RISIKO TINGGI TERHADAP ANCAMAN  
BENCANA



**Tabel L1.1. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Gempa Bumi.**

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN</b> |
|-----------|-----------------|------------------|
| 1         | Bali            | Badung           |
| 2         | Bali            | Buleleng         |
| 3         | Bali            | Gianyar          |
| 4         | Bali            | Jembrana         |
| 5         | Bali            | Karang Asem      |
| 6         | Bali            | Klungkung        |
| 7         | Bali            | Kota Denpasar    |
| 8         | Bali            | Tabanan          |
| 9         | Banten          | Kota Cilegon     |
| 10        | Banten          | Lebak            |
| 11        | Banten          | Pandeglang       |
| 12        | Banten          | Serang           |
| 13        | Banten          | Tangerang        |
| 14        | Bengkulu        | Bengkulu Selatan |
| 15        | Bengkulu        | Bengkulu Utara   |
| 16        | Bengkulu        | Kaur             |
| 17        | Bengkulu        | Kepahiang        |
| 18        | Bengkulu        | Kota Bengkulu    |
| 19        | Bengkulu        | Lebong           |
| 20        | Bengkulu        | Muko-muko        |
| 21        | Bengkulu        | Rejang Lebong    |
| 22        | Bengkulu        | Seluma           |
| 23        | DI. Yogyakarta  | Bantul           |
| 24        | DI. Yogyakarta  | Gunung Kidul     |
| 25        | DI. Yogyakarta  | Kulon Progo      |
| 26        | Gorontalo       | Boalemo          |
| 27        | Gorontalo       | Bone Bolango     |
| 28        | Gorontalo       | Gorontalo        |
| 29        | Gorontalo       | Gorontalo Utara  |
| 30        | Gorontalo       | Kota Gorontalo   |
| 31        | Gorontalo       | Pohuwato         |
| 32        | Papua Barat     | Manokwari        |
| 33        | Papua Barat     | Raja Ampat       |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN</b>    |
|-----------|-----------------|---------------------|
| 34        | Jambi           | Kerinci             |
| 35        | Jawa Barat      | Bandung             |
| 36        | Jawa Barat      | Bandung Barat       |
| 37        | Jawa Barat      | Bogor               |
| 38        | Jawa Barat      | Ciamis              |
| 39        | Jawa Barat      | Cianjur             |
| 40        | Jawa Barat      | Garut               |
| 41        | Jawa Barat      | Kota Bandung        |
| 42        | Jawa Barat      | Kota Cimahi         |
| 43        | Jawa Barat      | Kota Sukabumi       |
| 44        | Jawa Barat      | Sukabumi            |
| 45        | Jawa Barat      | Tasikmalaya         |
| 46        | Jawa Tengah     | Cilacap             |
| 47        | Jawa Tengah     | Kebumen             |
| 48        | Jawa Tengah     | Wonogiri            |
| 49        | Jawa Timur      | Banyuwangi          |
| 50        | Jawa Timur      | Blitar              |
| 51        | Jawa Timur      | Jember              |
| 52        | Jawa Timur      | Kediri              |
| 53        | Jawa Timur      | Lumajang            |
| 54        | Jawa Timur      | Malang              |
| 55        | Jawa Timur      | Pacitan             |
| 56        | Jawa Timur      | Pasuruan            |
| 57        | Jawa Timur      | Ponorogo            |
| 58        | Jawa Timur      | Probolinggo         |
| 59        | Jawa Timur      | Situbondo           |
| 60        | Jawa Timur      | Sumenep             |
| 61        | Jawa Timur      | Trenggalek          |
| 62        | Jawa Timur      | Tulungagung         |
| 63        | Lampung         | Kota Bandar Lampung |
| 64        | Lampung         | Lampung Barat       |
| 65        | Lampung         | Lampung Selatan     |
| 66        | Lampung         | Lampung Timur       |
| 67        | Lampung         | Lampung Utara       |
| 68        | Lampung         | Tanggamus           |
| 69        | Maluku          | Buru                |
| 70        | Maluku          | Kota Ambon          |
| 71        | Maluku          | Maluku Tengah       |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>          | <b>KABUPATEN</b>   |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| 72        | Maluku                   | Maluku Tenggara    |
| 73        | Maluku                   | Seram Bagian Barat |
| 74        | Maluku                   | Seram Bagian Timur |
| 75        | Maluku Utara             | Kepulauan Sula     |
| 76        | Maluku Utara             | Tidore             |
| 77        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Barat         |
| 78        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Barat Daya    |
| 79        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Besar         |
| 80        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Jaya          |
| 81        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Selatan       |
| 82        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Singkil       |
| 83        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Tengah        |
| 84        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Tenggara      |
| 85        | Nanggroe Aceh Darussalam | Bireun             |
| 86        | Nanggroe Aceh Darussalam | Gayo Lues          |
| 87        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh    |
| 88        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang        |
| 89        | Nanggroe Aceh Darussalam | Nagan Raya         |
| 90        | Nanggroe Aceh Darussalam | Pidie              |
| 91        | Nanggroe Aceh Darussalam | Pidie Jaya         |
| 92        | Nanggroe Aceh Darussalam | Simeuleu           |
| 93        | Nusa Tenggara Barat      | Bima               |
| 94        | Nusa Tenggara Barat      | Dompu              |
| 95        | Nusa Tenggara Barat      | Kota Bima          |
| 96        | Nusa Tenggara Barat      | Kota Mataram       |
| 97        | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Barat       |
| 98        | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Tengah      |
| 99        | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Timur       |
| 100       | Nusa Tenggara Barat      | Sumbawa            |
| 101       | Nusa Tenggara Barat      | Sumbawa Barat      |
| 102       | Nusa Tenggara Timur      | Belu               |
| 103       | Nusa Tenggara Timur      | Ende               |
| 104       | Nusa Tenggara Timur      | Flores Timur       |
| 105       | Nusa Tenggara Timur      | Kota Kupang        |
| 106       | Nusa Tenggara Timur      | Kupang             |
| 107       | Nusa Tenggara Timur      | Manggarai          |
| 108       | Nusa Tenggara Timur      | Manggarai Barat    |
| 109       | Nusa Tenggara Timur      | Negekeo            |



| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>     | <b>KABUPATEN</b>        |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| 110       | Nusa Tenggara Timur | Ngada                   |
| 111       | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao               |
| 112       | Nusa Tenggara Timur | Sikka                   |
| 113       | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat             |
| 114       | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat Daya        |
| 115       | Nusa Tenggara Timur | Sumba Tengah            |
| 116       | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur             |
| 117       | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Selatan    |
| 118       | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Utara      |
| 119       | Papua               | Biak Numfor             |
| 120       | Papua               | Jaya Wijaya             |
| 121       | Papua               | Jayapura                |
| 122       | Papua               | Keerom                  |
| 123       | Papua               | Kota Jayapura           |
| 124       | Papua               | Nabire                  |
| 125       | Papua               | Pegunungan Bintang      |
| 126       | Papua               | Sarmi                   |
| 127       | Papua               | Supiori                 |
| 128       | Papua               | Tolikara                |
| 129       | Papua               | Waropen                 |
| 130       | Papua               | Yapen Waropen           |
| 131       | Sulawesi Selatan    | Luwu Timur              |
| 132       | Sulawesi Tengah     | Banggai                 |
| 133       | Sulawesi Tengah     | Banggai Kepulauan       |
| 134       | Sulawesi Tengah     | Buol                    |
| 135       | Sulawesi Tengah     | Donggala                |
| 136       | Sulawesi Tengah     | Kota Palu               |
| 137       | Sulawesi Tengah     | Morowali                |
| 138       | Sulawesi Tengah     | Parigi Moutong          |
| 139       | Sulawesi Tengah     | Poso                    |
| 140       | Sulawesi Tengah     | Tojo Una-Una            |
| 141       | Sulawesi Tengah     | Toli Toli               |
| 142       | Sulawesi Utara      | Bolaang Mongondow       |
| 143       | Sulawesi Utara      | Bolaang Mongondow Utara |
| 144       | Sulawesi Utara      | Kepulauan Sangihe       |
| 145       | Sulawesi Utara      | Kepulauan Sitaro        |
| 146       | Sulawesi Utara      | Kepulauan Talaud        |
| 147       | Sulawesi Utara      | Kota Bitung             |

| No  | PROVINSI         | KABUPATEN           |
|-----|------------------|---------------------|
| 148 | Sulawesi Utara   | Kota Manado         |
| 149 | Sulawesi Utara   | Minahasa            |
| 150 | Sulawesi Utara   | Minahasa Selatan    |
| 151 | Sulawesi Utara   | Minahasa Tenggara   |
| 152 | Sulawesi Utara   | Minahasa Utara      |
| 153 | Sumatera Barat   | Agam                |
| 154 | Sumatera Barat   | Kep.Mentawai        |
| 155 | Sumatera Barat   | Kota Bukit Tinggi   |
| 156 | Sumatera Barat   | Kota Padang         |
| 157 | Sumatera Barat   | Kota Padang Panjang |
| 158 | Sumatera Barat   | Kota Pariaman       |
| 159 | Sumatera Barat   | Kota Solok          |
| 160 | Sumatera Barat   | Lima Puluh Koto     |
| 161 | Sumatera Barat   | Padang Pariaman     |
| 162 | Sumatera Barat   | Pasaman             |
| 163 | Sumatera Barat   | Pasaman Barat       |
| 164 | Sumatera Barat   | Pesisir Selatan     |
| 165 | Sumatera Barat   | Solok               |
| 166 | Sumatera Barat   | Solok Selatan       |
| 167 | Sumatera Barat   | Tanah Datar         |
| 168 | Sumatera Selatan | Empat Lawang        |
| 169 | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam     |
| 170 | Sumatera Selatan | Lahat               |
| 171 | Sumatera Selatan | Oku Selatan         |
| 172 | Sumatera Utara   | Dairi               |
| 173 | Sumatera Utara   | Humbang Hasundutan  |
| 174 | Sumatera Utara   | Karo                |
| 175 | Sumatera Utara   | Kota Sibolga        |
| 176 | Sumatera Utara   | Langkat             |
| 177 | Sumatera Utara   | Mandailing Natal    |
| 178 | Sumatera Utara   | Nias                |
| 179 | Sumatera Utara   | Nias Selatan        |
| 180 | Sumatera Utara   | Padang Sidempuan    |
| 181 | Sumatera Utara   | Samosir             |
| 182 | Sumatera Utara   | Tapanuli Selatan    |
| 183 | Sumatera Utara   | Tapanuli Tengah     |
| 184 | Sumatera Utara   | Tapanuli Utara      |

**Tabel L1.2. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Tsunami**

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>          | <b>KABUPATEN</b>    |
|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1         | Bali                     | Badung              |
| 2         | Bali                     | Gianyar             |
| 3         | Bali                     | Klungkung           |
| 4         | Bali                     | Kota Denpasar       |
| 5         | Banten                   | Kota Cilegon        |
| 6         | Banten                   | Serang              |
| 7         | Bengkulu                 | Bengkulu Selatan    |
| 8         | Bengkulu                 | Kota Bengkulu       |
| 9         | DI. Yogyakarta           | Bantul              |
| 10        | DI. Yogyakarta           | Kulon Progo         |
| 11        | Jawa Barat               | Ciamis              |
| 12        | Jawa Barat               | Cianjur             |
| 13        | Jawa Barat               | Garut               |
| 14        | Jawa Barat               | Sukabumi            |
| 15        | Jawa Barat               | Tasikmalaya         |
| 16        | Jawa Tengah              | Cilacap             |
| 17        | Jawa Tengah              | Kebumen             |
| 18        | Jawa Tengah              | Purworejo           |
| 19        | Jawa Tengah              | Wonogiri            |
| 20        | Jawa Timur               | Blitar              |
| 21        | Jawa Timur               | Jember              |
| 22        | Jawa Timur               | Kota Surabaya       |
| 23        | Jawa Timur               | Lumajang            |
| 24        | Jawa Timur               | Malang              |
| 25        | Jawa Timur               | Trenggalek          |
| 26        | Jawa Timur               | Tulungagung         |
| 27        | Lampung                  | Kota Bandar Lampung |
| 28        | Lampung                  | Tanggamus           |
| 29        | Maluku                   | Kota Ambon          |
| 30        | Maluku Utara             | Ternate             |
| 31        | Maluku Utara             | Tidore Kepulauan    |
| 32        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Besar          |
| 33        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh     |
| 34        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Lhoksumawe     |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>          | <b>KABUPATEN</b>  |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 35        | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang       |
| 36        | Nanggroe Aceh Darussalam | Pidie             |
| 37        | Nusa Tenggara Barat      | Bima              |
| 38        | Nusa Tenggara Barat      | Kota Bima         |
| 39        | Nusa Tenggara Barat      | Kota Mataram      |
| 40        | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Barat      |
| 41        | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Tengah     |
| 42        | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Timur      |
| 43        | Nusa Tenggara Timur      | Ende              |
| 44        | Nusa Tenggara Timur      | Kota Kupang       |
| 45        | Sulawesi Selatan         | Bulukumba         |
| 46        | Sulawesi Selatan         | Jeneponto         |
| 47        | Sulawesi Selatan         | Kota Makassar     |
| 48        | Sulawesi Selatan         | Selayar           |
| 49        | Sulawesi Tengah          | Kota Palu         |
| 50        | Sulawesi Utara           | Kepulauan Sangihe |
| 51        | Sulawesi Utara           | Kepulauan Sitaro  |
| 52        | Sulawesi Utara           | Kota Bitung       |
| 53        | Sulawesi Utara           | Kota Manado       |
| 54        | Sulawesi Utara           | Minahasa          |
| 55        | Sulawesi Utara           | Minahasa Tenggara |
| 56        | Sulawesi Utara           | Minahasa Utara    |
| 57        | Sumatera Barat           | Kota Padang       |
| 58        | Sumatera Barat           | Kota Pariaman     |
| 59        | Sumatera Utara           | Nias              |
| 60        | Sumatera Utara           | Nias Selatan      |

**Tabel L1.3. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Letusan Gunung Api**

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN</b> |
|-----------|-----------------|------------------|
| 1         | Bali            | Bangli           |
| 2         | Bali            | Karang Asem      |
| 3         | Banten          | Pandeglang       |
| 4         | Banten          | Serang           |
| 5         | Bengkulu        | Bengkulu Utara   |
| 6         | Bengkulu        | Rejang Lebong    |
| 7         | DI. Yogyakarta  | Sleman           |
| 8         | Jambi           | Kerinci          |
| 9         | Jambi           | Merangin         |
| 10        | Jawa Barat      | Bandung          |
| 11        | Jawa Barat      | Bandung Barat    |
| 12        | Jawa Barat      | Bogor            |
| 13        | Jawa Barat      | Cianjur          |
| 14        | Jawa Barat      | Garut            |
| 15        | Jawa Barat      | Kuningan         |
| 16        | Jawa Barat      | Majalengka       |
| 17        | Jawa Barat      | Sukabumi         |
| 18        | Jawa Barat      | Tasikmalaya      |
| 19        | Jawa Tengah     | Banjarnegara     |
| 20        | Jawa Tengah     | Banyumas         |
| 21        | Jawa Tengah     | Batang           |
| 22        | Jawa Tengah     | Boyolali         |
| 23        | Jawa Tengah     | Brebes           |
| 24        | Jawa Tengah     | Karanganyar      |
| 25        | Jawa Tengah     | Kendal           |
| 26        | Jawa Tengah     | Klaten           |
| 27        | Jawa Tengah     | Magelang         |
| 28        | Jawa Tengah     | Pemalang         |
| 29        | Jawa Tengah     | Purbalingga      |
| 30        | Jawa Tengah     | Tegal            |
| 31        | Jawa Tengah     | Temanggung       |
| 32        | Jawa Tengah     | Wonosobo         |
| 33        | Jawa Timur      | Banyuwangi       |
| 34        | Jawa Timur      | Blitar           |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>          | <b>KABUPATEN</b>  |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 35        | Jawa Timur               | Bondowoso         |
| 36        | Jawa Timur               | Jember            |
| 37        | Jawa Timur               | Kediri            |
| 38        | Jawa Timur               | Lumajang          |
| 39        | Jawa Timur               | Madiun            |
| 40        | Jawa Timur               | Magetan           |
| 41        | Jawa Timur               | Malang            |
| 42        | Jawa Timur               | Mojokerto         |
| 43        | Jawa Timur               | Nganjuk           |
| 44        | Jawa Timur               | Pasuruan          |
| 45        | Jawa Timur               | Ponorogo          |
| 46        | Jawa Timur               | Probolinggo       |
| 47        | Lampung                  | Lampung Barat     |
| 48        | Lampung                  | Lampung Selatan   |
| 49        | Lampung                  | Tanggamus         |
| 50        | Maluku                   | Maluku Tengah     |
| 51        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Besar        |
| 52        | Nanggroe Aceh Darussalam | Bener Meriah      |
| 53        | Nusa Tenggara Barat      | Bima              |
| 54        | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Timur      |
| 55        | Nusa Tenggara Timur      | Ende              |
| 56        | Nusa Tenggara Timur      | Flores Timur      |
| 57        | Nusa Tenggara Timur      | Manggarai         |
| 58        | Nusa Tenggara Timur      | Manggarai Barat   |
| 59        | Nusa Tenggara Timur      | Negekeo           |
| 60        | Nusa Tenggara Timur      | Ngada             |
| 61        | Nusa Tenggara Timur      | Sikka             |
| 62        | Sulawesi Utara           | Bolaang Mongondow |
| 63        | Sulawesi Utara           | Kota Bitung       |
| 64        | Sulawesi Utara           | Minahasa          |
| 65        | Sulawesi Utara           | Minahasa Selatan  |
| 66        | Sulawesi Utara           | Minahasa Utara    |
| 67        | Sumatera Barat           | Agam              |
| 68        | Sumatera Barat           | Pasaman Barat     |
| 69        | Sumatera Barat           | Solok             |
| 70        | Sumatera Barat           | Tanah Datar       |
| 71        | Sumatera Selatan         | Lahat             |
| 72        | Sumatera Selatan         | Muara Enim        |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>  | <b>KABUPATEN</b> |
|-----------|------------------|------------------|
| 73        | Sumatera Selatan | Musi Rawas       |
| 74        | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam  |
| 75        | Sumatera Utara   | Karo             |
| 76        | Sumatera Utara   | Mandailing Natal |
| 77        | Sumatera Utara   | Padang Sidempuan |
| 78        | Sumatera Utara   | Tapanuli Selatan |
| 79        | Sumatera Utara   | Tapanuli Utara   |

**Tabel L1.4. Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki  
Risiko Tinggi Kekeringan**

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN</b>    |
|-----------|-----------------|---------------------|
| 1         | Bali            | Karang Asem         |
| 2         | Bangka Belitung | Bangka              |
| 3         | Bangka Belitung | Bangka Barat        |
| 4         | Bangka Belitung | Bangka Tengah       |
| 5         | Bangka Belitung | Belitung Timur      |
| 6         | Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang |
| 7         | Banten          | Kota Cilegon        |
| 8         | Banten          | Kota Tangerang      |
| 9         | Banten          | Pandeglang          |
| 10        | Banten          | Serang              |
| 11        | Banten          | Tangerang           |
| 12        | DI. Yogyakarta  | Kulon Progo         |
| 13        | DI. Yogyakarta  | GunungKidul         |
| 14        | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Barat  |
| 15        | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Pusat  |
| 16        | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Timur  |
| 17        | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Utara  |
| 18        | Jambi           | Kota Jambi          |
| 19        | Jawa Barat      | Bandung             |
| 20        | Jawa Barat      | Bandung Barat       |
| 21        | Jawa Barat      | Bekasi              |
| 22        | Jawa Barat      | Bogor               |
| 23        | Jawa Barat      | Cianjur             |
| 24        | Jawa Barat      | Cirebon             |
| 25        | Jawa Barat      | Karawang            |
| 26        | Jawa Barat      | Kota Bandung        |
| 27        | Jawa Barat      | Kota Banjar         |
| 28        | Jawa Barat      | Kota Bekasi         |
| 29        | Jawa Barat      | Kota Bogor          |
| 30        | Jawa Barat      | Kota Cimahi         |
| 31        | Jawa Barat      | Kota Cirebon        |
| 32        | Jawa Barat      | Kota Depok          |
| 33        | Jawa Barat      | Kota Sukabumi       |
| 34        | Jawa Barat      | Kota Tasikmalaya    |



| No | PROVINSI    | KABUPATEN       |
|----|-------------|-----------------|
| 35 | Jawa Barat  | Majalengka      |
| 36 | Jawa Barat  | Purwakarta      |
| 37 | Jawa Barat  | Subang          |
| 38 | Jawa Barat  | Sukabumi        |
| 39 | Jawa Barat  | Sumedang        |
| 40 | Jawa Barat  | Tasikmalaya     |
| 41 | Jawa Tengah | Banjarnegara    |
| 42 | Jawa Tengah | Banyumas        |
| 43 | Jawa Tengah | Batang          |
| 44 | Jawa Tengah | Blora           |
| 45 | Jawa Tengah | Boyolali        |
| 46 | Jawa Tengah | Brebes          |
| 47 | Jawa Tengah | Cilacap         |
| 48 | Jawa Tengah | Demak           |
| 49 | Jawa Tengah | Grobogan        |
| 50 | Jawa Tengah | Jepara          |
| 51 | Jawa Tengah | Karanganyar     |
| 52 | Jawa Tengah | Kebumen         |
| 53 | Jawa Tengah | Kendal          |
| 54 | Jawa Tengah | Klaten          |
| 55 | Jawa Tengah | Kota Magelang   |
| 56 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan |
| 57 | Jawa Tengah | Kota Salatiga   |
| 58 | Jawa Tengah | Kota Semarang   |
| 59 | Jawa Tengah | Kota Surakarta  |
| 60 | Jawa Tengah | Kota Tegal      |
| 61 | Jawa Tengah | Kudus           |
| 62 | Jawa Tengah | Magelang        |
| 63 | Jawa Tengah | Pati            |
| 64 | Jawa Tengah | Pekalongan      |
| 65 | Jawa Tengah | Pemalang        |
| 66 | Jawa Tengah | Purbalingga     |
| 67 | Jawa Tengah | Purworejo       |
| 68 | Jawa Tengah | Rembang         |
| 69 | Jawa Tengah | Semarang        |
| 70 | Jawa Tengah | Sragen          |
| 71 | Jawa Tengah | Sukoharjo       |
| 72 | Jawa Tengah | Tegal           |

| No  | PROVINSI           | KABUPATEN           |
|-----|--------------------|---------------------|
| 73  | Jawa Tengah        | Temanggung          |
| 74  | Jawa Tengah        | Wonogiri            |
| 75  | Jawa Tengah        | Wonosobo            |
| 76  | Jawa Timur         | Bojonegoro          |
| 77  | Jawa Timur         | Jombang             |
| 78  | Jawa Timur         | Kediri              |
| 79  | Jawa Timur         | Kodya Blitar        |
| 80  | Jawa Timur         | Kota Kediri         |
| 81  | Jawa Timur         | Kota Madiun         |
| 82  | Jawa Timur         | Kota Malang         |
| 83  | Jawa Timur         | Madiun              |
| 84  | Jawa Timur         | Magetan             |
| 85  | Jawa Timur         | Nganjuk             |
| 86  | Jawa Timur         | Ngawi               |
| 87  | Jawa Timur         | Pacitan             |
| 88  | Jawa Timur         | Pamekasan           |
| 89  | Jawa Timur         | Pasuruan            |
| 90  | Jawa Timur         | Ponorogo            |
| 91  | Jawa Timur         | Probolinggo         |
| 92  | Jawa Timur         | Sumenep             |
| 93  | Jawa Timur         | Trenggalek          |
| 94  | Jawa Timur         | Tuban               |
| 95  | Jawa Timur         | Tulungagung         |
| 96  | Kalimantan Barat   | Kota Pontianak      |
| 97  | Kalimantan Selatan | Hulu Sei Tengah     |
| 98  | Kalimantan Selatan | Kota Baru           |
| 99  | Kalimantan Selatan | Tabalong            |
| 100 | Kalimantan Selatan | Tanah Bumbu         |
| 101 | Kalimantan Selatan | Tanah Laut          |
| 102 | Kalimantan Tengah  | Barito Selatan      |
| 103 | Kalimantan Tengah  | Barito Timur        |
| 104 | Kalimantan Tengah  | Kota Waringin Barat |
| 105 | Kalimantan Tengah  | Kota Waringin Timur |
| 106 | Kalimantan Timur   | Kota Balikpapan     |
| 107 | Kalimantan Timur   | Kota Bontang        |
| 108 | Kalimantan Timur   | Kota Samarinda      |
| 109 | Kalimantan Timur   | Kutai Kartanegara   |
| 110 | Kalimantan Timur   | Kutai Timur         |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>     | <b>KABUPATEN</b>     |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 111       | Kepulauan Riau      | Bintan               |
| 112       | Kepulauan Riau      | Karimun              |
| 113       | Kepulauan Riau      | Kota Batam           |
| 114       | Kepulauan Riau      | Kota Tanjung Pinang  |
| 115       | Lampung             | Kota Bandar Lampung  |
| 116       | Lampung             | Kota Metro           |
| 117       | Lampung             | Lampung Selatan      |
| 118       | Lampung             | Lampung Tengah       |
| 119       | Lampung             | Lampung Timur        |
| 120       | Lampung             | Lampung Utara        |
| 121       | Lampung             | Tanggamus            |
| 122       | Lampung             | Tulangbawang         |
| 123       | Lampung             | Way Kanan            |
| 124       | Maluku Utara        | Halmahera Barat      |
| 125       | Maluku Utara        | Kota Tidore          |
| 126       | Maluku Utara        | Tidore               |
| 127       | Nusa Tenggara Timur | Manggarai Barat      |
| 128       | Nusa Tenggara Timur | Ngada                |
| 129       | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat          |
| 130       | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat Daya     |
| 131       | Papua Barat         | Kota Sorong          |
| 132       | Riau                | Indragiri Hilir      |
| 133       | Riau                | Pekan Baru           |
| 134       | Riau                | Pelalawan            |
| 135       | Riau                | Siak                 |
| 136       | Sulawesi Barat      | Majene               |
| 137       | Sulawesi Barat      | Mamuju               |
| 138       | Sulawesi Barat      | Polewali Mandar      |
| 139       | Sulawesi Selatan    | Kota Makassar        |
| 140       | Sulawesi Selatan    | Pangkajene Kepulauan |
| 141       | Sulawesi Selatan    | Pinrang              |
| 142       | Sulawesi Selatan    | Takalar              |
| 143       | Sulawesi Utara      | Kota Manado          |
| 144       | Sumatera Barat      | Kota Padang          |
| 145       | Sumatera Barat      | Padang Pariaman      |
| 146       | Sumatera Selatan    | Banyuasin            |
| 147       | Sumatera Selatan    | Kota Palembang       |
| 148       | Sumatera Selatan    | Musi Banyuasin       |

| No  | PROVINSI         | KABUPATEN    |
|-----|------------------|--------------|
| 149 | Sumatera Selatan | Musi Rawas   |
| 150 | Sumatera Selatan | Oku Selatan  |
| 151 | Sumatera Selatan | Oku Timur    |
| 152 | Sumatera Utara   | Kota Sibolga |

**Tabel L1.5. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Banjir**

| <b>No.</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN</b>     |
|------------|-----------------|----------------------|
| 1          | Bali            | Klungkung            |
| 2          | Bali            | Kota Denpasar        |
| 3          | Bangka Belitung | Belitung             |
| 4          | Bangka Belitung | Belitung Timur       |
| 5          | Banten          | Kota Tangerang       |
| 6          | Banten          | Serang               |
| 7          | Banten          | Tangerang            |
| 8          | DI. Yogyakarta  | Bantul               |
| 9          | DI. Yogyakarta  | Kulon Progo          |
| 10         | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Barat   |
| 11         | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Pusat   |
| 12         | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Selatan |
| 13         | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Timur   |
| 14         | DKI Jakarta     | Kota Jakarta Utara   |
| 15         | Gorontalo       | Boalemo              |
| 16         | Papua Barat     | Kota Sorong          |
| 17         | Papua Barat     | Sorong               |
| 18         | Papua Barat     | Sorong Selatan       |
| 19         | Jambi           | Batanghari           |
| 20         | Jambi           | Kota Jambi           |
| 21         | Jambi           | Muaro Jambi          |
| 22         | Jambi           | Tanjung Jabung Barat |
| 23         | Jambi           | Tanjung Jabung Timur |
| 24         | Jawa Barat      | Bandung              |
| 25         | Jawa Barat      | Bekasi               |
| 26         | Jawa Barat      | Ciamis               |
| 27         | Jawa Barat      | Cirebon              |
| 28         | Jawa Barat      | Indramayu            |
| 29         | Jawa Barat      | Karawang             |
| 30         | Jawa Barat      | Kota Banjar          |
| 31         | Jawa Barat      | Kota Bekasi          |
| 32         | Jawa Barat      | Majalengka           |
| 33         | Jawa Barat      | Purwakarta           |
| 34         | Jawa Barat      | Subang               |

| No | PROVINSI         | KABUPATEN       |
|----|------------------|-----------------|
| 35 | Jawa Barat       | Sukabumi        |
| 36 | Jawa Barat       | Sumedang        |
| 37 | Jawa Tengah      | Banyumas        |
| 38 | Jawa Tengah      | Brebes          |
| 39 | Jawa Tengah      | Cilacap         |
| 40 | Jawa Tengah      | Demak           |
| 41 | Jawa Tengah      | Grobogan        |
| 42 | Jawa Tengah      | Jepara          |
| 43 | Jawa Tengah      | Kebumen         |
| 44 | Jawa Tengah      | Kendal          |
| 45 | Jawa Tengah      | Kota Pekalongan |
| 46 | Jawa Tengah      | Kota Semarang   |
| 47 | Jawa Tengah      | Kota Tegal      |
| 48 | Jawa Tengah      | Kudus           |
| 49 | Jawa Tengah      | Pati            |
| 50 | Jawa Tengah      | Pekalongan      |
| 51 | Jawa Tengah      | Pemalang        |
| 52 | Jawa Tengah      | Purworejo       |
| 53 | Jawa Tengah      | Semarang        |
| 54 | Jawa Tengah      | Tegal           |
| 55 | Jawa Timur       | Bangkalan       |
| 56 | Jawa Timur       | Banyuwangi      |
| 57 | Jawa Timur       | Bojonegoro      |
| 58 | Jawa Timur       | Gresik          |
| 59 | Jawa Timur       | Jombang         |
| 60 | Jawa Timur       | Kodya Pasuruan  |
| 61 | Jawa Timur       | Kota Mojokerto  |
| 62 | Jawa Timur       | Kota Surabaya   |
| 63 | Jawa Timur       | Lamongan        |
| 64 | Jawa Timur       | Lumajang        |
| 65 | Jawa Timur       | Malang          |
| 66 | Jawa Timur       | Mojokerto       |
| 67 | Jawa Timur       | Pasuruan        |
| 68 | Jawa Timur       | Sidoarjo        |
| 69 | Jawa Timur       | Situbondo       |
| 70 | Jawa Timur       | Tuban           |
| 71 | Kalimantan Barat | Bengkayang      |
| 72 | Kalimantan Barat | Kapuas Hulu     |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>          | <b>KABUPATEN</b>      |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 73        | Kalimantan Barat         | Kayong Utara          |
| 74        | Kalimantan Barat         | Ketapang              |
| 75        | Kalimantan Barat         | Kota Pontianak        |
| 76        | Kalimantan Barat         | Kota Singkawang       |
| 77        | Kalimantan Barat         | Pontianak             |
| 78        | Kalimantan Barat         | Sambas                |
| 79        | Kalimantan Barat         | Sanggau               |
| 80        | Kalimantan Barat         | Sekadau               |
| 81        | Kalimantan Barat         | Sintang               |
| 82        | Kalimantan Selatan       | Banjar                |
| 83        | Kalimantan Selatan       | Barito Kuala          |
| 84        | Kalimantan Selatan       | Hulu Sei Selatan      |
| 85        | Kalimantan Selatan       | Kota Banjar Baru      |
| 86        | Kalimantan Selatan       | Kota Banjarmasin      |
| 87        | Kalimantan Selatan       | Tanah Bumbu           |
| 88        | Kalimantan Selatan       | Tanah Laut            |
| 89        | Kalimantan Selatan       | Tapin                 |
| 90        | Kalimantan Tengah        | Kota Waringin Timur   |
| 91        | Kalimantan Tengah        | Sukamara              |
| 92        | Kalimantan Timur         | Bulungan              |
| 93        | Kalimantan Timur         | Kota Tarakan          |
| 94        | Lampung                  | Lampung Tengah        |
| 95        | Lampung                  | Tulangbawang          |
| 96        | Maluku                   | Maluku Tengah         |
| 97        | Maluku                   | Maluku Tenggara Barat |
| 98        | Maluku                   | Seram Bagian Barat    |
| 99        | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Besar            |
| 100       | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Tamiang          |
| 101       | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Timur            |
| 102       | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Utara            |
| 103       | Nanggroe Aceh Darussalam | Bireun                |
| 104       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh       |
| 105       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Langsa           |
| 106       | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Lhoksumawe       |
| 107       | Nanggroe Aceh Darussalam | Nagan Raya            |
| 108       | Nusa Tenggara Barat      | Bima                  |
| 109       | Nusa Tenggara Barat      | Dompu                 |
| 110       | Nusa Tenggara Barat      | Kota Bima             |

| No  | PROVINSI            | KABUPATEN            |
|-----|---------------------|----------------------|
| 111 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram         |
| 112 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat         |
| 113 | Nusa Tenggara Timur | Belu                 |
| 114 | Nusa Tenggara Timur | Ende                 |
| 115 | Nusa Tenggara Timur | Kupang               |
| 116 | Nusa Tenggara Timur | Manggarai Barat      |
| 117 | Nusa Tenggara Timur | Negekeo              |
| 118 | Nusa Tenggara Timur | Ngada                |
| 119 | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Selatan |
| 120 | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Utara   |
| 121 | Papua               | Asmat                |
| 122 | Papua               | Boven Digoel         |
| 123 | Papua               | Kota Jayapura        |
| 124 | Papua               | Mappi                |
| 125 | Papua               | Merauke              |
| 126 | Papua               | Mimika               |
| 127 | Papua               | Nabire               |
| 128 | Papua               | Waropen              |
| 129 | Riau                | Kampar               |
| 130 | Riau                | Kuantan Singingi     |
| 131 | Riau                | Pekan Baru           |
| 132 | Riau                | Pelalawan            |
| 133 | Riau                | Rokan Hulu           |
| 134 | Riau                | Siak                 |
| 135 | Sulawesi Barat      | Polewali Mandar      |
| 136 | Sulawesi Selatan    | Bone                 |
| 137 | Sulawesi Selatan    | Gowa                 |
| 138 | Sulawesi Selatan    | Kota Makassar        |
| 139 | Sulawesi Selatan    | Kota Palopo          |
| 140 | Sulawesi Selatan    | Luwu                 |
| 141 | Sulawesi Selatan    | Luwu Timur           |
| 142 | Sulawesi Selatan    | Luwu Utara           |
| 143 | Sulawesi Selatan    | Maros                |
| 144 | Sulawesi Selatan    | Pangkajene Kepulauan |
| 145 | Sulawesi Selatan    | Pinrang              |
| 146 | Sulawesi Selatan    | Sidenreng Rappang    |
| 147 | Sulawesi Selatan    | Soppeng              |
| 148 | Sulawesi Selatan    | Takalar              |



| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>   | <b>KABUPATEN</b>   |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 149       | Sulawesi Selatan  | Tana Toraja        |
| 150       | Sulawesi Selatan  | Wajo               |
| 151       | Sulawesi Tenggara | Buton              |
| 152       | Sulawesi Tenggara | Buton Utara        |
| 153       | Sulawesi Tenggara | Konawe Selatan     |
| 154       | Sulawesi Tenggara | Kota Baubau        |
| 155       | Sulawesi Utara    | Kota Manado        |
| 156       | Sumatera Barat    | Agam               |
| 157       | Sumatera Barat    | Pasaman Barat      |
| 158       | Sumatera Selatan  | Kota Palembang     |
| 159       | Sumatera Selatan  | Kota Prabumulih    |
| 160       | Sumatera Selatan  | Lahat              |
| 161       | Sumatera Selatan  | Musi Banyuasin     |
| 162       | Sumatera Selatan  | Musi Rawas         |
| 163       | Sumatera Selatan  | Ogan Ilir          |
| 164       | Sumatera Utara    | Asahan             |
| 165       | Sumatera Utara    | Batubara           |
| 166       | Sumatera Utara    | Deli Serdang       |
| 167       | Sumatera Utara    | Kota Medan         |
| 168       | Sumatera Utara    | Kota Tanjung Balai |
| 169       | Sumatera Utara    | Labuhan Batu       |
| 170       | Sumatera Utara    | Langkat            |
| 171       | Sumatera Utara    | Mandailing Natal   |
| 172       | Sumatera Utara    | Serdang Bedagai    |
| 173       | Sumatera Utara    | Tapanuli Selatan   |
| 174       | Sumatera Utara    | Tapanuli Tengah    |

**Tabel L1.6. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki Risiko Tinggi Gerakan Tanah**

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN</b> |
|-----------|-----------------|------------------|
| 1         | Bali            | Bangli           |
| 2         | Bali            | Buleleng         |
| 3         | Bali            | Jembrana         |
| 4         | Bali            | Karang Asem      |
| 5         | Bali            | Tabanan          |
| 6         | Banten          | Lebak            |
| 7         | Bengkulu        | Bengkulu Utara   |
| 8         | Bengkulu        | Kaur             |
| 9         | Bengkulu        | Kepahiang        |
| 10        | Bengkulu        | Lebong           |
| 11        | Bengkulu        | Rejang Lebong    |
| 12        | Gorontalo       | Bone Bolango     |
| 13        | Gorontalo       | Gorontalo        |
| 14        | Papua Barat     | Kaimana          |
| 15        | Papua Barat     | Kota Sorong      |
| 16        | Papua Barat     | Manokwari        |
| 17        | Papua Barat     | Raja Ampat       |
| 18        | Papua Barat     | Sorong           |
| 19        | Papua Barat     | Teluk Wondama    |
| 20        | Jambi           | Kerinci          |
| 21        | Jawa Barat      | Bandung          |
| 22        | Jawa Barat      | Bandung Barat    |
| 23        | Jawa Barat      | Bogor            |
| 24        | Jawa Barat      | Ciamis           |
| 25        | Jawa Barat      | Cianjur          |
| 26        | Jawa Barat      | Garut            |
| 27        | Jawa Barat      | Kota Sukabumi    |
| 28        | Jawa Barat      | Kuningan         |
| 29        | Jawa Barat      | Sukabumi         |
| 30        | Jawa Barat      | Sumedang         |
| 31        | Jawa Barat      | Tasikmalaya      |
| 32        | Jawa Tengah     | Banjarnegara     |
| 33        | Jawa Tengah     | Banyumas         |
| 34        | Jawa Tengah     | Pekalongan       |

| No | PROVINSI                 | KABUPATEN           |
|----|--------------------------|---------------------|
| 35 | Jawa Tengah              | Purbalingga         |
| 36 | Jawa Tengah              | Wonosobo            |
| 37 | Jawa Timur               | Kota Batu           |
| 38 | Jawa Timur               | Pacitan             |
| 39 | Jawa Timur               | Pasuruan            |
| 40 | Jawa Timur               | Probolinggo         |
| 41 | Jawa Timur               | Sumenep             |
| 42 | Jawa Timur               | Trenggalek          |
| 43 | Kalimantan Tengah        | Murung Raya         |
| 44 | Kalimantan Timur         | Malinau             |
| 45 | Lampung                  | Kota Bandar Lampung |
| 46 | Lampung                  | Lampung Barat       |
| 47 | Lampung                  | Lampung Utara       |
| 48 | Lampung                  | Tanggamus           |
| 49 | Maluku                   | Buru                |
| 50 | Maluku                   | Maluku Tengah       |
| 51 | Maluku Utara             | Tidore              |
| 52 | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Barat Daya     |
| 53 | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Besar          |
| 54 | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Jaya           |
| 55 | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Tengah         |
| 56 | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Tenggara       |
| 57 | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Timur          |
| 58 | Nanggroe Aceh Darussalam | Bener Meriah        |
| 59 | Nanggroe Aceh Darussalam | Bireun              |
| 60 | Nanggroe Aceh Darussalam | Gayo Lues           |
| 61 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang         |
| 62 | Nanggroe Aceh Darussalam | Nagan Raya          |
| 63 | Nanggroe Aceh Darussalam | Pidie               |
| 64 | Nanggroe Aceh Darussalam | Pidie Jaya          |
| 65 | Nusa Tenggara Barat      | Bima                |
| 66 | Nusa Tenggara Barat      | Dompu               |
| 67 | Nusa Tenggara Barat      | Kota Bima           |
| 68 | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Barat        |
| 69 | Nusa Tenggara Barat      | Lombok Timur        |
| 70 | Nusa Tenggara Barat      | Sumbawa             |
| 71 | Nusa Tenggara Timur      | Belu                |
| 72 | Nusa Tenggara Timur      | Ende                |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>     | <b>KABUPATEN</b>     |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 73        | Nusa Tenggara Timur | Flores Timur         |
| 74        | Nusa Tenggara Timur | Kupang               |
| 75        | Nusa Tenggara Timur | Manggarai            |
| 76        | Nusa Tenggara Timur | Manggarai Barat      |
| 77        | Nusa Tenggara Timur | Negekeo              |
| 78        | Nusa Tenggara Timur | Ngada                |
| 79        | Nusa Tenggara Timur | Sikka                |
| 80        | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur          |
| 81        | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Selatan |
| 82        | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Utara   |
| 83        | Papua               | Jaya Wijaya          |
| 84        | Papua               | Jayapura             |
| 85        | Papua               | Keerom               |
| 86        | Papua               | Kota Jayapura        |
| 87        | Papua               | Nabire               |
| 88        | Papua               | Paniai               |
| 89        | Papua               | Pegunungan Bintang   |
| 90        | Papua               | Puncak Jaya          |
| 91        | Papua               | Sarmi                |
| 92        | Papua               | Tolikara             |
| 93        | Papua               | Yahukimo             |
| 94        | Papua               | Yapen Waropen        |
| 95        | Sulawesi Barat      | Majene               |
| 96        | Sulawesi Barat      | Mamasa               |
| 97        | Sulawesi Barat      | Mamuju               |
| 98        | Sulawesi Barat      | Polewali Mandar      |
| 99        | Sulawesi Selatan    | Bone                 |
| 100       | Sulawesi Selatan    | Enrekang             |
| 101       | Sulawesi Selatan    | Gowa                 |
| 102       | Sulawesi Selatan    | Kota Palopo          |
| 103       | Sulawesi Selatan    | Luwu                 |
| 104       | Sulawesi Selatan    | Luwu Timur           |
| 105       | Sulawesi Selatan    | Luwu Utara           |
| 106       | Sulawesi Selatan    | Pinrang              |
| 107       | Sulawesi Selatan    | Sinjai               |
| 108       | Sulawesi Selatan    | Soppeng              |
| 109       | Sulawesi Selatan    | Tana Toraja          |
| 110       | Sulawesi Tengah     | Banggai              |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b>   | <b>KABUPATEN</b>        |
|-----------|-------------------|-------------------------|
| 111       | Sulawesi Tengah   | Banggai Kepulauan       |
| 112       | Sulawesi Tengah   | Buol                    |
| 113       | Sulawesi Tengah   | Donggala                |
| 114       | Sulawesi Tengah   | Kota Palu               |
| 115       | Sulawesi Tengah   | Morowali                |
| 116       | Sulawesi Tengah   | Parigi Moutong          |
| 117       | Sulawesi Tengah   | Poso                    |
| 118       | Sulawesi Tengah   | Tojo Una-Una            |
| 119       | Sulawesi Tengah   | Toli Toli               |
| 120       | Sulawesi Tenggara | Kolaka Utara            |
| 121       | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara            |
| 122       | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari            |
| 123       | Sulawesi Utara    | Bolaang Mongondow       |
| 124       | Sulawesi Utara    | Bolaang Mongondow Utara |
| 125       | Sulawesi Utara    | Kepulauan Sitaro        |
| 126       | Sulawesi Utara    | Kota Bitung             |
| 127       | Sulawesi Utara    | Kota Tomohon            |
| 128       | Sulawesi Utara    | Kotamobagu              |
| 129       | Sulawesi Utara    | Minahasa                |
| 130       | Sulawesi Utara    | Minahasa Selatan        |
| 131       | Sulawesi Utara    | Minahasa Utara          |
| 132       | Sumatera Barat    | Kep.Mentawai            |
| 133       | Sumatera Barat    | Kota Bukit Tinggi       |
| 134       | Sumatera Barat    | Kota Padang             |
| 135       | Sumatera Barat    | Lima Puluh Koto         |
| 136       | Sumatera Barat    | Pasaman                 |
| 137       | Sumatera Barat    | Solok                   |
| 138       | Sumatera Selatan  | Empat Lawang            |
| 139       | Sumatera Selatan  | Lahat                   |
| 140       | Sumatera Selatan  | Oku Selatan             |
| 141       | Sumatera Utara    | Dairi                   |
| 142       | Sumatera Utara    | Humbang Hasundutan      |
| 143       | Sumatera Utara    | Karo                    |
| 144       | Sumatera Utara    | Kota Sibolga            |
| 145       | Sumatera Utara    | Langkat                 |
| 146       | Sumatera Utara    | Mandailing Natal        |
| 147       | Sumatera Utara    | Nias                    |
| 148       | Sumatera Utara    | Nias Selatan            |

| <b>No</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN</b> |
|-----------|-----------------|------------------|
| 149       | Sumatera Utara  | Padang Sidempuan |
| 150       | Sumatera Utara  | Pakpak Bharat    |
| 151       | Sumatera Utara  | Simalungun       |
| 152       | Sumatera Utara  | Tapanuli Selatan |
| 153       | Sumatera Utara  | Tapanuli Utara   |
| 154       | Sumatera Utara  | Toba Samosir     |



**LAMPIRAN 2. MATRIK INDUK KEGIATAN RENCANA AKSI  
NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
(RAN-PRB) TAHUN 2010-2012**





MATRIK RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAN PRB) 2010-2012

| No<br>(1)  | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)                |          | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |            | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                                     |
|--|--|--|------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------|-------------------------|---|
|  |  |  | Propinsi                     | Kab/Kota |  | Th 2010                             | Th 2011    |                         |   |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |  |  |                              |          |  |                                     |            |                         |   |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                   |  |  |                              |          |  |                                     |            |                         |   |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya                            | Membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi<br><br>Terselenggaranya koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan serta sumber daya di setiap tingkat | Seluruh daerah rawan bencana |          | Meningkatnya harmonisasi antara riset dan operasional<br><br>Seluruh pelaku pembangunan ditingkat pusat, propinsi kab/kota, kecamatan ( pengelola program, stakeholder ) melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, pedoman, standard dan juklak/juknis serta sesuai kewenangannya   | 200                                 | 200        | 200 APBN                | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA<br><br>BNPB                          |
|  | Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS  | 33 Propinsi  |                              |          | Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS  | 1,200                               | 1,200      | 1,200 APBN              | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                                       |
|  | Lahan daerah penyangga rawan kebakaran hutan dan lahan                                       | Riau<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan Barat<br>kalimantan Timur  |                              |          | Terbinanya kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan  | 6,800                               | 7,300      | 7,800 APBN              | Kem. Kehutanan, Dirjen PHKA                                       |
|  | 33 Prov  | 33 prov  |                              |          | Terselenggaranya Kegiatan dekonstruksi ditunjukan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam bidang bantuan sosial sebagai upaya pengurangan risiko bencana melalui kegiatan yang bersifat non fisik seperti pelatihan SDM penanggulangan Bencana (TAGANA), Pelatihan Kemampuan Evakuasi Korban Bencana, Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Logistik bagi Korban Bencana. Sedangkan Tugas Pembantuan difokuskan pada kegiatan bantuan yang bersifat fisik, seperti bantuan lauk-pauk dan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana. | 98,137,339                          | 117,764,87 | 141,317,94 APBN         | Kem. Sosial, Dinas Sosial/Kesos/Institusi Sosial Provinsi terkait |
|  | Penguatan kapasitas kepakaran multidisiplin di Perguruan tinggi, BPBD, lembaga riset terkait | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu   |                              |          | tersusun dan terseliasinya dokumen strategi penguatan kapasitas kepakaran dan SDM terkait PRB tingkat nasional dan daerah yang mendukung strategi PB nasional  | 500                                 | 1,000      | - APBN                  | LPI, Puslit Oseanografi   |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|---|--|----------|----------|---|------------------------------|---------|---------|------------------|------------------------|
|     |   |  | Propinsi | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                        |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)      |          | (5)   | (6)                          | (7)     | (8)     |                  |                        |
|     | Tervujudnya Koordinasi Bidang Penanggulangan Kerawanan Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya penanganan tanggap cepat terhadap gangguan kesra yang diukur melalui: Jumlah K/L, NGO, Pemda yang berperan aktif dalam tanggap cepat terhadap gangguan kesra | 1,000                        | 1,200   | 1,200   | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Koordinasi Urusan Dinamika Alam dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan bencana alam untuk meningkatkan Ketahanan Sosial  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Koordinasi Urusan Konflik Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan konflik sosial untuk meningkatkan Ketahanan Sosial  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Koordinasi Urusan Pemulihan Lingkungan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial                                    | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Pemulihan Lingkungan untuk meningkatkan Ketahanan Sosial  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Koordinasi Urusan Dampak Teknologi dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Dampak Negatif Teknologi untuk meningkatkan Ketahanan Sosial  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap _an_uan Bencana alam   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap _an_uan Bencana Alam   | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |
|     | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Teknologi  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Negatif Teknologi  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA           |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)  |          | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|---|--|----------|--|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------|
|           |                 |   | Propinsi   | Kab/kota |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |                                  |
|           |                 | Meningkatnya Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat terhadap gangguan kerawanan sosial  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          | Terselenggarakannya sosialisasi pengembangan budaya sadar Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait  | 600                                 | 750     | 750     | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Tersinkronisasinya upaya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengulangan kerawanan sosial  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          | Tertanggunya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengulangan kerawanan sosial                           | 600                                 | 750     | 750     | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Meningkatnya Upaya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          | Terselenggaranya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat    | 600                                 | 750     | 750     | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Tersusunnya Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          | Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat                            | 600                                 | 750     | 750     | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Meningkatnya pemahaman aparaturnya dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota  | 20 provinsi  |          | Terciptanya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah | 1,000                               | 1,000   | 1,000   | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|           |                 | Meningkatnya pemahaman aparaturnya dalam masalah penanganan bencana yang sewaktu-waktu terjadi, sehingga masa kritis pada tahap tanggap darurat bencana dapat diatasi dengan baik | 20 provinsi  |          | Terciptanya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah | 1,000                               | 1,000   | 1,000   | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|           |                 | Memotivasi petugas kebakaran dengan cara memberikan reward  | 500 kab/kota   |          | Terwujudnya peningkatan kemampuan aparat   | 2,500                               | 1,000   | 1,500   | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|           |                 | Mewujudkan pola keterpaduan dalam penanggulangan kebakaran  | 20 provinsi  |          | Tersusunnya prosedur tetap (protap)  | 1,500                               |         |         | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|           |                 | Meningkatnya ketramplilan dan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana   | 20 provinsi  |          | Terciptanya masyarakat yang sadar bencana  | 3,000                               |         |         | APBN                       | KEMDAGRI                         |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator  |
|-----|----------|--|---|----------|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---|
|     |          |  | Propinsi  | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |   |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)   |          | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)     |                  |   |
|     |          | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jakarta   |          | Tersedianya organisasi direktorat khusus yang menangani keselamatan dengan kewenangan yang dapat menjamin ketaatan (operator sarana dan prasana) terhadap regulasi perkeretaapian yang berlaku | 800                          | -       | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|     |          | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera   |          | Terbentuknya unit pengawasan/inspektur untuk pencegahan bencana pada masing-masing Saker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian   | 1.000                        | 1.000   | 1.000   | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|     |          | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Banten<br>Jabar<br>Jateng<br>DIY<br>Jatim<br>Sumut<br>NAD<br>Sumbang<br>Sumsel<br>Lampung |          | Tersedianya unit pelaksana teknis dalam pembinaan teknis serta pengawasan dan penegakan hukum di daerah  | -                            | 500     | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|     |          | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera   |          | Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian prasarana perkeretaapian di daerah   | -                            | 500     | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian              |
|     |          | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera   |          | Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian sarana perkeretaapian di daerah  | -                            | 500     | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|     |          | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera   |          | Tersedianya unit pelaksana teknis dalam perawatan dan pengoperasian peralatan serta administrasi pergudangan di daerah   | -                            | 500     | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian              |
|     |          | Pengambil kebijakan di pusat dan daerah  | Pusat dan Daerah  |          | Terlaksananya kerjasama penanggulangan bencana yang terintegrasi   |                              |         |         | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan   |
|     |          | Menyusun peraturan-peraturan   |   |          | Tersedianya peraturan-peraturan terkait upaya penanggulangan bencana   |                              |         |         | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan   |

| No | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi  |  | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)   |
|----|-----------------|--|---|--|---|------------------------------|---------|---------|-------------------------|---|
|    |                 |  | Propinsi  | Kab/kota   |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                         |   |
|    |                 | Membentuk kelembagaan  |   |  | Tersedianya unit kerja terkait dengan upaya penanggulangan bencana  |                              |         |         | APBN                    | PPK Kementerian Kesehatan   |
|    |                 | Sistem mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana.            | 33 provinsi   |  | Tertindakannya sistem koordinasi dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana antara pemerintah pusat dan daerah  | 5,000                        | 5,000   | 5,000   | APBN                    | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah   |
|    |                 | Koordinasi dengan BNPB dan BPBD dan instansi terkait untuk menyusun mekanisme kerja dan merencanakan dukungan sar-pras                               | Mabes TNI dan Kowil   |  | Terpenuhinya dukungan alpa/sarana, dan kesehatan prasarana PRCPB ditingkat pusat dan daerah (secara bertahap)   | 12,650                       | 18,245  | 21,378  | APBN                    | Siog TNI  |
|    |                 | Tertindakannya koordinasi dalam perencanaan dan pemantauan Program PRB di tujuh Provinsi   | NTT<br>Sumbang<br>Bengkulu<br>Ambon, Maluku<br>Jawa Tengah<br>DIY<br>Sulteng                | Kota Palu  | Dokumen Perencanaan Program dan terlaksananya kegiatan Pemantuan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB)   | 275                          | 275     |         | PHLN                    | Bappenas  |
|    |                 | Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)   | NTT<br>Sumbang<br>Bengkulu<br>Ambon, Maluku<br>Jawa Tengah<br>DIY<br>Sulteng                | Kota Palu  | Tertindakannya Kegiatan sosialisasi Pedoman Penyusunan RPB  | 350                          | 400     |         | PHLN                    | BNPB  |
|    |                 | Meningkatnya pemahaman Pemerintah Provinsi ttg Mekanisme Penyusunan RTRW Berbasis Mitigasi Bencana   | Jawa Tengah<br>DIY<br>Bengkulu<br>NTT<br>Sulteng  | Kota Palu  | Tertindakannya Kegiatan sosialisasi ttg Perda RTRW Berbasis Mitigasi Bencana  | 275                          | 275     |         | PHLN                    | KEMDAGRI kerjasama dgn kem. PU, BNPB dan Pemerintah Daerah Jateng, DIY, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu |
|    |                 | Terbentuk dan meningkatnya kapasitas dari 5 forum tematik dan 7 Forum PRB Daerah dalam hal tugas, kewenangan, dan sumber dayanya terkait dengan PRB. | Sumbang<br>Bengkulu<br>DIY-Jateng<br>Sulteng<br>NTT<br>Maluku<br>Jawa Timur,<br>Jawa Tengah | Gunung Talang<br>Gunung Merapi<br>Das Benmerain<br>Gunung Semeru<br>DAS Bengawan Solo<br>Kota Palu | 1) Terbentuk dan beroperasinya 5 forum PRB serta 7 forum tematik ; 2) Tersusunnya program kerja yang koheren dan mawadahi kebutuhan antar pemangku kepentingan dengan sumber daya yang saling komplementer; 3) Adanya mekanisme kerja yang jelas antar para pemangku kepentingan. | 636                          | 546     |         | PHLN                    | BNPB (bekerjasama dengan PLANAS dan BPBD serta forum PRB lainnya)   |

| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi  |   | Indikator Kinerja | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |            |   | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|---|---|---|---|-------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------------|
|     |   |   | Propinsi  | Kab/Kota  |                   | Th 2010                      | Th 2011    | Th 2012   |                  |                        |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)               | (7)                          | (8)        |   |                  |                        |
|     | 6 BPBD provinsi dan 1 BPBD Kota dapat menjalankan mandatnya (Turfoks) sesuai dengan peraturan daerah dan perundangan yang ada   | Sumber NTT Maluku DIY Jateng Sulteng Bengkulu                 | Kota Palu   | Adanya peningkatan kapasitas fungsional (teknis) dan managerial baik dalam aspek kelembagaan maupun SDM   | 555               | 565                          | PHLN       | KEMDAGRI, BNPB, (bekerjasama dengan BPBD atau instansi penangungjawab PB di wilayah tsb)  |                  |                        |
|     | Adanya peningkatan kapasitas BNPB (secara kelembagaan dan personal) dalam menjalankan mandatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.  | Nasional (BNPB)   |   | 1) Teriaksananya pelatihan untuk para pejabat dan staf struktural BNPB dalam aspek fungsional dan managerial sesuai dengan tupoksinya; 2) Terbentuknya Pokja tematik dengan berbagai sektor terkait.  | 1.390             | 1.100                        | PHLN       | BNPB  |                  |                        |
|     | Terwujudnya sinkronisasi, kerja sama dan kemitraan antar para pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan PRBBK di 6 provinsi lokasi SCDRR melalui penyelenggaraan Konferensi PRBBK VI, pertemuan koordinasi reguler, dan pemantauan ke lapangan | Sumber Bengkulu Di Yogyakarta Jawa Tengah NTT Sulteng Makasar | Kota Palu   | 1) Adanya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program PRBBK antar pemangku kepentingan; 2) Adanya kerjasama yang terfasilitasi; 3) Adanya kegiatan lokakarya, seminar dan konferensi terselenggarakan; 4) Adanya kegiatan pemantauan ke lapangan yang terjadwal | 405               | 825                          | PHLN       | BNPB, Bappenas, KEMDAGRI  |                  |                        |
|     | CSO s and Government  | Jakarta   |   | #of IEC materials produced/guideline for advocacy developed   | 76.5              |                              | PHLN       | ECB Indonesia (Care-CRS-Oxfam-World Vision-Save the Children-Mercy Corps-UNICEF-UNLV)   |                  |                        |
|     | District government officers, agencies and other stakeholders   | NTT NTB Papua Papua Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah      | Belu, TTU, TTS, Ende, Manggarai, Lembata and 1 more to be determined. Jayawijaya, Nabire Sangihe Donggala | \$ A coordination mechanism is operational in each targeted district.   | 11.000            | 10.000                       | 5.000 PHLN | 1. Oxfam<br>2. PMPB (Belu, TTU, TTS)<br>3. FRD (Ende, Manggarai, Lembata)<br>4. Perkumpulan Kelola (Sangihe)<br>5. Yayasan Lambata (Donggala)<br>6. IDEA<br>7. IDEP<br>8. dan sekitar 7 LSM local lain yang akan diidentifikasi |                  |                        |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)                                       |   | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |           |           | Sumber Pendanaan<br>(7)          | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)  |
|-----------|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                             | Th 2011   | Th 2012   |                                  |  |
|           |                 | Local Government (district level)  | Kalimantan Barat<br>Sulawesi Tengah<br>Papua<br>NAD |   | #CP developed and implemented  | 284.1                               | 284.1     | 284.1     | PHLN, Donors<br>(1 US\$ = 9,470) | World Vision Partners<br>(Local Government)  |
|           |                 | Bappeda, BPBD Kabupaten/<br>Keshbanglinmas, SKPD terkait, dan<br>LSM lokal         | Jateng<br>NTT<br>NTB                                | Rembang dan<br>Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu | - Terdapatnya RPB, RAD PRB, dan<br>RenKon di tingkat kabupaten dengan<br>anggaran yang cukup   | X                                   | X         | X         | PHLN                             | Plan Indonesia   |
|           |                 | Bappeda, BPBD Kabupaten/<br>Keshbanglinmas, SKPD terkait, dan<br>LSM lokal         | Jateng<br>NTT<br>NTB                                | Rembang dan<br>Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu | Terdapatnya Perencanaan<br>Pembangunan yang bersifat efektif PRB<br>di tingkat Kabupaten, Alokasi anggaran<br>Kabupaten untuk PRB  | X                                   | X         | X         | PHLN                             | Plan Indonesia   |
|           |                 | Mainstreaming DRR in regular<br>development and through post-<br>disaster recovery |   |   | Support for the mainstreaming of DRR<br>in: (i) sectoral development programs;<br>(ii) regional and local development<br>programs; (iii) World Bank and donor<br>financed development programs and<br>projects | 10.101.33                           | 10.101.33 | 10.101.33 | PHLN                             | National Development<br>Planning Agency<br>(BAPPENAS), Ministry of<br>Public Works, Local<br>Governments, Civil<br>Society, World Bank |
|           |                 |  |   |   | Support to national and local strategy<br>for DRR and CCA linkages   | 789.17                              | 789.17    | 789.17    | PHLN                             | National Council for<br>Climate Change (DNPI),<br>National Disaster<br>Management Agency<br>(BNPBP)                                    |
|           |                 | Tingkat yasan Bina Swadaya,<br>unit usaha dan program/kegiatan                     | Jakarta   |   | Kelembagaan PRB di Bina Swadaya<br>berfungsi   |                                     |           |           |                                  | Bina Swadaya   |
|           |                 | BDPB tingkat kabupaten/kota,<br>Forum PRB di desa                                  | Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur                 |   | Koordinasi dan kerjasama BDPB<br>dengan Forum PRB masyarakat di<br>tingkat desa, Kelembagaan PRB<br>berfungsi  |                                     |           |           |                                  | BINA SWADAYA   |
|           |                 | Masyarakat desa ring I Kelut   | Jawa Timur  | Desa ring I Gunung<br>Kelut                           | terbentuknya forum lokal komunitas<br>Kelut  |                                     |           |           | Swasta/<br>Masyarakat            | Sampoerna, PSMB UPN<br>Jogjakarta, Perkumpulan<br>Skala  |



| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)   |  | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)   |
|-----------|-----------------|---|---|--|--|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------|---|
|           |                 |   | Propinsi  | Kab/Kota   |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                         |   |
|           |                 | Board Members, Staff, Volunteers,<br>DM Village Committee | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya,<br>Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | DRR institutionalized into PMI structure<br>and function at all levels | 2,356                               | 159,730 |         | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI National<br>Headquarter, PMI<br>Chapter, PMI Branch,<br>Community |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  |   | Lokasi<br>(4)  |                | Indikator Kinerja<br>(5) | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                       |   | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|---|---|--|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
|           |                 | Propinsi  | Kab/Kota  | Th 2010  | Th 2011<br>(6) |                          | Th 2012                      |                       |   |                         |                               |
|           | Staff           | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang KlATEN, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara | Number of Focal point at national, province and district level with authority and resources to co-ordinate all related stakeholders on DRR and CCA | 2,359          | 1,554                    | 1,389                        | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch |                         |                               |
|           | PMI             | PMI NHQ.  |   | Ongoing dialogue, coordination and information exchange between DRR disaster managers and development sectors at all levels.                       | 200            | 200                      | 200                          | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National Headquarter                          |                         |                               |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                          |
|-----------|-----------------|--|---|---|--|------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                         |  |
|           |                 | KSR (Volunteers Corps), TSR (Skilled Volunteers), CBAT (Community Based Action Team) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta,<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Number of KSR, TSR and CBAT recruited to be mobilized for DRR Activities | 274.40                       | 2.55    |         | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHO, PMI Chapter,<br>PMI Branch,<br>Community, LGU |

| No  | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi  |   | Indikator Kinerja | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |                |                       | Sumber Pendanaan                       | Pelaksana/ Koordinator |
|---|--|---|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|
|   |  |   | Propinsi  | Kab/Kota  |                   | Th 2010                       | Th 2011        | Th 2012               |  |                        |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   |   | (5)               | (6)                           |                |                       | (7)                                    | (8)                    |
|   | Board Members, Staff, Volunteers   | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-Bau<br>Kutai Kartanegara | Capacity of Board Members, Staff and Volunteers increased   | 4,166             | 3,702                         | 3,702          | Swasta/<br>Masyarakat | PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch       |                        |
|   | PMI's Staff and Volunteers   | 33 Provinces and 408 Districts  |   | Staff and Volunteers developed<br>DRR/CCA Planning based on comprehensive vulnerability and capacity assessment | 34                |                               |                | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter            |                        |
|   | PMI Staff  | PMI NHQ   |   | Logistic Management performed well to support Disaster Response Services  | 200               | 200                           | 200            | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter            |                        |
|   | PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch   | PMI NHQ   |   | Central Warehouse and Regional Warehouse in place, managed and functioned properly                              | 1,000             | 1,000                         | 1,000          | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter            |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUATA Rp)</b>          |  |   |   |   | <b>204,463</b>    | <b>393,458</b>                | <b>255,261</b> |                       |  |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM A (JUATA Rp)</b>           |  |   |   |   | <b>204,463</b>    | <b>393,458</b>                | <b>255,261</b> |                       |  |                        |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b> |  |   |   |   |                   |                               |                |                       |  |                        |
| 1   | Pengendalian dan pengkajian ancaman bencana  | Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana  | Daerah rawan bencana  | Jumlah kajian ancaman bencana yang dilaksanakan   | 30,000            | 36,000                        | 42,000         | APBN, APBD, PHLN      | BNPB                                   |                        |
|   | 1. Karakteristik geologi dan daya dukung keteknikkan tanah serta zonasi potensi likuifaksi | Banten<br>Bali  |   | Dipergunakannya peta zonasi likuifaksi oleh pemangku kepentingan  | 290               | 320                           | 350            | APBN                  | PTLWB BPPT<br>LPI, Puslit Geoteknologi |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)    |         |  | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|----------|---|--|--|--|---------------------------------|---------|--|--|------------------------|
|     |          |   | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                         | Th 2011 | Th 2012  |  |                        |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)  |  | (5)  | (6)                             | (7)     | (8)  |  |                        |
|     |          | Memfasilitasi daerah dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran.   | 10 provinsi  |  | Terkumpulnya informasi lokasi rawan bencana dari berbagai instansi terkait dan Pemerintah Daerah.  | 300                             | APBN    | KEMDAGRI   |  |                        |
|     |          | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana. Di daerah agar lebih terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.   | 7 provinsi dan 1 kota                                      |  | Terkumpulnya informasi lokasi rawan bencana dari berbagai instansi terkait dan Pemerintah Daerah.  | 4,000                           | PHLN    | KEMDAGRI   |  |                        |
|     |          | Terlaksananya kegiatan SCDRR baik di pusat dan daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.  | 7 provinsi dan 1 kota                                      |  | Tersosialisasinya kriteria dan kerangka pelaksanaan proyek SCDRR   | 1,000                           | APBN    | KEMDAGRI   |  |                        |
|     |          | Menjadikan posko Depdagri sebagai pusat komunikasi dan koordinasi penanggulangan bencana.   | Jakarta  |  | Tersedianya data dan informasi mengenai kebencanaan di daerah di Posko Bencana depdagri  | 500                             | APBN    | KEMDAGRI   |  |                        |
|     |          | Instansi kesehatan prov & kab/kota  | Setiap prov & kab/kota                                     |  | Adanya antipisasi terhadap setiap ancaman bencana yang timbul  |                                 | APBN    | PPK Kementerian Kesehatan                                    |  |                        |
|     |          | 1). Tersusunnya Peta Risiko Bencana yang memenuhi kaidah pemetaan, memiliki legitimasi di kalangan pemangku kepentingan dan mudah diakses publik; 2). Adanya penguatan database kebencanaan di tingkat nasional (dan daerah); 3) Tersusun-nya buku data bencana 30 tahun dan buku profile bencana di lima provinsi. | DIY<br>Jawa Tengah<br>Bengkulu<br>Sumbat<br>NTT<br>Sulteng | Kota Palu  | 1) Adanya Peta Risiko Bencana yang menjadi acuan para pemangku kepentingan dan sinkron antara pusat dan daerah; 2) Adanya database kebencanaan (DIB) yang menjadi acuan para pemangku kepentingan dan sinkron antara pusat dan daerah; 3) Jumlah buku data bencana 30 tahun dan buku profile bencana per-provinsi yang dicetak (dan terdiseminasikan). | 1,468                           | PHLN    | BNPB (bekerjasama dengan K/L terkait, PT/PSB, BPBD dan NGOs) |  |                        |
|     |          | ECB members-CBO s-government  | Jakarta  |  | CP of ECB members compiled   | 22.5                            | PHLN    | PHLN   | ECB Indonesia (Care-CRS)<br>Oxfam-World Vision-<br>Save the Children-Mercy<br>Corps-MPBI-IMC |                        |
|     |          | BNPB dan LSM internasional  | Nasional<br>Jakarta  |  | Pelatihan rencana kontinjensi dan KZB berjalan dengan rutin dengan dukungan dari berbagai pihak.   | On-going dengan staff yang ada. | PHLN    | PHLN   | OCHA   |                        |
|     |          | Staf lembaga pemerintahan dan LSM lokal   | Jateng<br>NTT<br>NTB                                       | Rembang dan Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan studi banding   | X                               | X       | X  | PHLN   | Plan Indonesia         |

| No   | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi  |  | Indikator Kinerja | Indikasi Pendanaan (JUITA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator           |
|--|---|---|---|--|-------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------|----------------------------------|
|  |   |   | Propinsi  | Kab/Kota   |                   | Th 2010                       | Th 2011 | Th 2012 |                    |                                  |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)   |  | (5)               | (6)                           |         |         | (7)                | (8)                              |
|  | Guru Sekolah  | Jakarta Jawa Barat DIY Jateng NTT NTB                           | Bogor Bantul Rembang dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu | - Modul panduan tersedia untuk guru  | X                 | X                             | X       | X       | PHLN               | Plan Indonesia                   |
|  | masyarakat rawan bencana kebakaran & banjir, pemukiman yg sering terjadi musibah                                    | perumahan padat kota besar Jakarta                              |   | berhasil disediakan file tentang bencana didaerah tersebut   |                   |                               |         |         |                    | PKPU                             |
|  | Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan  | Jakarta   |   | Teridentifikasi berbagai jenis ancaman dan sifatnya  | 100               | 100                           | 100     | 100     | Swasia/ Masyarakat | BINA SWADAYA                     |
|  | Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat   | Bengkulu NTT Kalimantan Timur Jawa Timur DIY                    |   | Teridentifikasi berbagai jenis ancaman dan sifatnya  |                   |                               |         |         |                    | BINA SWADAYA                     |
|  | Pemda dan para pemangku kepentingan tingkat propinsi dan kabupaten/ kota rawan erupsi gunungapi, longsor dan banjir |   |   | Para pemangku kepentingan mampu mengkaji karakter ancaman di wilayahnya untuk digunakan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan rencana pengurangan risiko.bencana | 100               | 100                           | 100     | 100     | Swasia/ Masyarakat | PSMB UPN Veteran dan mitra lokal |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUITA Rp)</b> |   |   |   |  |                   |                               |         |         |                    |                                  |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana   | Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melakukan analisis risiko bencana | Daerah rawan bencana                                      | Jumlah dokumen analisis risiko bencana yang dilaksanakan   | 37.681            | 36.635                        | 42.450  | 50.400  | APBN, APBD, PHLN   | BNPB                             |
|  | 1. Konsep penyusunan tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana   | Jawa Tengah   |   | Diterapkannya model/konsep penyusunan tata ruang berbasis mitigasi bencana   | 280               | 310                           | 340     | 340     | APBN               | LIPI, Puslit Geoteknologi        |
|  | 2. Diketuainya model prediksi   | Jawa Tengah   |   | Diterapkannya konsep mitigasi tld  | 285               | 315                           | 345     | 345     | APBN               | LIPI, Puslit Geoteknologi        |
|  | 3. Diketuainya parameter curah hujan sebagai pemicu longsor dan berkurangnya korban akibat bahaya tersebut          | Jawa Barat Jawa Tengah  |   | Berkurangnya korban dan kerugian akibat bencana longsor  | 270               | 300                           | 330     | 330     | APBN               | LIPI, Puslit Geoteknologi        |
|  | Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian masalah kelembagaan dan ketatalaksanaan bidang kebencanaan di daerah.      | 7 provinsi  |   | Terselenggaranya kelembagaan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.  | 400               |                               |         |         | APBN               | KEMDAGRI                         |
|  | Instansi kesehatan prov & kab/kota  | Setiap prov & kab/kota  |   | Adanya penilaian tingkat kerawanan bencana di setiap kab/kota  | 1.022             | 1.175                         | 1.351   | 1.351   | APBN               | PPK Kementerian Kesehatan        |
|  |   | National Level  |   |  |                   |                               |         |         | APBN               | Badan Geologi, KESDM             |
|  |   |   |   |  |                   |                               |         |         |                    | UN TWG DRR (Convergence Group)   |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |                               | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|---|----------|---|--|--|--|------------------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|
|   |          |   | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012                       |   |                        |
| (1)   | (2)      | (3)   | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)           | (8)                           |   |                        |
|   |          | masyarakat rawan bencana kebakaran & banjir, pemukiman yg sering terjadi musibah<br>Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan      | Jakarta  | Jakarta  | berhasil disediakan file tentang bencana di daerah tersebut  |                              |               | PKPU                          |   |                        |
|   |          | Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat   | Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur  |  | Teridentifikasi tingkat risiko suatu ancaman berdasarkan tingkat kapasitas dan Kerentanan lembaga menangani PRB di berbagai tingkatan  |                              |               | BINA SWADAYA                  |   |                        |
|   |          | Pemerintah RI<br>Pemprov NAD<br>Pemda dan para pemangku kepentingan tingkat propinsi dan kabupaten/ kota rawan erupsi gunungapi, longsor dan banjir | Indonesia<br>Indonesia<br>Jawa Timur<br>DIY  |  | Draft Peta Index Risiko<br>Draft hasil risk assessment<br>Para pemangku kepentingan mampu melakukan analisis risiko bencana di wilayah kerjanya untuk digunakan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan rencana pengurangan risiko bencana | 100<br>100                   | 100           | PHLN<br>Swasta/<br>Masyarakat | PMB-ITB<br>PMB-ITB<br>PSMB UPN Veteran dan mitra loka Veteran |                        |
|   |          | Community   | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yo., akarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yo., akarta Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara | PMI research capacity in hazards, risk and disaster studies  | 300                          |               | Swasta/<br>Masyarakat         | PMI National Headquarter                                      |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b> |          |   |  |  |  | <b>38,657</b>                | <b>45,400</b> | <b>52,866</b>                 |   |                        |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi  |   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)          |                            |  | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator |
|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------|
|   |  |  | Propinsi  | Kab/kota  |   | Th 2010                               | Th 2011                    | Th 2012  |  |                        |
| 3   | Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana | <p>(3)</p> <p>Teridentifikasi tindakan PRB di seluruh Provinsi dan kab/kota</p> <p>Minimalisasi gangguan DFI</p> <p>Penguatan kapasitas Peringatan Dini Bencana(PDB) pada Aparat dan pelaku PRB</p> <p>Meningkatnya pemahaman aparatur penda dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>Instansi kesehatan prov &amp;kab/kota</p> <p>Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam PRB melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi</p> <p>masyarakat rawan bencana kebakaran &amp; kebanjiran, pemukiman yg sering terjadi musibah</p> <p>Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan</p> <p>Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat</p> <p>Board Members, Staff, Volunteer</p> <p>PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, community</p> | <p>(4)</p> <p>Daerah rawan bencana</p> <p>33 Prop.</p> <p>Nasional</p> <p>Sulawesi</p> <p>NTT</p> <p>Papua</p> <p>Sumatera Barat</p> <p>Bengkulu</p> <p>10 provinsi</p> | <p>(5)</p> <p>Jumlah Informasi tindakan PRB kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan</p> <p>Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)</p> <p>Terlaksananya pelatihan serta penguatan kapasitas aparat dan pelaku PDB dalam PRB yang didukung perguruan tinggi dan lembaga pendidikan terkait daerah</p> <p>Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah daerah dalam usaha Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran.</p> <p>Adanya hasil evaluasi upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan</p> <p>Adanya sejumlah Perda/Pergub, PerBup/Walikota tentang PRB</p> <p>berhasil disepakati jalur evakuasi &amp; jalur logistik jika bencana berulang</p> <p>Diperoleh tindakan PRB berikut tingkat pelaksanaannya</p> <p>Diperoleh tindakan PRB berikut tingkat pelaksanaannya</p> <p>Number of Relief to Recovery activities which felect the attainment of DRR and CCA</p> <p>PMI-managed contingency funds (part of or separate from other savings initiatives).</p> <p>Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN</p> | <p>(6)</p> <p>40,000</p> <p>1,500</p> <p>3,000</p> <p>3,000</p> | <p>48,000</p> <p>3,000</p> <p>500</p> | <p>56,000</p> <p>1,000</p> | <p>(7)</p> <p>APBN, APBD, PHLN</p> <p>APBN</p> <p>APBN</p> <p>APBD</p> <p>APBN</p> <p>PHLN</p> <p>PKPU</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>Swasta/ Masyarakat</p> <p>Swasta/ Masyarakat</p> <p>59,164</p> <p>363 APBN</p> | <p>(8)</p> <p>BNPB</p> <p>Kementerian Pertanian</p> <p>LPI, Puslit Oseanografi</p> <p>KEMDAGRI</p> <p>PPK Kementerian Kesehatan</p> <p>BNPB kerjasama dgn Pemerintah Daerah</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>PMI National Headquarter</p> <p>PMI National Headquarter</p> <p>BAPETEN</p> |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b> |  |  |   |   |   | <b>46,966</b>                         | <b>53,844</b>              | <b>59,164</b>  |  |                        |
| 4   | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan     | <p>Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN</p>   | Jakarta   |   | 300   | 330                                   |                            |  |  |                        |



| No  | Kegiatan    | Sasaran   | Lokasi                                      |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |          |          | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator      |
|-----|-------------|---|---|----------|---|------------------------------|----------|----------|------------------|-----------------------------|
|     |             |   | Propinsi                                    | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011  | Th 2012  |                  |                             |
| (1) | (2)         | (3)   | (4)   |          | (5)   | (6)                          |          |          | (7)              | (8)                         |
|     | perundangan | Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN        |   |          | Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN  |                              |          |          |                  |                             |
|     |             | Tersusunnya dokumen perencanaan dan peraturan perundangan   | Propinsi dan kab/kota                       |          | Seluruh pengambil keputusan dan stakeholder mempunyai komitmen untuk menyusun dokumen perencanaan dan peraturan perundangan   | 12,000                       | 14,400   | 16,800   | APBN, APBD, PHLN | BNPB                        |
|     |             | Terlaksananya sosialisasi PDAS  | 33 Propinsi                                 |          | Terlaksananya sosialisasi PDAS di 33 Propinsi   | 1,100                        | 1,100    | 1,100    | APBN             | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS |
|     |             | berfungsinya SSOP di 36 BPDAS   | 33 Propinsi                                 |          | berfungsinya SSOP di 36 BPDAS   | 2,000                        | 2,000    | 3,200    | APBN             | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS |
|     |             | 2 kegiatan (Penyusunan Pedoman dan Perencanaan Program)   | Jakarta                                     |          | Terselenggaranya kegiatan penyusunan perencanaan program dan buku pedoman yang terfokus pada Program Utama Depsos dalam sistem PB Nasional yaitu : "CCBDM" (Community Centre Based Disaster Management) atau penanggulangan bencana terpadu yang berbasis masyarakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat secara terpadu agar lebih siap-siaga untuk menghadapi bencana yang akan datang melalui proses early warning system, rapid response dan social recovery | 3,744.28                     | 4,493.14 | 5,391.77 | APBN             | Kem. Sosial                 |
|     |             | Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi untuk memudahkan Pemerintah Daerah apabila terjadi bencana | Jatim<br>Sulut<br>Sumbar<br>Jabar<br>Jateng |          | Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi yang dapat diaktifkan untuk tanggap darurat bencana geologi bagi Pemerintah Daerah   | 703                          | 808      | 929      | APBN             | Badan Geologi, KESDM        |
|     |             | Meningkatnya Ketahanan dan Pengetahuan Masyarakat/Lembaga mengenai Kebencanaan Geologi            | Jabar<br>Jateng<br>Jatim<br>Sumbar          |          |   |                              |          |          | APBN             | Badan Geologi, KESDM        |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi  |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator                          |
|-----|----------|--|---|--|--|-------------------------------|---------|---------|------------------|---|
|     |          |  | Propinsi  | Kab/Kota   |  | Th 2010                       | Th 2011 | Th 2012 |                  |   |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)   |  | (5)  | (6)                           |         |         | (7)              | (8)   |
|     |          | Terfasilitasinya rencana mitigasi bencana di 30 kawasan  | Sumatera Barat<br>Bengkulu<br>Jawa Timur<br>NTT<br>Sulawesi Tenggara<br>Lampung<br>Bengkulu<br>Jawa Tengah<br>Jawa Barat<br>DIY<br>NTB<br>NAD<br>Sulawesi Utara<br>Papua<br>Jawa Timur<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Selatan<br>Gorontalo<br>Sulawesi Tengah<br>Maluku<br>Papua Barat |  | Persentase kawasan pesisir yang mengadopsi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dalam perencanaan daerahnya           | 2,000                         | 4,000   | 6,000   | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan                       |
|     |          | Terusunnya norma, stantar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil        |   |  | Jumlah NSPK tentang mitigasi bencana yang dilengkapi dengan data bencana terkini   | 200                           | 100     | 100     | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan                       |
|     |          | Terusunnya 3 dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis mitigasi bencana | Sumber NTT  | 2010: Kabupaten Pesisir Selatan (Sumber) dan Kabupaten Alor (NTT); 2011: Kabupaten/Pulau kecil lainnya | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil   | 800                           | 450     |         | PHLN             | BNPB bekerja sama dgn Kem. Kelautan & Perikanan |
|     |          | Terusunnya Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat            | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung  |  | Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat | 600                           | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA                                    |
|     |          | Terusunnya Kebijakan tentang Kedaruratan Gangguan Kesra  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung  |  | Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang Kedaruratan Gangguan Kesejahteraan Rakyat                                  | 600                           | 750     | 750     | APBN             | KEMENKOKESRA                                    |
|     |          | Memantapkan kesamaan tujuan bagi Pemda dalam pembentukan BPBD  | 5 provinsi  |  | Tersusunnya pedoman penanggulangan bencana bagi daerah dalam pembentukan BPBD  | 300                           |         |         | APBN             | KEMDAGRI  |
|     |          | Meningkatkan kesiapsiagaan aparat Pemda dalam penanggulangan wabah   | 5 provinsi  |  | Tersusunnya pedoman kesiapsiagaan aparat dalam penanggulangan wabah di daerah.   | 300                           |         |         | APBN             | KEMDAGRI  |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |           | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator  |
|-----|----------|---|--|-----------|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---|
|     |          |   | Propinsi   | Kab/Kota  |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |   |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)  |           | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)     |                  |   |
|     |          | Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana   | Jakarta  |           | Tersedianya Peraturan Menteri tentang standar keselamatan perkeretaapian nasional  | 400                          | -       | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian                   |
|     |          | Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana   | Jakarta  |           | Tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman audit keselamatan sarana dan prasarana KA                                    | 400                          | -       | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian                   |
|     |          | Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana   | Jakarta  |           | Tersedianya peraturan tentang pedoman penelitian, pemeriksaan dan penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana | 400                          | -       | -       | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian                   |
|     |          | Pusat Penanggulangan Krisis   | Pusat  |           | Terlaksananya upaya penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur yang ada   |                              |         |         | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan   |
|     |          | Tersusunnya kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana di Tk Nasional dan sosialisasinya kepada Pemerintah Provinsi                | Nasional<br>Jateng<br>DIY<br>Bengkulu<br>Sumbang<br>NTT<br>Maluku<br>Sulteng | Kota Palu | Dokumen Kebijakan dan Strategi PB dan terlaksanakannya kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Strategi PB                      | 450                          | 400     |         | PHLN             | BNPB kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jateng, DIY, Sumbang, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu |
|     |          | Tersusunnya Petunjuk Tehnis Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) ditingkat Nasional dan sosialisasinya pada Pemerintah Provinsi | Nasional<br>Jateng<br>DIY<br>Bengkulu<br>Sumbang<br>NTT<br>Maluku<br>Sulteng | Kota Palu | Petunjuk Tehnis Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) dan Sosialisasinya  | 250                          | 250     |         | PHLN             | BNPB kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jateng, DIY, Sumbang, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu |
|     |          | Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berbasis Mitigasi Bencana Provinsi dan Kota   | Jateng<br>Bengkulu<br>NTT<br>Maluku<br>Sulteng                               | Kota Palu | Jumlah Dokumen RTRW Berbasis Mitigasi Bencana, Tingkat Provinsi dan Kota   | 600                          | 550     |         | PHLN             | KEMDAGRI kerjasama dgn Kem. PU, BNPB, PemProv Jateng, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu           |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi   |           | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |                          |   | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|----------|--|--|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|---|---|------------------------|
|     |          |  | Propinsi   | Kab/Kota  |   | Th 2010                       | Th 2011                  | Th 2012   |   |                        |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)  |           | (5)   | (6)                           | (7)                      | (8)   |   |                        |
|     |          | Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tingkat Provinsi dan Kota   | Jateng<br>Bengkulu<br>NTT<br>Maluku<br>Sulteng       | Kota Palu | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tingkat Provinsi dan Kota   | 600                           | 550                      | PHLN  | KEMDAGRI kerjasama dgn BNPB, PemProv Jateng, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu      |                        |
|     |          | Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tk Provinsi dan Kota  | Jateng<br>Bengkulu<br>NTT<br>Maluku<br>Sulteng       | Kota Palu | Jumlah Dokumen Renstra BPBD Tk Provinsi dan Kota  | 600                           | 550                      | PHLN  | KEMDAGRI kerjasama dgn BNPB, PemProv Jateng, DIY, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu |                        |
|     |          | Tersusunnya 5 dokumen RPB, 5 dokumen RAD PRB, 5 dokumen Renkon, dan 5 dokumen rekomendasi pengintegrasian PRB ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang/menengah, RTRW dan rencana kerja pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas daerah | Sulteng<br>Jawa Tengah<br>Bengkulu<br>Sumbang<br>NTT |           | 1) Jumlah peta risiko bencana tingkat Kab/kota yang tersusun secara partisipatif 2) Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tingkat Kab/kota, 3) Jumlah RAD PRB tingkat kkabupaten/kota yang tersusun, 4) Jumlah Renkon tingkat kabupaten/kota yang tersusun, 5) Jumlah draft Rumusan Pengintegrasian PRB dalam dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM, RTRW, RKPD) yang dihasilkan. | 2.500                         | 1.975                    | PHLN  | BNPB  |                        |
|     |          | Multi-pemangku kepentingan   | Nasional<br>Jakarta                                  |           | Informasi tersebar dan koordinasi berjalan dengan baik.   | On-going dengan staff         | -                        | PHLN  | OCHA  |                        |
|     |          |  | Nasional   |           |   | 6,017,4                       |                          | PHLN, AusAID, (AUD 2,050,000 between 2008 and 2010) | IFRC/PMI  |                        |
|     |          | Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll  |  |           |   | Belum bisa diindikasikan      | Belum bisa diindikasikan | PHLN  | Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll                  |                        |
|     |          |  | National Level                                       |           |   |                               |                          |   | UNICEF/BPNB/PMI   |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator                                       |
|-----|----------|---|---|----------|--|------------------------------|---------|---------|-----------------------|--|
|     |          |   | Propinsi  | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                       |  |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)   |          | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)     |                       |  |
|     |          |   |   |          | Support to the capacity development of Government of Indonesia's effort to mainstream DRR into rehabilitation and reconstruction framework         | 2,367.5                      | 2,367.5 | 2,367.5 | PHLN                  | National Disaster Management Agency (BNPB), UNDP, World Bank |
|     |          | BDPB Kab/Kota, Pemerintah Desa                                      | Jakarta   |          | Ada konsep dan kegiatan PRB dalam kegiatan pemerintah maupun mitra Bina Swadaya, Ada Perda dan Pesrdes yang disusun bersama masyarakat (Forum PRB) |                              |         |         |                       | BINA SWADAYA   |
|     |          | Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur                                 |   |          |  |                              |         |         |                       |  |
|     |          | Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan          | Jakarta   |          | Ada rencana aksi BDPB, pemerintah desa dan Forum PRB/masyarakat  |                              |         |         |                       | BINA SWADAYA   |
|     |          | Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat | Bengkulu<br>NTT   |          | Ada rencana aksi BDPB, pemerintah desa dan Forum PRB/masyarakat  |                              |         |         |                       | BINA SWADAYA   |
|     |          | Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi .                     | Kalimantan Timur<br>Jawa Tengah<br>DIY<br>Jawa Timur<br>NTT |          | Terdapat pengkajian partisipatif di tingkat komunitas  | 100                          | 100     | 100     | Swasta/<br>Masyarakat | PSMB UPN Veteran   |
|     |          | Board Members, Staff, Volunteers                                    | PMI NHQ   |          | PMI DRR policy include strategy and implementation plan, based on clear and clearly stated vision and priorities, with targets                     | 25                           | 25      | 25      | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National Headquarter                                     |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)                   | Lokasi<br>(4)   |  | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                    |
|-----------|-----------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|
|           |                 |                                  | Propinsi  | Kab/Kota   |   | Th 2010                              | Th 2011 | Th 2012 |                         |  |
|           |                 | PMI Chapter, PMI Branch          | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang KlATEN, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-Bau<br>Kutai Kartanegara | Number of PMI DRR Plan of Action integrated into Miusrenbang    | 605.80                               | 445.82  | 435.78  | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU |
|           |                 | Board Members, Staff, Volunteers | PMI NHQ   |  | PMI Disaster Risk Reduction Framework for 2010-2014 is in place | 100                                  |         |         | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI National Headquarter                         |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi  |  | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                       | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|--|--|---|---|--|---|------------------------------|----------------|-----------------------|---|------------------------|
|  |  |   | Propinsi  | Kab/Kota   |   | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012               |   |                        |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   |  | (5)   | (6)                          | (7)            | (8)                   |   |                        |
|  | Board Members, Staff, Volunteers, CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (local Government Unit) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta,<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Participatory Monitoring and Evaluation systems to assess resilience and progress in DRR | 1,624.9   | 683.4                        | 480.2          | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter, PMI<br>Chapter, PMI Branch,<br>Community |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUTA Rp)</b>  |  |   |   |  |   | <b>41,687</b>                | <b>37,078</b>  | <b>38,792</b>         |   |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM B (JUTA Rp)</b>   |  |   |   |  |   | <b>164,991</b>               | <b>172,956</b> | <b>193,272</b>        |   |                        |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |   |   |  |   |                              |                |                       |   |                        |
| <b>PROGRAM C - PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |   |   |  |   |                              |                |                       |   |                        |
| 4  | Penelitian tentang budaya sadar bencana akrab dengan budaya  | Penelitian masyarakat Jawa Barat tentang budaya sadar bencana   |   |  | Penelitian tentang komitmen dan dukungan di pusat, provinsi dan kab/kota dalam penyelenggaraan budaya sadar bencana dalam PRB | 20000                        | 57400          | 15700                 | PHLN  | UNN                    |
|  |  |   |   |  |   |                              |                |                       |   | PTLWB BPPT             |

| No | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8) |
|----|-----------------|---|---|----------|---|------------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------|
|    |                 |   | Propinsi  | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                         |                               |
|    |                 | Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di 30 kawasan       | Lampung<br>Jawa Barat<br>DIY<br>NAD<br>NTB<br>Bengkulu<br>Jawa Tengah<br>Sulawesi Utara<br>Papua<br>Jawa Timur<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Selatan<br>Gorontalo<br>Sulawesi Tengah<br>Maluku<br>Sumatera Barat<br>Papua Barat<br>Banten |          | Persentase masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana    | 500                          | 1,000   | 1,500   | APBN                    | Kem. Kelautan & Perikanan     |
|    |                 | Diffusi Pembelajaran Kebencanaan di daerah terkena dampak                     | NAD<br>Jawa Tengah  |          | Kajian metode efektif dalam difusi pembelajaran kebencanaan   | 200                          | 200     |         | APBN                    | LIPI, Puslit Oseanografi      |
|    |                 | pemahaman bentuk kearifan lokal di masyarakat berisiko bencana                | Sulawesi<br>NTT   |          | Kajian pengalaman bencana serta kaitannya dalam pembentukan kearifan lokal  | 500                          | 500     | 500     | APBN                    | LIPI, Puslit Oseanografi      |
|    |                 | Pendidikan Kebencanaan melalui Internet di Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset | Seluruh Propinsi  |          | Tersusunnya model pembelajaran E-learning   | 500                          | 200     | 200     | APBN                    | LIPI, Dikti-Kem. Diknas, BNPB |
|    |                 | transliterasi sains ke materi pendidikan kreatif bagi masyarakat umum         | Nasional<br>NAD<br>Sulawesi<br>NTT<br>Papua<br>Sumatera Barat<br>Bengkulu   |          | pengembangan alat peraga pendidikan PRB, media campaign   | 800                          | 1,500   | 500     | APBN                    | LIPI, Puslit Oseanografi      |
|    |                 | Partisipasi pelaku PRB lembaga akademis dalam advokasi PRB                    | Nasional<br>NAD<br>Sulawesi<br>NTT<br>Papua<br>Sumatera Barat<br>Bengkulu   |          | Penguatan jejaring, koordinasi dan komunikasi lembaga riset dan akademis tingkat nasional, regional/internasional | 500                          | 500     | 500     | APBN                    | LIPI, Puslit Oseanografi      |
|    |                 | pameran nasional dan daerah oleh pelaku PRB bagi masyarakat umum              | Nasional<br>NAD<br>Sulawesi<br>NTT<br>Papua<br>Sumatera Barat<br>Bengkulu   |          | Terlaksananya pameran Siaga Bencana nasional dan daerah   | 1,000                        | 1,300   | 500     | APBN                    | LIPI, Puslit Oseanografi      |



| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi   |   | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                          |                    | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|----------|--|--|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|---|------------------------|
|     |          |  | Propinsi   | Kab/Kota  |  | Th 2010                      | Th 2011                  | Th 2012            |   |                        |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)  |   | (5)  | (6)                          | (7)                      | (8)                |   |                        |
|     |          | Meningkatnya upaya pengembangan budaya keselamatan dan ketahanan masyarakat dan petugas di masing masing prov & kab/kota                         | Jawa dan Sumatera  |   | Teraksananya Safety Management System secara berkelanjutan   | -                            | 1,500                    | APBN               | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |                        |
|     |          | Masyarakat dan petugas di masing masing prov & kab/kota  | Setiap prov & kab/kota   |   | Peningkatan kepedulian dan kepekaan petugas kesehatan dan masyarakat akan risiko bencana   |                              |                          | APBN               | PPK Kementerian Kesehatan   |                        |
|     |          | Meningkatnya pemahaman dan kapasitas masyarakat mengenai PRB, melalui penguatan peran media, sektor swasta, LSM dan Pemerintah sebagai agen PRB. | Bengkulu Sumatera Barat DIY NTT Sulteng Jakarta Bali   | Kota Palu   | 1. Jumlah program kerjasama penyadaran publik yang dilakukan oleh media, sektor swasta, LSM dan Pemerintah. 2. Jumlah masyarakat yang paham PRB.     | 1,500                        | 1,000                    | PHLN               | BNPB  |                        |
|     |          | Jurnalis Masyarakat Desa dan Kabupaten   | Indonesia Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB  | Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu | - Jumlah jurnalis yang dilatih Jumlah Rencana Kontinjensi yang disusun di tingkat Desa, Jumlah Rencana Kontinjensi yang disusun di tingkat Kabupaten | X                            | X                        | X PHLN X PHLN      | Plan Indonesia Plan Indonesia   |                        |
|     |          | Pembuat kebijakan dan pelaku utama respon dalam kondisi darurat masyarakat setempat desa sekitar lokasi IDRR                                     | 9 regional Pusat Penanggulangan Krisis Depkes Jawa Barat   |   |  | Belum bisa diindikasikan     | Belum bisa diindikasikan | PHLN               | Kem. Kesehatan  |                        |
|     |          | Staff Bina Swadaya, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta         | Bengkulu NTT Kalimantan Timur Bengkulu NTT Kalimantan Timur Sumut Kepri Jakarta Jateng Jatim Bali Sultul Papua |   | Cerita ttg bencana ada dalam berbagai bentuk kesenian masyarakat Adanya solusi dan pembelajaran antar stakeholder                                    |                              |                          |                    | PKPU BINA SWADAYA BINA SWADAYA  |                        |
|     |          | Budaya sadar bencana di sekolah dan anak anak sekolah  |  |   | 800 schools reached & educated, 240,000 students educated  | 1,482.24                     | 1,482.24                 | Swasta/ Masyarakat | HOPE worldwide Indonesia (Yayasan Hope Indonesia), Dinas Pendidikan setempat      |                        |
|     |          | Masyarakat di kawasan rawan bencana letusan gunungapi, banjir dan longsor  | Jawa Tengah Jawa Timur DIY   |   | Terlaksananya kerja praktek dan KKN tematis untuk peningkatan kesadaran masyarakat di kawasan letusan gunungapi, banjir dan longsor                  | 50                           | 50                       | Swasta/ Masyarakat | PSMB UPN Veteran  |                        |
|     |          | Perubahan perilaku masyarakat setempat   | Jawa Barat   |   | Satu program dalam setahun   | 100                          |                          | Swasta/ Masyarakat | MAIPARK   |                        |

| No<br>(1)                                    | Kegiatan<br>(2)   | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)<br>(6) |                 |                 | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)   |
|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
|  |   |   | Propinsi  | Kab/Kota  |   | Th 2010                              | Th 2011         | Th 2012         |                         |   |
|  |   | Board Members, Staff, Volunteers; CBAT (Community Based Action Team), Community LGU (local Government Unit)   | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Knowledge about Safety and Resilience Community at different groups and levels increased  | 450                                  | 250             | 160             | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI National<br>Headquarter, PMI<br>Chapter, PMI Branch,<br>Community   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUATA Rp)</b> |   |   |   |   |   |                                      |                 |                 |                         |   |
| 2  | pemantauan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana | Pengadaan peralatan sesimik untuk studi prekursor gempa bumi<br><br>Penelitian Velocity Model local 15 lokasi<br><br>Penelitian seismisitas di berbagai zona sudduksi dan sesar yang ada<br><br>Terpentainya penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana<br>1. Diketahui pola pergerakan dan deformasi kulit bumi berdasarkan pengukuran GPS serta diketahuinya karakteristik kegempaan | Sumatera Barat  |   | Tersedianya fasilitas untuk penelitian prekursor gempa bumi dengan metoda sesimik<br><br>Meningkatnya Akurasi penentuan lokasi gempa bumi<br><br>Meningkatnya pemahaman tentang hubungan antara sistem sesar dan gempa bumi.<br><br>Jumlah informasi kegiatan pemantauan penggunaan teknologi berpotensi bencana<br><br>Diterapkannya konsep mitigasi thd pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami | 63,482<br>6,300                      | 75,182<br>6,300 | 83,810<br>6,600 | APBN<br>APBN            | BMKG DEPUTI BIDANG<br>GEOFISIKA<br><br>BMKG DEPUTI BIDANG<br>GEOFISIKA<br><br>BMKG DEPUTI BIDANG<br>GEOFISIKA<br><br>BNPB<br>PHLN<br><br>LPI, Puslit Geoteknologi |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi                       |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |               | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator   |
|---|---|--|------------------------------|----------|--|------------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
|   |   |  | Propinsi                     | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012       |                  |  |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)                          |          | (5)  | 1,000                        | 1,000         | 1,000         | (7)              | (8)  |
|   |   | Meningkatnya pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi prasarana KA pada lokasi rawan bencana       | Jawa dan Sumatera            |          | Teraksananya pemeriksaan jalan rel, jembatan dan terowongan 2-3 kali setahun   | 1,000                        | 1,000         | 1,000         | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian |
|   |   |  | Jakarta                      |          |  |                              |               |               | PHLN             | Institut Teknologi Bandung and Asian Disaster Preparedness Center    |
|   |   |  | Jakarta                      |          |  |                              |               |               | PHLN             | Institut Teknologi Bandung and Asian Disaster Preparedness Center    |
|   |   | masyarakat desa sekitar lokasi IDRR  | Jawa Barat                   | Bogor    |  |                              |               |               |                  | PKPU   |
|   |   | Staff Bina Swadaya, staff BDPB, anggota Forum PRB  | Bengkulu<br>NTT<br>KalTim    |          | Ada laporan hasil pemantauan secara rutin yang didiskusikan  |                              |               |               |                  | BINA SWADAYA   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b> |   |  |                              |          |  | <b>53,425</b>                | <b>62,455</b> | <b>71,785</b> |                  |  |
| 3   | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan | Terselenggaranya Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan                  | Indonesia                    |          | Laporan Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan   | 300                          | 330           | 363           | APBN             | BAPETEN  |
|   |   | Membangun kapasitas operasional  |                              |          | Terjadinya Kesinambungan operasional   | 900                          | 900           | 900           | APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|   |   | Melaksanakan studi untuk mengetahui prekursor gempa bumi menggunakan metoda geofisika secara terpadu |                              |          | Tersedianya informasi studi untuk menuju preonksi gempa bumi   | 500                          | 500           | 550           | APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|   |   | Setiap desa rawan bencana tersedia tenaga yang kompeten dalam PRB                                    | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah propinsi dan kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan kriteria   | 60,000                       | 72,000        | 84,000        | APBN, APBD, PHLN | BNPB   |
|   |   | 40 angk berasal dari masy.   | Jakarta<br>Jabar             |          | Terselenggaranya Kegiatan ini yang dapat memperkuat dukungan masyarakat secara terlatih dalam penanggulangan bencana terutama aspek-aspek meliputi: Pemahaman, Kesadaran, Tanggungjawab, Komitmen, Rasa memiliki, dan Partisipasi. | 6,328.59                     | 7,594.31      | 9,113.17      | APBN             | Kem. Sosial  |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)   |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)   |
|-----------|-----------------|--|---|----------|---|-------------------------------------|---------|-------------------------|---|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/kota |   | Th 2010                             | Th 2011 |                         |   |
|           |                 | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM perlindungan  | 33 Prop.  |          | SDM Perindungan mampu melakukan analisis DFI  |                                     |         | APBN                    | Kementerian Pertanian   |
|           |                 | Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana  | Jabar<br>Jateng<br>Jatim<br>Sumbar                        |          | Peningkatan Presentasi Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana Geologi                                     |                                     |         | APBN                    | Badan Geologi, KESDM  |
|           |                 | Kepala Bandar Udara dan personil Bandar udara siap menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor dll) baik dalam rangka evakuasi korban maupun distribusi bantuan | Semua bandara yang termasuk kategori daerah rawan bencana |          | Tertaksananya koordinasi dan kesiapan pengelola bandar udara ketika terjadi bencana alam                        | 300                                 | 300     | APBN                    | Kem. Perhubungan  |
|           |                 | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana   | Jawa dan Sumatera   |          | Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian SDM perkeretaapian di daerah  | 300                                 | -       | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana,<br>Ditjen Perkeretaapian                   |
|           |                 | Peningkatan budaya keselamatan di masyarakat dan operator kereta api   | Jawa dan Sumatera   |          | Tertaksananya pendidikan keselamatan kepada masyarakat, awak sarana dan petugas operasi dan perawatan prasarana | 1,000                               | 1,000   | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana,<br>Ditjen Perkeretaapian                   |
|           |                 | masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana khususnya pada keselamatan dan keamanan perjalanan KA   |   |          | pada masing-masing wilayah Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian   |                                     |         |                         | Direktorat Teknik<br>Prasarana & Direktorat<br>Keselamatan dan Teknik<br>Sarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi                                  |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |            |  | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|---|--|---|----------|---|------------------------------|------------|--|------------------|------------------------|
|     |   |  | Propinsi                                | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011    | Th 2012  |                  |                        |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                                     |          | (5)   | (6)                          | (7)        | (8)  |                  |                        |
|     | meningkatnya kemampuan personil Polri dalam hal membaca peta khususnya peta sebaran kriminalitas  | Mabes Polri dan Bakosurtanal   |   |          | Adanya peta sebaran kriminalitas pada daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi terhadap peralatan bencana Bakosurtanal sehingga:<br>1. Polri memiliki pengetahuan pengolahan peta yg dapat dikembangkan lebih lanjut dengan asistensi dari Bakosurtanal<br>2. Bakosurtanal memiliki peta sebaran kriminalitas yg akan dibagikan ke Polres/Polsek dan Masyarakat<br>3. Perangkat Bakosurtanal lebih dapat terjaga baik dengan adanya peta yg akan disebarakan ke Polres/Polsek serta masyarakat sekitarnya karena masyarakat merasa memilikinya dan mengerti/paham akan pentingnya alat tersebut |                              | APBN       | POLRI, Pusdalops POLRI & Bakosurtanal                        |                  |                        |
|     | Masyarakat dan petugas di masing-masing prov& kab/kota  | Setiap prov & kab/kota   |   |          | Peningkatan kemampuan petugas dan masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana   |                              | APBN       | PPK Kementerian Kesehatan                                    |                  |                        |
|     | Mengembangkan program bahan ajar yang handal dan sah yang dapat meningkatkan mutu beberapa mata pelajaran yang relevan (Agama, IPA, dan IPS) pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar. | Provinsi rawan bencana seperti Papua, NTT, NTB, Jawa, Jateng, DI, Jawa, Sumbang, Bengkulu, NAD | Kabupaten/ kota terpilih untuk uji coba |          | Tersusunnya bahan ajar tentang risiko bencana untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah  | 2,250                        | APBN, PHLN | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Peningkatan Ujian dan Menengah |                  |                        |
|     | Sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama pada provinsi-provinsi daerah rawan bencana alam  | 33 provinsi  |   |          | Terlaksananya pengajaran resiko bencana pada sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di provinsi-provinsi rawan bencana  | 65,500                       | APBN, PHLN | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah  |                  |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi   |                                   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)    |         |                                   | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|----------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------------------|--|------------------------|
|     |          |  | Propinsi   | Kab/kota                          |   | Th 2010                         | Th 2011 | Th 2012                           |  |                        |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)  |                                   | (5)   | (6)                             | (7)     | (8)                               |  |                        |
|     |          | 1). Meningkatkan kapasitas PSB di 6 Provinsi dan 1 kota diwilayah SCDRR. 2)Terbangunnya jejaring antar PT/PSB sehingga terdapat proses transfer of knowledge dan pertukaran informasi; 3) Meningkatkan kapasitas dari Perguruan Tinggi untuk mampu melakukan riset terkait kebencanaan dengan berdasarkan pada kearifan lokal di masing-masing wilayahnya. | DIY<br>Jawa Tengah,<br>Bengkulu<br>Sumbaw<br>Maluku<br>NTT<br>Sulteng  | Kota Palu                         | 1) Jumlah pusat studi bencana di Perguruan Tinggi yang meningkat kapasitasnya di 6 propinsi dan 1 kota; 2) Adanya mekanisme berjejaring yang jelas antar PT/PSB dalam pertukaran informasi dan/atau riset bersama; 3) Adanya hasil-hasil riset inovasi kebencanaan yang berdasarkan local wisdom di wilayah ybs | 462                             | 457     | PHLN                              | BNPb (bekerja sama dengan PT/forum PT, lembaga kajian pusat dan PSB)                         |                        |
|     |          | Terlaksananya integrasi PRB ke dalam kegiatan pendidikan di 14 sekolah.  | Bengkulu<br>Sumatera Barat<br>DIY<br>NTT<br>Sulteng<br>Jakarta<br>Bali | Kota Palu<br>Kota Jakarta Selatan | 1. Terintegrasinya PRB ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstra kurikuler, 2. Tersusunnya pedoman dan materi ajar,3. Terlaksananya pelatihan untuk komunitas sekolah  | 990                             | 1,045   | PHLN                              | Kem. Diknas  |                        |
|     |          | ECB members-CBO s-government- universities   | Sumatera Barat   |                                   |   |                                 |         | PHLN, USAID<br>(Total: \$494,804) | Mercy Corps  |                        |
|     |          | Anggota Konsorsium Pendidikan Bencana dan pemangku kepentingan lain yang relevan.  | Jakarta  |                                   | Level of capacity identified/type of training identified  |                                 | 45      | 45 PHLN                           | ECB Indonesia (Care-CRS<br>Oxfam-World Vision-<br>Save the Children-Mercy<br>Corps-MPBI-IMC) |                        |
|     |          | Daerah prioritas yang ditentukan BNPB.   | Nasional<br>Jakarta  |                                   | Masuknya PRB di dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.  | On-going dengan staff yang ada. |         | PHLN                              | OCHA   |                        |
|     |          | BNPB dan LSM internasional.  |  |                                   | Berjalannya latihan dan pembelajaran tentang PRB.   | On-going dengan staff yang ada. |         | PHLN                              | OCHA   |                        |

| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi   |  | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |           |  | Sumber Pendanaan                                     | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|---|---|----------|--|---|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|
|     |   |   | Propinsi | Kab/Kota   |   | Th 2010                      | Th 2011   | Th 2012  |  |                        |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)      |  | (5)   | (6)                          | (7)       | (8)  |  |                        |
|     | Targeted communities members and village governments, schools teachers and children | NTT<br>NTB<br>Papua<br>Papua Barat<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Tengah                               |          | Belu, TTU, TTS, Ende, Manggarai, Lembat and 1 more to be determined.<br>Jayawijaya, Nabire Sangihe<br>Donggala | \$ 2 Community Organisers (1 male and 1 female) from each village in 15 districts are identified and trained on 3 topics related to DDR.  |                              | PHLN      | 1 Oxfam<br>2. PNMPB (Belu, TTU, TTS)<br>3. FIRI (Ende, Manggarai, Lembata)<br>4. Perkumpulan Kelola (Sangihe)<br>5. Yayasan Jambata (Donggala)<br>6. IDEA<br>7. IDEP<br>8. dan sekitar 7 LSM local lain yang akan diidentifikasi |  |                        |
|     | Community<br>Schools  | Sumut<br>Jakarta<br>Jawa Timur<br>Kalimantan Barat<br>Sulawesi Tengah<br>Maluku Utara<br>NTT<br>Papua |          | Nias<br>Jakarta<br>Surabaya  | #of community trained about DDR, #of schools trained on DDR   | 189                          | 189       | 189  | World Vision Partners                                |                        |
|     |   |   |          | Nasional (Indonesia) & Region  |   | 147,500.5                    | 147,500.5 | 147,500.5  | BNPB, AIFDR and other relevant partners, as required |                        |
|     |   | Jakarta<br>Jawa Tengah<br>Jawa Timur  |          | Jakarta Barat<br>Magelang<br>Jember  |   | 2,641.8                      |           |  | Nahdlatul Ulama (NU)                                 |                        |
|     | 18 organisasi pemuda desa/rangkap   | NAD   |          | Aceh Selatan   | 168 tokoh pemuda desa damping mengikuti pelatihan tentang management organisasi pemuda.<br>18 organisasi pemuda desa berperan aktif dalam kegiatan masyarakat yang terkait dengan PRB di desanya. | 9,295.90                     | 4,647.95  |  | PHLN,<br>SWASTA/MAS<br>YARAKAT                       |                        |
|     | 18 desa (360 peserta)   | NAD   |          | Aceh Selatan   | 360 tokoh masyarakat di desa-desa damping mengikuti pelatihan PRB dan terlibat aktif dalam perencanaan kegiatan selanjutnya.  |                              |           |  | JRS  |                        |
|     | 18 Desa, (360 peserta)  | NAD   |          | Aceh Selatan   | 360 tokoh masyarakat di desa-desa damping mengikuti pelatihan EPS dan terlibat aktif dalam perencanaan kegiatan selanjutnya.  |                              |           |  |  |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |   | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                          |                          | Sumber Pendanaan          | Pelaksana/ Koordinator   |
|-----|----------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
|     |          |   | Propinsi   | Kab/Kota  |  | Th 2010                      | Th 2011                  | Th 2012                  |                           |  |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)  |   | (5)  | (6)                          |                          |                          | (7)                       | (8)  |
|     |          | 18 Desa (180 peserta tokoh pemuda/desa)   | NAD  | Aceh Selatan  | 180 pemuda/i mengikuti pelatihan EPS dan pertemuan rutin untuk pendampingan sebagai tindak lanjut pelatihan                          |                              |                          |                          |                           | JRS  |
|     |          | 18 Sekolah Dasar & dinas pendidikan (114 peserta guru dan aktor pendidikan)                                   | NAD  | Aceh Selatan  | 114 guru SD dampingan mengikuti pelatihan peace education dan menindaklanjuti hasil pelatihan dalam pengajaran mereka                |                              |                          |                          |                           | JRS  |
|     |          | 18 Sekolah Dasar (114 peserta guru dan aktor pendidikan)  | NAD  | Aceh Selatan  | 114 guru SD mengikuti pelatihan EPS dan menyusun tindak lanjut dari hasil pelatihan untuk diterapkan di sekolah mereka masing-masing |                              |                          |                          |                           | JRS  |
|     |          | 18 desa dampingan (1.440 pemuda/i desa)   | NAD  | Aceh Selatan  | 1.440 pemuda/i mengikuti pelatihan pengelolaan konflik lewat media olahraga dan pertemuan-pertemuan rutin                            |                              |                          |                          |                           |  |
|     |          | 18 Sekolah Dasar (108 guru SD)  | NAD  | Aceh Selatan  | 108 guru SD mengikuti pelatihan dan menindaklanjutinya dengan sebuah perencanaan di sekolah masing-masing                            |                              |                          |                          | PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT |  |
|     |          | Tokoh desa, Kepala Desa, dan Forum Anak Desa  | Jawa Tengah<br>NTT<br>NTB                            | Rembang dan Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu                    | Terdapatnya perencanaan desa yang berperspektif PRB, Alokasi Anggaran Dana Desa untuk kegiatan PRB                                   | X                            | X                        | X                        | X PHLN                    | Plan Indonesia   |
|     |          | Guru-guru, Kepala Sekolah, dan staf staf Dinas Pendidikan.  | Jakarta<br>Jawa Barat<br>Jateng<br>NTT               | Bogor<br>Bantul<br>Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu             | Jumlah penyelenggara pendidikan yang terlibat dalam Forum Sekolah  | X                            | X                        | X                        | X PHLN                    | Plan Indonesia   |
|     |          | Masyarakat  | Jakarta<br>Jawa Barat<br>DIY<br>Jateng<br>NTT<br>NTB | Bogor<br>Bantul<br>Rembang dan Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu | Jumlah orang (laki-laki dan perempuan) yang mengikuti kegiatan kampanye  | X                            | X                        | X                        | X PHLN                    | Plan Indonesia   |
|     |          | Masyarakat desa dan Kabupaten   | Jakarta<br>Jawa Barat<br>DIY<br>Jateng<br>NTT<br>NTB | Bogor<br>Bantul<br>Rembang dan Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu | - Jumlah simulasi yang dilakukan secara periodik   | X                            | X                        | X                        | X PHLN                    | Plan Indonesia   |
|     |          | Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi; termasuk pemerintah, LSM, PMI dll | Nasional   |   |  | Belum bisa diindikasikan     | Belum bisa diindikasikan | Belum bisa diindikasikan | PHLN                      | Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll |



| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi  |             | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |           |           | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator  |
|-----|----------|--|---|-------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------|---|
|     |          |  | Propinsi  | Kab/Kota    |   | Th 2010                      | Th 2011   | Th 2012   |                  |   |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)   | (5)         | (6)   | (7)                          | (8)       |           |                  |   |
|     |          | Regional Stakeholders DM (in Indonesia, stakeholders under Ministry of Health)                       | 9 kantor regional Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Departemen Kesehatan          | National    | Support for the establishment and capacity building of national, provincial and local disaster management agencies, leveraging government and other donor programs                          | 12,626.67                    | 12,626.67 | 12,626.67 | PHLN             | National Disaster Management Agency (BNPB), Ministry of Home Affairs, Local Governments |
|     |          | Capacity building of national and local DRM agencies, including in risk assessment and risk-response |   |             |   |                              |           |           |                  | UNICEF and Cluster Members (including Government Counterparts)                          |
|     |          | peserta dari relawan bencana dari kantong kantong bencana / berpotensi bencana di kota kot besar     | Jawa Barat  | Jabodetabek |   |                              |           |           |                  | PKPU  |
|     |          | BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta   | Bengkulu NTT Kalimantan Timur   |             | Peningkatan kapasitas dan ketahanan individu, keluarga, masyarakat dan Forum PRB serta BDPB   |                              |           |           |                  | BINA SWADAYA  |
|     |          | Sekolah Dasar  | Indonesia   | Indonesia   | Adanya materi-materi/kurikulum Program Kesiapan Sekolah terhadap Bahaya Gempa   |                              |           |           | APBN             | PMB-ITB   |
|     |          | Pemerintah Daerah  | Indonesia   | Indonesia   | Kegiatan teaching and learning serta small project scale dalam bidang mitigasi bencana  |                              |           |           | APBD             | PMB-ITB (Pemda-Pemda)   |
|     |          | DPRD, Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, BPLH Provinsi/ Kabupaten/ kota                                 | Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jawa Timur |             | 1. Terselenggaranya Seminar dan Workshop, 2. Adanya Rekomendasi integrasi Pengurangan risiko bencana akibat perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah, 3. Sinergisasi StakeHolder | 400                          | 400       | 400       |                  | Bappenas, BPBN, DNPI, Climate Change Center (C3)  |
|     |          | Siswa dan Guru SMA/SMK   | Jawa Barat  |             | 1. Terselenggaranya penyuluhan bagi Siswa dan Guru SMA/SMK se-Jawa Barat, 2. Terlibatnya Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten   | 300                          | 300       | 300       |                  | BPBD, Climate Change Center (C3), Dinas Pendidikan, BPLHD Jawa Barat                    |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi   |   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                    |                    | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator  |
|-----|----------|--|--|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|
|     |          |  | Propinsi   | Kab/Kota  |   | Th 2010                      | Th 2011            | Th 2012            |                       |   |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)  |   | (5)   | (6)                          |                    |                    | (7)                   | (8)   |
|     |          | Siswa dan Guru SMA/SMK   | Jawa Barat   |   | 1. Terselenggaranya Pelatihan (TfT) bagi Siswa dan Guru SMA/SMK se-Jawa Barat, 2. Terlibatnya Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten, 3. Sinergisasi Stakeholder  | 350                          | 350                | 350                |                       | BPBD, Climate Change Center (C3), Organisasi Kemahasiswaan                      |
|     |          | BPBD, BPLH, Mahasiswa, Dosen/Akademisi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, LSM | Jawa Barat   |   | 1. Terselenggaranya Seminar, 2. Adanya Rekomendasi ilmiah tentang Kerentanan terhadap Bencana yang diakibatkan perubahan iklim, 3. Sinergisasi stakeholder  | 100                          |                    | 100                |                       | BPBD, Climate Change Center (C3), Organisasi Kemahasiswaan, BPLHD Jawa Barat    |
|     |          | Organisasi Caritas milik Keuskupan Gereja Katolik                              | Jateng<br>Sumsel<br>Jabar<br>Jatim<br>Sulsel<br>Maluku<br>NTT<br>Kalbar<br>Sulteng | Purwokerto,<br>Palembang, Bandung,<br>Surabaya, Makassar,<br>Arboina, Maumere,<br>Pontianak, Ketapang,<br>Tanjung Karang  | a. Identifikasi capaian kinerja institusi dalam 6 area kunci: (1) kebijakan; (2) strategi; (3) perencanaan berbasis karakter kewilayahan; (4) manajemen siklus proyek; (5) relasi eksternal; (6) kapasitas institusi, b. Prioritas aksi yg dipilih untuk meningkatkan capaian area kunci tertentu, c. Hasil Kajian risiko Bencana Partisipatif dan inisiasi kelompok basis PRB, d. Dilakukan pertemuan jejaring dan ditemukan identifikasi kebutuhan penguatan basis organisasi dalam mengarusutamakan PRB dalam berbagai bentuk aktivitas pengembangan kapasitas organisasi, e. Perencanaan aksi PRB di komunitas basis perintis, f. Dihasilkan rencana pembelajaran, rencana produksi materi pembelajaran dan produk akhir berupa materi-materi pembelajaran dalam bentuk media cetak dan elektronik. | 5.200                        | Belum direncanakan | Belum direncanakan | Swasta/<br>Masyarakat | KARINA  |
|     |          | pelatihan guru sekolah dalam PRB   | Sumut<br>Kep.Riau<br>Jakarta<br>Jateng<br>Jatim<br>Bali<br>Sulut<br>Papua          | Medan<br>Batam<br>Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan<br>Semarang<br>Surabaya<br>Denpasar<br>Manado<br>Jayapura | 4.000 school teachers trained,  |                              |                    |                    | Swasta/<br>Masyarakat | HOPE worldwide<br>Indonesia (Yayasan Hope Indonesia), Dinas Pendidikan setempat |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator                               |
|-----|----------|---|--|--|--|------------------------------|---------|---------|-----------------------|--|
|     |          |   | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                       |  |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)     |                       |  |
|     |          | Masyarakat di kawasan rawan bencana letusan gunungapi, banjir dan longsor   | Jawa Tengah<br>Jawa Timur<br>DIY   |  | Teraksana kegiatan kerja praktek dan KKN tematis di bidang pendidikan, penyuluhan dan pelatihan di masyarakat kawasan rawan letusan gunungapi banjir dan longsor | 50                           | 50      | 50      | Swasta/<br>Masyarakat | PSMB UPN Veteran                                     |
|     |          | Perubahan perilaku masyarakat setempat  | Jawa Barat   | Kabupaten Sukabumi (+/- 100 dusun)                   | Satu program dalam setahun   |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | MAIPARK  |
|     |          |   | Jakarta, Jawa  |  |  |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | Skala dan Greenpress                                 |
|     |          | 700 warga ring I Kelut dan organisasi (Setlak, Tagana, PMI Kediri dan Biltar)   | Jawa Timur   | Biltar kota kediri kab Kediri                        | terbentuknya tim siaga bencana kelut.  |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala    |
|     |          | 300 orang (70% organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, 30% akademis)   | Sumber<br>Jateng<br>Sulsel<br>Gorontalo  | Padang<br>Semarang<br>Makasar<br>Gorontalo<br>Aronbo | Penguatan pengetahuan dasar stakeholders di bidang kebencanaan   |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | MERC (Medical emergency Rescue Committee), Sampoerna |
|     |          | 300 orang dari 5 propinsi   | Sumber<br>Jateng<br>Sulsel<br>Gorontalo<br>Maluku  | Padang<br>Semarang<br>Makasar<br>Gorontalo<br>Aronbo | Terbentuknya tim relawan siaga bencana   |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | MERC (Medical emergency Rescue Committee), Sampoerna |
|     |          | 1100 relawan internal Sampoerna   | Sumber<br>Jateng<br>Sulsel<br>Gorontalo<br>Maluku<br>Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi) | Padang<br>Semarang<br>Makasar<br>Gorontalo<br>Aronbo | Meningkatkan pemahaman stakeholders di dalam situasi bencana   |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | MERC (Medical emergency Rescue Committee), Sampoerna |
|     |          | 1100 relawan internal Sampoerna   | Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi)  |  | Terbentuknya tim relawan siaga bencana   |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | Sampoerna Rescue tim dan internal departemen (EHS)   |
|     |          |   | Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi)  |  | Meningkatkan pemahaman stakeholders di dalam situasi bencana di kantor   |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | Sampoerna Rescue tim dan internal departemen (EHS)   |
|     |          | Staff, Volunteers Corps (KSR), Saigana (Disaster Response Team), Red Cross Youth, CBAT (Community Based Action Team), Community | PMI NHQ  |  | ICBRR and DM Training Curriculum and materials updated and incorporate DRR and CCA   | 308.05                       |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National Headquarter                             |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         | Sumber Pendanaan<br>(7)   | Pelaksana/ Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                             | Th 2011 |                           |                               |
|           |                 | School Committee, Teachers, Red Cross Youth, School Children, Volunteers Corps         | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Number of school conducted Disaster Risk Reduction in School     | 1,943.86                            | 737,17  | 470 Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter   |
|           |                 | Staff, Volunteers Corps (KSR), Saigana (Disaster Response Team), Red Cross Youth, CBAT | PMI NHQ   |   | PMI Training curriculum updated based on lesson learnt and needs | 150                                 | 100     | Swasta/<br>Masyarakat     | PMI National<br>Headquarter   |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)                     | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                    |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|
|           |                 |                                    | Propinsi  | Kab/Kota  |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                         |  |
|           |                 | CBAT (Community Based Action Team) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara | Community Based Action Team (CBAT)<br>trained relevant skills for DRR | 757.08                       | 1243.32 | 741.88  | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)                               | Indikasi Pendanaan (JU TA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                          |
|-----------|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                       | Th 2011 | Th 2012 |                         |  |
|           |                 | CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (Local Government Unit) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Regular disaster response drill or simulation provided | 772.91                        | 363.96  | 502.89  | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHQ, PMI Chapter,<br>PMI Branch,<br>Community, LGU |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)         | Lokasi<br>(4)   |  | Indikator Kinerja<br>(5)                              | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                    |
|-----------|-----------------|------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------|---------|-------------------------|--|
|           |                 |                        | Propinsi  | Kab/Kota   |   | Th 2010                      | Th 2011<br>(6) | Th 2012 |                         |  |
|           |                 | KSR (Volunteers Corps) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara | KRS (Volunteers Corps) trained on Disaster Management | 3,032.58                     | 600            | 600     | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)         | Lokasi<br>(4)   |  | Indikator Kinerja<br>(5)                                  | Indikasi Pendanaan (JU TA Rp)<br>(6) |          | Sumber<br>Pendanaan<br>(7)     | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8)                       |
|-----------|-----------------|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
|           |                 |                        | Propinsi  | Kab/Kota   |   | Th 2010                              | Th 2011  |                                |  |
|           |                 | KSR (Volunteers Corps) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya,<br>Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | KSR (Volunteers Corps) trained<br>relevant skills for DRR | 1,787.30                             | 1,319.06 | 1,017<br>Swasta/<br>Masyarakat | PMI NHQ, PMI Chapter,<br>PMI Branch,<br>Community, LGU |



| No  | Kegiatan                                   | Sasaran  | Lokasi  |  | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)              |   |   | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|------------------------|
|   |  |  | Propinsi  | Kab/Kota   |   | Th 2010                                   | Th 2011                                   | Th 2012   |   |                        |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                       | (8)                                       |   |   |                        |
|   |  | KSR (Volunteers Corps)   | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara | Satgana performed quick, accurate and coordinated disaster response activities  | 3,770.72                                  | 965.82                                    | 600 Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch  |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b>                         |  |  |   |  |   | <b>267,257</b>                            | <b>327,578</b>                            | <b>346,750</b>  |   |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM C (JUTA Rp)</b>                          |  |  |   |  |   | <b>384,165</b>                            | <b>465,215</b>                            | <b>502,345</b>  |   |                        |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b> |  |  |   |  |   |   |   |   |   |                        |
| 1   | pengendalian dan pemantauan risiko bencana | Kajian dinamika pantai, untuk mitigasi dan adaptasi bencana alam monitoring gempa kuat dan perhitungan magnitude mbmg Terpentanya risiko bencana di seluruh Provinsi dan Kab/Kota Minimalisasi gangguan DFI Terpentanya Tingkat Aktivitas Gunungapi secara menerus Peningkatan Kualitas pemantauan Gunungapi | Banten<br>DKI<br>Jabar<br>Jateng<br>Jatim<br><br>Seluruh daerah rawan bencana<br>33 Prop.<br><br>Seluruh Wilayah Indonesia<br><br>Seluruh Wilayah Indonesia   |  | Tersedianya informasi spasial untuk mitigasi dan adaptasi thd bencana alam (global warming) di Pantura Jawa<br><br>Meningkatnya data dan informasi gempa kuat<br><br>Jumlah dokumen dan informasi risiko bencana<br><br>Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)<br><br>Jumlah Terpentanya tingkat aktivitas Gunungapi per tahun<br><br>Jumlah Terpentanya tingkat aktivitas Gunungapi per tahun | 532<br><br>190<br><br>42,000<br><br>1,266 | 600<br><br>190<br><br>50,400<br><br>1,456 | 700 APBN<br><br>190 APBN<br><br>58,800 APBN, APBD, PHLN<br><br>APBN<br><br>1,675 APBN<br><br>APBN | Bakosurtanal<br><br>BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA<br><br>BNPB<br><br>Kementerian Pertanian<br><br>Badan Geologi, KESDM<br><br>Badan Geologi, KESDM |                        |



| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator                            |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
|   |  |  | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012        |                    |   |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)            | (8)            |                    |   |
|   |  | Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)   |  |  |  | 675,526.67                   | 675,526.67     | 675,526.67     | PHLN               | Government of DKI, MoPW, MoF, BAPPENAS            |
|   |  | masyarakat rawan bencana banjir, masyarakat pinggir kali, pemukiman padat  | kota kota besar Jawa Sumatera  |  |  |                              |                |                |                    | PKPU  |
|   |  | BOPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta   | Bengkulu NTT Kalimantan Timur Indonesia  |  | Ada data dan up date data tentang risiko bencana   |                              |                |                |                    | BINA SWADAYA                                      |
|   |  | Pemerintah RI  |  |  | Sistem pemantauan bencana yang teruji secara online  |                              |                |                | APBN               | PMB-ITB   |
|   |  | Pemerintah Daerah Jawa Barat   | Jawa Barat   | Garut  | Pemanataan secara berkala dan ter sistematis Gunung Api Guntur   |                              |                |                | APBN               | PMB-ITB   |
|   |  | di 3 desa ring 1 Kelut   | Jawa Timur   | 3 desa ring 1 kelut  |  |                              |                |                | Swasta/ Masyarakat | Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala |
|   |  | KSR (Volunteer Corps), CBAT (Community Based Action Team), Community   | NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klalten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbaawa Barat Muko-Muko, Kota | Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) carried out to provide comprehensive pictures of the existing hazards, risk, vulnerability and capacity at the community level | 674.23                       | 266.75         | 380.40         | Swasta/ Masyarakat | PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUTA Rp)</b> |  |  |  |  |  | <b>723.693</b>               | <b>730.563</b> | <b>739.395</b> |                    |   |
| 2   | penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana | Terselenggaranya penerapan upaya fisik, non fisik dan peraturan perundangan PB Meminimalisir korban jiwa dan kerugian akibat bencana tanah longsor | Seluruh daerah rawan bencana   |  | Jumlah lokasi upaya penerapan fisik dan non fisik  | 45,000                       | 54,000         | 63,000         | APBN, ABPD, PHLN   | BNPB  |
|   |  |  | Jateng NTT   | Banjarmegara, Manggarai  | Bertungsiya peralatan early warning system   |                              | 300            | 400            | APBN               | KPDT  |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)   |
|-----------|-----------------|---|---|---|--|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------|---|
|           |                 |   | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                         |   |
|           |                 | Tervujudnya pemahaman yang sama tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan bencana di daerah. | 15 Provinsi   |   | Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan bencana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah | 700                                 |         |         | APBN                    | KEMDAGRI  |
|           |                 | Mengurangi penyebab risiko bencana longsor  | Jabar<br>Jateng   | <b>2010</b> : Sta. Garahan.<br><b>2012</b> : Cianjur - Padalarang, Purwokerto - Kroya.  | Prasarana KA siap dan aman operasi   | 1.000                               | -       | 3.500   | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Teknik<br>Prasarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |
|           |                 | Mencegah faktor penyebab kerusakan terhadap konstruksi terowongan   | Jabar   | Terowongan Lampegan lintas Sukabumi - Cianjur   | Prasarana KA siap dan aman operasi   | 1.000                               | -       | -       | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Teknik<br>Prasarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |
|           |                 | Mengurangi penyebab risiko bencana akibat gerusan air/dasar sungai  | Jabar<br>Jateng<br>Jatim  | <b>2010</b> : Soka - Kebumen; Primbong - Butuh; Telawah - Karangsono; Gundih - Surabaya; Cikampek - Padalarang.<br><b>2012</b> : Cirebon - Kroya. | Pencegahan terhadap bencana akibat gerusan air/dasar sungai  | 34.500                              | -       | 3.500   | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Teknik<br>Prasarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |
|           |                 | Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut                               | Volume kebutuhan pengerukan terhadap total volume rencana areal pengerukan secara nasional. |   |  | 87.000                              | 0       | 0       | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Ditjen Hubla   |
|           |                 | Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien        | Jumlah kebutuhan rehabilitasi faspel terhadap kebutuhan rehabilitasi secara nasional        |   |  | 26.300                              | 0       | 0       | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Ditjen Hubla   |
|           |                 | Memperbaiki Fasilitas Pelabuhan yang rusak akibat gempa   | Jumlah rehabilitasi dermaga yang dibangun terhadap jumlah dermaga yang terkena gempa        |   | Saukorem Prov. Papua Barat   | 10.000                              | 0       | 0       | APBN                    | Kem. Perhubungan,<br>Kampel Oransbari   |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi  |              | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                | Sumber Pendanaan<br>(7)         | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                               |
|-----------|-----------------|--|---|--------------|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|---|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota     |   | Th 2010                      | Th 2011<br>(6) |                                 |   |
|           |                 | Meincludi dan memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan agar tidak rentan terhadap bencana   | Tersebar di seluruh Indonesia   |              | Tersedianya Bronjong untuk mengantisipasi longsor   | 1,500                        | 3,600          | 4,900 APBN                      | Kem. PU, Ditjen Bina Marga                                  |
|           |                 | Petugas di masing-masing prov& kab/kota.   | Tersebar di seluruh Indonesia   |              | Tersedianya Jembatan Darurat (Balley) untuk memperlancar arus transportasi dalam keadaan darurat.   | 8,000                        | 16,000         | 36,000 APBN                     | Kem. PU, Ditjen Bina Marga                                  |
|           |                 |  | Setiap prov & kab/kota  |              | Tersedianya rencana kedaruratan bidang kesehatan di Kab/Kota  |                              |                | APBN                            | PPK Kementerian Kesehatan                                   |
|           |                 | Terintegrasi pengurangan risiko bencana ke dalam 3 sektor pembangunan (kesehatan, perhubungan, livelihood) dan pengembangan perkotaan dan perdesaan. | Suleng<br>Sulsel<br>Bengkulu<br>NTT<br>Sumbat<br>DI Yogyakarta<br>Jateng<br>NTT<br>NTB<br>Jakarta |              | 1) Jumlah program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi ke dalam sektor pembangunan; 2) Jumlah pedoman/kebijakan yang dihasilkan                   | 1,500                        | 1,400          | PHLN                            | BNPB, Bappenas, Kem. Kesehatan, Kem. Perhubungan            |
|           |                 |  |   |              |   | Funding until 2010           |                | PHLN                            | WFP   |
|           |                 |  |   |              |   | 2,000.3                      | 2,000.3        | PHLN                            | AUSAID, RMA Indonesia and HK Logistics                      |
|           |                 | 18 desa (12.240 jiwa)  | NAD   | Aceh Selatan | Perencanaan Desa jangka menengah dan panjang yang mengintegrasikan PRB dan rencana aksinya, dengan melibatkan semua unsur yang ada di desa masing-masing. |                              |                | PHLN,<br>SWASTA/AMAS<br>YARAKAT | JRS   |
|           |                 | Western Indonesia Road Improvement Project (WINRIP)  |   |              |   | 2,841,000                    |                | PHLN                            | Ministry of Public Works<br>Directorate General of Highways |
|           |                 | BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta   | Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur   |              | Ada rencana, SOP dan pelaksanaan penanggulangan bencana   |                              |                |                                 | BINA SWADAYA  |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)                                | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |          | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                          |
|-----------|-----------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------|----------|-------------------------|--|
|           |                 |   | Propinsi  | Kab/Kota  |   | Th 2010                      | Th 2011<br>(6) | Th 2012  |                         |  |
|           |                 | CBAT (Community Based Action Team), Community | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Small Structural mitigation measures (bronjong, water harvesting tanks, etc.) in place to protect against major hazard, built using local labour, skills, materials | 8,860.44                     | 2,726.59       | 3,118.05 | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHQ, PMI Chapter,<br>PMI Branch,<br>Community, LGU |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                          |
|-----------|-----------------|---|---|---|--|------------------------------|----------------|---------|-------------------------|--|
|           |                 |   | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                      | Th 2011<br>(6) | Th 2012 |                         |  |
|           |                 | CBAT (Community Based Action Team), Community LGU (Local Government Unit) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Small Structural and non structural mitigation measures in place to reduce health risk using local labour, skills, materials | 789,66                       | 351,83         | 541,78  | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHO, PMI Chapter,<br>PMI Branch,<br>Community, LGU |

| No   | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi  |   | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan        | Pelaksana/ Koordinator                           |                               |
|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|-------------------------------|
|  |  |  | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                       | Th 2011 | Th 2012 |                         |  |                               |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   |   | (5)  | (6)                           |         |         | (7)                     | (8)  |                               |
|  |  | CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (Local Government Unit) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara | Number of Small Structural mitigation measures applied good natural resource and environmental management scheme | 1,036.31                      | 363.34  | 464.08  | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU |                               |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUATA Rp)</b> |  |  |   |   |  |                               |         |         |                         |  |                               |
| 3  | Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana | Menyusun dan mengembangkan basis data rawan bencana                        | Jawa tengah, jawa timur (2010), Sebagian Sumatera, sebagian Sulawesi (2011), Sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan (2012)  |   | Tersusunnya Basisdata Multirawan Bencana alam  | 3,070,187                     | 80,742  | 115,425 | 1,300<br>1,500<br>1,900 | APBN<br>APBN<br>APBN                             | Bakosurtanal *, Kem. PU, BMKG |
|  |  | Data management Center, Database gempa dan system data sharing             | Jakarta   |   | Terwujudnya pelayanan yang handal data gempa untuk nasional dan internasional                                    | 1,000                         | 500     | 500     | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA                     |                               |
|  |  | Memetakan daerah berisiko getaran gempa kuat                               | Jakarta   |   | Tersedianya informasi untuk keperluan bangunan tahan gempa dan keperluan lainnya                                 | 300                           | 300     | 300     | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA                     |                               |
|  |  | Peningkatan Pelayanan data dan informasi rmagnitbumi                       | Jakarta   |   | Para pemakai mendapatkan data yang lebih up todate   | 125                           |         |         | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA                     |                               |
|  |  | Menentukan daerah limpasan tsunami   |   |   | Kelengkapan system siap-siagaan  | 750                           | 800     | 800     | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA                     |                               |



| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi  |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator      |
|-----------|-----------------|--|---|----------|---|------------------------------|----------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011<br>(6) | Th 2012 |                         |                             |
|           |                 | Tersedianya informasi sumber bahaya atau ancaman bencana   | Seluruh daerah rawan bencana  |          | Jumlah informasi sumber bahaya atau ancaman bencana                                   | 36,000                       | 43,200         | 50,400  | APBN, APBD, PHLN        | BNPB                        |
|           |                 | Terpetakannya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan   | 12 Propinsi   |          | Terpetakannya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan                            | 3,000                        | 3,000          | 3,000   | APBN                    | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS |
|           |                 | Tersedianya informasi Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Gempabumi, Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah | KRB Gunungapi:<br>NTT<br>Maluku<br>Lampung<br>Jabar<br>Jatim<br>Sumut   |          | Tersedianya Peta KRB Gunungapi Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah sejumlah 27 Peta | 1,907                        | 2,193          | 2,522   | APBN                    | Badan Geologi, KESDM        |
|           |                 |  | Gerakan tanah:<br>Bengkulu<br>Jambi<br>NTT<br>Sulut<br>Sulteng<br>Sumsel<br>Jateng<br>Sumut<br>NAD<br>Sumbar<br>Jatim |          |   |                              |                |         |                         |                             |
|           |                 |  | Gempabumi:<br>NTB<br>Bali<br>Jabar<br>Jatim<br>Lampung<br>Jateng<br>Sulsel<br>Sulut<br>Bengkulu<br>Jabar<br>Bariten   |          |   |                              |                |         |                         |                             |
|           |                 |  | Tsunami:<br>Banten<br>Jateng<br>Jatim<br>Sulut<br>Sulsel<br>Bengkulu<br>Lampung<br>Sultra<br>Bali<br>Jabar            |          |   |                              |                |         |                         |                             |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi  |   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |                         | Sumber Pendanaan                               | Pelaksana/ Koordinator          |
|-----|----------|--|---|---|---|------------------------------|---------|-------------------------|--|---------------------------------|
|     |          |  | Propinsi  | Kab/Kota  |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012                 |  |                                 |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)   |   | (5)   | (6)                          |         |                         | (7)  | (8)                             |
|     |          | Tersedianya informasi Analisa Risiko Gununggapi, Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah untuk penyusunan Tata Ruang | Banten<br>Jateng<br>Jatim<br>Lampung<br>Sumbar<br>NTT                               |   | Tersedianya Peta KRB Gununggapi Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah sejumlah 27 Peta  | 1,907                        | 2,193   | 2,522                   | APBN   | Badan Geologi, KESDM            |
|     |          | Tersedianya informasi Prakiraan Kejadian Gerakan Tanah   | Seluruh Wilayah Indonesia   |   | Tersedianya Peta Prakiraan Kejadian Gerakan Tanah sejumlah 396/Tahun  | 24                           | 24      | 24                      | APBN   | Badan Geologi, KESDM            |
|     |          | Peran Gender dalam PRB di berbagai tingkat pelaku  | Sulawesi<br>NTT<br>Kaltim   |   |   | 500                          | 500     | 500                     |  | LIPi, Puslit Oseanografi        |
|     |          | Meningkatnya upaya penevediaan data dan informasi kerawanan Sosial   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan<br>Lampung |   | Terselenggarakannya penyediaan data dan informasi Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait   | 600                          | 750     | 750                     | APBN   | KEMENKOKESRA                    |
|     |          | Pusdalops POLRI, Polres dan Polsek   | Mabes Polri dan BNPB  |   | Polres/Polsek dapat membaca dan menjelaskan isi peta rawan kebencanaan kepada masyarakat di daerah rawan.bencana  |                              |         |                         | APBN   | POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB   |
|     |          | Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.   | Maluku utara<br>NTT   | Kota Tuai, Kota Ternate & Tidore, Kota Kalabahi (Alor). | Tersosialisasinya kawasan rawan bencana tsunami, serta upaya untuk menghindari dari bencana sekunder.   | 7,000                        | -       | -                       | APBN   | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |
|     |          | Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.   | Papua Barat   | Manokwari   | Tersosialisasinya kawasan rawan bencana tsunami, serta upaya untuk menghindari dari bencana sekunder.   | 2,000                        | -       | -                       | APBN   | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |
|     |          | 18 desa (12.240 jiwa)  | NAD   | Aceh Selatan  | Laporan hasil identifikasi masyarakat desa rentan bencana dan kebutuhan mereka  |                              |         |                         | PHLN,<br>SWASTA/MAS<br>YARAKAT                 | JRS                             |
|     |          | 18 desa (252 peserta)  | NAD   | Aceh Selatan  | 252 tokoh masyarakat desa dampingan mengikuti pertemuan-pertemuan dan pelatihan tentang pengelolaan konflik.  |                              |         |                         | PHLN,<br>SWASTA/MAS<br>YARAKAT                 | JRS                             |
|     |          | Pemerintah Daerah/Pemda<br>Pemerintah RI<br>18 desa  | Indonesia<br>Indonesia<br>NAD   | Aceh Selatan  | Draft Peta Zonasi Tsunami Indonesia<br>Draft Peta Zonasi Gempa Indonesia<br>· Tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di 18 desa mengikuti pelatihan dan FGD.<br>· Laporan hasil identifikasi masyarakat desa rentan bencana dan kebutuhan mereka, DVD dan media untuk kampanye dan pendidikan PRB. | 993.71                       | 430.95  | Blm ada rencana program | APBN<br>APBN<br>PHLN,<br>SWASTA/MAS<br>YARAKAT | PMB-ITB<br>PMB-ITB<br>JRS       |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)                           |
|-----------|-----------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------|---------|-------------------------|---|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota  |   | Th 2010                      | Th 2011<br>(6) | Th 2012 |                         |   |
|           |                 | KSR (Volunteer Corps), CBAT (Community Based Action Team), Community | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Baseline Survey carried out to provide baseline data from the community | 472.06                       | 330.22         | 328.60  | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI National<br>Headquarter, PMI<br>Chapter, PMI Branch |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi  |   | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |         | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator                                  |
|--|--|---|---|---|--|-------------------------------|---------|-----------------------|---|
|  |  |   | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                       | Th 2011 |                       |   |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   |   | (5)  | Th 2010                       | Th 2011 | (7)                   | (8)   |
|  |  | KSR (Volunteer Corps), CBAT (Community Based Action Team), Community                          | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) carried out to provide comprehensive pictures of the existing hazards, risk, vulnerability and capacity at the community level | 794.94                        | 890.92  | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter, PMI<br>Chapter, PMI Branch |
|  |  | PMI   | PMI NHQ   |   | GIS Database and Map of Hazards & Risks properly updated and used as sources for preparing contingency plan  | 321                           | 100     | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter                             |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUATA Rp)</b> |  |   |   |   |  |                               |         |                       |   |
| 4  | melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana | Terselenggaranya sistim pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA berpotensi bencana | Seluruh daerah rawan bencana  |   | Jumlah provinsi, kab/kota yang menyelenggarakan sistim pengawasan dan pengelolaan SDA berpotensi bencana   | 58.994                        | 56.711  | 64.077                | BNPB  |
|  | Teridentifikasi gejala bencana secara dini sebelum menimbulkan bencana.                                    |   | Tersebar di seluruh Indonesia   |   |  | 45.000                        | 54.000  | APBN, APBD,<br>PHLN   |   |
|  | Terwujudnya sistim informasi (data dan peta) untuk kawasan rawan bencana di setiap Propinsi dan Kabupaten. |   | Wilayah Jawa dan Bali.  |   | Tersedianya Alat DRU (Disaster Relief Unit) untuk mengantisipasi terjadinya bencana.   | 110.000                       | 140.000 | APBN                  | Kem. PU, Ditjen Bina Marga                              |
|  |  |   |   |   | Sistem Informasi basis data dan peta micro-zonasi.   | 1.000                         | -       | APBN                  | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,                         |

| No  | Kegiatan                                    | Sasaran   | Lokasi                                       |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |                    | Sumber Pendanaan                                | Pelaksana/ Koordinator |
|---|---|---|--|--|--|------------------------------|---------|--------------------|---|------------------------|
|   |   |   | Propinsi                                     | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012            |   |                        |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)                |   |                        |
|   |   | Tersusunnya 3 dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis mitigasi bencana | Sumbar NTT                                   | 2010: Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar) dan Kabupaten Alor (NTT); 2011: Kabupaten/Pulau kecil lainnya | Ada up date data, Perda, perda, tim pengontrol dan pengelola sumber daya alam.   | 800                          | 450     | PHLN               | BNPB bekerja sama dgn Kem. Kelautan & Perikanan |                        |
|   |   | BDPB, Desa, Forum PRB   | Bengkulu, NTT, Kalimantan Timur              |  |  |                              |         |                    | BINA SWADAYA                                    |                        |
|   |   | Pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan pengelolaan sumberdaya alam berpotensi menimbulkan bencana              | Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur NTT     |  | Pemerintah dan masyarakat mengetahui tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan | 100                          | 100     | Swasta/ Masyarakat | PSMB UPN Veteran                                |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUTA Rp)</b> |   |   |  |  |  |                              |         |                    |   |                        |
| 5   | Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang | Terkendalinya penataan ruang sesuai standar   | Seluruh daerah rawan bencana                 |  | Jumlah Provinsi dan kab/kota yang mengendalkan penataan ruang sesuai standar   | 156.900                      | 194.550 | 223.100            | BNPB  |                        |
|   |   | Tersedianya pengembangan sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dengan remote sensing.                       | Wilayah Jawa dan Bali.                       |  | Sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dan terkait risiko bencana.  | 1.000                        | -       | -                  | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,                 |                        |
|   |   | Bina Swadaya, BDPB, Desa, Forum PRB   | Bengkulu NTT Kalimantan Timur                |  | Ada rencana dan tim pengontrol tata ruang  |                              |         |                    | BINA SWADAYA                                    |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 5 (JUTA Rp)</b> |   |   |  |  |  |                              |         |                    |   |                        |
| 6   | pengelolaan lingkungan hidup                | Neraca SDA  | Jawa tengah jawa timur (2011)                |  | Tersedianya neraca sumber daya alam terintegrasi   | 61.000                       | 72.000  | 84.000             | Bakosurtanal                                    |                        |
|   |   | Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar  | sebagian Sulawesi sebagian Kalimantan (2012) |  | Jumlah Provinsi dan kab/kota yang melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai standar                                     | 150.000                      | 180.000 | 210.000            | BNPB  |                        |
|   |   | Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi  | Propinsi                                     |  | Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi   | 10.000                       | 10.000  | 10.000             | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                     |                        |
|   |   | Lahan gambut di Kalimantan Tengah, Jambi, Riau  | propinsi                                     |  | Terlaksananya rehabilitasi lahan gambut dan terwujudnya konservasi tanah dan air   | 475.000                      | 275.000 | 200.000            | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                     |                        |
|   |   | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan di Cianjur, Bogor, Depok, bekasi dan Jakarta                        | 5 kab  |  | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air                           | 365.350                      | 150.450 | 110.850            | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                     |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator   |
|-----|----------|--|---|----------|--|-------------------------------|---------|---------|------------------|--|
|     |          |  | Propinsi  | Kab/kota |  | Th 2010                       | Th 2011 | Th 2012 |                  |  |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)   |          | (5)  | (6)                           |         |         | (7)              | (8)  |
|     |          | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Wonosobo, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Temanggung        | 5 kab   |          | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air   | 168,000                       | 60,670  | 59,650  | APBN, APBD       | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                                    |
|     |          | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Ngawi, Bojonegoro | 6 kab   |          | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air DAS Solo  | 171,000                       | 50,850  | 45,680  | APBN, APBD       | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                                    |
|     |          | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan kabupaten Bndung Barat, Sumedang, Garut, Kutopanjang           | 4 kab   |          | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air Catchment area waduk Siguling, Jatigede, Kutopanjang dan Masbastari | 95,000                        | 30,850  | 24,250  | APBN, APBD       | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                                    |
|     |          | 200 kabupaten/kota yang memiliki lahan kritis lebih dari 20 % dari luas kabupaten                              | 200 kab/kota  |          | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air pada 200 kab/kota   | 500,000                       | 500,000 | 500,000 | APBD             | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                                    |
|     |          | Lahan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur  |   |          | Terlaksananya upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganana pasca kebakaran hutan dan lahan   | 9,565                         | 7,850   | 9,250   | APBN             | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS                                    |
|     |          | Terwujudnya upaya konservasi air untuk pertanian   | 33 Propinsi   |          | Tersedianya embung 1.969 unit, Dam Part. 1.646 unit dan Sumur Resapan 7.000 unit   | 95,650                        | 106,400 | 113,700 | APBN             | Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA |
|     |          | mitigasi tsunami di 17 lokasi  | Jawa Timur<br>Jawa Tengah<br>Bengkulu<br>DIY<br>Jawa Barat<br>NTT<br>Sulawesi Tenggara<br>Lampung<br>NAD<br>Sulawesi Utara<br>Papua |          | memiliki vegetasi pelindung pantai untuk mitigasi bencana tsunami  | 800                           | 2,000   | 4,000   | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan                                      |
|     |          | Tertanamnya vegetasi pantai di 17 lokasi   | Jawa Tengah<br>Jawa Timur<br>Banten<br>Jawa Barat<br>NTB  |          | Persentase kawasan pesisir yang memiliki vegetasi pelindung pantai   | 800                           | 2,000   | 4,000   | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan                                      |
|     |          | Pengembangan data tutupan lahan sebagai informasi dasar pengurangan bencana                                    | Seluruh kabupaten di Indonesia  |          | Data tutupan lahan dan kawasan lindung   | 1,600                         | 1,600   | 1,600   | APBN             | KLH  |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |            | Sumber Pendanaan                | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|----------|--|--|--|--|------------------------------|---------|------------|---------------------------------|------------------------|
|     |          |  | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012    |                                 |                        |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)  | (4)  | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)        |                                 |                        |
|     |          | Pemulihan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang   | NAD<br>Pantai Utara Jawa<br>Sulawesi Tengah dan<br>Gorontalo   | Simeulue<br>Pantai Utara Jawa<br>Teluk Tomini                | Jumlah Demplot untuk Pemulihan Ekosistem   | 500                          | 500     | 500 APBN   | KLH                             |                        |
|     |          | Penanggulangan dampak kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di pesisir dan laut                                  | Riau   | Dumai  | Buku Pedoman   | 75                           | 75      | 75 APBN    | KLH                             |                        |
|     |          | Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan                                 | Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan |  | Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan | 3,000                        | 3,000   | 3,000 APBN | KLH                             |                        |
|     |          | Kecukupan pangan, kesehatan masyarakat pada daerah rawan kekeringan  | Jateng<br>NTT<br>DIY   | Banjarnegara, Belu, Gunung Kidul                             | Terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat daerah rawan kekeringan   | 250                          | 250     | 250 APBN   | KPDT                            |                        |
|     |          | Berkurangnya dampak abrasi pantai pada daerah pesisir dan lahan kritis   | Sulsel<br>Gorontalo<br>Bengkulu<br>Sumatera Barat  | Pinrang, Gorontalo, Bulukumba, Bengkulu Utara, Kep. Mentawai | Terbentuknya hutan-hutan mangrove di kawasan rawan abrasi  | 110                          | 300     | 300 APBN   | KPDT                            |                        |
|     |          | Tersedianya strategi dan program pemulihan fungsi lahan Kawasan Lindung Dataran Dieng.                                 | Jawa Tengah  | Kawasan Dataran Dieng.                                       | Sistem Pemantauan risiko bencana dan program pemulihan.  | 750                          | -       | - APBN     | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |                        |
|     |          | Pelestarian lingkungan hidup wilayah mangrove, terumbu karang, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi di daerah rawan bencana. | 4 Kowil  |  | Terwujudnya kegiatan penghijauan pada zona pesisir rawan abrasi, lindung dan resapan air   | 240                          | 288     | 346 APBN   | Ster TNI                        |                        |
|     |          |  | 4 Kowil  |  | Terwujudnya kegiatan pelestarian sungai akibat pendangkalan sungsi   | 100                          | -       | 144 APBN   | Ster TNI                        |                        |
|     |          |  | 4 Kowil  |  | Terwujudnya kegiatan pelestarian jalur hijau berupa zona hijau bantaran sungai dan penanaman pohon penahan erosi   | 100                          | 120     | 144 APBN   | Ster TNI                        |                        |

| No   | Kegiatan<br>(2)                          | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)   |  | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |                  |                  | Sumber Pendanaan<br>(7)   | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)  |
|--|--|---|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--|
|  |  |   | Propinsi  | Kab/Kota   |  | Th 2010                       | Th 2011          | Th 2012          |                           |  |
|  |  | 18 Sekolah Dasar (2.988 guru dan siswa)                           | NAD   | Aceh Selatan   | 2.988 guru dan siswa sekolah dasar di daerah dampingan mengelola kebun sekolah yang berwawasan lingkungan  |                               |                  |                  | PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT | JRS  |
|  |  | Linking Disaster Risk Reduction and Climate Adaptation            |   |  | Support to pilot initiatives in climate adaptation and resilience in urban and rural communities to build alliance among the DRR and CCA constituents and programs | 11,048.33                     | 11,048.33        | 11,048.33        | PHLN                      | National Council for Climate Change (DNPI), National Disaster Management Agency (BNPB), Local Governments, Civil Society, World Bank |
|  |  | BDP, Desa, Forum PRB  | Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur                                     |  | Ada tim dan sistem kontrol yang tertuang dalam Perdes Lingkungan Hidup atau PRB  |                               |                  |                  |                           | BINA SWADAYA   |
|  |  | Siswa dan Guru SMA/SMK  | Jawa Barat  |  | 1. Adanya Program Sistematis Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2. Sinergisasi BPBD, Dinas Pendidikan, BPLH   | 200                           | 200              | 200              |                           | BPBD, Climate Change Center (C3), Dinas Pendidikan   |
|  |  | Masyarakat (Rumah tangga)   | Jakarta<br>Jawa Barat<br>DIY<br>Jawa Timur<br>Sumut<br>Sulsel<br>Kalsel | Jakarta<br>Bandung<br>Yogyakarta<br>Surabaya<br>Medan<br>Makassar<br>Banjarmasin | Reduksi Sampah, Jumlah RW partisipan, Jumlah Kader lingkungan  |                               |                  |                  | APBD, Swasta/ Masyarakat  | Unilever, Pemkot, Media : Dita, Republika, Rase FM, PR, Sonora DIY, KR, Jawa Pos   |
|  |  | Kab. Pnggaran   |   |  | Jumlah kelapa yg ditanam   |                               |                  |                  | Masyarakat/ Masyarakat    |  |
|  |  |   |   |  |  |                               |                  |                  | Swasta/ Masyarakat        | Pemkot, PKK, Unilever, Media, Republika, delta, sonora, KR, Jawa Pos   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 6 (JUATA Rp)</b> |  |   |   |  |  | <b>2,059,138</b>              | <b>1,394,651</b> | <b>1,310,687</b> |                           |  |
| 7  | pengaturan pembangunan dan tata bangunan | Ter sosialisasinya peraturan, kebijakan dan pedoman tata bangunan | Seluruh daerah rawan bencana  |  | Jumlah Dokumen keputusan dan stakeholder di pusat, provinsi dan kab/kota mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan pengaturan pembangunan dan tata bangunan        | 120.000                       | 144.000          | 168.000          | APBN, APBD, PHLN          | BNPB   |



| No  | Kegiatan                         | Sasaran   | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator   |
|---|----------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|   |                                  |   | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012        |                       |  |
| (1)   | (2)                              | (3)   | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)            | (8)            |                       |  |
|   |                                  | Pengurangan risiko dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tektonik.               | NTT<br>Maluku<br>Maluku Utara<br>Papua<br>Papua Barat<br>Jakarta<br>Jawa Barat<br>Jateng<br>NTT<br>NTB |  | Berkurangnya dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ditimbulkan gempa.   | 15,500                       | -              | -              | APBN                  | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,  |
|   |                                  | Sekolah Dasar   |  | Bogor<br>Rembang, Solo, dan Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dumou | Jumlah Sekolah yang memiliki struktur yang aman.   | X                            | X              | X              | PHLN                  | Plan Indonesia   |
|   |                                  | Mengembangkan standar-bencana bagi gedung sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah | 33 provinsi  |  | Tersusunnya dokumen tentang standar bangunan sekolah tahan gempa yang  |                              | 2,000          |                | APBN                  | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah  |
|   |                                  | Penerapan standar bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah tahan gempa    |  |  | Terlaksananya standar bangunan sekolah tahan gempa pada semua sekolah  |                              | 65,500         | 80,000         | APBN                  | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah  |
|   |                                  |   |  |  | Support to implementation of disaster and climate proof building codes and standards and micro zoning              | 3,156.67                     | 3,156.67       | 3,156.67       | PHLN                  | Ministry of Public Works, National Disaster Management Agency (BNPB), Local Governments, Civil Society |
|   |                                  | Terbangunnya rumah contoh tahan gempa untuk kekuatan gempa skala kota padang            | SumBar   | Kota Padang  | Terbangun 5 banunan rumah sederhana tahan gempa di Kota Padang   |                              | 3,000          |                | APBN, APBD            | Pusat Studi Bencana Universitas Andalas  |
|   |                                  | Bina Swadaya, BDPB, Desa, Masyarakat  | Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur  |  | Ada peraturan dan tim pengontrol tata bangunan   |                              |                |                |                       | BINA SWADAYA   |
|   |                                  | CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (Local Government Unit)              | 33 Provinces, 408 Districts  |  | Promotion of Disaster Risk Reduction/Climate Change Adaptation undertaken using a number of communication channels | 859.98                       | 311.08         | 555.71         | Swasta/<br>Masyarakat | PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 7 (JUTA Rp)</b> |                                  |   |  |  |  | <b>139,517</b>               | <b>214,968</b> | <b>251,712</b> |                       |  |
| 8   | pembangunan sarana dan prasarana | Pembangunan Sistem Radar Cuaca  | Papua<br>Papua Barat<br>Maluku Utara<br>Kalsel<br>Riau   | Merauke<br>Manokwari<br>Ternate<br>Banjarmasih<br>Pekanbaru        | Data dan Informasi Radar Cuaca di daerah yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan dan angin           | 72,000                       |                |                | APBN                  | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI   |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator         |
|-----|---|--|----------|----------|---|------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------------------|
|     |   |  | Propinsi | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                                |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)      |          | (5)   | (6)                          |         |         | (7)              | (8)                            |
|     | Pembangunan Ground Satellite Receiver                                       | Sumut Papua  | Medan    | Jayapura | Data dan informasi satelit cuaca yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan, sst dan estimasi hujan  | 5,000                        |         |         | APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|     | Pembangunan Sistem Automatic Weather Station ( AWS )                        | Daerah Bencana di Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua |          |          | Data unsur cuaca secara otomatis  | 19,440                       |         |         | APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|     | Pembangunan Sistem Automatic Rain Gauges ( ARG )                            | Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua                   |          |          | Data curah hujan secara otomatis  | 990                          |         |         | APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|     | Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Perubahan Iklim Nasional dan Regional | Kantor Pusat dan 5 Provinsi lain.                          |          |          | Informasi Perubahan Iklim dari skala Nasional hingga skala Kabupaten  | 16,055                       |         |         | APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI |
|     | Pengelabahan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG                        | Kantor Pusat   |          |          | Terbangunnya satu Pusat Inventory Gas Rumah Kaca (GRK). Tersedianya Informasi Proyeksi Iklim hingga skala kabupaten berdasar berbagai scenario IPCC. Tersedianya Peta - Peta Kerentanan Perubahan Iklim berbasis pulau/wilayah (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua). | 44,900                       | 47,350  | 47,350  | APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI |
|     | Terbangunnya sarana dan prasarana sesuai standar                            | Seluruh daerah rawan bencana                               |          |          | Jumlah Provinsi dan kab/kota yang membangun sarana dan prasarana sesuai perencanaan   | 200,000                      | 240,000 | 280,000 | APBN, APBD, PHLN | BNPB                           |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator    |
|-----|----------|---|--|--|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
|     |          |   | Propinsi   | Kab/Kota                                   |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                           |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)     |                  |                           |
|     |          | Terbangunnya sarana struktur rumah bencana di 24 kawasan  | Jawa Timur<br>Bengkulu<br>Jawa Tengah<br>Jawa Barat<br>NTB<br>NAD<br>Sulawesi Utara<br>Papua<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Selatan<br>Gorontalo<br>Maluku<br>Papua Barat<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DIY |  | Persentase kawasan pesisir yang memiliki fasilitas penyelamatan diri dan permukiman tahan terhadap ancaman bencana   | 40,000                       | 4,000   | 18,000  | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan |
|     |          | 33 PROV   | 33 prov  |  | Kegiatan bantuan stimulan Terselenggaranya kegiatan bantuan stimulan BBR (Bahan Bangunan Rumah) yang dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu Rehabilitasi dan Relokasi, khusus untuk relokasi lahan yang disediakan diharuskan terhindar dari lokasi rawan bencana. Terselenggaranya Santunan untuk meringankan beban psikologis dan meminimalisir terjadinya trauma psikologis | 31,600                       | 37,920  | 45,504  | APBN             | Kem. Sosial               |
|     |          | Pencegahan bahaya yang ditimbulkan akibat tanah longsor   | NTT<br>Sulbar  | Manggarai, Flores Timur<br>Polewali Mandar | Terbentuknya talud sebagai penahan bahaya tanah longsor  |                              | 500     | 500     | APBN             | KPDT                      |
|     |          | Teridentifikasinya pola kerjasama pemanfaatan sarpras antar daerah dalam rangka penanggulangan bencana dengan menyusun database sarpras penanggulangan bencana sehingga kebutuhan dan kondisi sarpras penanggulangan bencana di daerah dapat diketahui. | 9 Provinsi   |  | Tersusunnya database sarpras penanggulangan bencana dengan berkoordinasi antar daerah dalam rangka pemanfaatan sarpras bencana   | 300                          | 500     | 700     | APBN             | KEMDAGRI                  |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi                              |   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |             | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|----------|--|-------------------------------------|---|---|------------------------------|---------|-------------|---|------------------------|
|     |          |  | Propinsi                            | Kab/Kota  |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012     |   |                        |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)                                 |   | (5)   | (6)                          | (7)     | (8)         |   |                        |
|     |          | Terselenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif  | 2 Propinsi<br>3 Kabupaten<br>1 Kota |   | Terbangunnya Sarana Prasarana Pemerintahan di 6 (enam) wilayah (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Pariaman).  | 14                           |         | APBN        | KEMDAGRI  |                        |
|     |          | Terselenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif. | 2 Propinsi<br>3 Kabupaten<br>1 Kota |   | Terwujudnya koordinasi penanganan, pengeloaan serta pertanggung-jawaban/pelaporan dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi gedung kantor Pemerintahan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah, NTB, Kab. Tanah Datar, Toraja Utara, Lombok Barat dan Kota Pariaman. | 200                          |         | APBN        | KEMDAGRI  |                        |
|     |          | Meningkatnya pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi faktor penyebab risiko bencana   | Jawa dan Sumatera                   |   | Tersedianya SIM terkait prasarana KA yang akurat dan mutakhir   | 2.000                        | 2.000   | 2.000 APBN  | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Teknik<br>Prasarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |                        |
|     |          | Meningkatnya kelancaran operasi perjalanan KA  | Jawa Tengah                         | <p>2010 : Brumbung - Tegowanu; Kaliwungu - Kalibodri; Sta. Semarang Tawang; Jerakah - Kaliwun_u, Kaliwungu - Kalibodri; Sragen - Masaran.</p> <p>2011 : Purwakarta - Padalarang; Cicalengka - Banjar; Gampingan - Jambon; Kumpangbandan - Tanahabang.</p> | Prasarana KA siap dan aman operasi  | 35.000                       | 41.000  | 37.000 APBN | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Teknik<br>Prasarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |           |           | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator         |
|-----|----------|--|--|--|--|------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------|
|     |          |  | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011   | Th 2012   |                  |                                |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)  |  | (5)  | (6)                          |           |           | (7)              | (8)                            |
|     |          |  | Jawa tengah<br>Jawa Timur<br>Jakarta                       | 2012 : Brumbung - Ngoro, Masaran - Madiun; Sidoarjo - Tanggulangin - Porong; Kumpangbandan - Tanahabang. |  |                              |           |           |                  |                                |
|     |          | Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut  | Jumlah kebutuhan kapal patroli per luasan wilayah keamanan |  |  | 276,600                      | 0         | 0         | 0 APBN           | Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla |
|     |          | Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut  | Jumlah kapal marine surveyor per luasan wilayah pelayanan  |  |  | 4,100                        | 0         | 0         | 0 APBN           | Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla |
|     |          | Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut | Jumlah kecukupan dan keandalan SBMP per wilayah pelayanan  |  |  | 99,000                       | 0         | 0         | 0 APBN           | Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla |
|     |          | Pembangunan pengendali banjir untuk membebaskan daerah dari banjir seluas 350.000 Ha.  | Tersebar di seluruh Indonesia                              |  | Terlindungnya daerah permukiman dari banjir seluas 350.000 Ha            | 3,800,000                    | 4,000,000 | 4,500,000 | APBN             | Kem. PU, Ditjen SDA            |
|     |          | Pembangunan pengendali lahar gunung berapi untuk membebaskan daerah dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha.  | DIY<br>Jateng<br>Jatuh                                     |  | Terlindungnya daerah permukiman dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha | 180,000                      | 100,000   | 120,000   | APBN             | Kem. PU, Ditjen SDA            |
|     |          | Penanganan longsoran tebing  | Tersebar di seluruh Indonesia                              |  | Terlindungnya lalu lintas dari Longsoran tebing                          | 30,000                       | 36,000    | 44,250    | APBN             | Kem. PU, Ditjen Bina           |
|     |          | Memperkuat badan jalan dari longsoran.   | Tersebar di seluruh Indonesia                              |  | Terlindungnya Badan Jalan dari longsoran.                                | 500                          | 4,400     | 4,850     | APBN             | Marfa<br>Kem. PU, Ditjen Bina  |
|     |          | Tersedianya peralatan (PA Mobile, Pipa, Hidran Umum, Pompa, Mobil Tanki untuk penanganan darurat bidang air minum dan air limbah.                                | Kantor Pusat (Dep. PU)                                     |  | Terpenuhinya prasarana dan sarana untuk pengungsi.                       | 15,000                       | 15,000    | 15,000    | APBN             | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya    |
|     |          | Tersedianya peralatan (WC, Knock Down, MK Mobile, Alat Berat, Pompa Banjir, Pompa lumpur untuk penanganan darurat bidang penyehatan lingkungan permukiman.       | Kantor Pusat (Dep. PU)                                     |  | Terpenuhinya prasarana dan sarana untuk pengungsi.                       | 12,000                       | 12,000    | 12,000    | APBN             | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya    |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)  |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)   |
|-----------|-----------------|---|--|----------|---|--------------------------------------|---------|---------|-------------------------|---|
|           |                 |   | Propinsi   | Kab/Kota |   | Th 2010                              | Th 2011 | Th 2012 |                         |   |
|           |                 | Tersedianya peralatan (tenda keluarga, hunian darurat untuk penanganan darurat bidang perumahan dan permukiman. Terbentuknya Satgas penanggulangan darurat dan pelatihan tenaga Satgas bidang Cipta Karya | Kantor Pusat (Dep. PU)   |          | Terperuhnya prasarana dan sarana untuk pengungsi.   | 12,000                               | 12,000  | 12,000  | APBN                    | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya   |
|           |                 | Terbentuknya Satgas penanggulangan darurat dan pelatihan tenaga Satgas bidang Cipta Karya   | Kantor Pusat (Dep. PU)   |          | Terperuhnya prasarana dan sarana untuk pengungsi.   | 1,500                                | 1,500   | 1,500   | APBN                    | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya   |
|           |                 | Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan prasarana dan sarana pengembangan kawasan khusus yang terkena bencana   | NAD, Riau, Kepri, Jabar, Sumbang, Sulut, Maluku, Papua, NTT, Papua Barat, Sumut  |          | Jumlah Fasilitas Kebijakan dan Bantuan Stimulan Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman untuk 19 Kawasan Khusus yang terkena bencana seluas 380 Ha | 12,000                               | 21,000  | 24,000  | APBN                    | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan |
|           |                 | Terperuhnya kebijakan dan bantuan stimulan Rumah Khusus dalam konteks penanggulangan bencana  | Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu  |          | Jumlah Rumah Pasca Bencana yang terbangun   | 60,000                               | 40,000  | 40,000  | APBN                    | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Formal     |
|           |                 | Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana   | NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |          | Jumlah fasilitas dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana  | 50,000                               | 50,000  | 50,000  | APBN                    | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya    |
|           |                 | Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana   | NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |          | Jumlah fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana  | 25,000                               | 25,000  | 25,000  | APBN                    | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya    |

| No   | Kegiatan                  | Sasaran  | Lokasi   |  | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                  |                  | Sumber Pendanaan                       | Pelaksana/ Koordinator   |
|--|---------------------------|--|--|--|---|------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |                           |  | Propinsi   | Kab/Kota   |   | Th 2010                      | Th 2011          | Th 2012          |  |  |
| (1)  | (2)                       | (3)  | (4)  |  | (5)   | (6)                          | (7)              | (8)              |  |  |
|  |                           | Terasiliasinya penyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan swadaya yang dapat memstimulasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat di kawasan bencana | NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |  | Jumlah fasilitas dan stimulasi PSU perumahan swadaya di kawasan bencana   | 40,000                       | 40,000           | 40,000           | APBN                                   | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya |
|  |                           |  | Sulawesi   |  |   | 8,806                        | 8,806            | 8,806            | PHLN                                   | Oxfam  |
|  |                           | Masyarakat Desa  | Jakarta<br>Jawa Barat<br>Jateng<br>NTT<br>NTB  | Bogor<br>Rembang, Solo, dan Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Dompu | - Jumlah upaya mitigasi di tingkat Desa   | X                            | X                | X                | PHLN                                   | Plan Indonesia   |
|  |                           | National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural  |  |  |   |                              |                  |                  | PHLN                                   | Ministry of Home Affairs, World Bank                                 |
|  |                           | National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban  |  |  |   | 2,130,750                    |                  |                  | PHLN                                   | MINISTRY OF SETTLEMENT AND REGIONAL INFRASTRUCTURE                   |
|  |                           | terbangunnya struktur evakuasi vertikal yang tahan gempa dan layak huni di daerah rawan gempa di Kota Padang   | SumBar   | Kota Padang  | Terbentuk: 1. Dokumen perencanaan bangunan evakuasi vertikal, 2. Terwujudnya gedung-gedung bertingkat untuk tsunami untuk evakuasi vertikal |                              | 1,000            | 2,000            | APBN, APBD, PHLN, Swasta/IVIS/yan/amat | BNPB, PSB Unand, PKB ITB   |
|  |                           | Bina Swadaya, BDPB, Desa, Forum PRB  | Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur  |  | Ada rencana, tim pelaksana dan partisipasi masyarakat   |                              |                  |                  |  | BINA SWADAYA   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 8 (JUTA Rp)</b>  |                           |  |  |  |   | <b>7,179,855</b>             | <b>4,737,526</b> | <b>5,330,460</b> |  |  |
| <b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM D (JUTA Rp)</b>   |                           |  |  |  |   | <b>13,449,283</b>            | <b>7,481,712</b> | <b>8,118,856</b> |  |  |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |                           |  |  |  |   |                              |                  |                  |  |  |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>   |                           |  |  |  |   |                              |                  |                  |  |  |
| 1  | pengamatan gejala bencana | Kajian risiko Multi-Bencana Terpadu  | DIY  |  | Tersedia dan tersosialisasinya model sistem informasi kebencanaan   | 800                          | 800              | 800              | APBN                                   | Bakosurtanal   |
|  |                           | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MEWS   | Semua lokasi yang telah terpasang Peralatan MEWS   |  | Sistem beroperasi secara normal   | 13,000                       | 13,000           | 13,000           | APBN                                   | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI                                       |
|  |                           | Pembangunan Gedung MEWS  | Sumut<br>Sulsel<br>Bali  | Medan<br>Makassar<br>Denpasar                                      | Gedung MEWS sebagai pusat pelayanan peringatan dini cuaca di daerah   | 990                          | 990              | 990              | APBN                                   | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI                                       |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)                   |                                  | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)  |
|-----------|-----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------|
|           |                 |  | Propinsi                        | Kab/Kota                         |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                         |                                |
|           |                 | Persiapan Operasional Numeric Weather Prediction (NWP)   | Jakarta                         |                                  | Fasilitas PC Cluster untuk operasional dan SDM modifikasi model NWP beroperasi                 | 3,000                               | 3,000   | 3,000   | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|           |                 | Sewa Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG   | Jakarta                         |                                  | Sarana Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG beroperasi normal                                   | 3,000                               | 3,000   | 3,000   | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|           |                 | Pengadaan sistem monitoring gempa bumi otomatis, 4 remote sta, 1 center, dan sistem komunikasi                   |                                 |                                  | Meningkatnya pelayanan data gempa bumi lokal di 9 lokasi                                       | 4,000                               | 4,000   | 4,000   | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Pengadaan sarana dan prasarana guna monitoring bencana gempa bumi dan tsunami                                    | Jakarta                         |                                  | Tersedianya fasilitas untuk monitoring bencana gempa bumi dan tsunami di 10 Regional Center    | 1,500                               | 1,500   | 1,500   | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Pengadaan sarana dan prasarana guna mengkalibrasi peralatan  | Jakarta                         |                                  | Tersedianya fasilitas untuk mengkalibrasi peralatan gempa bumi di masing-masing Balai Besar    | 1,200                               | 1,200   | 1,200   | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Peningkatan Pelayanan data Geomagnet   | Banten                          |                                  | Meningkatnya pelayanan magnet bumi di Banten   | 4,000                               | 2,750   |         | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Peningkatan Pelayanan data magnet bumi   | Papua Maluku Yogyakarta Sumbang | Jayapura Ambon Yogyakarta Padang | Peningkatan pelayanan magnet bumi di 4 lokasi (Jayapura, Ambon, Yogyakarta dan Padang Panjang) | 2,300                               | 2,300   | 2,300   | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Melengkapi peralatan untuk studi prekursor gempa bumi  |                                 |                                  | Tersedianya fasilitas untuk studi prekursor gempa bumi   | 400                                 | 400     | 400     | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Penin katan Pelan anan informasi petir   |                                 |                                  | Tersedian a informasi ke adian etir di beberapa lokasi di Indonesia                            | 150                                 | 150     | 150     | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Mendapatkan lokasi sensor seismik dg kualitas yang baik  |                                 |                                  | Meningkatnya kualitas data seismic dari 25 lokasi  | 200                                 | 200     | 200     | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|           |                 | Setiap gejala kejadian bencana dilaporkan secara cepat kepada Pemda dan kemudian diteruskan ke instansi terkait. | Seluruh daerah rawan bencana    |                                  | Jumlah lokasi pengamatan gejala kejadian bencana yang dilaksanakan                             | 24,000                              | 28,800  | 33,600  | APBN, APBD, PHLN        | BNPB                           |



| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan         | Pelaksana/ Koordinator      |
|-----|----------|---|--|----------|---|------------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------------------------|
|     |          |   | Propinsi   | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                          |                             |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)  |          | (5)   | (6)                          | (7)     | (8)     |                          |                             |
|     |          | Tersedianya sebagai teknologi pengurangan risiko bencana.   | Banten<br>Jawa Barat<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>Jawa timur<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan Selatan<br>Sumatera Selatan<br>Lampung<br>Sumatera Barat<br>Sumatera Hindia<br>Laut Banda<br>Laut Maluku<br>laut Jawa |          | Dikuasanya kemampuan membangun teknologi sistem peringatan dini yang handal untuk bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kerusakan perairan dan lingkungan | 8,000                        | 10,000  | 12,000  | APBN, APBD, PHLN, SWASTA | PTLWB BPPT                  |
|     |          | - Operasionalisasi dan pemeliharaan buoy tsunami dan stasiun penerima data buoy.                                  | Samudera Hindia<br>Laut Banda<br>Laut Maluku<br>laut Jawa  |          | Buoy dan stasiun penerima data beroperasi   |                              |         |         |                          | PTLWB BPPT                  |
|     |          | - Terbangunnya konsep, sistem dan prototype sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat. | Banten<br>Jawa Barat<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>Jawa timur<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan Selatan<br>Sumatera Selatan<br>Lampung<br>Sumatera Barat  |          | Paket teknologi digunakan oleh pemangku kepentingan   |                              |         |         |                          | PTLWB BPPT                  |
|     |          | - Tersedianya konsep, desain dan rekayasa teknologi penanggulangan bencana akibat gagal teknologi.                | Banten<br>Jawa Barat<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>Jawa timur<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan Selatan<br>Sumatera Selatan<br>Lampung<br>Sumatera Barat  |          | Terwujudnya sistem peringatan dini yang cepat dan akurat  |                              |         |         |                          |                             |
|     |          | Tersedianya dan terpasangnya AWS  | 6 Propinsi   |          | Tersedianya dan terpasangnya AWS 6 Unit   | 1,000                        | 2,000   | 1,500   | APBN                     | Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS |
|     |          | Terpantunya Tingkat Aktivitas Gunungapi pada level waspada  | 10 Lokasi (berdasarkan data statistik)   |          | Jumlah Terpantunya tingkat aktivitas Gunungapi per tahun pada level waspada   | 971                          | 1,117   | 1,285   | APBN                     | Badan Geologi, KESDM        |

| No   | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |         |          | Sumber Pendanaan         | Pelaksana/ Koordinator |
|--|---|---|----------|----------|---|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|------------------------|
|  |   |   | Propinsi | Kab/Kota |   | Th 2010                       | Th 2011 | Th 2012  |                          |                        |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)      |          | (5)   | (6)                           | (7)     | (8)      |                          |                        |
|  | 1). Tersedianya informasi hotspot (harian)  | Sumatera dan Kalimantan   |          |          | Informasi pemantauan hotspot, harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.                   | 232,6                         | 255     | 281 APBN | LAPAN                    |                        |
|  | 2). Tersedianya informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan/SPBK (harian)                                 | Sumatera dan Kalimantan   |          |          | Informasi pemantauan SPBK harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.                       |                               |         |          |                          |                        |
|  | 3). Tersedianya informasi pemantauan daerah potensi banjir (harian)   | Indonesia   |          |          | Informasi pemantauan potensi banjir harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.             |                               |         |          |                          |                        |
|  | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media    | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur                              |          |          | Pemanfaatan pemahaman proses alam dalam PRB   | 500                           | 500     | 500 APBN | LIPI, Puslit Oseanografi |                        |
|  | BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta  | Jakarta Bengkulu NTT  |          |          | Data gejala bencana menurut masyarakat dan menurut BMKG   |                               |         |          | BINA SWADAYA             |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUATA Rp)</b> |   |   |          |          |   |                               |         |          |                          |                        |
| 2  | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana  | Tersusunnya Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri | Jakarta  |          | Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri                     | 69.244                        | 75.962  | 79.706   | 605 APBN                 | BAPETEN                |
|  | Tersusunnya Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan                                  |   |          |          | Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan  | 500                           | 550     |          |                          |                        |
|  | Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM |   |          |          | Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM |                               |         |          |                          |                        |
|  | Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit  |   |          |          | Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit  |                               |         |          |                          |                        |
|  | Terciptanya Budaya Keselamatan di INNR  | Jakarta   |          |          | Budaya Keselamatan di INNR  | 342                           | 376     | 413 APBN | BAPETEN                  |                        |
|  | Tersedianya Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNR  |   |          |          | Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNR  |                               |         |          |                          |                        |
|  | Tersedianya Laporan hasil kajian Teknis evaluasi pengawasan INNR  |   |          |          | Laporan Hasil Kajian Teknis evaluasi pengawasan INNR  |                               |         |          |                          |                        |



| No  | Kegiatan                                     | Sasaran   | Lokasi  |   | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |               | Sumber Pendanaan        | Pelaksana/ Koordinator   |
|---|--|---|---|---|--|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
|   |  |   | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012       |                         |  |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   |   | (5)  | (6)                          |               |               | (7)                     | (8)  |
|   |  | Sekolah Dasar dampingan Plan Indonesia  | Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB                       | Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu | - Kajian mengenai Sekolah yang Aman dari Ancaman Bencana tersedia  | X                            | X             | X             | PHLN                    | Plan Indonesia   |
|   |  |   |   |   | Technical Assistance for the development of national and regional risk and impact assessment frameworks, tools and methodologies | 2,367.5                      | 2,367.5       | 2,367.5       | PHLN                    | National Development Planning Agency (BAPPENAS), National Disaster Management Agency (BNPb) World Bank |
|   |  | BOPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta  | Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur Kota di Indonesia |   | Dokumen Hasil analisis   |                              |               |               |                         | BINA SWADAYA   |
|   |  | Pemerintah Kota   | Indonesia   |   | Metoda kajian risiko kegunaan yang Teruji  |                              |               |               | APBN                    | PMB-ITB  |
|   |  | Pemprov NAD   | Indonesia   |   | Teknis penyusunan dan pemasangan early warning sistem di kawasan rawan tsunami   |                              |               |               | APBN                    | PMB-ITB  |
|   |  | Pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan pembangunan berpotensi menimbulkan bencana  | Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur NTT                |   | Pemerintah dan masyarakat mengetahui tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan                    | 100                          | 100           | 100           | Swasta/ Masyarakat      | PSMB UPN Veteran   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b> |  |   |   |   |  |                              |               |               |                         |  |
| 3   | pen_ambilan keputusan status ancaman bencana | Setia, hasil analisis diteta, kan status ancaman bencana  | Seluruh daerah rawan bencana                            |   | Jumlah dokumen ke, utusan status ancaman bencana   | 29,609                       | 35,993        | 40,536        | 28,000 APBN, ABPD, PHLN | BNPB   |
|   |  | Terbangunnya sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem (badai, rob) dan kerusakan perairan dan lingkungan yang handal |   |   |  |                              |               |               |                         | PTLWB BPPT   |
|   |  | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media                              | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu              |   | tersumunya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami   | 500                          | 500           |               | APBN                    | BNPB, LIPI, Kem. Kelautan & Perikanan, Kem. RISTEK, BMKG, Kem. Dagri                                   |
|   |  | BOPB, Pemerintah Desa, Forum PRB  | Jakarta, Bengkulu, NTT, Kalimantan Timur                |   | Keputusan jenis status ancaman   |                              |               |               |                         | BINA SWADAYA   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b> |  |   |   |   |  | <b>28,500</b>                | <b>34,100</b> | <b>39,200</b> |                         |  |

| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi  |                        | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |                         | Sumber Pendanaan               | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|---|---|---|------------------------|--|------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
|     |   |   | Propinsi  | Kab/Kota               |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012                 |                                |                        |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                    | (6)  | (7)                          | (8)     |                         |                                |                        |
| 4   | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana | Penyediaan informasi spasial indeks kebencanaan/peta multirawan bencana                   | Jawa Timur, Jawa Tengah Sebagian Sumatera sebagian Sulawesi sebagian Kalimantan |                        | Tersedia dan tersosialisasinya informasi spasial atas dasar indeks kebencanaan         | 1,200                        | 1,320   | 1,452 APBN              | Bakosurtanal                   |                        |
|     |   | Pembuatan Atlas kebencanaan   | Indonesia   |                        |  | 238                          | 262     | 288 APBN                | Bakosurtanal                   |                        |
|     |   | Pembangunan Decision Support Sistem MEWS  | Sumut Sulse Bali  | Medan Makasar Denpasar | Sistem integrasi Radar Mosaic, model prakiraan, display dan disseminasi sesuai harapan | 10,000                       | 10,000  | 10,000 APBN             | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |                        |
|     |   | Pembangunan Sistem Komunikasi dan Integrasi   | Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua  |                        | Termonitornya seluruh tampilan radar cuaca di kantor pusat                             | 7,500                        | 7,500   | 7,500 APBN              | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |                        |
|     |   | Pembangunan Teleconference  | Sumut Sulse Bali  | Medan Makasar Denpasar | Termonitornya alur informasi cuaca   | 600                          | 600     | 600 APBN                | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |                        |
|     |   | Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan NDC CTBTO                               | Jakarta   |                        | Tersedianya fasilitas untuk pelayanan informasi CTBTO                                  | 500                          | 500     | 500 APBN                | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |                        |
|     |   | Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan AEIC                                    | Jakarta   |                        | Meningkatnya pelayanan informasi gempabumi untuk ASEAN                                 | 500                          | 500     | 500 APBN                | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |                        |
|     |   | Pengadaan digital seismograph di 15 stasiun Geofisika                                     |   |                        | Meningkatnya pelayanan informasi gempa lokal   | 600                          | 600     | 600 APBN                | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |                        |
|     |   | Peningkatan Kerapatan Jaringan Pengamatan temporer magnetibumi                            |   |                        | Meningkatnya informasi perubahan tahunan magnetibumi di Indonesia                      | 500                          | 0       | APBN                    | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |                        |
|     |   | Peningkatan database di Jakarta dan redundant-Bali  |   |                        | Meningkatnya kelengkapan InaTEWS untuk keperluan Indonesia dan International           | 400                          | 460     | 550 APBN                | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |                        |
|     |   | Informasi dan warning terkirim dan diterima secara cepat                                  |   |                        | Terpenuhiya kelengkapan persaratan RTWP  | 40                           | 40      | 40 APBN                 | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |                        |
|     |   | Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sistem monitoring prekursor gempabumi   |   |                        | Tersedianya informasi prediksi gempabumi   | 800                          | 800     | 800 APBN                | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |                        |
|     |   | Berfungsinya sistim informasi peringatan bencana yang evidence based di seluruh Indonesia | Seluruh daerah rawan bencana  |                        | Dokumen keputusan yang dihasilkan dalam menyelenggarakan peringatan bencana            | 50,000                       | 60,000  | 70,000 APBN, APBD, PHLN | BNPB                           |                        |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi   |   | Indikator Kinerja | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |          |         | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|--|----------|----------|---|-------------------|------------------------------|----------|---------|---|------------------------|
|     |  |          | Propinsi | Kab/kota  |                   | Th 2010                      | Th 2011  | Th 2012 |   |                        |
| (1) | (2)  | (3)      | (4)      | (5)   | (6)               | (7)                          | (8)      |         |   |                        |
|     | 33 Prov  | 33 Prov  | 33 prov  | Terselenggaranya kegiatan studi kebijaksanaan sehingga dapat terpetakan dan terdeteksinya daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi sebagai langkah antisipasi dan terselenggaranya kegiatan kampung Siaga Bencana (KSB) | 4,891.67          | 5,625.42                     | 6,750.50 | APBN    | Kem. Sosial dan Akademisi   |                        |
|     | Minimalisasi gangguan DFI  | 33 Prop. | 33 Prop. | Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)   |                   |                              |          | APBN    | Kementerian Pertanian   |                        |
|     | Daerah yang rawan terhadap risiko bencana  | Provinsi | Provinsi | tersebaranya informasi tentang peringatan dini bencana  | 2,500             | 2,500                        | 3,000    | APBN    | Kem. Kominfo, Direktorat Sarana Teknologi Komunikasi, Ditjen SKDI |                        |
|     | Tersedianya sistem (baik hardware maupun software) yang dapat mendukung pengolahan data penginderaan jauh guna pemantauan bumi untuk mitigasi bencana.                                     |          |          | Informasi pemantauan harian yang terupload di website SIMBA secara real time setiap hari.Sistem informasi pemantauan harian dan bulanan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis website.  | 446.7             | 491                          | 540      | APBN    | LAPAN   |                        |
|     | Tersedianya informasi pemantauan cuaca dan iklim, sistem peringatan bahaya kebakaran, banjir/longsor, kekeringan, hotspot, dan ketersediaan pangan di website SIMBA                        |          |          |   |                   |                              |          |         |   |                        |
|     | 3). Tersedianya informasi bencana alam lainnya, seperti: sebaran kabut asap, dampak letusan gunung api, dampak gempa bumi, dampak tsunami dan lain-lain di website SIMBA                   |          |          |   |                   |                              |          |         |   |                        |
|     | Terlaksananya diseminasi informasi penginderaan jauh untuk mitigasi bencana alam melalui kerjasama antar dan inter lembaga dan instansi serta melalui website SIMBA -LAPAN dan media massa |          |          |   |                   |                              |          |         |   |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi                                     |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                          |                          | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator   |
|-----|----------|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|
|     |          |  | Propinsi                                   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011                  | Th 2012                  |                  |  |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)                      | (8)                      |                  |  |
|     |          | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media   | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu |  | tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami  | 250                          | 500                      | 500                      | APBN             | LPI, Puslit Oseanografi  |
|     |          | Tersedianya panduan dan petunjuk teknis pengurangan risiko bencana.  | Wilayah Jawa dan Bali.                     |  | Penyebarluasan Panduan dan petunjuk teknis.  | 1,000                        | -                        | -                        | APBN             | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,                                      |
|     |          | Tersedianya dan terlaksananya sistem peringatan dini berbasis komunitas di 3 Provinsi.   | Bengkulu Sumatera Barat NTT DIY Sulteng    | Kota Palu  | 1). Jumlah SOP sistem peringatan dini berbasis komunitas yang tersusun di 3 Provinsi.  | 880                          | 770                      |                          | PHLN             | BMIKG dan BNPP   |
|     |          | Terdokumentasinya bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana ke dalam buku yang disebarluaskan sebanyak 1.000 eksemplar di di 13 kabupaten/kota di 6 provinsi | Jateng DI Yogyakarta Bengkulu Sumbang NTT  | Palu Cilacap Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul Mukomuko, Kota Bengkulu Solok Sikka, Alor, Belu | 1) Adanya buku tentang kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana yang diterbitkan, 2) Jumlah lembaga terkait penanggulangan bencana yang menerima buku tentang kearifan lokal dalam PRB dan penanggulangan bencana | 150                          | 150                      |                          | PHLN             | BNPP   |
|     |          | Multi-pemangku kepentingan   | Nasional Jakarta                           |  | Informasi tersebar dan koordinasi berjalan dengan baik.  | On-going dengan staff        |                          |                          | PHLN             | OCHA   |
|     |          | Forum Anak Desa dan Murid Sekolah Dasar  | Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB          | Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu                                    | - Jumlah sistem peringatan dini di tingkat desa/ kelurahan   | X                            | X                        | X                        | PHLN             | Plan Indonesia   |
|     |          | Masyarakat   | Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB          | Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu                                    | - Jumlah media yang dikembangkan   | X                            | X                        | X                        | PHLN             | Plan Indonesia   |
|     |          | Anak-anak dan Remaja   | Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB          | Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu                                    | Jumlah media kampanye yang dihasilkan  | X                            | X                        | X                        | PHLN             | Plan Indonesia   |
|     |          | Pekerja Kemusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll  |  |  | Belum bisa diindikasikan   | Belum bisa diindikasikan     | Belum bisa diindikasikan | Belum bisa diindikasikan | PHLN             | Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll |
|     |          | Tersedianya sarana dan rambu evakuasi tsunami  | Sumbang                                    | Kota Padang  | 1) Tersedianya prasarana di target evakuasi, 2) 100 mahasiswa terlibat, 3) 10 jalur evakuasi siap digunakan  | 5,000                        |                          |                          | APBN, APBD       | Pusat Studi Bencana Universitas Andalas                              |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)                                  |                   | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |                       | Sumber<br>Pendanaan<br>(7)                              | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|---|--|-------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|
|           |                 |   | Propinsi                                       | Kab/Kota          |   | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012               |   |                                  |
|           |                 | BDPB, Pemerintah Desa,<br>Masyarakat, Bina Swadaya, LSM,<br>Swasta      | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur |                   | Dokumen Hasil analisis  |                                     |         |                       | BINA SWADAYA  |                                  |
|           |                 | BDPB, Pemerintah Desa,<br>Masyarakat, Bina Swadaya, LSM,<br>Swasta      | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>Kalimantan Timur |                   | Ada berbagai jenis media dan data<br>jumlah penerima informasi dari<br>pelaksana  |                                     |         |                       | BINA SWADAYA  |                                  |
|           |                 | Sekolah-2 dari tingkat SD, SLTP,<br>SMK dan SMU, Muspida dan<br>Muspika | Bengkulu<br>Jogjakarta                         |                   | Tersebaranya tools edukasi bencana di<br>1.332 kantor desa, 79 kantor<br>kecamatan dan 9 kantor<br>kabupaten/kota di Bengkulu, 90<br>kantor dinas pendidikan dan 1.833<br>sekolah di Prop.Bengkulu. | 4,120                               | 4,120   | 4,120                 | ACT   |                                  |
|           |                 | Pemerintah RI   | Indonesia                                      |                   | • Me-maintain sistem informasi<br>tersebut agar tetap up to date<br>datannya<br>• Penyempurnaan sistem  |                                     |         | APBN                  | PMB-ITB (Ristek, BMKG)                                  |                                  |
|           |                 | Perubahan perilaku masyarakat<br>setempat                               | Jawa<br>NAD                                    |                   |   |                                     |         | PHLN                  | Skala dan CSF   |                                  |
|           |                 | Masyarakat desa ring I Kelut  | Jawa Timur                                     | desa ring I Kelut | terbentuknya radio amatir   |                                     |         | Swasta/<br>Masyarakat | Sampoerna, PSMB UPN<br>Jogjakarta, Perkumpulan<br>Skala |                                  |



| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi   |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |                                    | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|---|---|---|--|--|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|
|   |   |   | Propinsi   | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012                            |   |                        |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)  |  | (5)  | (6)                          | (7)           | (8)                                |   |                        |
|   | Board Members, Staff, Volunteers, CBAT (Community Based Action Team), Community, Local Government Unit) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo<br>Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-Bau<br>Kutai Kartanegara | ICBRR/DRR identified as responsibility of all stakeholders (PMI, Community, LGU) with shared commitment and supports | 2.28   | 481.43                       | 187.84        | Swasta/<br>Masyarakat              | PMI National<br>Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch, Community |                        |
|   | PMI   | PMI NHQ   |  |  | Radio Communication Network established at all levels  | 460                          | 460           | Swasta/<br>Masyarakat              | PMI National<br>Headquarter                                     |                        |
|   | PMI   | PMI NHQ   |  |  | Efficient national EWS include CBEWS in place involving all levels of government, civil society and community based on sound scientific information, risk knowledge, communicating and warning dissemination and community response capacity | 33                           | 33            | Swasta/<br>Masyarakat              | PMI National<br>Headquarter                                     |                        |
|   | PMI   | PMI NHQ   |  |  | CBEWS SOP, Manual and IEC materials printed and disseminated to 33 PMI Chapters  | 100                          | 100           | Swasta/<br>Masyarakat              | PMI National<br>Headquarter                                     |                        |
|   | PMI Staff   | PMI NHQ   |  |  | DMIS functioned accurately   | 12                           | 12            | Swasta/<br>Masyarakat              | PMI National<br>Headquarter                                     |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUTA Rp)</b> |   |   |  |  |  | <b>92,724</b>                | <b>97,825</b> | <b>108,533</b>                     |   |                        |
| 5   | pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana   | Meningkatkan Kerapatan Jaringan repeat station<br>Setiap ancaman bencana tertanggulangi dengan baik   |  |  | Tersedianya informasi untuk survei gravitasi<br>Jumlah Data dan Informasi kegiatan tindakan bencana yang tertanggulangi  | 15                           | 15            | 15 APBN<br>84,000 APBN, APBD, PHLN | BMKG DEPUTI BIDANG<br>GEOFISIKA<br>BNPB                         |                        |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                         | Sumber Pendanaan            | Pelaksana/ Koordinator |
|---|---|--|--|----------|---|------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
|   |   |  | Propinsi   | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012                 |                             |                        |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)  |          | (5)   | (6)                          | (7)            | (8)                     |                             |                        |
|   |   | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu                                 |          | tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami                                   | 250                          | 500            | 500 APBN                | LIPI, Puslit Oseanografi    |                        |
|   |   | Multi pemangkukepentingan  | Nasional Jakarta   |          | Jejaring yang ada terpelihara dengan baik serta bertambah besar.                                    | On-going dengan staff        | -              | PHLN                    | OCHA                        |                        |
|   |   | Affected population  | Country wide   |          | Ada sistem peringatan dini dan SOP yang disimulasikan   |                              |                |                         | UNICEF                      |                        |
|   |   | BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta   | Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur                                      |          |   |                              |                |                         | BINA SWADAYA                |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 5 (JUTA Rp)</b>   |   |  |  |          |   | <b>60,265</b>                | <b>72,515</b>  | <b>84,515</b>           |                             |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM E (JUTA Rp)</b>  |   |  |  |          |   | <b>280,342</b>               | <b>316,395</b> | <b>352,490</b>          |                             |                        |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b> |   |  |  |          |   |                              |                |                         |                             |                        |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>           |   |  |  |          |   |                              |                |                         |                             |                        |
| 1   | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan bencana masyarakat | Terselenggaranya promosi kerentanan masyarakat rawan bencana berskala nasional                                     | Seluruh daerah rawan bencana   |          | Jumlah kemiraan dan dokumen dalam penyelenggaraan promosi pemahaman kerentanan masyarakat dalam PRB | 26,000                       | 31,200         | 36,400 APBN, ABPD, PHLN | BNPB                        |                        |
|   |   | - Penyelenggaraan seminar dan lokakarya pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan internasional              | Jakarta Banten Lampung Jawa Tengah Sumatera Barat                          |          | - Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana                         |                              |                |                         | PTLWB BPPT                  |                        |
|   |   | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di 464 Kab/Kota                         | 464 Kab/Kota   |          | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di Kab/Kota              | 500                          | 500            | 500 APBN                | Kem. Kehutanan, Dirjen RLPS |                        |
|   |   | Meningkatnya pemahaman masyarakat/Lembaga tentang mitigasi bencana geologi   | 14 Lokasi berdasarkan tingkat aktivitas kegiatan                           |          | Peningkatan Persentase pemahaman Masyarakat/Lembaga   | 1,050                        | 1,050          | 1,050 APBN              | Badan Geologi, KESDM        |                        |
|   |   | Meningkatnya pengetahuan Masyarakat/Lembaga Penanganan Bencana mengenai Kebencanaan Geologi                        | -  |          | Tersedianya bahan untuk sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bencana geologi | 720                          | 828            | 952 APBN                | Badan Geologi, KESDM        |                        |
|   |   | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana geologi                                      | 14 Lokasi berdasarkan tingkat aktivitas kegiatan                           |          | Peningkatan Persentase pemahaman Masyarakat/Lembaga   |                              |                | APBN                    | Badan Geologi, KESDM        |                        |
|   |   | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |          | Terselenggaranya sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana               | 600                          | 750            | 750 APBN                | KEMENKOKESRA                |                        |

| No  | Kegiatan  | Sasaran | Lokasi                            |   | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                                |                           | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|------------------------|
|     |   |         | Propinsi                          | Kab/Kota  |  | Th 2010                      | Th 2011                        | Th 2012                   |  |                        |
| (1) | (2)   | (3)     | (4)                               |   | (5)  | (6)                          | (7)                            | (8)                       |  |                        |
|     | Masyarakat dan petugas di masing-masing prov & Kab/Kota   |         | Sumatera Barat                    |   | Adanya kepedulian masyarakat terhadap ancaman potensi bencana  |                              | APBN                           | PPK Kementerian Kesehatan |  |                        |
|     | Community in village level  |         | Papua NTT                         | Wamena, Keerom Waingapu                                   | #EWS used in community   | 284.1                        | PHLN, USAID (Total: \$494.804) | World Vision partners     |  |                        |
|     | 18 Sekolah dasar (2.988 guru dan siswa SD)  |         | NAD                               | Aceh Selatan  | 1. Guru-guru SD-SD didampingi masukan perspektif PRB dan pendidikan perdamaiannya dalam praktek pengajarannya di kelas   | 8,806                        | PHLN                           | UNDP                      |  |                        |
|     |   |         |                                   |   | 2. Minimal 3 kali setahun ada pertemuan dengan pihak pemerintah lokal dan dinas terkait untuk berkoordinasi dan komunikasi tentang pentingnya PRB dan peace education dalam pendidikan dasar |                              | PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT      | JRS                       |  |                        |
|     |   |         |                                   |   | 3. Mengirim laporan secara rutin (4 bulanan) kepada pemerintah setempat dan dinas-dinas terkait.   |                              |                                |                           |  |                        |
|     | Forum Anak Desa dan Muirid Sekolah Dasar  |         | Jakarta Jawa Barat Jateng N I NTB | Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembang dan Sikka Dompu | - Jumlah Peta dan Analisis Risiko Bencana di tingkat Desa  | X                            | X                              | PHLN                      | Plan Indonesia   |                        |
|     | Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll |         |                                   |   |  | Belum bisa diindikasikan     | Belum bisa diindikasikan       | PHLN                      | Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll |                        |
|     | Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll |         |                                   |   |  | Belum bisa diindikasikan     | Belum bisa diindikasikan       | PHLN                      | Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll |                        |
|     | Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll |         |                                   |   |  | Belum bisa diindikasikan     | Belum bisa diindikasikan       | PHLN                      | Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll |                        |

| No   | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi   |   | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |               |               | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator                  |
|--|---|---|--|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---|
|  |   |   | Propinsi   | Kab/Kota  |  | Th 2010                       | Th 2011       | Th 2012       |                       |   |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)  |   | (5)  | (6)                           |               |               | (7)                   | (8)                                     |
|  |   | Terlaksananya simulasi tsunami untuk semua murid sekolah di kota Padang   | Sumbar   | Kota Padang   | Dikuti seluruh sekolah di kota Padang yang berada pada zona bahaya   |                               |               | 5,000         | APBN, APBD, PHLN      | Pusat Studi Bencana Universitas Andalas |
|  |   | Pemerintah Desa, Masyarakat, Forum PRB                                    | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim   |   | Ada data kerentanan yang diaupdate   |                               |               |               |                       | BINA SWADAYA                            |
|  |   | Masyarakat di kawasan rawan bencana letusan gunungapi, banjir dan longsor | Jawa Tengah<br>Jawa Timur<br>DI Yogyakarta   |   | Tersusun metodologi kerja praktek dan KKN tematik untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sadar budaya | 50                            | 50            | 50            | Swasta/<br>Masyarakat | PSMB UPN Veteran                        |
|  |   | PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch  | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-Bau<br>Kutai Kartanegara | Number of Sector Based Program which reflect the attainment of "Building Safer and More Resilient Communities"             | 4,311                         | 3,629.8       | 3,721         | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National Headquarter                |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUATA Rp)</b> |   |   |  |   |  | <b>42,321</b>                 | <b>38,292</b> | <b>48,707</b> |                       |   |
| 2  | perencanaan partisipatif penanggulangan bencana | Tersedianya dokumen perencanaan partisipatif PRB di desa                  | Seluruh daerah rawan bencana   |   | Jumlah dokumen perencanaan partisipatif PRB<br><br>- Terselenggaranya seminar dan lokakarya nasional dan internasional     | 15,000                        | 18,000        | 21,000        | APBN, APBD, PHLN      | BNPB<br><br>PTLWB BPPT                  |

| No  | Kegiatan | Sasaran  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator   |
|-----|----------|--|---|----------|---|------------------------------|---------|---------|-----------------------|--|
|     |          |  | Propinsi  | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                       |  |
| (1) | (2)      | (3)  | (4)   |          | (5)   | (6)                          | (7)     | (8)     |                       |  |
|     |          | Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air/ kelompok tani | 33 Propinsi   |          | Terselenggaranya sekolah lapang iklim untuk P3A 720 unit.                                     | 4,000                        | 6,500   | 7,500   | APBN                  | Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA |
|     |          | Tersedianya model pelibatan masyarakat dalam menghadapi bencana.       | Wilayah Jawa dan Bali.  |          | Model dan program pelibatan masyarakat.   | 1,000                        |         |         | APBN                  | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,                                |
|     |          | Petugas di masing-masing prov& kab/kota                                | Setiap prov & kab/kota  |          | Adanya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana                              |                              |         |         | APBN                  | PPK Kementerian Kesehatan                                      |
|     |          |  | National  |          |   | Funding contract until       |         |         | PHLN                  | IFRC/PMI   |
|     |          | Pemerintah Desa, Masyarakat, Forum PRB                                 | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim                              |          | Ada Rencana Aksi Masyarakat   |                              |         |         |                       | BINA SWADAYA   |
|     |          | Pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi           | Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>Jawa Timur<br>NTT                 |          | Masyarakat di kawasan rawan letusan mempunyai rencana pengurangan risiko bencana partisipatif | 100                          | 100     | 100     | Swasta/<br>Masyarakat | PSMB UPN Veteran   |
|     |          | 1100 relawan internal Sampoerna  | Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi) |          | Penguatan pengetahuan dasar stakeholders di bidang kebencanaan                                |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | Sampoerna Rescue tim dan internal departemen (EHS)             |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)                         | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JU TA Rp) |                |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8)                  |
|-----------|-----------------|--|---|---|---|-------------------------------|----------------|---------|----------------------------|---|
|           |                 |  | Propinsi  | Kab/Kota  |   | Th 2010                       | Th 2011<br>(6) | Th 2012 |                            |   |
|           |                 | Community, LGU (Local Government Unit) | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang KlATEN, Magelang, Boyolali, Temanggung, Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-Bau<br>Kutai Kartanegara | tools and equipment in place with systems and trained community members for maintenance and operation | 100                           | 240            | 240     | Swasta/<br>Masyarakat      | PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi   |   | Indikator Kinerja                | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)     |                                  |   | Sumber Pendanaan                                  | Pelaksana/ Koordinator |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|
|   |   |  | Propinsi   | Kab/Kota  |                                  | Th 2010                          | Th 2011                          | Th 2012   |   |                        |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)  |   | (5)                              | (6)                              | (7)                              | (8)   |   |                        |
|   | Board Members, Staff, Volunteers, CBAT, Community, LGU      | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur  | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo<br>Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-Bau<br>Kutai Kartanegara | DRR/CCA planning prioritized problems and solution based on existing hazards, risk, vulnerability and capacity at local level   | 176.6                            | 254.45                           | 246.36                           | Swasta/<br>Masyarakat   | PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b> |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |   |   |                        |
| 3   | peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana | Terwujudnya komitmen semua unsur/stakeholder akan pentingnya PRB berbasis masyarakat<br>Terlalu petugas daerah tentang PDAS<br>Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan kerawanan sosial<br>Petugas di masing-masing prov & kab/kota<br>Pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana | Seluruh daerah rawan bencana<br>33 Propinsi<br>Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan Lampung<br>Setiap prov & Kab/kota<br>Mabes TNI dan Kowil   | Jumlah komitmen stakeholder sebagai pelaku PRB<br>Terlalu petugas daerah tentang PDAS di 33 Propinsi<br>Terbangunnya komitmen bersama antara Pemerintah dan Stakeholder Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial<br>Adanya komitmen kesepakatan dalam upaya penanggulangan bencana bidang kesehatan<br>Terlalu petugas daerah tentang PDAS di 33 Propinsi | 20,377<br>25,000<br>1,000<br>600 | 25,094<br>30,000<br>2,000<br>750 | 29,086<br>35,000<br>2,500<br>750 | BNPB<br>PHLN<br>Kem. Kehutanan, Dirjen RLPS<br>KEMENKOKESRA<br>APBN<br>- APBN |   |                        |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2)                | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4) |                           | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7)  | Pelaksana/ Koordinator<br>(8) |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|---------------------------|---|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------------|
|           |                                |   | Propinsi      | Kab/kota                  |   | Th 2010                              | Th 2011 | Th 2012 |                          |                               |
|           |                                | Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana | 4 Kowil       |                           | Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat  | -                                    | 960     | -       | APBN                     | Slog TNI                      |
|           |                                | Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana | 4 Kowil       |                           | Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat  | -                                    | -       | 1,152   | APBN                     | Slog TNI                      |
|           |                                | Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana |               |                           | Terkoordinirnya pemanfaatan alat angkut milik swasta untuk mendukung penanganan bencana   |                                      |         | 115     |                          | Ster TNI                      |
|           |                                |   | Jakarta       |                           |   | 4,403                                |         |         | PHLN                     | UNOCHA                        |
|           | 48 Tenaga pendamping JRS       |   | NAD           | Tapak Tuan, Aceh Selatan, | 48 tenaga pendamping JRS mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan PRB (DRR, EPS, pengelolaan konflik, PRA, pendidikan perdamaian)             |                                      |         |         | PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT | JRS                           |
|           | 18 desa (360 peserta)          |   | NAD           | Aceh Selatan              | 360 tokoh masyarakat desa dampingan mengikuti pelatihan PRB dan menyusun kegiatan tindak lanjut atas pelatihan yang dilakukannya                      |                                      |         |         | PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT | JRS                           |
|           | 18 desa (360 jiwa)             |   | NAD           | Aceh Selatan              | 360 orang rentan membuat kegiatan bersama yang berawasan PRB dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan desa.                                     |                                      |         |         | PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT | JRS                           |
|           | 18 desa (720 peserta pemuda/i) |   | NAD           | Aceh Selatan              | 720 pemuda/i mengikuti pelatihan dan kegiatan PRB dan pengelolaan konflik, lewat olahraga, usaha peningkatan pendapatan dan kegiatan lain yang sesuai |                                      |         |         | PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT | JRS                           |
|           | Masyarakat luas                |   | Indonesia     |                           | Sekolah Aman dari Bencana merupakan bagian dari Strategi Kebijakan Nasional   | X                                    | X       | X       | PHLN                     | Plan Indonesia                |



| No  | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi  |   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |                       | Sumber Pendanaan                                 | Pelaksana/ Koordinator                           |
|-----|--|---|---|---|---|------------------------------|---------|-----------------------|--|--|
|     |  |   | Propinsi  | Kab/Kota  |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012               |  |  |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   |   | (5)   | (6)                          | (7)     | (8)                   |  |  |
|     | Murid Sekolah  | Jakarta<br>Jawa Barat<br>Jateng<br>NTT<br>NTB<br>Sumbar   | Bogor<br>Rembang, Solo, dan<br>Grobogan<br>Lembata dan Sikka<br>Domau<br>Kota Padang  |   | - Jumlah tim siaga cilik yang terbentuk   | X                            | X       | X                     | PHLN   | Plan Indonesia                                   |
|     | Terbentuknya kelompok trainer sosialisasi evakuasi tsunami |   |   |   | 1) 50 orang mahasiswa menjadi trainer<br>, 2) Tersedia bahan ajar untuk sosialisasi evakuasi tsunami Padang                         |                              | 2,000   |                       | APBN, APBD                                       | Pusat Studi Bencana Universitas Andalas          |
|     | Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB                           | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim  |   |   | Peraturan dan SOP yang dipatuhi   |                              |         |                       |  | BINA SWADAYA                                     |
|     | Board Members, Staff, Volunteers                           | PMI NHQ   |   |   | Institutional mandates & responsibilities for DRR are clearly defined   | 118.4                        | 3.9     | 14.82                 | Swasta/<br>Masyarakat                            | PMI National Headquarter                         |
|     | PMI  | PMI NHQ   |   |   | Number of presentations/ contributions PMI makes at various regional and international forum of Red Cross and Red Crescent Movement | 200                          | 200     | 200                   | Swasta/<br>Masyarakat                            | PMI National Headquarter                         |
|     | CBAT (Community Based Action Team), Community              | DKI Jakarta   | Jakarta Barat, Jakarta Timur  |   | Number of cooperative established and managed properly at community levels  | 1,498.23                     |         |                       | PHLN   | PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU |
|     | Board Members, Staff, Volunteers, Community                | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta,<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | List of Board Members, Staff and Volunteers participated on exchange and internship program | 77.58   |                              |         | Swasta/<br>Masyarakat | PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU |  |

| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi                       |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan        | Pelaksana/ Koordinator   |
|---|---|---|------------------------------|----------|--|------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|
|   |   |   | Propinsi                     | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                         |  |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)                          |          | (5)  | (6)                          |         |         | (7)                     | (8)  |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b> |   |   |                              |          |  |                              |         |         |                         |  |
| 4   | penguatan ketahanan sosial masyarakat   | Tervujudnya komitmen semua unsur/stakeholders dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat disemua tingkat | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah komitmen dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat  | 33.697                       | 35.914  | 39.792  | 20.000 APBN, APBD, PHLN | BNPB   |
|   | Berkembangnya sumber air alternatif skala kecil untuk pertanian                       | 18 Propinsi   |                              |          | Tersedianya 7.208 unit pompa air   | 91.600                       | 96.080  | 100.640 | APBN                    | Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA |
|   | Peningkatan ekonomi masyarakat pada daerah pasca bencana                              | Sulbar  | Sulbar                       | Solo     | Terbentuknya lahan usaha yang produktif guna menunjang pemulihan ekonomi masyarakat                    | 300                          | 500     | 500     | APBN                    | KPDT   |
|   | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan Kerawanan Sosial       | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan   | Sulbar                       | Solo     | Terjalannya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial | 600                          | 750     | 750     | APBN                    | KEMENKOKESRA   |
|   | Meningkatkan kemampuan personil   | Mabes Polri   | Mabes Polri                  |          | Meningkatkan kemampuan personil dalam rangka Penanggulangan Bencana                                    | 298                          |         |         | APBN                    | POLRI, DIT SAMAPTA POLRI                                       |
|   | Melaksanakan gladi posko penanganan bencana   | 4 Kowil   | 4 Kowil                      |          | Terlatihnya mekanisme hubungan komando dan staf PRCPB dalam penanganan bencana                         | 60                           | 72      | 86      | APBN                    | Ster TNI   |
|   | Melaksanakan gladi lapangan penanganan bencana secara terpadu dengan instansi terkait | 4 Kowil   | 4 Kowil                      |          | Terlatihnya prajurit PRCPB bersama instansi terkait dalam penanganan bencana secara terpadu            | 95                           | 114     | 137     | APBN                    | Ster TNI   |
|   |   | 4 Kowil   | 4 Kowil                      |          | Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam membantu proses penanganan bencana                             | 60                           | 72      | 86      | APBN                    | Ster TNI   |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi  |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan      | Pelaksana/ Koordinator                            |
|-----|----------|---|---|--|--|------------------------------|---------|---------|-----------------------|---|
|     |          |   | Propinsi  | Kab/Kota   |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                       |   |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)   |  | (5)  | (6)                          | (7)     | (8)     |                       |   |
|     |          | Meningkatnya kemampuan masyarakat di 36 desa di 13 kabupaten/kota di 6 provinsi dalam mengurangi risiko bencana yang dihadapi   | Sulawesi Tengah<br>DIY<br>Bengkulu<br>Sumbar<br>NTT | tahun 2010<br>Kota Palu<br>Cilacap<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul<br>Mukomuko, Kota<br>Bengkulu<br>Kab Solok<br>tahun 2011<br>Sikka, Alor | 1) Jumlah pilot project PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) yang dilaksanakan; 2) Jumlah rencana aksi komunitas yang tersusun dan terlaksana; 3) Jumlah masyarakat yang terlibat | 5,250                        | 2,225   |         | PHLN                  | BNPB  |
|     |          | Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Masyarakat  | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT                          |  | Ada mekanisme gotong royong dan dana bencana dari pemerintah dan masyarakat  |                              |         |         |                       | BINA SWADAYA                                      |
|     |          | Remaja masjid, mahasiswa, pelajar & masyarakat umum, organisasi kepemudaan  | KalTim  | 300 kota/kabupaten rawan bencana   | Terlathinya 15.000 relawan siap pakai dan terbentuknya komunitas masyarakat relawan di 300 kota/kab se Indonesia yg rawan bencana, @ 50 orang  | 1.820                        | 1.820   | 1.820   |                       | ACT   |
|     |          | Remaja masjid, mahasiswa, pelajar & masyarakat umum, organisasi kepemudaan hasil seleksi dan pelatihan relawan & Pembentukan Komunitas masyarakat relawan seluruh Indonesia |   | 300 kota/kabupaten rawan bencana   | Terkelolanya dan terberdayakannya 15.000 relawan dan 300 komunitas masyarakat relawan seluruh Indonesia dalam aktifitas kemanusiaan, penanggulangan bencana  | 52.500                       | 52.500  | 52.500  |                       | ACT   |
|     |          | Pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi  | Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>jawa Timur<br>NTT   |  | Terjadis serangkaian pelatihan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah   | 100                          | 100     | 100     | Swasta/<br>Masyarakat | PSMB UPN Veteran                                  |
|     |          | komunitas masyarakat  | Jawa Timur  | Blitar, kota Kediri dan Kab. Kediri  | terbentuknya Peringatan dini berdasarkan kearifan lokal  |                              |         |         | Swasta/<br>Masyarakat | Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala |

| No   | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi  |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |                          | Sumber Pendanaan  | Pelaksana/ Koordinator |
|--|---|---|---|--|--|-------------------------------|--------------------------|---|------------------------|
|  |   |   | Propinsi  | Kab/Kota   |  | Th 2010                       | Th 2011                  |   |                        |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)   |  | (5)  | (6)                           | (7)                      | (8)   |                        |
|  | Community, LGU (Local Government Unit)                          | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang<br>Klaten, Magelang,<br>Boyolali, Temanggung,<br>Karanganyar,<br>Purworejo<br>Kota Yogyakarta;<br>Bantul, Kulon Progo,<br>Gunung Kidul, Sleman<br>Alor, Sikka<br>Lombok Timur, Kep.<br>Sumbawa Barat<br>Muko-Muko, Kota<br>Bengkulu, Bengkulu<br>Utara, Rejang Lebong<br>Sangihe, Minahasa<br>Selatan<br>Majene<br>Konawe Selatan, Bau-<br>Bau<br>Kutai Kartanegara | EWS based on community knowledge of relevant hazards and risks, of warning signals and their meanings, and of actions to be taken when warnings are issued | 33   | 33                            | 33 Swasta/<br>Masyarakat | PMI National<br>Headquarter, PMI<br>Chapter, PMI Branch |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUATA Rp)</b> |   |   |   |  |  | <b>172,716</b>                | <b>178,266</b>           | <b>184,653</b>  |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM F (JUATA Rp)</b>  |   |   |   |  |  | <b>269,111</b>                | <b>277,566</b>           | <b>302,178</b>  |                        |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAAN</b>            |   |   |   |  |  |                               |                          |   |                        |
| 1  | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana | Tersedianya kemampuan penanggulangan ke darurat dari seluruh instansi terkait dalam tugas tanggap darurat   | Indonesia   |  | Laporan hasil pelatihan uji coba ke darurat nuklir                           | 665                           | 732                      | 805 APBN  | BAPETEN                |
|  |   | Tersedianya dokumen pedoman tanggap darurat sebagai acuan tugas di lapangan dalam penanggulangan ke darurat nuklir/radiologi di Indonesia   |   |  | Pedoman Kesiapsiagaan dan penanggulangan ke darurat nuklir                   |                               |                          |   |                        |
|  |   | Terselenggaranya tanggapan BAPETEN atas ke darurat nuklir dan radiologi, serta tersedianya sistem kesiapsiagaan nuklir dan radiologi  |   |  | Laporan Hasil pengawasan pengawasan dan tanggap darurat nuklir dan radiologi |                               |                          |   |                        |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)  |   |   | Sumber Pendanaan | Pelaksana/ Koordinator |
|-----|----------|---|----------|----------|--|---|---|---|------------------|------------------------|
|     |          |   | Propinsi | Kab/Kota |  | Th 2010   | Th 2011   | Th 2012   |                  |                        |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)      |          | (5)  | (6)   | (7)   | (8)   |                  |                        |
|     |          | <p>Satuan Tanggap darurat BAPETEN yang mampu melaksanakan tugas tanggap darurat secara efektif dan efisien</p> <p>Meningkatnya koordinasi nasional di antara instansi terkait dalam penanganan Kesiapsiagaan Nuklir, Illicit Trafficking, dan Proteksi Radiasi</p> <p>Tersedianya dokumen komitmen daerah dalam mekanisme dan kesiapan PRB</p> <p>Penerbitan dokumen panduan, jurnal dan buku tentang teknologi pengurangan risiko bencana</p> <p>Tersedianya acuan analisis dan mitigasi DFI</p> <p>Sekolah Model Siaga Bencana, komunitas sekolah dan pelaku terkait</p> <p>Instansi kesehatan di masing-masing prov&amp;kab/kota.</p> <p>perencanaan dan kesiapsiagaan penda dalam berkoordinasi dengan para pihak terkait di wilayahnya; 2) meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam mobilisasi/koordinasi sumberdaya yang ada dari para pemangku kepentingan</p> <p>Terbentuknya Pusdalops (EOC) di tingkat nasional dan 2 provinsi yang memiliki kapasitas sebagai pusat koordinasi penanganan dan terlempang informasi yang terlengkap dengan sarana audio komunikasi yang memadai</p> |          |          | <p>Laporan pengembangan kapasitas tanggap darurat</p> <p>Laporan koordinasi nasional dan internasional dalam bidang kedaruratan nuklir, Illicit Trafficking dan proteksi radiasi</p> <p>Jumlah dokumen komitmen daerah dalam kesiapan PRB</p> <p>- Tersedianya panduan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana</p> <p>Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)</p> <p>Kajian, Pengembangan dan Penguatan kapasitas Sekolah Model untuk menjadi sekolah Contoh Siaga Bencana</p> <p>Terbentuknya pola penanganan bencana yang sistematis sesuai dengan jenis bencana</p> <p>Adanya mekanisme koordinasi yang jelas sebagai acuan dalam mobilisasi/koordinasi sumberdaya yang ada dari para pemangku kepentingan;</p> <p>1. Terbentuknya Pusdalops (EOC) yang operasional dan berfungsi sesuai perannya; 2.) Adanya sarana audio komunikasi yang memadai dan terkoordinasi dengan baik dengan BNPB di tingkat pusat</p> | <p>20,000</p> <p>24,000</p> <p>28,000</p> <p>2,000</p> <p>1,300</p> <p>1,300</p> <p>2,000</p> | <p>28,000</p> <p>24,000</p> <p>28,000</p> <p>2,000</p> <p>1,300</p> <p>1,300</p> <p>2,000</p> | <p>BNPB</p> <p>APBN, APBD, PHLN</p> <p>BNPB</p> <p>PTLWB BPPT</p> <p>Kementerian Pertanian</p> <p>LIP, Kem. Diknas, BNPB</p> <p>APBN</p> <p>PPK Kementerian Kesehatan</p> <p>BNPB bekerjasama dengan BPBD dan berbagai instansi terkait, NGO)</p> <p>BNPB (bekerjasama dengan BPBD)</p> |                  |                        |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)  |              | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6)              |         |                                   | Sumber Pendanaan<br>(7)                            | Pelaksana/ Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|--|--|--------------|--|--|---------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
|           |                 |  | Propinsi   | Kab/Kota     |  | Th 2010  | Th 2011 | Th 2012                           |  |                               |
|           |                 | 1) Terlaksananya pemetaan Data Base infrastruktur (sumber daya / kapasitas) terkait PB antar sektor di 5 Provinsi dan 1 Kota; 2) Terbangunnya sistem informasi yang terpadu antara pusat dan daerah sehingga koordinasi dan mobilisasi PB menjadi lebih efektif dan efisien. | DIY<br>Jawa Tengah<br>Bengkulu<br>Sumbar<br>NTT<br>Sulteng | Kota Palu    | 1) Tersumunya Peta Data Base infrastruktur PB (sumber daya / kapasitas) di daerah ybs; 2) Adanya koneksi antara jaringan sistem informasi pusat dengan daerah. | 404  | 444     | PHLN                              | KEMDAGRI,<br>(bekerjasama dengan Pemda dan BN(PB)) |                               |
|           |                 |  | Sumatra Barat  |              |  |  |         | PHLN, USAID<br>(Total: \$494.804) | Mercy Corps  |                               |
|           |                 | LSM lokal dan internasional  | Tergantung kejadian bencana.                               |              | Terpenuhiya kebutuhan dasar korban bencana untuk menyelamatkan kehidupan mereka.   |  |         | PHLN                              | OCHA   |                               |
|           |                 | Kelompok Masyarakat  | Banten<br>Sumatra Barat                                    |              | Peta risiko Bencana dan rencana kesiapan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dihasilkan   | Menunggu persetujuan dari kantor pusat dan donor | Belum   | PHLN                              | Islamic Relief                                     |                               |
|           |                 |  |  |              | Kapasitas Disaster Management Tim di tingkat desa cukup handal dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon terhadap kemungkinan datangnya bencana      |  |         |                                   |  |                               |
|           |                 |  |  |              | Mas, arakat di zona risiko bencana tinggi menyadari akan risiko bencana, mampu melakukan kesiagaan dan mampu melakukan respon terhadap risiko bencana          |  |         |                                   |  |                               |
|           |                 |  |  |              | Tingkat kerawanan masyarakat terhadap risiko bencana dapat diturunkan secara significant   |  |         |                                   |  |                               |
|           |                 | 18 desa (180 pemuda/i)   | NAD  | Aceh Selatan | 180 pemuda/i mengikuti vocational training dan mendiklatujutnya dengan membuat rencana kegiatan untuk meningkatkan pendapatan                                  |  |         | PHLN,<br>SWASTA/AMAS<br>YARAKAT   | JRS  |                               |

| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi                       |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |          |                       | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator   |
|---|---|---|------------------------------|----------|---|------------------------------|----------|-----------------------|--|--|
|   |   |   | Propinsi                     | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011  | Th 2012               |  |  |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)                          |          | (5)   | (6)                          | (7)      | (8)                   |  |  |
|   | Support to comprehensive risk financing strategy linked to DRR actions        |   |                              |          | Technical Assistance for the development and implementation of comprehensive risk financing framework for Indonesia | 5,050.67                     | 5,050.67 | PHLN                  | Ministry of Finance, National Development Planning Agency (BAPPENAS), World Bank |  |
|   | Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya                         | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim  |                              |          | Dokumen mekanisme dan SOP- PRB dihasilkan oleh stakeholder PRB di tingkat desa                                      |                              |          |                       | BINA SWADAYA   |  |
|   | Siswa SD, SLTP, SMU & SMK   | Bengkulu  |                              |          | Terlathinya 55.602 (25%) siswa se propinsi Bengkulu   | 2,030                        | 2,030    | ACT                   |  |  |
|   | Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi .                               | Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>Jawa Timur<br>NTT                                   |                              |          | Masyarakat di kawasan rawan erusi mempunyai mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana                           | 100                          | 100      | Swasta/<br>Masyarakat | PSMB UPN Veteran   |  |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUTA Rp)</b> |   |   |                              |          |   |                              |          |                       |  |  |
| 2   | penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana            | Terselenggaranya penyusunan dan uji coba rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah dokumen uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana  | 31,142                       | 34,102   | 37,286                | BNPB   |  |
|   | Pelatihan teknis dan operasional tentang teknologi pengurangan risiko bencana |   |                              |          | - Terbitnya jurnal berkala yang terakreditasi   | 30,000                       | 36,000   | 42,000                | APBN, APBD, PHLN   |  |
|   | Personil yang mengawasi posko 24 jam  |   | Mabes Poiri dan BNPB         |          | memiliki SOP Ren Kontinjensi di Bid. Kebencanaan  |                              |          | APBN                  | POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB  |  |
|   | Personil melakukan uji masyarakat di masing-masing kab/kota.                  |   |                              |          | memiliki SOP Ren Kontinjensi di Bid. Kebencanaan  |                              |          |                       | Kesehatan  |  |
|   |   |   | Nationwide                   |          |   |                              |          | PHLN                  | Ambulans 118 and Asian Disaster Preparedness Center                              |  |
|   | Community/government/schools/ media/private sectors                           |   | Sumatera Barat               |          | Simulation plan/SOPs for urban and rural areas developed  | 45                           | 45       | 45                    | PHLN   | ECB Indonesia (Care-CRS Oxfam-World Vision-Save the Children-Mercy Corps-MPBI-IMC) |
|   | Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya                         | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim  |                              |          | Simulasi terjadwal oleh Tim PRB tingkat Desa dan Kabupaten  |                              |          |                       | BINA SWADAYA   |  |

| No   | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi                       |                             | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan        | Pelaksana/ Koordinator    |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|
|  |  |  | Propinsi                     | Kab/Kota                    |  | Th 2010                       | Th 2011 | Th 2012 |                         |                           |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                          |                             | (5)  | (6)                           |         |         | (7)                     | (8)                       |
|  |  | Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi .                                    | Jawa Tengah                  |                             | Masyarakat di kawasan rawan bencana erupsi gunungapi melakukan kegiatan penguatan penanganan darurat | 100                           | 100     | 100     | Swasta/ Masyarakat      | PSMB UPN Veteran          |
|  |  | Board Members, Staff, Volunteers   | NTT                          |                             | DR Contingency Plan, SOP and DR Operational Guidelimes updated based on review and lesson learnt     | 100                           |         |         | Swasta/ Masyarakat      | PMI National Headquarter  |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUATA Rp)</b> |  |  |                              |                             |  |                               |         |         |                         |                           |
| 3  | pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini | Terselenggaranya pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini | Seluruh daerah rawan bencana |                             | Jumlah laporan dan dokumen penyelenggaraan pemasangan dan pengujian geladi tanggap darurat           | 26,000                        | 31,200  | 42,145  | 36,400 APBN, ARPD, PHLN | BNPB                      |
|  |  | Instansi kesehatan dan masyarakat di masing-masing kab/kota.                       |                              |                             | - Terbitnya buku-buku mengenai teknologi penanggulangan bencana                                      |                               |         |         |                         | PTLWB BPPT                |
|  |  | Forum Anak Desa dan Murid Sekolah Dasar  | Jakarta                      |                             | Meningkatnya kemampuan petugas dan masyarakat dalam merespons bencana yang terjadi                   |                               |         |         | APBN                    | PPK Kementerian Kesehatan |
|  |  | Permerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya                             | Jawa Barat                   | Bogor                       | Jumlah Peta dan Analisis Risiko Bencana yang dibuat oleh Anak-anak                                   | X                             | X       | X       | X PHLN                  | Plan Indonesia            |
|  |  | Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi, banjir dan lon_sor.                 | Jateng                       | Rembang, Solo, dan Grobogan | Jumlah video partisipatif yang dibuat oleh anak  |                               |         |         |                         | BINA SWADAYA              |
|  |  |  | NTT                          | Lembata dan Sikka           | Ada kesepakatan dan mekanisme pelaksanaan peringatan dini dari tingkat kabupaten hingga masyarakat   |                               |         |         |                         |                           |
|  |  |  | NTT                          | Dompu                       |  | 400                           | 400     | 400     | Swasta/ Masyarakat      | PSMB UPN Veteran          |



| No  | Kegiatan  | Sasaran                                    | Lokasi  |  | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |                       | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator |
|---|---|--|---|--|---|------------------------------|---------------|-----------------------|--|------------------------|
|   |   |  | Propinsi  | Kab/Kota   |   | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012               |  |                        |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)   |  | (5)   | (6)                          | (7)           | (8)                   |  |                        |
|   |   | PMI, Community                             | NAD<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>DI Yogyakarta<br>NTT<br>NTB<br>Bengkulu<br>Sulawesi Utara<br>Sulawesi Barat<br>Sulawesi Tenggara<br>Riau<br>Kalimantan Timur | Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara | Community-based EWS established at local level  | 100                          | 200           | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch, Community |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b> |   |  |   |  |   | <b>26.500</b>                | <b>31.800</b> | <b>36.800</b>         |  |                        |
| 4   | penyediaan dan persiapan barang pemenuhan kebutuhan dasar | Tersedianya barang pasokan kebutuhan dasar | Seluruh daerah rawan bencana  |  | Jumlah laporan dan dokumen tersedianya barang pasokan   | 120.000                      | 144.000       | 168.000               | APBN, APBD, PHLN   | BNPB                   |
|   | penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar                      | 33 pro dan kab/kota rawan bencana          | 33 pro dan kab/kota rawan bencana   |  | Terselenggaranya kegiatan darurat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan sarana pendukungnya sehingga bantuan tersebut dapat menjangkau korban bencana berupa; Bantuan darurat, bantuan evakuasi kit serta kendaraan siaga bencana merupakan komponen kesiapsiagaan yang telah disiapkan di gudang provinsi melalui Dinas Sosial/Kesos/Inststitusi Sosial terkait. Khusus untuk bantuan beras dan mie instan mekanisme penyerahan bantuan melalui sistem D.O (Delivery Order) | 126,395,99                   | 151,675,19    | 182,010,23            | APBN   | Kem. Sosial            |



| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi                       |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                       | Sumber Pendanaan                       | Pelaksana/ Koordinator |
|---|---|--|------------------------------|----------|---|------------------------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|
|   |   |  | Propinsi                     | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012               |  |                        |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)                          |          | (5)   | (6)                          | (7)            | (8)                   |  |                        |
|   | Meningkatnya pemahaman dan menguatkannya kesiapsiagaan komunitas terhadap ancaman bencana di lokasi pilot project | Bengkulu<br>DIY<br>Sumatera Barat<br>NTT<br>Sulawesi               | Kota Palu                    |          | 1) Jumlah kelompok komunitas yang mampu mengidentifikasi dan menyusun peta rawan bencana di lingkungannya<br>2) Jumlah TOOL KIT (alat komunikasi) mengenai informasi PRB yang tersebar di tingkat komunitas<br>3) Jumlah Rencana Aksi yang tersusun di kelompok komunitas (kelompok agama, profesi dan lainnya) | 1,500                        | 1,500          | PHLN                  | BNPB berkerjasama dengan Pihak ke-tiga |                        |
|   | All stakeholders in Disaster Management   | Nasional   |                              |          |   |                              |                |                       | UNICEF/BNPB/MPBI                       |                        |
|   | Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya   | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim                               |                              |          | Ada SOP, data kebutuhan, tim pelaksana, lokasi kumpul   |                              |                |                       | BINA SWADAYA                           |                        |
|   | Muspika Dan Perangkat Desa  | Propinsi Bengkulu & Jogjakarta                                     |                              |          | Terlathnya 2.822 orang muspika & perangkat Desa se propinsi Bengkulu & Jogjakarta   | 3,200                        | 3,200          |                       | ACT                                    |                        |
|   | PMI Staff   | Jambi<br>DI Yogyakarta<br>Bali                                     |                              |          | EOC established at all levels and performed as PMI's standard   | 396.43                       |                | Swasta/<br>Masyarakat | PMI National Headquarter               |                        |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 5 (JUTA Rp)</b> |   |  |                              |          |   | <b>246,596</b>               | <b>294,200</b> | <b>339,200</b>        |  |                        |
| 6   | penyiapan lokasi evakuasi   | Tersedianya rencana tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah laporan Provinsi dan Kab/Kota yang menyediakan tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana  | 60,000                       | 72,000         | 84,000<br>PHLN        | BNPB                                   |                        |

| No<br>(1)                                    | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)  |   | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)<br>(6) |           |           | Sumber Pendanaan<br>(7)                                   | Pelaksana/ Koordinator<br>(8)  |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------|-----------|---|--|
|  |  |  | Propinsi   | Kab/Kota  |   | Th 2010                              | Th 2011   | Th 2012   |   |  |
|  |  | Mampu didarati pesawat sekelas F70 / Hercules C130   | Sumut<br>NTT<br>NAD<br>Bengkulu<br>Maluku<br>Papua<br>Sulteng<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Utara            | Lasondre - Nias Selatan (Pulau-pulau Batu)<br>Komodo - Labuhan Bajo<br>Tardamu - Sabu<br>Nias Selatan Baru<br>Kuala Batee - NAD<br>Teuku Cut Ali - NAD<br>Hamzah Fanzuri - Singkil<br>Muko-muko - Bengkulu<br>Gewayantana - Larantuka<br>Namrole - Buru<br>Enalamo - Sula<br>Dobo - Kepulauan Aru<br>Tual Baru - Malra S.<br>Condrongoro - Serui<br>Tojo Una-una - Ampana<br>Wai Oti - Maumere<br>Wonopito - Lembata Baru<br>Bula - Seram Bagian Timur<br>Namiaea - Buru<br>Faliabahaya Mangole - Taliabu<br>Numfor - Biak Numfor | Kemampuan bandara untuk didarati pesawat sekelas F-70 / Hercules C-130 dalam rangka evakuasi dan penanganan bencana   | 615,500                              | 1,366,171 | 1,366,171 | APBN, APBD  | Kem. Perhubungan   |
|  |  | Pemerintah Desa, Forum PRB, Stakeholder lainnya  | Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim   |   | Ada jalur evakuasi, titik kumpul yang aman  |                                      |           |           |   | BINA SWADAYA   |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 6 (JUATA Rp)</b> |  |  |  |   |   |                                      |           |           |   |  |
| 7  | penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana | Tersedianya data, informasi protap tanggap darurat bencana<br>Instansi kesehatan di masing-masing kab/kota.<br>Affected population<br>Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya<br>Pemerintah Daerah/Pemda | Seluruh daerah rawan bencana<br>Setiap prov & kab/kota<br>National<br>Jakarta<br>Bengkulu<br>NTT<br>KalTim |   | Jumlah informasi Provinsi dan kab/kota tentang protap tanggap darurat bencana<br>Adanya peningkatan kualitas respon tanggap darurat dalam upaya penanggulangan bencana<br>Ada data, up date data, SOP dan tim pelaksana tanggap darurat bencana<br>Draft policy paper tentang formulasi dan revisi strategi tanggap darurat bencana | 675,500                              | 1,438,171 | 1,450,171 | 200,000<br>240,000<br>280,000<br>APBN, APBD, PHLN<br>APBN | BNPB<br>PPK Kementerian Kesehatan<br>UNICEF/BNPB<br>BINA SWADAYA<br>APBN, APBD |

| No  | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi                       |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |            |            | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/ Koordinator |                  |                          |
|---|--|---|------------------------------|----------|--|------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
|   |  |   | Propinsi                     | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011    | Th 2012    |                    |                        |                  |                          |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)                          |          | (5)  | (6)                          | (7)        | (8)        |                    |                        |                  |                          |
|   |  | Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi, banjir dan longsor.                | Jawa Tengah                  |          |  | 100                          | 100        | 100        | Swasta/ Masyarakat | PSMB UPN Veteran       |                  |                          |
|   |  |   | DI Yogyakarta                |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  |   | Jawa Timur                   |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  |   | NTT                          |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 7 (JUTA Rp)</b> |  |   |                              |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
| 8   | penyediaan dan penyajian bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana | Tersedianya logistik dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah laporan Provinsi dan Kab/Kota yang menyediakan logistik dan peralatan | 200,100                      | 240,100    | 280,100    | 400,000            | 560,000                | APBN, APBD, PHLN | BNPB                     |
|   |  |   | NTT                          | Belu     |  | 3,950                        |            |            | PHLN               |                        | PHLN             | UNICEF                   |
|   |  | Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya                             | Jakarta                      |          | Ada tim pelaksana, tempat penyimpanan dan rencana pemulihan                  |                              |            |            |                    |                        |                  | BINA SWADAYA             |
|   |  |   | Bengkulu                     |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  |   | NTT                          |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  |   | KalTim                       |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  | CBAT (Community Based Action Team), Satgas (Disaster Response Team)               | PMI NHQ Office, 33 Provinces |          | Suitable equipment for mobilization of CBAT and Satgas in place              | 1,563.62                     | 814.23     | 900        | Swasta/ Masyarakat |                        |                  | PMI National Headquarter |
| <b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 8 (JUTA Rp)</b> |  |   |                              |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  |   |                              |          |  | 405,514                      | 480,814    | 560,900    |                    |                        |                  |                          |
| <b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM G (JUTA Rp)</b>  |  |   |                              |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  |   |                              |          |  | 1,865,795                    | 2,854,810  | 3,097,112  |                    |                        |                  |                          |
| <b>TOTAL PENDANAAN (JUTA Rp)</b>            |  |   |                              |          |  |                              |            |            |                    |                        |                  |                          |
|   |  |   |                              |          |  | 16,618,149                   | 11,962,113 | 12,821,514 |                    |                        |                  |                          |

LAMPIRAN 3. MATRIK KEGIATAN KEMENTERIAN DAN  
LEMBAGA (K/L) DALAM RENCANA AKSI  
NASIONAL PENGURANGAN RISIKO  
BENCANA (RAN-PRB) TAHUN 2010-2012



**LAMPIRAN 3**  
**MATRIK RAN-PRB 2010-2012 DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA**

| No<br>(1)  | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)   |   | Lokasi<br>Kab/Kota<br>(4) | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|--|--|--|---|---------------------------|---|------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------|
|  |  |  |   |                           |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                            |                                  |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BAKOSURTANAL</b>  |  |  |   |                           |   |                              |         |         |                            |                                  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |  |  |   |                           |   |                              |         |         |                            |                                  |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |  |   |                           |   |                              |         |         |                            |                                  |
| 1  | pengenalan dan pemantauan risiko bencana   | Kajian dinamika pantai, untuk mitigasi dan adaptasi bencana alam | Banten<br>DKI<br>Jabar<br>Jateng<br>Jatim   |                           | Tersedianya informasi spasial untuk mitigasi dan adaptasi thd bencana alam (global warming) di Pantura Jawa | 532                          | 600     | 700     | APBN                       | Bakosurtanal                     |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |  |  |   |                           |   |                              |         |         |                            |                                  |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |  |   |                           |   |                              |         |         |                            |                                  |
| 3  | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana | Menyusun dan mengembangkan basis data rawan bencana              | Jawa tengah,<br>jawa timur<br>(2010), Sebagian Sumatera,<br>sebagian Sulawesi (2011),<br>Sebagian Sumatera,<br>sebagian Kalimantan (2012) |                           | Tersusunnya Basisdata Multirawan Bencana alam   | 1,300                        | 1,500   | 1,900   | APBN                       | Bakosurtanal *,<br>Kem. PU, BMKG |
| 6  | pengelolaan lingkungan hidup   | Neraca SDA   | Jawa tengah<br>jawa timur<br>(2011)<br>Sebagian Sumatera<br>sebagian Sulawesi<br>sebagian Kalimantan<br>(2012)                            |                           | Tersedianya neraca sumber daya alam terintegrasi  | -                            | 1,200   | 1,700   | APBN                       | Bakosurtanal                     |



| No   | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |              |              | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|--|--|--|---|----------|--|------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|
|  |  |  | Propinsi  | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011      | Th 2012      |                  |                         |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   |          | (5)  | (6)                          |              |              | (7)              | (8)                     |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>     |  |  |   |          |  |                              |              |              |                  |                         |
| <b>PROGRAM E.: PERINGATAN DINI</b>   |  |  |   |          |  |                              |              |              |                  |                         |
| 1  | pengamatan gejala bencana Terpadu                        | Kajian risiko Multi Bencana  | DIY   |          | Tersedia dan tersosialisasinya model sistem informasi kebencanaan              | 800                          | 800          | 800          | APBN             | Bakosurtanal            |
| 4  | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana      | Penyediaan informasi spasial indeks kebencanaan/peta multirawan bencana                    | Jawa Timur, Jawa Tengah Sebagian Sumatera sebagian Sulawesi sebagian Kalimantan |          | Tersedia dan tersosialisasinya informasi spasial atas dasar indeks kebencanaan | 1,200                        | 1,320        | 1,452        | APBN             | Bakosurtanal            |
|  |  | Pembuatan Atlas kebencanaan  | Indonesia   |          |  | 238                          | 262          | 288          | APBN             | Bakosurtanal            |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BAKOSURTANAL</b>   |  |  |   |          |  | <b>4,070</b>                 | <b>5,682</b> | <b>6,840</b> |                  |                         |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BAPETEN</b>   |  |  |   |          |  |                              |              |              |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>     |  |  |   |          |  |                              |              |              |                  |                         |
| <b>PROGRAM B.: PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |  |   |          |  |                              |              |              |                  |                         |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan | Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN                | Jakarta   |          | Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN                | 300                          | 330          | 363          | APBN             | BAPETEN                 |
|  |  | Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN |   |          | Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN |                              |              |              |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |  |   |          |  |                              |              |              |                  |                         |
| <b>PROGRAM C.: PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |  |   |          |  |                              |              |              |                  |                         |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan    | Terselenggaranya Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan        | Indonesia   |          | Laporan Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan     | 300                          | 330          | 363          | APBN             | BAPETEN                 |

| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)                                    | Sasaran<br>(3)  |  | Lokasi<br>(4) |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|---|--|---|--|---------------|----------|---|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------|
|   |  |   |  | Propinsi      | Kab/kota |   | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |                                  |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |  |   |  |               |          |   |                                     |         |         |                            |                                  |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |  |   |  |               |          |   |                                     |         |         |                            |                                  |
| 2   | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana | Tersusunnya Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri         |  | Jakarta       |          | Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri                     | 500                                 | 550     | 605     | APBN                       | BAPETEN                          |
|   |  | Tersusunnya Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan                                  |  |               |          | Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan  |                                     |         |         |                            |                                  |
|   |  | Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM |  |               |          | Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM |                                     |         |         |                            |                                  |
|   |  | Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit  |  |               |          | Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit  |                                     |         |         |                            |                                  |
|   |  | Terciptanya Budaya Keselamatan di INNRR   |  | Jakarta       |          | Budaya Keselamatan di INNRR   | 342                                 | 376     | 413     | APBN                       | BAPETEN                          |
|   |  | Tersedianya Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNRR   |  |               |          | Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNRR   |                                     |         |         |                            |                                  |
|   |  | Tersedianya Laporan hasil kajian Teknis evaluasi pengawasan INNRR   |  |               |          | Laporan Hasil Kajian Teknis evaluasi pengawasan INNRR   |                                     |         |         |                            |                                  |

| No   | Kegiatan  | Sasaran  |           | Lokasi |   | Indikator Kinerja |              | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|--|---|--|-----------|--------|---|-------------------|--------------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
|  |   | (1)  | (2)       | (3)    | (4)   | (5)               | (6)          | (7)                          | (8)     |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b><br><b>PROGRAM G. : KESIAPSIAGAAN</b> |   |  |           |        |   |                   |              |                              |         |                  |                         |
| 1  | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan gan risiko bencana | Tersedianya kemampuan penanggulangan kedaruratan dari seluruh instansi terkait dalam tugas tanggap darurat                                   | Indonesia |        | Laporan hasil pelatihan uji coba kedaruratan nuklir   | 665               | 732          | 805 APBN                     | BAPETEN |                  |                         |
|  |   | Tersedianya dokumen pedoman tanggap darurat sebagai acuan petugas di lapangan dalam penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi di Indonesia |           |        | Pedoman kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir   |                   |              |                              |         |                  |                         |
|  |   | Terselenggaranya tanggapan BAPETEN atas kedaruratan nuklir dan radiologi, serta tersedianya sistem kesiapsiagaan nuklir dan radiologi        |           |        | Laporan Hasil pengawasan pengawasan dan tanggap darurat nuklir dan radiologi  |                   |              |                              |         |                  |                         |
|  |   | Satuan Tanggap darurat BAPETEN yang mampu melaksanakan tugas tanggap darurat secara efektif dan efisien                                      |           |        | Laporan pengembangan kapasitas tanggap darurat  |                   |              |                              |         |                  |                         |
|  |   | Meningkatnya koordinasi nasional di antara instansi terkait dalam penanganan Kesiapsiagaan Nuklir, Illicit Trafficking, dan Proteksi Radiasi |           |        | Laporan koordinasi nasional dan internasional dalam bidang kedaruratan nuklir, Illicit Trafficking dan proteksi radiasi |                   |              |                              |         |                  |                         |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BAPETEN</b>  |   |  |           |        |   | <b>2,107</b>      | <b>2,318</b> | <b>2,549</b>                 |         |                  |                         |

| No   | Kegiatan  | Sasaran  |                | Lokasi |     | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/Koordinator        |
|--|---|--|----------------|--------|-----|--|------------------------------|---------|---------|------------------|------------------------------|
|  |   | (1)  | (2)            | (3)    | (4) |  | (5)                          | Th 2010 | Th 2011 |                  |                              |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BMKG</b>  |   |  |                |        |     |  |                              |         |         |                  |                              |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>     |   |  |                |        |     |  |                              |         |         |                  |                              |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                       |   |  |                |        |     |  |                              |         |         |                  |                              |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | Membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi  |                |        |     | Meningkatnya harmonisasi antara riset dan operasional                            | 200                          | 200     | 200     | 200 APBN         | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |   |  |                |        |     |  |                              |         |         |                  |                              |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |   |  |                |        |     |  |                              |         |         |                  |                              |
| 2  | penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana       | Pengadaan peralatan seismik untuk studi prekursor gempabumi. Penelitian Velocity Model local 15 lokasi | Sumatera Barat |        |     | Tersedianya fasilitas untuk penelitian prekursor gempabumi dengan metoda seismik | 6,300                        | 6,300   | 6,300   | 6,600 APBN       | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA |
|  |   |  |                |        |     | Meningkatnya Akurasi penentuan lokasi gempabumi                                  | 400                          | 400     | 400     | 400 APBN         | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA |
|  |   |  |                |        |     | Meningkatnya pemahaman tentang hubungan antara sistem sesar dan gempabumi.       | 400                          | 400     | 400     | 400 APBN         | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan             | Membangun kapasitas operasional  |                |        |     | Terjadinya Kesenambungan operasional   | 900                          | 900     | 900     | 900 APBN         | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA |
|  |   | Melaksanakan studi untuk mengetahui prekursor gempabumi menggunakan metoda geofisika secara terpadu    |                |        |     | Tersedianya informasi studi untuk menuju prediksi gempabumi                      | 500                          | 500     | 500     | 550 APBN         | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |   |  |                |        |     |  |                              |         |         |                  |                              |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |   |  |                |        |     |  |                              |         |         |                  |                              |
| 1  | pengendalian dan pemantauan risiko bencana                        | monitoring gempa kuat dan perhitungan magnitudo Mbmng  |                |        |     | Meningkatnya data dan informasi gempa kuat                                       | 190                          | 190     | 190     | 190 APBN         | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)   |   | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8)     |
|-----------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------|
|           |  |  | Propinsi  | Kab/Kota  |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |                                      |
| 3         | identifikasi dan pengenalan secara pasif terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana | Data management Center, Database gempa dan system data sharing<br><br>Memetakan daerah berisiko getaran gempa kuat<br><br>Peningkatan Pelayanan data dan informasi<br><br>Menentukan daerah limpasan tsunami | Jakarta   |   | Terwujudnya pelayanan yang handal data gempa untuk nasional dan internasional<br><br>Tersedianya informasi untuk keperluan bangunan tahan gempa dan keperluan lainnya<br><br>Para pemakai mendapatkan data yang lebih up todate<br><br>Kelengkapan system kesiap-siagaan | 1,000                               | 500     | 500     | APBN                       | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
| 8         | pembangunan sarana dan prasarana   | Pembangunan Sistem Radar Cuaca   | Papua<br>Papua Barat<br>Maluku Utara<br>Kalsel<br>Biau                    | Merauke<br>Manokwari<br>Ternate<br>Banjarmasin<br>Pekanbaru | Data dan Informasi Radar Cuaca di daerah yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan dan angin   | 72,000                              |         |         | APBN                       | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>METEOROLOGI |
|           |  | Pembangunan Ground Satelite Receiver   | Sumut<br>Papua  | Medan<br>Jayapura   | Data dan informasi satelit cuaca yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan, sst dan estimasi hujan   | 5,000                               |         |         | APBN                       | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>METEOROLOGI |
|           |  | Pembangunan Sistem Automatic Weather Station (AWS)   | Daerah Bencana di<br>Sumatra<br>Kalimantan<br>Sulawesi<br>Maluku<br>Papua |   | Data unsur cuaca secara otomatis   | 19,440                              |         |         | APBN                       | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>METEOROLOGI |
|           |  | Pembangunan Sistem Automatic Rain Gauges (ARG)   | Sumatra<br>Kalimantan<br>Sulawesi<br>Maluku<br>Papua                      |   | Data curah hujan secara otomatis   | 990                                 |         |         | APBN                       | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>METEOROLOGI |
|           |  | Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Perubahan Iklim Nasional dan Regional  | Kantor Pusat dan 5 Provinsi lain.   |   | Informasi Perubahan Iklim dari skala Nasional hingga skala Kabupaten   | 16,055                              |         |         | APBN                       | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>KLIMATOLOGI |

| No  | Kegiatan                  | Sasaran   | Lokasi   |                        | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan               | Pelaksana/<br>Koordinator      |
|---|---------------------------|---|--|------------------------|---|------------------------------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                           |   | Propinsi   | Kab/kota               |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                                |                                |
| (1)   | (2)                       | (3)   | (4)  | (4)                    | (5)   | (6)                          | (6)     | (7)     | (8)                            |                                |
|   |                           | Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG   | Kantor Pusat                                     |                        | Terbangunnya satu Pusat Inventory Gas Rumah Kaca (GRK). Tersedianya Informasi Proyeksi Iklim hingga skala kabupaten berdasar berbagai skenario IPCC. Tersedianya Peta - Peta Kerentanan Perubahan Iklim berbasis pulau/wilayah (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua). | 44,900                       | 47,350  | APBN    | BMKG DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI |                                |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |                           |   |  |                        |   |                              |         |         |                                |                                |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |                           |   |  |                        |   |                              |         |         |                                |                                |
| 1   | Pengamatan gejala bencana | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MEWS  | Semua lokasi yang telah terpasang Peralatan MEWS |                        | Sistem beroperasi secara normal   | 13,000                       | 13,000  | 13,000  | APBN                           | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|   |                           | Pembangunan Gedung MEWS   | Sumut Sulsel Bali                                | Medan Makasar Denpasar | Gedung MEWS sebagai pusat pelayanan peringatan dini cuaca di daerah   | 990                          | 990     | 990     | APBN                           | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|   |                           | Persiapan Operasional Numeric Weather Prediction (NWP)  | Jakarta  |                        | Fasilitas PC Cluster untuk operasional dan SDM modifikasi model NWP beroperasi  | 3,000                        | 3,000   | 3,000   | APBN                           | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|   |                           | Sewa Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG  | Jakarta  |                        | Sarana Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG beroperasi normal  | 3,000                        | 3,000   | 3,000   | APBN                           | BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI |
|   |                           | Pengadaan sistem monitoring gempabumi otomatis, 4 remote sta, 1 center, dan sistem komunikasi |  |                        | Meningkatnya pelayanan data gempabumi lokal di 9 lokasi   | 4,000                        | 4,000   | 4,000   | APBN                           | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|   |                           | Pengadaan sarana dan prasarana guna monitoring bencana gempabumi dan tsunami                  | Jakarta  |                        | Tersedianya fasilitas untuk monitoring bencana gempabumi dan tsunami di 10 Regional Center  | 1,500                        | 1,500   | 1,500   | APBN                           | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |
|   |                           | Pengadaan sarana dan prasarana guna mengkalibrasi peralatan                                   | Jakarta  |                        | Tersedianya fasilitas untuk mangkalibrasi peralatan gempabumi di masing-masing Balai Besar  | 1,200                        | 1,200   | 1,200   | APBN                           | BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA   |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2)                                    | Sasaran<br>(3)  |                                 | Lokasi<br>(4)                    |         | Indikator Kinerja<br>(5)   |        |        | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |      | Sumber<br>Pendanaan<br>(7)           | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|---------|--|--------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|
|           |  | Propinsi  | Kab/Kota                        | Th 2010                          | Th 2011 | Th 2012  |        |        |                                     |      |                                      |                                  |
|           |  | Peningkatan Pelayanan datin Geomagnet                         | Banten                          |                                  |         | Meningkatnya pelayanan magnet bumi di Banten   | 4,000  | 2,750  |                                     | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Peningkatan Pelayanan datin magnet bumi                       | Papua Maluku Yogyakarta Sumbang | Jayapura Ambon Yogyakarta Padang |         | Peningkatan pelayanan magnet bumi di 4 lokasi (Jayapura, Ambon, Yogyakarta dan Padang Panjang)                                 | 2,300  | 2,300  | 2,300                               | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Melengkapi peralatan untuk studi prekursor gempa bumi         |                                 |                                  |         | Tersedianya fasilitas untuk Studi prekursor gempa bumi   | 400    | 400    | 400                                 | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Peningkatan Pelayanan informasi petir                         |                                 |                                  |         | Tersedianya informasi kejadian petir di beberapa lokasi di Indonesia   | 150    | 150    | 150                                 | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Mendapatkan lokasi sensor seismik dg kualitas yang baik       |                                 |                                  |         | Meningkatnya kualitas data seismic dari 25 lokasi  | 200    | 200    | 200                                 | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
| 2         | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana |   |                                 |                                  |         | Memapatkan seismograph dengan sensitivitas tinggi dan Mereduksi tingkat noise yang disebabkan oleh lingkungan geologi setempat | 250    | 1,500  | 1,650                               | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Penelitian tentang zonasi gempa bumi dan perkiraan dampaknya  |                                 |                                  |         | Berkurangnya kerugian akibat kejadian gempa bumi   | 400    | 400    | 400                                 | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Pengembangan peralatan seismograph dan accelerometer          |                                 |                                  |         | Berkurangnya ketergantungan peralatan dari LN  | 600    | 600    | 600                                 | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Penelitian tentang penyebab dan dampak gempa bumi dan tsunami |                                 |                                  |         | Meningkatnya pelayanan info gempa bumi dan tsunami   | 300    | 300    | 300                                 | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
|           |  | Mencari lokasi pengganti stasiun geomagnet Tangerang          | Banten                          |                                  |         | Tersedianya informasi guna membangun stasiun pengamatan magnet bumi yang representatif di Banten                               | 250    |        |                                     | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |                                  |
| 4         | penyebarluasan informasi tentang                   | Pembangunan Decision Support Sistem MEWS                      | Sumut Sulse Bali                | Medan Makasar Denpasar           |         | Sistem integrasi Radar Mosaic, model prakiraan, display dan disseminasi sesuai harapan   | 10,000 | 10,000 | 10,000                              | APBN | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>METEOROLOGI |                                  |

| No                                 | Kegiatan                                      | Sasaran  | Lokasi   |                              | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator            |
|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
|                                    |   |  | Propinsi   | Kab/kota                     |  | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012        |                  |                                      |
| (1)                                | (2)   | (3)  | (4)  |                              | (5)  | (6)                          |                |                | (7)              | (8)                                  |
|                                    | peringatan bencana                            | Pembangunan Sistem Komunikasi dan Integrasi  | Sumatra<br>Kalimantan<br>Sulawesi<br>Maluku<br>Papua |                              | Termonitornya seluruh tampilan radar cuaca di kantor pusat                   | 7,500                        | 7,500          | 7,500          | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>METEOROLOGI |
|                                    |   | Pembangunan Teleconference   | Sumut<br>Sulsel<br>Bali                              | Medan<br>Makasar<br>Denpasar | Termonitornya alur informasi cuaca   | 600                          | 600            | 600            | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG<br>METEOROLOGI |
|                                    |   | Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan NDC CTBTO                              | Jakarta  |                              | Tersedianya fasilitas untuk pelayanan informasi CTBTO                        | 500                          | 500            | 500            | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
|                                    |   | Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan AEC                                    | Jakarta  |                              | Meningkatnya pelayanan informasi gempa bumi untuk ASEAN                      | 500                          | 500            | 500            | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
|                                    |   | Pengadaan digital seismograph di 15 stasiun Geofisika                                    |  |                              | Meningkatnya pelayanan informasi gempa lokal                                 | 600                          | 600            | 600            | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
|                                    |   | Peningkatan Kerapatan Jaringan Pengamatan temporer magnet bumi                           |  |                              | Meningkatnya informasi perubahan tahunan magnet bumi di Indonesia            | 500                          | 0              |                | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
|                                    |   | Peningkatan database di Jakarta dan redundant-Bali                                       |  |                              | Meningkatnya kelengkapan InaTEWS untuk keperluan Indonesia dan International | 400                          | 460            | 550            | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
|                                    |   | Informasi dan warning terkirim dan diterima secara cepat                                 |  |                              | Terpenuhi kelengkapan persaratan RTWP  | 40                           | 40             | 40             | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
|                                    |   | Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sistem monitoring prekursor gempa bumi |  |                              | Tersedianya informasi prediksi gempa bumi                                    | 800                          | 800            | 800            | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
| 5                                  | pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana | Meningkatkan Kerapatan Jaringan repeat station   |  |                              | Tersedianya informasi untuk survei gravitasi                                 | 15                           | 15             | 15             | APBN             | BMKG DEPUTI<br>BIDANG GEOFISIKA      |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BMKG</b> |   |  |  |                              |  | <b>181,545</b>               | <b>111,695</b> | <b>111,985</b> |                  |                                      |



| No   | Kegiatan   | Sasaran   |                              | Lokasi |  | Indikator Kinerja   |        |        | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                 | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|--|--|---|------------------------------|--------|--|---|--------|--------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|  |  | (3)   |                              | (4)    |  | (5)   |        |        | Th 2010                      | Th 2011         |                  |                         |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BNPB</b>  |  |   |                              |        |  |   |        |        |                              |                 |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |  |   |                              |        |  |   |        |        |                              |                 |                  |                         |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                   |  |   |                              |        |  |   |        |        |                              |                 |                  |                         |
| 1  | Melakukan koordinasi, pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | Terselenggaranya koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan serta sumber daya di setiap tingkat | Seluruh daerah rawan bencana |        |  | Seluruh pelaku pembangunan ditingkat pusat, propinsi kab/kota, kecamatan ( pengelola program, stakeholder ) melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, pedoman, standard dan juklak/juknis serta sesuai kewenangnya | 30,000 | 36,000 | 42,000                       | APBN, APBD, BLN | BNPB             |                         |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |   |                              |        |  |   |        |        |                              |                 |                  |                         |
| 1  | Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana                          | Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana            | Daerah rawan bencana         |        |  | Jumlah kajian ancaman bencana yang dilaksanakan   | 30,000 | 36,000 | 42,000                       | APBN, APBD, BLN | BNPB             |                         |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana                                  | Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melakukan analisis risiko bencana                                 | Daerah rawan bencana         |        |  | Jumlah dokumen analisis risiko bencana yang dilaksanakan  | 36,000 | 43,200 | 50,400                       | APBN, APBD, BLN | BNPB             |                         |
| 3  | Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana                   | Teridentifikasinya tindakan PRB di seluruh Provinsi dan kab/kota                                | Daerah rawan bencana         |        |  | Jumlah Informasi tindakan PRB kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan  | 40,000 | 48,000 | 56,000                       | APBN, APBD, BLN | BNPB             |                         |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi                       |   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/Koordinator     |
|--|--|---|------------------------------|---|---|------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
|  |  |   | Propinsi                     | Kab/kota  |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                           |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                          | (4)   | (5)   | (6)                          |         |         | (7)              | (8)                       |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan               | Tersusunnya dokumen perencanaan dan peraturan perundangan   | Propinsi dan kab/kota        |   | Seluruh pengambil keputusan dan stakeholder mempunyai komitmen untuk menyusun dokumen perencanaan dan peraturan perundangan                 | 12,000                       | 14,400  | 16,800  | APBN, APBD, BLN  | BNPB                      |
|  |  | Tersusunnya 3 dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis mitigasi bencana | Sumber NTT                   | 2010: Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbang) dan Kabupaten Alor (NTT); 2011: Kabupaten/Pulau kecil lainnya | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  | 800                          | 450     | 0       | UNDP             | BNPB bekerja sama dgn DKP |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |   |                              |   |   |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |   |                              |   |   |                              |         |         |                  |                           |
| 1  | pengembangan budaya sadar bencana                                      | Seluruh masyarakat sadar dan akrab dengan bencana   | Seluruh daerah rawan bencana |   | Jumlah kemitraan yang memberikan komitmen dan dukungan di pusat, provinsi dan kab/kota dalam penyelenggaraan budaya sadar bencana dalam PRB | 56,000                       | 67,200  | 78,400  | APBN, APBD, BLN  | BNPB                      |
| 2  | pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana | Terpantaunya penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana  | Seluruh daerah rawan bencana |   | Jumlah informasi kegiatan pemantauan penggunaan teknologi berpotensi bencana  | 45,000                       | 54,000  | 63,000  | APBN, APBD, BLN  | BNPB                      |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan                  | Setiap desa rawan bencana tersedia tenaga yang kompeten dalam PRB   | Seluruh daerah rawan bencana |   | Jumlah propinsi dan kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan kriteria                      | 60,000                       | 72,000  | 84,000  | APBN, APBD, BLN  | BNPB                      |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |  |   |                              |   |   |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |   |                              |   |   |                              |         |         |                  |                           |
| 1  | pengendalian pemantauan risiko bencana                                 | Terpantaunya risiko bencana di seluruh Provinsi dan Kab/Kota  | Seluruh daerah rawan bencana |   | Jumlah dokumen dan informasi risiko bencana   | 42,000                       | 50,400  | 58,800  | APBN, APBD, BLN  | BNPB                      |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)                |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|--|--|------------------------------|----------|---|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------|
|           |  |  | Propinsi                     | Kab/Kota |   | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |                                  |
| 2         | penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana                            | Terselenggaranya penerapan upaya fisik, non fisik dan peraturan perundangan PB | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah lokasi upaya penerapan fisik dan non fisik   | 45,000                              | 54,000  | 63,000  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 3         | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman                       | Tersedianya informasi sumber bahaya atau ancaman bencana                       | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah informasi sumber bahaya atau ancaman bencana   | 36,000                              | 43,200  | 50,400  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 4         | melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan | Terselenggaranya sistim pengawasan terhadap pengelolaan SDA berpotensi bencana | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah provinsi, kab/kota yang menyelenggarakan sistim pengawasan dan pengelolaan SDA berpotensi bencana  | 45,000                              | 54,000  | 63,000  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 5         | Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang  | Terkendalinya penataan ruang sesuai standard                                   | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah Provinsi dan kab/kota yang mengendalikan penataan ruang sesuai standar   | 60,000                              | 72,000  | 84,000  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 6         | pengelolaan lingkungan hidup   | Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar                   | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah Provinsi dan kab/kota yang melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai standar  | 150,000                             | 180,000 | 210,000 | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 7         | pengaturan dan tata bangunan   | Tersosialisasinya peraturan, kebijakan dan pedoman tata bangunan               | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah Dokumen keputusan dan stakeholder di pusat, provinsi dan kab/kota mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan pengaturan pembangunan dan tata bangunan | 120,000                             | 144,000 | 168,000 | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi                                     |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/Koordinator |
|---|---|--|--|----------|---|------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------------|
|   |   |  | Propinsi                                   | Kab/kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                       |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)  | (5)      | (6)   | (7)                          | (8)     |         |                  |                       |
| 8   | pembangunan sarana dan prasarana                    | Terbangunnya sarana dan prasarana sesuai standar prasarana   | Seluruh daerah rawan bencana               |          | Jumlah Provinsi dan kab/kota yang membangun sarana dan prasarana sesuai perencanaan | 280,000 APBN, APBD, BLN      | 240,000 | 200,000 | BNPB             |                       |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |   |  |  |          |   |                              |         |         |                  |                       |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |   |  |  |          |   |                              |         |         |                  |                       |
| 1   | pengamatan gejala bencana                           | Setiap gejala kejadian bencana dilaporkan secara cepat kepada Pemda dan kemudian diteruskan ke instansi terkait.   | Seluruh daerah rawan bencana               |          | Jumlah lokasi pengamatan gejala kejadian bencana yang dilaksanakan                  | 33,600 APBN, APBD, BLN       | 28,800  | 24,000  | BNPB             |                       |
| 2   | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana  | Setiap pengamatan gejala kejadian bencana dianalisis   | Seluruh daerah rawan bencana               |          | Jumlah dokumen analisis risiko bencana yang dilaksanakan                            | 33,600 APBN, APBD, BLN       | 28,800  | 24,000  | BNPB             |                       |
| 3   | pengambilan keputusan status ancaman bencana        | Setiap hasil analisis ditetapkan status ancaman bencana  | Seluruh daerah rawan bencana               |          | Jumlah dokumen keputusan status ancaman bencana                                     | 39,200 APBN, APBD, BLN       | 33,600  | 28,000  | BNPB             |                       |
|   | ancaman bencana                                     | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu |          | tersusunnya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami                         | BNPB RISTEK, BMKG, Depdagri  | 500     | 500     |                  |                       |
| 4   | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana | Berfungsinya sistem informasi peringatan bencana yang evidence based di seluruh Indonesia                          | Seluruh daerah rawan bencana               |          | Dokumen keputusan yang dihasilkan dalam menyelenggarakan peringatan bencana         | 70,000 APBN, APBD, BLN       | 60,000  | 50,000  | BNPB             |                       |
| 5   | pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana       | Setiap ancaman bencana tertanggulangi dengan baik  | Seluruh daerah rawan bencana               |          | Jumlah Data dan Informasi kegiatan tindakan bencana yang tertanggulangi             | 84,000 APBN, APBD, BLN       | 72,000  | 60,000  | BNPB             |                       |

| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)   | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)                |          | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|---|---|---|------------------------------|----------|--|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------|
|   |   |   | Propinsi                     | Kab/Kota |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |                                  |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b> |   |   |                              |          |  |                                     |         |         |                            |                                  |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>           |   |   |                              |          |  |                                     |         |         |                            |                                  |
| 1   | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan nasional masyarakat    | Terselenggaranya promosi kerentanan masyarakat rawan bencana berskala nasional                            | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah kemitraan dan dokumen dalam penyelenggaraan promosi pemahaman kerentanan masyarakat dalam PRB | 26,000                              | 31,200  | 36,400  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 2   | perencanaan partisipatif penanggulangan PRB di desa             | Tersedianya dokumen perencanaan partisipatif PRB di desa  | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah dokumen perencanaan partisipatif PRB  | 15,000                              | 18,000  | 21,000  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 3   | peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana     | Terwujudnya komitmen semua unsur/stakeholder akan pentingnya PRB berbasis masyarakat                      | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah komitmen stakeholder sebagai pelaku PRB   | 25,000                              | 30,000  | 35,000  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| 4   | penguatan ketahanan sosial masyarakat                           | Terwujudnya komitmen semua unsur/stakeholders dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat disemua tingkat | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah komitmen dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat  | 20,000                              | 24,000  | 28,000  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>  |   |   |                              |          |  |                                     |         |         |                            |                                  |
| 1   | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana | Tersedianya dokumen komitmen daerah dalam mekanisme dan kesiapan PRB                                      | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah dokumen komitmen daerah dalam kesiapan PRB  | 20,000                              | 24,000  | 28,000  | APBN, APBD, BLN            | BNPB                             |

| No | Kegiatan<br>(1)  | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)                |          | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|----|--|---|------------------------------|----------|--|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------------|
|    |  |   | Propinsi                     | Kab/kota |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                         |                                  |
| 2  | penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana           | Terselenggaranya penyusunan dan uji coba rencana Penanggulangan kedaruratan bencana           | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah dokumen uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana   | 30,000                              | 36,000  | 42,000  | APBN, APBD, BLN         | BNPB                             |
| 3  | pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan                | Terselenggaranya pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan                 | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah laporan dan dokumen penyelenggaraan pemasangan dan pengujian geladi tanggap darurat                   | 26,000                              | 31,200  | 36,400  | APBN, APBD, BLN         | BNPB                             |
| 4  | penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar            | Tersedianya barang pasokan kebutuhan dasar  | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah laporan dan dokumen tersedianya barang pasokan kebutuhan dasar  | 120,000                             | 144,000 | 168,000 | APBN, APBD, BLN         | BNPB                             |
| 5  | pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap | Terselenggaranya pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi semua daerah rawan bencana | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah laporan dan dokumen penyelenggaraan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tanggap darurat | 240,000                             | 288,000 | 336,000 | APBN, APBD, BLN         | BNPB                             |
| 6  | penyiapan lokasi evakuasi  | Tersedianya rencana tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana                            | Seluruh daerah rawan bencana |          | Jumlah laporan Provinsi dan Kab/kota yang menyediakan tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana         | 60,000                              | 72,000  | 84,000  | APBN, APBD, BLN         | BNPB                             |

| No<br>(1)  | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)               |          | Lokasi<br>(4) |   | Indikator Kinerja<br>(5)           | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |                  |                  | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|--|--|------------------------------|----------|---------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |  | Propinsi                     | Kab/Kota | Th 2010       | Th 2011   |                                    | Th 2012                             |                  |                  |                            |                                  |
| 7  | penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana                           | Seluruh daerah rawan bencana |          |               | Jumlah informasi Provinsi dan kab/kota tentang protap tanggap darurat bencana | 200,000                            | 240,000                             | 280,000          | APBN, APBD, BLN  | BNPB                       |                                  |
| 8  | penyediaan dan penyiapan peralatan untuk bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana | Seluruh daerah rawan bencana |          |               | Jumlah laporan Provinsi dan Kab/Kota yang menyediakan logistik dan peralatan  | 400,000                            | 480,000                             | 560,000          | APBN, APBD, BLN  | BNPB                       |                                  |
|  |  |                              |          |               |   | <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BNPB</b> | <b>2,376,300</b>                    | <b>2,850,950</b> | <b>3,325,000</b> |                            |                                  |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BPPT</b>  |  |                              |          |               |   |                                    |                                     |                  |                  |                            |                                  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>     |  |                              |          |               |   |                                    |                                     |                  |                  |                            |                                  |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |                              |          |               |   |                                    |                                     |                  |                  |                            |                                  |
| 1  | Penggalan dan pengkajian ancaman bencana   |                              |          |               |   |                                    |                                     |                  |                  | PTLWB BPPT                 |                                  |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |                              |          |               |   |                                    |                                     |                  |                  |                            |                                  |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |                              |          |               |   |                                    |                                     |                  |                  |                            |                                  |
| 1  | pengembangan budaya sadar bencana  |                              |          |               |   |                                    |                                     |                  |                  | PTLWB BPPT                 |                                  |

| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)   | Sasaran<br>(3)  |  | Lokasi<br>(4)  |          | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7)                  | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|---|---|---|--|--|----------|--|-------------------------------------|---------|---------|---|----------------------------------|
|   |   |   |  | Propinsi   | Kab/kota |  | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |   |                                  |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |   |   |  |  |          |  |                                     |         |         |   |                                  |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |   |   |  |  |          |  |                                     |         |         |   |                                  |
| 1   | pengamatan gejala bencana teknologi pengurangan risiko bencana. | Tersedianya berbagai teknologi pengurangan risiko bencana.  |  | Banten<br>Jawa Barat<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>Jawa timur<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan<br>Selatan<br>Sumatera<br>Selatan<br>Lampung<br>Sumatera Barat<br>Sumatera Hindia<br>Laut Banda<br>Laut Maluku<br>laut Jawa |          | Dikuasainya kemampuan membangun teknologi sistem peringatan dini yang handal untuk bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kerusakan perairan dan lingkungan | 8,000                               | 10,000  | 12,000  | APBN,<br>APBD,<br>BUMN,<br>swasta,<br>Hibah | PTLWB BPPT                       |
|   |   | - Operasionalisasi dan pemeliharaan buoy tsunami dan stasiun penerima data buoy.                                  |  | Samudera Hindia<br>Laut Banda<br>Laut Maluku<br>laut Jawa  |          | Buoy dan stasiun penerima data beroperasi  |                                     |         |         |   | PTLWB BPPT                       |
|   |   | - Terbangunnya konsep, sistem dan prototype sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat. |  | Banten<br>Jawa Barat<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>Jawa timur<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan<br>Selatan<br>Sumatera<br>Selatan<br>Lampung<br>Sumatera Barat  |          | Paket teknologi digunakan oleh pemangku kepentingan  |                                     |         |         |   | PTLWB BPPT                       |



| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|---|---|--|---|----------|--|------------------------------|---------|---------|------------------|-------------------------|
|   |   |  | Propinsi  | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                         |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)      | (6)  | (7)                          | (8)     | (9)     | (10)             |                         |
|   |   | - Terbangunnya konsep, desain dan rekayasa teknologi penanggulangan bencana akibat gagal teknologi.  | Banten<br>Jawa Barat<br>DKI Jakarta<br>Jawa Tengah<br>Jawa timur<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan<br>Selatan<br>Sumatera<br>Selatan<br>Lampung<br>Sumatera Barat |          | Informasi risiko bencana tersaji dengan cepat dan akurat   |                              |         |         | PTLWB BPPT       |                         |
| 2   | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana  | Tersedianya hasil analisis risiko multi bencana dan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan.<br><br>Terbangunnya sistem kajian cepat (rapid assessment) multi bencana |   |          | Terbangunnya kemampuan dalam pengkajian dan penerapan teknologi untuk mitigasi bencana gagal teknologi |                              |         |         | PTLWB BPPT       |                         |
| 3   | pengambilan keputusan status ancaman bencana        | Terbangunnya sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem (badai, rob) dan kerusakan perairan dan lingkungan yang berdampak                           |   |          |  |                              |         |         | PTLWB BPPT       |                         |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkat Masyarakat</b> |   |  |   |          |  |                              |         |         |                  |                         |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>         |   |  |   |          |  |                              |         |         |                  |                         |
| 1   | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat | - Penyelenggaraan seminar dan lokakarya pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan internasional  | Jakarta<br>Banten<br>Lampung<br>Jawa Tengah<br>Sumatera Barat   |          | - Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana                            |                              |         |         | PTLWB BPPT       |                         |

| No                                 | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |               | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator |
|------------------------------------|--|---|----------|----------|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
|                                    |  |   | Propinsi | Kab/kota |   | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012       |                  |                           |
| (1)                                | (2)  | (3)   | (4)      | (4)      | (5)   | (6)                          | (6)           | (7)           | (8)              |                           |
| 2                                  | perencanaan partisipatif penanggulangan bencana                    |   |          |          | - Terselenggaranya seminar dan lokakarya nasional dan internasional     |                              |               |               | PTLWB BPPT       |                           |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>   |  |   |          |          |   |                              |               |               |                  |                           |
| 1                                  | penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana    | Penerbitan dokumen panduan, jurnal dan buku tentang teknologi penanggulangan risiko bencana |          |          | - Tersedianya panduan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana |                              |               |               | PTLWB BPPT       |                           |
| 2                                  | penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana | Pelatihan teknis dan operasional tentang teknologi penanggulangan risiko bencana            |          |          | - Terbitnya jurnal berkala yang terakreditasi                           |                              |               |               | PTLWB BPPT       |                           |
| 3                                  | pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan      |   |          |          | - Terbitnya buku-buku mengenai teknologi penanggulangan bencana         |                              |               |               | PTLWB BPPT       |                           |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BPPT</b> |  |   |          |          |   | <b>8,000</b>                 | <b>10,000</b> | <b>12,000</b> |                  |                           |

| No   | Kegiatan  | Sasaran  |              | Lokasi       | Indikator Kinerja |  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|--|---|--|--------------|--------------|-------------------|--|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
|  |   | (3)  | (3)          |              | (4)               | (5)  | Th 2010                      | Th 2011 |                  |                         |
| (1)  | (2)   |  |              | (4)          |                   |  | (6)                          |         | (7)              | (8)                     |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>  |   |  |              |              |                   |  |                              |         |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |   |  |              |              |                   |  |                              |         |                  |                         |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                   |   |  |              |              |                   |  |                              |         |                  |                         |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | Meningkatnya pemahaman aparat permda dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota   | 20 provinsi  | 20 provinsi  |                   | Terciptanya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah                 | 1,000                        | 1,000   | 1,000 APBN       | KEMDAGRI                |
|  |   | Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memahami masalah penanganan bencana yang sewaktu-waktu terjadi, sehingga masa kritis pada tahap tanggap darurat bencana dapat diatasi dengan baik | 4 kab/kota   | 4 kab/kota   |                   | Terciptanya dukungan terhadap peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah. | 250                          |         | APBN             | KEMDAGRI                |
|  |   | Memotivasi petugas kebakaran dengan cara memberikan reward   | 500 kab/kota | 500 kab/kota |                   | Terwujudnya peningkatan kemampuan aparat   | 2,500                        | 1,000   | 1,500 APBN       | KEMDAGRI                |
|  |   | Mewujudkan pola keterpaduan dalam penanggulangan kebakaran   | 20 provinsi  | 20 provinsi  |                   | Tersusunnya prosedur tetap (protap)  | 1,500                        |         | APBN             | KEMDAGRI                |
|  |   | Meningkatnya ketrampilan dan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana   | 20 provinsi  | 20 provinsi  |                   | Terciptanya masyarakat yang sadar bencana  | 3,000                        |         | APBN             | KEMDAGRI                |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |   |  |              |              |                   |  |                              |         |                  |                         |
| 1  | Pengenal dan pengkajian ancaman                                   | Memfasilitasi daerah dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran.  | 10 provinsi  | 10 provinsi  |                   | Terkumpulnya informasi lokasi rawan bencana dari berbagai instansi terkait dan Pemerintah Daerah.                              | 300                          |         | APBN             | KEMDAGRI                |

| No | Kegiatan<br>(1)  | Sasaran<br>(2)   | Lokasi<br>(3)         |          | Indikator Kinerja<br>(4) | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(5) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|----|--|--|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------------|
|    |  |  | Propinsi              | Kab/kota |                          | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |                                  |
|    | bencana  | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana. Di daerah agar lebih terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan   | 7 provinsi dan 1 kota |          |                          | 4,000                               |         |         | PHLN                       | KEMDAGRI                         |
|    |  | Terlaksananya kegiatan SCDRR baik di pusat dan daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya                          | 7 provinsi dan 1 kota |          |                          | 1,000                               |         |         | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|    |  | Menjadikan posko Depdagri sebagai pusat komunikasi dan koordinasi penanggulangan bencana   | Jakarta               |          |                          | 500                                 |         |         | APBN                       | KEMDAGRI                         |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana                        | Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian masalah kelembagaan dan ketatalaksanaan bidang kebencanaan di daerah.                       | 7 provinsi            |          |                          | 400                                 |         |         | APBN                       | KEMDAGRI                         |
| 3  | Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana         | Meningkatnya pemahaman aparatat pemda dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. | 10 provinsi           |          |                          | 3,000                               |         |         | APBD                       | KEMDAGRI                         |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan | Memantapkan kesamaan tujuan bagi Pemda dalam pembentukan BPBD  | 5 provinsi            |          |                          | 300                                 |         |         | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|    |  | Meningkatkan kesiapsiagaan aparat Pemda dalam penanggulangan wabah   | 5 provinsi            |          |                          | 300                                 |         |         | APBN                       | KEMDAGRI                         |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  |                           | Lokasi   |   | Indikator Kinerja |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator  |
|---|--|--|---------------------------|--|---|-------------------|---------|---------|------------------|--------------------------|
|   |  | (3)  | (4)                       | Propinsi   | Kab/Kota  | Th 2010           | Th 2011 | Th 2012 |                  |                          |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)                       | (5)  | (6)   | (7)               | (8)     | (9)     | (10)             |                          |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b> |  |  |                           |  |   |                   |         |         |                  |                          |
| <b>PROGRAM D. : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                 |  |  |                           |  |   |                   |         |         |                  |                          |
| 1   | pengenalan dan pemantauan risiko bencana                               | Permutakhiran data dan informasi mengenai daerah rawan bencana di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Terinventarisasinya data dan informasi kebencanaan yang termuat dalam Database Serpras kebencanaan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien di 6 (enam) Propinsi. | 2 provinsi dan 3 kota/kab | Kepulauan Riau<br>Daerah Yogyakarta<br>Sulawesi Utara<br>Kalimantan<br>Selatan<br>Nusa Tenggara Barat<br>Papua | Tersusunnya database terbaru diimplementasikan ke dalam bentuk peta daerah rawan bencana dan narasi.<br><br>Tersedianya database Sarana Prasarana Kebencanaan di 6 (enam) Propinsi. Database berbasis lokasi yang mudah dibaca dan dipahami pengguna. Database yang dapat diperbaharui ketika ada data baru yang harus dimasukkan | 300<br><br>980    |         |         | APBN<br><br>APBN | KEMDAGRI<br><br>KEMDAGRI |
| 2   | penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana | Memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan panduan informasi dan penyuluhan tentang kebencanaan di daerah.<br><br>Terwujudnya pemahaman yang sama tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana di daerah.                               | 5 provinsi dan 2 kota     |  | Tersusunnya panduan informasi dan penyuluhan tentang kebencanaan di daerah.<br><br>Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah   | 250<br><br>700    |         |         | APBN<br><br>APBN | KEMDAGRI<br><br>KEMDAGRI |

| No<br>(1)  | Kegiatan<br>(2)                  | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4)                       |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |              |              | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                                  |   | Propinsi                            | Kab/kota |   | Th 2010                             | Th 2011      | Th 2012      |                            |                                  |
| 8  | pembangunan sarana dan prasarana | Teridentifikasinya pola kerjasama pemanfaatan sarpras antar daerah dalam rangka penanggulangan bencana dengan menyusun database sarpras penanggulangan bencana sehingga kebutuhan dan kondisi sarpras penanggulangan bencana di daerah dapat diketahui. | 9 Propinsi                          |          | Tersusunnya database sarpras penanggulangan bencana dengan berkoordinasi antar daerah dalam rangka pemanfaatan sarpras bencana  | 300                                 | 500          | 700          | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|  |                                  | Terseleenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif  | 2 Propinsi<br>3 Kabupaten<br>1 Kota |          | Terbangunnya Sarana Prasarana Pemerintahan di 6 (enam) wilayah (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Tanah Datar, kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Pariaman).  | 14                                  |              |              | APBN                       | KEMDAGRI                         |
|  |                                  | Terseleenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif.   | 2 Propinsi<br>3 Kabupaten<br>1 Kota |          | Terwujudnya koordinasi penanganan, pengelolaan serta pertanggung-jawaban/pelaporan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor Pemerintahan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah, NTB, Kab. Tanah Datar, Toraja Utara, Lombok Barat dan Kota Pariaman. | 200                                 |              |              | APBN                       | KEMDAGRI                         |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b> |                                  |   |                                     |          |   | <b>20,794</b>                       | <b>2,500</b> | <b>3,200</b> |                            |                                  |

| No   | Kegiatan                         | Sasaran   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator   |
|--|----------------------------------|---|--|----------|---|------------------------------|---------|---------|------------------|---|
|  |                                  |   | Propinsi   | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |   |
| (1)  | (2)                              | (3)   | (4)  | (4)      | (5)   | (6)                          | (6)     | (7)     | (8)              |   |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT</b>   |                                  |   |  |          |   |                              |         |         |                  |   |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b> |                                  |   |  |          |   |                              |         |         |                  |   |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |                                  |   |  |          |   |                              |         |         |                  |   |
| 8  | pembangunan sarana dan prasarana | Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan prasarana dan sarana pengembangan kawasan khusus yang terkena bencana | NAD, Riau, Kepri, Jabar, Sumbang, Sult, Maluku, Papua, NTT, Papua Barat, Sumut   |          | Jumlah Fasilitas Kebijakan dan Bantuan Stimulan Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman untuk 19 Kawasan Khusus yang terkena bencana seluas 380 Ha | 12,000                       | 21,000  | 24,000  | APBN             | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan |
|  |                                  | Terperluhnya kebijakan dan bangunan stimulan Rumah Khusus dalam konteks penanggulangan bencana                        | Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu  |          | Jumlah Rumah Pasca Bencana yang terbangun   | 60,000                       | 40,000  | 40,000  | APBN             | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Formal     |
|  |                                  | Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana                 | NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sult, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |          | Jumlah fasilitas dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana  | 50,000                       | 50,000  | 50,000  | APBN             | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya    |
|  |                                  | Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana             | NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sult, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |          | Jumlah fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana  | 25,000                       | 25,000  | 25,000  | APBN             | Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang, Perumahan Swadaya   |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator   |
|--|--|---|---|----------|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---|
|  |  |   | Propinsi  | Kab/kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |   |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)      | (6)  | (7)                          | (8)     |         |                  |   |
|  |  | <p>Tersedianya prasarana, sarana, utilitas perumahan swadaya yang dapat menstimulasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat di kawasan bencana</p> | <p>NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat</p> |          | <p>Jumlah fasilitas dan stimulasi PSU perumahan swadaya di kawasan bencana</p>   | 40,000                       | 40,000  | 40,000  | APBN             | <p>Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputy Bidang Perumahan Swadaya</p> |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT</b>  |  |   |   |          |  | 187,000                      | 176,000 | 179,000 |                  |   |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                  |  |   |   |          |  |                              |         |         |                  |   |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |  |   |   |          |  |                              |         |         |                  |   |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                   |  |   |   |          |  |                              |         |         |                  |   |
| 1  | <p>Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya</p> | <p>Terwujudnya Koordinasi Bidang Penanggulangan Kerawanan Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat</p>  | <p>Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br/>DKI Jakarta<br/>Gorontalo, dan Lampung</p>   |          | <p>Meningkatnya penanganan tanggap cepat terhadap gangguan kesra yang diukur melalui: Jumlah K/L, NGO, Pemda yang berperan aktif dalam tanggap cepat terhadap gangguan kesra</p> | 1,000                        | 1,200   | 1,200   | APBN             | <p>KEMENKOKESRA</p>   |
|  |  | <p>Meningkatnya Koordinasi Urusan Dinamika Alam dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial</p>  | <p>Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br/>DKI Jakarta<br/>Gorontalo, dan Lampung</p>   |          | <p>Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan bencana alam untuk meningkatkan Ketahanan Sosial</p>  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | <p>KEMENKOKESRA</p>   |
|  |  | <p>Meningkatnya Koordinasi Urusan Konflik Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial</p>   | <p>Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br/>DKI Jakarta<br/>Gorontalo, dan Lampung</p>   |          | <p>Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan konflik sosial untuk meningkatkan Ketahanan Sosial</p>  | 600                          | 750     | 750     | APBN             | <p>KEMENKOKESRA</p>   |



| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   |  | Lokasi<br>(4) |         | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |     |     | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|--|--|---------------|---------|--|------------------------------|-----|-----|----------------------------|----------------------------------|
|           |                 | Propinsi   | Kab/Kota   | Th 2010       | Th 2011 |  | Th 2012                      |     |     |                            |                                  |
|           |                 | Meningkatnya Koordinasi Urusan Pemulihan Lingkungan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |               |         | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Pemulihan Lingkungan untuk meningkatkan Ketahanan Sosial     | 600                          | 750 | 750 | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Meningkatnya Koordinasi Urusan Dampak Teknologi dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial     | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |               |         | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Dampak Negatif Teknologi untuk meningkatkan Ketahanan Sosial | 600                          | 750 | 750 | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Bencana alam                     | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |               |         | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Bencana Alam           | 600                          | 750 | 750 | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial                   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |               |         | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial         | 600                          | 750 | 750 | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |
|           |                 | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan             | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |               |         | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan   | 600                          | 750 | 750 | APBN                       | KEMENKOKESRA                     |

| No  | Kegiatan | Sasaran   | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |          | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator |
|-----|----------|---|---|----------|--|------------------------------|---------|----------|------------------|---------------------------|
|     |          |   | Propinsi  | Kab/kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012  |                  |                           |
| (1) | (2)      | (3)   | (4)   | (4)      | (5)  | (6)                          | (6)     | (7)      | (8)              |                           |
|     |          | Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Teknologi                                | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan<br>Lampung |          | Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Negatif Teknologi | 600                          | 750     | 750 APBN | KEMENKOKESRA     |                           |
|     |          | Meningkatnya Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat terhadap gangguan kerawanan sosial                        | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan<br>Lampung |          | Terselenggarakannya sosialisasi pengembangan budaya sadar Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait            | 600                          | 750     | 750 APBN | KEMENKOKESRA     |                           |
|     |          | Tersinkronisasinya upaya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengurangan kerawanan sosial              | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan<br>Lampung |          | Tertanganinya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengurangan kerawanan sosial                                    | 600                          | 750     | 750 APBN | KEMENKOKESRA     |                           |
|     |          | Meningkatnya Upaya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan<br>Lampung |          | Terselenggaranya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat              | 600                          | 750     | 750 APBN | KEMENKOKESRA     |                           |
|     |          | Tersusunnya Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan<br>Lampung |          | Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat                                      | 600                          | 750     | 750 APBN | KEMENKOKESRA     |                           |

| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)   |          | Lokasi<br>(4)  |         | Indikator Kinerja<br>(5)   |         |         | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>Th 2010      Th 2011      Th 2012 |     | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |      |              |
|---|--|--|----------|--|---------|--|---------|---------|---|-----|----------------------------|----------------------------------|------|--------------|
|   |  | Propinsi   | Kab/Kota | Th 2010  | Th 2011 | Th 2012  | Th 2010 | Th 2011 | Th 2012   |     |                            |                                  |      |              |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>               |  |  |          |  |         |  |         |         |   |     |                            |                                  |      |              |
| 4   | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan                     | Tersusunnya Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat |          | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |         | Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat |         |         | 600   | 750 | 750                        | 750                              | APBN | KEMENKOKESRA |
|   |  | Tersusunnya Kebijakan tentang Kedaruratan Gangguan Kesra   |          | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |         | Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang kedaruratan Gangguan Kesejahteraan Rakyat                                  |         |         | 600   | 750 | 750                        | 750                              | APBN | KEMENKOKESRA |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b> |  |  |          |  |         |  |         |         |   |     |                            |                                  |      |              |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                  |  |  |          |  |         |  |         |         |   |     |                            |                                  |      |              |
| 1   | pengenalan dan pemantauan risiko bencana                                     | Meningkatnya Upaya Pengendalian dampak negatif penggunaan Teknologi                                      |          | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |         | Tersedianya Laporan dan Evaluasi tentang penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber Kerawanan Sosial            |         |         | 600   | 750 | 750                        | 750                              | APBN | KEMENKOKESRA |
| 3   | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman | Meningkatnya upaya penyediaan data dan informasi kerawanan Sosial  |          | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung |         | Terselenggarakannya penyediaan data dan informasi Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait                    |         |         | 600   | 750 | 750                        | 750                              | APBN | KEMENKOKESRA |

| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               | Sumber Pendanaan | Pelaksana/Koordinator                                       |
|---|---|---|--|----------|---|------------------------------|---------------|------------------|---|
|   |   |   | Propinsi   | Kab/kota |   | Th 2010                      | Th 2011       |                  |   |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)  |          | (5)   | (6)                          |               | (7)              | (8)   |
| <b>PRIORITAS : Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>                      |   |   |  |          |   |                              |               |                  |   |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>                                 |   |   |  |          |   |                              |               |                  |   |
| 1   | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat               | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan Lampung |          | Terselenggaranya sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana   | 600                          | 750           | 750 APBN         | KEMENKOKESRA  |
| 3   | peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan an bencana    | Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan kerawanan sosial  | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan Lampung |          | Terbangunnya komitmen bersama antara Pemerintah dan Stakeholder Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial  | 600                          | 750           | 750 APBN         | KEMENKOKESRA  |
| 4   | penguatan ketahanan sosial masyarakat                             | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan Kerawanan Sosial   | Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan<br>DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan Lampung |          | Terjalinya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial   | 600                          | 750           | 750 APBN         | KEMENKOKESRA  |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                    |   |   |  |          |   | <b>12.400</b>                | <b>15.450</b> | <b>15.450</b>    |   |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b>  |   |   |  |          |   |                              |               |                  |   |
| <b>PRIORITAS : Penguatan Risiko Bencana sebagai Prioritas Nasional dan Daerah serta Penguatan Kelembagaan</b> |   |   |  |          |   |                              |               |                  |   |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                  |   |   |  |          |   |                              |               |                  |   |
| 1   | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | Sistem mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana. | 33 provinsi  |          | Terlaksananya sistem koordinasi dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana antara pemerintah pusat dan daerah | 5,000                        | 5,000         | 5,000 APBN       | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah |

| No   | Kegiatan  | Sasaran   |   | Lokasi                                  |  | Indikator Kinerja |        | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         | Sumber Pendanaan  | Pelaksana / Koordinator            |
|--|---|---|---|---|--|-------------------|--------|------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  |   | (3)   | (3)   | (4)                                     | (4)  | (5)               | (5)    | Th 2010                      | Th 2011 |   |                                    |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan | Mengembangkan program bahan ajar yang handal dan sah yang dapat diintegrasikan pada beberapa mata pelajaran yang relevan (Agama, IPA, dan IPS) pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar. | Provinsi rawan bencana seperti Papua, NTT, NTB, Jatim, Jateng, DIY, Jabar, Sumbbar, Bengkulu, NAD | Kabupaten/ kota terpilih untuk uji coba | Tersusunnya bahan ajar tentang risiko bencana untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah                                     | 2,250             |        | APBN, PHLN                   |         | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah |                                    |
|  |   | Sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama pada provinsi-provinsi daerah rawan bencana alam  | 33 provinsi   |   | Terlaksananya pengajaran resiko bencana pada sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di provinsi-provinsi rawan bencana | 65,500            | 80,500 | APBN, PHLN                   |         | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah |                                    |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| 7  | pengaturan pembangunan dan tata bangunan              | Mengembangkan standar bencana bagi gedung sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah   | 33 provinsi   |   | Tersusunnya dokumen tentang standar bangunan sekolah tahan gempa yang  | 2,000             |        | APBN                         |         | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah |                                    |
|  |   | Penerapan standar bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah tahan gempa  |   |   | Terlaksananya standar bangunan sekolah tahan gempa pada semua sekolah  | 65,500            | 80,000 | APBN                         |         | Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah |                                    |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b>  |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KEHUTANAN</b>   |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>     |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| <b>PROGRAM A : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>                                       |   |   |   |   |  |                   |        |                              |         |   |                                    |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian                        | Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS   | 33 Propinsi   |   | Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS  | 1,200             | 1,200  | 1,200                        | 1,200   | APBN  | Kementerian Kehutanan, Dirjen RLPS |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi   |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan              | Pelaksana/<br>Koordinator          |
|---|--|--|--|----------|--|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------------|
|   |  |  | Propinsi   | Kab/kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                               |                                    |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)  |          | (5)  | (6)                          |         |         | (7)                           | (8)                                |
|   | tugas, kewenangan, dan sumber daya   | Lahan daerah penyangga rawan kebakaran hutan dan lahan   | Riau<br>Jambi<br>Sumatera Barat<br>Kalimantan Barat<br>kalimantan<br>Timur |          | Terbnyanya kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan            | 6,800                        | 7,300   | 7,800   | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen PHKA |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>               |  |  |  |          |  |                              |         |         |                               |                                    |
| 4   | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan                     | Terlaksananya sosialisasi PDAS   | 33 Propinsi  |          | Terlaksananya sosialisasi PDAS di 33 Propinsi  | 1,100                        | 1,100   | 1,100   | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |
|   |  | berfungsinya SOP di 36 BPDAS   | 33 Propinsi  |          | berfungsinya SOP di 36 BPDAS   | 2,000                        | 2,000   | 3,200   | APBN                          | Dephut, Dirjen RUPS                |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b> |  |  |  |          |  |                              |         |         |                               |                                    |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                  |  |  |  |          |  |                              |         |         |                               |                                    |
| 3   | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman | Terpetaknya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan   | 12 Propinsi  |          | Terpetaknya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan                                       | 3,000                        | 3,000   | 3,000   | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |
| 6   | pengelolaan lingkungan hidup   | Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi   | Propinsi   |          | Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi                                   | 10,000                       | 10,000  | 10,000  | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |
|   |  | Lahan gambut di Kalimantan Tengah, Jambi, Riau   | propinsi   |          | Terlaksananya rehabilitasi lahan gambut dan terwujudnya konservasi tanah dan air               | 475,000                      | 275,000 | 200,000 | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |
|   |  | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan di Cianjur, Bogor, Depok, beksi dan Jakarta            | 5 kab  |          | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air | 365,350                      | 150,450 | 110,850 | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |
|   |  | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutanWonosobo, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Temanggung | 5 kab  |          | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air | 168,000                      | 60,670  | 59,650  | APBN dan DAK Bidang Kehutanan | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |

| No   | Kegiatan  | Sasaran  |              | Lokasi |     | Indikator Kinerja  |                  |                  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                               | Sumber Pendanaan                   | Pelaksana / Koordinator |
|--|---|--|--------------|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|  |   | (3)  | (4)          | (5)    | (6) | (7)  | (8)              | Th 2010          | Th 2011                      | Th 2012                       |                                    |                         |
|  |   | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Ngawi, Bojonegoro | 6 kab        |        |     | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air DAS Solo  | 171,000          | 50,850           | 45,680                       | APBN dan DAK Bidang Kehutanan | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |                         |
|  |   | Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan kabupaten Bindung Barat, Sumedang, Garut, Kutopanjang          | 4 kab        |        |     | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air Catchment area waduk Siguling, Jatigede, Kutopanjang dan Masbastari | 95,000           | 30,850           | 24,250                       | APBN dan DAK Bidang Kehutanan | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |                         |
|  |   | 200 kabupaten/kota yang memiliki lahan kritis lebih dari 20% dari luas kabupaten                               | 200 kab/kota |        |     | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air pada 200 kab/kota   | 500,000          | 500,000          | 500,000                      | DAK Bidang Kehutanan          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |                         |
|  |   | Lahan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur  |              |        |     | Terlaksananya upaya pencegahan, pemadaman, dan penangan pasca kebakaran hutan dan lahan  | 9,565            | 7,850            | 9,250                        | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen PHKA |                         |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |   |  |              |        |     |  |                  |                  |                              |                               |                                    |                         |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>   |   |  |              |        |     |  |                  |                  |                              |                               |                                    |                         |
| 1  | pengamatan gejala bencana                                   | Tersedianya dan terpasangnya AWS   | 6 Propinsi   |        |     | Tersedianya dan terpasangnya AWS 6 Unit  | 1,000            | 2,000            | 1,500                        | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |                         |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkat Masyarakat</b>                          |   |  |              |        |     |  |                  |                  |                              |                               |                                    |                         |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>                                  |   |  |              |        |     |  |                  |                  |                              |                               |                                    |                         |
| 1  | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat         | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di 464 kab/kota                     | 464 Kab/kota |        |     | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di Kab/Kota   | 500              | 500              | 500                          | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |                         |
| 3  | peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana | Terlaksananya petugas daerah tentang PDAS  | 33 Propinsi  |        |     | Terlaksananya petugas daerah tentang PDAS di 33 Propinsi   | 1,000            | 2,000            | 2,500                        | APBN                          | Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS |                         |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN KEHUTANAN</b>  |   |  |              |        |     |  | <b>1,810,515</b> | <b>1,104,770</b> | <b>980,480</b>               |                               |                                    |                         |

| No   | Kegiatan   | Sasaran  |  | Lokasi   |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator |
|--|--|--|--|----------|----------|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
|  |  | (3)  |  | Propinsi | Kab/kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                           |
| (1)  | (2)  |  |  | (4)      | (4)      | (5)  | (6)                          |         |         | (7)              | (8)                       |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KELAUTAN &amp; PERIKANAN</b>  |  |  |  |          |          |  |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |  |  |  |          |          |  |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |  |  |          |          |  |                              |         |         |                  |                           |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan | Terrfasilitasinya rencana mitigasi bencana di 30 kawasan   | Sumatera Barat<br>Bengkulu<br>Jawa Timur<br>NTT<br>Sulawesi<br>Tenggara<br>Lampung<br>Bengkulu<br>Jawa Tengah<br>Jawa Barat<br>DIY<br>NTB<br>NAD<br>Sulawesi Utara<br>Papua<br>Jawa Timur<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Selatan<br>Gorontalo<br>Sulawesi Tengah<br>Maluku<br>Papua Barat |          |          | Persentase kawasan pesisir yang mengadopsi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dalam perencanaan daerahnya | 2,000                        | 4,000   | 6,000   | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan |
|  |  | Tersusunnya norma, standar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana di wilayah , esisir dan , ulau-pulau kecil |  |          |          | Jumlah NSPK tentang mitigasi bencana yang dilengkapi dengan data bencana terkini                               | 200                          | 100     | 100     | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan |



| No   | Kegiatan                          | Sasaran  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator   |
|--|-----------------------------------|--|---|----------|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
|  |                                   |  | Propinsi  | Kab/Kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                           |
| (1)  | (2)                               | (3)  | (4)   |          | (5)  | (6)                          |         |         | (7)              | (8)                       |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |                                   |  |   |          |  |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |                                   |  |   |          |  |                              |         |         |                  |                           |
| 1  | pengembangan budaya sadar bencana | Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di kawasan | Lampung<br>Jawa Barat<br>DIY<br>NAD<br>NTB<br>Bengkulu<br>Jawa Tengah<br>Sulawesi Utara<br>Papua<br>Jawa Timur<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Selatan<br>Gorontalo<br>Sulawesi Tengah<br>Maluku<br>Sumatera Barat<br>Papua Barat<br>Banten |          | Persentase masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | 500                          | 1,000   | 1,500   | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |                                   |  |   |          |  |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |                                   |  |   |          |  |                              |         |         |                  |                           |
| 6  | pengelolaan lingkungan hidup      | Tertanamnya greenbelt untuk mitigasi tsunami di 17 lokasi            | Sumatera Barat<br>NTB<br>Jawa Timur<br>Jawa Tengah<br>Bengkulu<br>DIY<br>Jawa Barat<br>NTT<br>Sulawesi<br>Tenggara<br>Lampung<br>NAD<br>Sulawesi Utara<br>Papua   |          | Persentase kawasan pesisir yang memiliki vegetasi pelindung pantai untuk mitigasi bencana tsunami              | 800                          | 2,000   | 4,000   | APBN             | Kem. Kelautan & Perikanan |

| No   | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi  |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |               | Sumber Pendanaan          | Pelaksana/<br>Koordinator |
|--|---|--|---|----------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|  |   |  | Propinsi  | Kab/kota |  | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012       |                           |                           |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   | (4)      | (5)  | (6)                          | (6)           | (7)           | (8)                       |                           |
|  |   | Tertanamnya vegetasi pantai di 17 lokasi                 | Jawa Tengah<br>Jawa Timur<br>Banten<br>Jawa Barat<br>NTB  |          | Persentase kawasan pesisir yang memiliki vegetasi pelindung pantai   | 800                          | 2.000         | 4.000 APBN    | Kem. Kelautan & Perikanan |                           |
| 8  | pembangunan sarana dan prasarana                                  | Terbangunnya sarana struktur ramah bencana di 24 kawasan | Jawa Timur<br>Bengkulu<br>Jawa Tengah<br>Jawa Barat<br>NTB<br>NAD<br>Sulawesi Utara<br>Papua<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Selatan<br>Gorontalo<br>Maluku<br>Irian Barat<br>Sumatera Barat<br>Lampung<br>DIY<br>NTT |          | Persentase kawasan pesisir yang memiliki fasilitas penyelamatan diri dan permukiman tahan terhadap ancaman bencana | 40.000                       | 4.000         | 18.000 APBN   | Kem. Kelautan & Perikanan |                           |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN KELAUTAN &amp; PERIKANAN</b>   |   |  |   |          |  | <b>44.300</b>                | <b>13.100</b> | <b>33.600</b> |                           |                           |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KESEHATAN</b>   |   |  |   |          |  |                              |               |               |                           |                           |
| <b>PRIORITAS: PENGUATAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b> |   |  |   |          |  |                              |               |               |                           |                           |
| <b>PROGRAM A : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>                                 |   |  |   |          |  |                              |               |               |                           |                           |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | Pengambil kebijakan di pusat dan daerah                  |   |          | Terlaksananya kerjasama penanggulangan bencana yang terintegrasi   |                              |               | APBN          | PPK Kementerian Kesehatan |                           |
|  |   | Menyusun peraturan-peraturan                             |   |          | Tersedianya peraturan-peraturan terkait upaya penanggulangan bencana   |                              |               | APBN          | PPK Kementerian Kesehatan |                           |
|  |   | Membentuk kelembagaan                                    |   |          | Tersedianya unit kerja terkait dengan upaya penanggulangan bencana   |                              |               | APBN          | PPK Kementerian Kesehatan |                           |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   |                        | Lokasi   |          | Indikator Kinerja |     |         | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator   |
|--|--|---|------------------------|----------|----------|-------------------|-----|---------|------------------------------|---------|------------------|---------------------------|
|  |  | (3)   | (3)                    | Propinsi | Kab/Kota | (4)               | (4) | Th 2010 | Th 2011                      | Th 2012 |                  |                           |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |   |                        |          |          |                   |     |         |                              |         |                  |                           |
| 1  | Pengendalian dan pengkajian ancaman bencana              | Instansi kesehatan prov & kab/kota                      | Setiap prov & kab/kota | Propinsi | Kab/Kota | (5)               | (5) | (5)     | (5)                          | (5)     | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana                        | Instansi kesehatan prov & kab/kota                      | Setiap prov & kab/kota | Propinsi | Kab/Kota | (5)               | (5) | (5)     | (5)                          | (5)     | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan |
| 3  | Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana         | Instansi kesehatan prov & kab/kota                      | Setiap prov & kab/kota | Propinsi | Kab/Kota | (5)               | (5) | (5)     | (5)                          | (5)     | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan | Pusat Penanggulangan Krisis                             | Pusat                  | Propinsi | Kab/Kota | (5)               | (5) | (5)     | (5)                          | (5)     | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |   |                        |          |          |                   |     |         |                              |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |   |                        |          |          |                   |     |         |                              |         |                  |                           |
| 1  | pengembangan budaya sadar bencana                        | Masyarakat dan petugas di masing-masing prov & kab/kota | Setiap prov & kab/kota | Propinsi | Kab/Kota | (5)               | (5) | (5)     | (5)                          | (5)     | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan    | Masyarakat dan petugas di masing-masing prov & kab/kota | Setiap prov & kab/kota | Propinsi | Kab/Kota | (5)               | (5) | (5)     | (5)                          | (5)     | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |  |   |                        |          |          |                   |     |         |                              |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |   |                        |          |          |                   |     |         |                              |         |                  |                           |
| 1  | pengendalian dan pemantauan risiko bencana               | Petugas di masing-masing prov & kab/kota.               | Setiap prov & kab/kota | Propinsi | Kab/Kota | (5)               | (5) | (5)     | (5)                          | (5)     | APBN             | PPK Kementerian Kesehatan |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi                 |   | Indikator Kinerja | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |                           | Sumber Pendanaan | Pelaksana/Koordinator |
|---|--|--|------------------------|---|-------------------|------------------------------|---------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|   |  |  | Propinsi               | Kab/kota  |                   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012                   |                  |                       |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)                    | (5)   | (6)               | (7)                          | (8)     |                           |                  |                       |
| 2   | penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana | Petugas di masing-masing prov& kab/kota.                     | Setiap prov &kab/kota  | Tersedia rencana kedaruratan bidang kesehatan di kab/kota                                 |                   | APBN                         |         | PPK Kementerian Kesehatan |                  |                       |
| <b>PRIORITAS: PENINGKATAN KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA PADA SEMUA TINGKATAN MASYARAKAT</b> |  |  |                        |   |                   |                              |         |                           |                  |                       |
| <b>PROGRAM F : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>             |  |  |                        |   |                   |                              |         |                           |                  |                       |
| 1   | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat                    | Masyarakat dan petugas di masing-masing prov & Kab/Kota      | Setiap prov & kab/kota | Adanya kepedulian masyarakat terhadap ancaman potensi bencana                             |                   | APBN                         |         | PPK Kementerian Kesehatan |                  |                       |
| 2   | perencanaan partisipatif penanggulangan bencana                        | Petugas di masing-masing prov& kab/kota                      | Setiap prov & kab/kota | Adanya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana                          |                   | APBN                         |         | PPK Kementerian Kesehatan |                  |                       |
| 3   | peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana            | Petugas di masing-masing prov & kab/kota                     | Setiap prov & Kab/Kota | Adanya komitmen kesepakatan dalam upaya penanggulangan bencana bidang kesehatan           |                   | APBN                         |         | PPK Kementerian Kesehatan |                  |                       |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>  |  |  |                        |   |                   |                              |         |                           |                  |                       |
| 1   | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan an risiko bencana     | Instansi kesehatan di masing-masing prov&kab/kota.           | Setiap prov &kab/kota  | Terbentuknya pola penanggulangan bencana yang sistematis sesuai dengan jenis bencana      |                   | APBN                         |         | PPK Kementerian Kesehatan |                  |                       |
| 2   | penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan an kedaruratan bencana  | Instansi kesehatan dan masyarakat di masing-masing kab/kota. | Setiap prov &kab/kota  | Meningkatnya keterpaduan antar instansi dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana |                   | APBN                         |         | PPK Kementerian Kesehatan |                  |                       |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  |                        | Lokasi   |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan          | Pelaksana / Koordinator   |
|---|--|--|------------------------|----------|----------|---|------------------------------|---------|---------|---------------------------|---|
|   |  | (3)  | (3)                    | Propinsi | Kab/Kota |   | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                           |   |
| (1)   | (2)  |  |                        | (4)      | (4)      | (5)   | (6)                          | (6)     | (7)     | (8)                       |   |
| 3   | pengorganisasi-an, pemasaan, dan pengujian sistem peringatan                               | Instansi kesehatan dan masyarakat di masing-masing kab/kota. | Setiap prov & kab/kota |          |          | Meningkatnya kemampuan petugas dan masyarakat dalam merespons bencana yang terjadi    |                              |         | APBN    | PPK Kementerian Kesehatan |   |
| 7   | penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana | Instansi kesehatan di masing-masing kab/kota.                | Setiap prov & kab/kota |          |          | Adanya peningkatan kualitas respon tanggap darurat dalam upaya penanggulangan bencana |                              |         | APBN    | PPK Kementerian Kesehatan |   |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   |  |  |                        |          |          |   |                              |         |         |                           |   |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |  |  |                        |          |          |   |                              |         |         |                           |   |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |  |  |                        |          |          |   |                              |         |         |                           |   |
| 4   | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana  | Daerah yang rawan terhadap risiko bencana                    | Provinsi               |          |          | tersebar nya informasi tentang peringatan dini bencana                                | 2,500                        | 2,500   | 3,000   | APBN                      | Kem. Kominfo, Direktorat Sarana Teknologi Komunikasi, Ditjen SKDI |

| No<br>(1)  | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja<br>(5)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8)  |
|--|--|--|----------|----------|--|------------------------------|---------|---------|---|
|  |  |  | Propinsi | Kab/kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |   |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b><br><b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b><br><b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b> |  |  |          |          |  |                              |         |         |   |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya                            | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jakarta  |          | Tersedianya organisasi direktorat khusus yang menangani keselamatan dengan kewenangan yang dapat menjamin ketaatan (operator sarana dan prasarana) terhadap regulasi perkeretaapian yang berlaku | 800                          | -       | -       | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|  | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera  |          |          | Terbentuknya unit pengawasan/inspektor untuk pencegahan bencana pada masing-masing Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian  | 1,000                        | 1,000   | 1,000   | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|  | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Banten<br>Jabar<br>Sumut<br>NAD<br>Sumbang<br>Sumsel   |          |          | Tersedianya unit pelaksana teknis dalam pembinaan teknis serta pengawasan dan penegakan hukum di daerah  | -                            | 500     | -       | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|  | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera  |          |          | Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian prasarana perkeretaapian di daerah   | -                            | 500     | -       | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian              |
|  | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera  |          |          | Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian sarana perkeretaapian di daerah  | -                            | 500     | -       | Dephub, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian           |

| No   | Kegiatan   | Sasaran  |                   | Lokasi            |     | Indikator Kinerja  |     |     | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |       | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-----|--|-----|-----|------------------------------|-------|------------------|---|
|  |  | (3)  | (3)               | (4)               | (4) | (5)  | (5) | (6) | (6)                          | (7)   |                  |   |
| (1)  | (2)  | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana | Jawa dan Sumatera | Jawa dan Sumatera | (4) | (5)  | (5) | (6) | (6)                          | (7)   | (7)              | (8)   |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |  |                   |                   |     |  |     |     |                              |       |                  |   |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan | Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana                  | Jakarta           | Jakarta           |     | Tersedianya Peraturan Menteri tentang standar keselamatan perkeretaapian nasional  | 400 | -   | -                            | -     | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|  |  | Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana                  | Jakarta           | Jakarta           |     | Tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman audit keselamatan sarana dan prasarana KA                                    | 400 | -   | -                            | -     | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|  |  | Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana                  | Jakarta           | Jakarta           |     | Tersedianya peraturan tentang pedoman penelitian, pemeriksaan dan penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana | 400 | -   | -                            | -     | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |  |                   |                   |     |  |     |     |                              |       |                  |   |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |  |                   |                   |     |  |     |     |                              |       |                  |   |
| 1  | pengembangan budaya sadar bencana                        | Meningkatnya upaya pengembangan budaya keselamatan dan ketahanan                             | Jawa dan Sumatera | Jawa dan Sumatera |     | Terlaksananya Safety Management System secara berkelanjutan  | -   | -   | -                            | 1,500 | APBN             | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |

| No | Kegiatan<br>(1)  | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)  | Lokasi<br>(4) |          | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8)  |
|----|--|--|---|---------------|----------|---|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|---|
|    |  |  |   | Propinsi      | Kab/kota |   | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |   |
| 2  | pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana | Meningkatnya pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi prasarana KA pada lokasi rawan bencana   | Jawa dan Sumatera   |               |          | Terlaksananya pemeriksaan jalan rel, jembatan dan terowongan 2-3 kali setahun                                   | 1,000                               | 1,000   | 1,000   | APBN                       | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian              |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan                  | Kepala Bandar Udara dan personil Bandar udara siap menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor dll) baik dalam rangka evakuasi korban maupun distribusi bantuan | Semua bandara yang termasuk kategori daerah rawan bencana |               |          | Terlaksananya koordinasi dan kesiapan pengelola bandar udara ketika terjadi bencana alam                        | 300                                 | 300     | 300     | APBN                       | Kem. Perhubungan  |
|    |  | Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana   | Jawa dan Sumatera   |               |          | Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian SDM perkeretaapian di daerah  | 300                                 | -       | -       | APBN                       | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |
|    |  | Peningkatan budaya keselamatan di masyarakat dan operator kereta api   | Jawa dan Sumatera   |               |          | Terlaksananya pendidikan keselamatan kepada masyarakat, awak sarana dan petugas operasi dan perawatan prasarana | 1,000                               | 1,000   | 1,000   | APBN                       | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |



| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)  |                   | Lokasi<br>(4)  |         | Indikator Kinerja<br>(5)   |       |       | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |      | Sumber<br>Pendanaan<br>(7)  | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|---|--|---|-------------------|--|---------|--|-------|-------|-------------------------------------|------|---|----------------------------------|
|   |  | Propinsi  | Kab/Kota          | Th 2010  | Th 2011 | Th 2012  |       |       |                                     |      |   |                                  |
|   |  | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana khususnya pada keselamatan dan keamanan perjalanan KA | Jawa dan Sumatera |  |         | Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan pada masing-masing wilayah Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian | 5,000 | 5,000 | 5,000                               | APBN | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana & Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian |                                  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b> |  |   |                   |  |         |  |       |       |                                     |      |   |                                  |
| <b>PROGRAM D.: PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                  |  |   |                   |  |         |  |       |       |                                     |      |   |                                  |
| 1   | pengenalan dan pemantauan risiko bencana                               | Mengetahui penyebab kecelakaan dan pembuatan kesimpulan untuk membuat rekomendasi mengenai hal-hal pencegahan               | Jawa dan Sumatera |  |         | Tersusunnya laporan penelitian termasuk database terkait kecelakaan akibat bencana                       | 400   | 400   | 400                                 | APBN | Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian                               |                                  |
| 2   | penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana | Mengurangi penyebab risiko bencana longsor  | Jabar Jateng      | <b>2010</b> : Sta. Garahan.<br><b>2012</b> : Cianjur - Padalarang; Purwokerto Kroya. |         | Prasarana KA siap dan aman operasi   | 1,000 | -     | 3,500                               | APBN | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian  |                                  |
|   |  | Mencegah faktor penyebab kerusakan terhadap konstruksi terowongan   | Jabar             | Terowongan Lampegan lintas Sukabumi - Cianjur  |         | Prasarana KA siap dan aman operasi   | 1,000 | -     | -                                   | APBN | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian  |                                  |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2)                  | Sasaran<br>(3)   | Lokasi<br>(4)  |  | Indikator Kinerja<br>(5)                                      | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |         |         | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8)  |
|-----------|----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|---|
|           |                                  |  | Propinsi   | Kab/kota   |   | Th 2010                             | Th 2011 | Th 2012 |                            |   |
|           |                                  | Mengurangi penyebab risiko bencana akibat gerusan air/dasar sungai                                   | Jabar<br>Jateng<br>Jatim   | 2010 : Soka - Kebumen;<br>Primbon - Butuh;<br>Telawah - Karangsono;<br>Gundih - Surabaya;<br>Cikampek - Padalarang.<br>2012 : Cirebon - Kroya. | Pencegahan terhadap bencana akibat gerusan air/dasar sungai   | 34,500                              | -       | 3,500   | APBN                       | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Teknik<br>Prasarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |
|           |                                  | Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut                        |  |  |   | 87,000                              | 0       | 0       | APBN                       | Kem. Perhubungan,<br>Ditjen Hubla   |
|           |                                  | Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien | Jumlah kebutuhan rehabilitasi faspel terhadap kebutuhan rehabilitasi secara nasional |  |   | 26,300                              | 0       | 0       | APBN                       | Kem. Perhubungan,<br>Ditjen Hubla   |
|           |                                  | Memperbaiki Fasilitas Pelabuhan yang rusak akibat gempa  | Jumlah rehabilitasi dermaga yang dibangun terhadap jumlah dermaga yang terkena gempa |  | Saukorem Prov. Papua Barat                                    | 10,000                              | 0       | 0       | APBN                       | Kem. Perhubungan,<br>Kampel Oransbari   |
| 8         | pembangunan sarana dan prasarana | Meningkatnya pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi faktor penyebab risiko bencana       | Jawa dan Sumatera  |  | Tersedianya SIM terkait prasarana KA yang akurat dan mutakhir | 2,000                               | 2,000   | 2,000   | APBN                       | Kem. Perhubungan,<br>Direktorat Teknik<br>Prasarana, Ditjen<br>Perkeretaapian |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   |  | Lokasi<br>(4)  |                                    | Indikator Kinerja<br>(5) | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |        |      | Sumber<br>Pendanaan<br>(7)   | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|--|--|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------|--|----------------------------------|
|           |                 | Propinsi   | Kab/Kota   | Th 2010  | Th 2011                            |                          | Th 2012                             |        |      |  |                                  |
|           |                 | Meningkatnya kelancaran operasi perjalanan KA  | Jawa Tengah  | 2010 : Brumbung - Tegowanu; Kaliwungu - Kalibodri; Sta. Semarang Tawang; Jerakah - Kaliwungu; Kaliwungu - Kalibodri; Sragen - Masaran. | Prasarana KA siap dan aman operasi | 35,000                   | 41,000                              | 37,000 | APBN | Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian |                                  |
|           |                 | Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut  | Jumlah kebutuhan kapal patroli per luasan wilayah keamanan |  |                                    | 276,600                  | 0                                   | 0      | APBN | Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla                                       |                                  |
|           |                 | Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut  | Jumlah kapal marine surveyor per luasan wilayah pelayanan  |  |                                    | 4,100                    | 0                                   | 0      | APBN | Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla                                       |                                  |
|           |                 | Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut | Jumlah kecukupan dan keandalan SBNP per wilayah pelayanan  |  |                                    | 99,000                   | 0                                   | 0      | APBN | Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla                                       |                                  |

| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)                                     | Sasaran<br>(3)                                   |   | Lokasi<br>(4)  |   | Indikator Kinerja<br>(5) | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |                  |                  | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|---|---|--|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |   |  |   | Propinsi   | Kab/kota  |                          | Th 2010                             | Th 2011          | Th 2012          |                            |                                  |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada semua tingkatan masyarakat</b> |   |  |   |  |   |                          |                                     |                  |                  |                            |                                  |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>  |   |  |   |  |   |                          |                                     |                  |                  |                            |                                  |
| 6   | penyiapan lokasi evakuasi kelas F70 / Hercules C130 | Mampu didarati pesawat kelas F70 / Hercules C130 | Sumut<br>NTT<br>NAD<br>Bengkulu<br>Maluku<br>Papua<br>Sulteng<br>Maluku Utara<br>Sulawesi Utara | Lasondre - Nias Selatan (Pulau-pulau Batu)<br>Komodo - Labuhan Bajo<br>Tardamu - Sabu<br>Nias Selatan Baru<br>Kuala Batee - NAD<br>Teuku Cut Ali - NAD<br>Hamzah Fanzuri - Singkil<br>Muko-muko - Bengkulu<br>Gewayantana -<br>Larantuka<br>Namrole - Buru<br>Emalamo - Sula<br>Dobo - Kepulauan Aru<br>Tual Baru - Malra<br>S.<br>Condronegoro - Serui<br>Tojo Una-una - Ampana<br>Wai Oti - Maumere<br>Wonopito - Lembata<br>Baru<br>Bula - Seram Bagian<br>Timur<br>Namlea - Buru<br>Falabisahaya Mangole -<br>Taliabu<br>Numfor - Biak Numfor<br>Muting - Papua<br>Sarmi - Papua<br>Miangas - Sulawesi | Kemampuan bandara untuk didarati pesawat kelas F-70/Hercules C-130 dalam rangka evakuasi dan penanganan bencana | 615,500                  | 1,366,171                           | 1,366,171        | APBN/APBD        | Kem. Perhubungan           |                                  |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>                                   |   |  |   |  |   |                          | <b>1,203,000</b>                    | <b>1,419,871</b> | <b>1,422,371</b> |                            |                                  |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   |             | Lokasi | Indikator Kinerja  |              | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |        | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator  |
|--|--|---|-------------|--------|--|--------------|------------------------------|--------|------------------|--|
|  |  | (3)   | (4)         |        | Th 2010  | Th 2011      | Th 2012                      | (7)    |                  |  |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)         | (5)    | (6)  | (7)          | (8)                          |        |                  |  |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PERTANIAN</b>   |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>     |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| 3  | Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana                         | Minimalisasi gangguan DFI                               | 33 Prop.    |        | Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)                              | APBN         |                              |        |                  | Kementerian Pertanian  |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| 3  | penyelenggara an pengetahuan dan kemampuan SDM penyuluhan, dan pelatihan | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM perlindungan | 33 Prop.    |        | SDM Perlindungan mampu melakukan analisis DFI                                    | APBN         |                              |        |                  | Kementerian Pertanian  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| 1  | pengenalan dan pemantauan risiko bencana                                 | Minimalisasi gangguan DFI                               | 33 Prop.    |        | Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)                              | APBN         |                              |        |                  | Kementerian Pertanian  |
| 6  | pengelolaan lingkungan hidup   | Terwujudnya upaya konservasi air untuk pertanian        | 33 Propinsi |        | Tersedianya embung 1.969 unit; Dam Parit 1.646 unit dan Sumur Resapan 7.000 unit | 113,700 APBN | 106,400                      | 95,650 |                  | Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>    |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>   |  |   |             |        |  |              |                              |        |                  |  |
| 4  | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana                      | Minimalisasi gangguan DFI                               | 33 Prop.    |        | Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)                              | APBN         |                              |        |                  | Kementerian Pertanian  |

| No  | Kegiatan   | Sasaran   | Lokasi                        |   | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                |                | Sumber Pendanaan | Pelaksana/Koordinator  |
|---|--|---|-------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
|   |  |   | Propinsi                      | Kab/kota  |   | Th 2010                      | Th 2011        | Th 2012        |                  |  |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)                           | (5)   | (6)   | (6)                          | (6)            | (7)            | (8)              |  |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b> |  |   |                               |   |   |                              |                |                |                  |  |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>           |  |   |                               |   |   |                              |                |                |                  |  |
| 2   | perencanaan partisipatif penanggulangan bencana                              | Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air/ kelompok tani                        | 33 Propinsi                   |   | Terselenggaranya sekolah lapang iklim untuk P3A 720 unit.   | 4,000                        | 6,500          | 7,500          | APBN             | Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA |
| 4   | penguatan ketahanan sosial masyarakat  | Berkembangnya sumber air alternatif skala kecil untuk pertanian                               | 18 Propinsi                   |   | Tersedianya 7.208 unit pompa air  | 91,600                       | 96,080         | 100,640        | APBN             | Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>  |  |   |                               |   |   |                              |                |                |                  |  |
| 1   | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan an risiko bencana           | Tersedianya acuan analisis dan mitigasi DFI   | 33 Prop.                      |   | Jml. Luas Pertanian yang terkena gangguan DFI (ha)  |                              |                |                | APBN             | Kementerian Pertanian  |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PERTANIAN</b>                                     |  |   |                               |   |   | <b>191,250</b>               | <b>208,980</b> | <b>221,840</b> |                  |  |
| <b>Matrik RAN-PRB 2010-2012, Kementerian Pekerjaan Umum</b>                             |  |   |                               |   |   |                              |                |                |                  |  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>                     |  |   |                               |   |   |                              |                |                |                  |  |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                                      |  |   |                               |   |   |                              |                |                |                  |  |
| 2   | penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan an bencana    | Melindungi dan memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan agar tidak rentan terhadap bencana | Tersebar di seluruh Indonesia |   | Tersedianya Bronjong untuk mengantisipasi longsoran   | 1,500                        | 3,600          | 4,900          | APBN             | Kem. PU, Ditjen Bina Marga                                     |
| 3   | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau bencana | Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.                                      | Maluku utara NTT              | Kota Tuai, Kota Ternate & Tidore, Kota Kalabahi (Alor). | Tersedianya Jembatan Darurat (Balley) untuk memperlancar arus transportasi dalam keadaan darurat.     | 8,000                        | 16,000         | 36,000         | APBN             | Kem. PU, Ditjen Bina Marga                                     |
| 4   | melakukan kontrol terhadap penguasaan  | Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.                                      | Papua Barat                   | Manokwari   | Tersosialisasinya kawasan rawan bencana tsunami, serta upaya untuk menghindari dari bencana sekunder. | 2,000                        | -              | -              | APBN             | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,                                |
| 4   | melakukan kontrol terhadap penguasaan  | Teridentifikasi gejala bencana secara dini sebelum menimbulkan bencana.                       | Tersebar di seluruh Indonesia |   | Tersedianya Alat DRU (Disaster Relief Unit) untuk mengantisipasi terjadinya bencana.                  | 110,000                      | 140,000        | 160,000        | APBN             | Kem. PU, Ditjen Bina Marga                                     |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi  |                        | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |           |           | Sumber Pendanaan                | Pelaksana / Koordinator |
|-----|--|--|---|------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
|     |  |  | Propinsi  | Kab/Kota               |  | Th 2010                      | Th 2011   | Th 2012   |                                 |                         |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (4)                    | (5)  | (6)                          | (6)       | (7)       | (8)                             |                         |
|     | dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi | Terwujudnya sistem informasi (data dan peta) untuk kawasan rawan bencana di setiap Propinsi dan Kabupaten.               | Wilayah Jawa dan Bali.                                |                        | Sistem Informasi basis data dan peta micro-zonasi.                         | 1,000                        | -         | -         | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |                         |
| 5   | Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang      | Tersedianya pengembangan sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dengan remote sensing                             | Wilayah Jawa dan Bali.                                |                        | Sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dan terkait risiko bencana.  | 1,000                        | -         | -         | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |                         |
| 6   | pengelolaan lingkungan hidup                     | Tersedianya strategi dan program pemulihan fungsi lahan Kawasan Lindung Dataran Dieng                                    | Jawa Tengah   | Kawasan Dataran Dieng. | Sistem Pemantauan risiko bencana dan program pemulihan.                    | 750                          | -         | -         | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |                         |
| 7   | pengaturan pembangunan dan tata bangunan         | Pengurangan risiko dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tektonik.  | NIT<br>Maluku<br>Maluku Utara<br>Papua<br>Papua Barat |                        | Berkurangnya dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ditimbulkan gempa. | 15,500                       | -         | -         | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |                         |
| 8   | pembangunan sarana dan prasarana                 | Pembangunan pengendali banjir untuk membebaskan daerah dari banjir seluas 350.000 Ha.                                    | Tersebar di seluruh Indonesia                         |                        | Terlindungnya daerah permukiman dari banjir seluas 350.000 Ha              | 3,800,000                    | 4,000,000 | 4,500,000 | Kem. PU, Ditjen SDA             |                         |
|     |  | Pembangunan pengendali lahar gunung berapi untuk membebaskan daerah permukiman dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha. | DIY<br>Jateng<br>Jatim                                |                        | Terlindungnya daerah permukiman dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha   | 180,000                      | 100,000   | 120,000   | Kem. PU, Ditjen SDA             |                         |
|     |  | Penanganan longsoran tebing  | Tersebar di seluruh Indonesia                         |                        | Terlindungnya lalu lintas dari Longsoran tebing                            | 30,000                       | 36,000    | 44,250    | Kem. PU, Ditjen Bina Marga      |                         |
|     |  | Memperkuat badan jalan dari longsor.   | Tersebar di seluruh Indonesia                         |                        | Terlindungnya Badan Jalan dari longsor.                                    | 500                          | 4,400     | 4,850     | Kem. PU, Ditjen Bina Marga      |                         |

| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Lokasi                 |          | Indikator Kinerja                               | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |                  |                  | Sumber Pendanaan                | Pelaksana/<br>Koordinator |
|---|---|--|------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |   |  | Propinsi               | Kab/kota |   | Th 2010                      | Th 2011          | Th 2012          |                                 |                           |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)                    | (4)      | (5)   | (6)                          | (6)              | (7)              | (8)                             |                           |
|   |   | Tersedianya peralatan (IPA Mobile, Pipa, Hidran Umum, Pompa, Mobil Tanki untuk penanganan darurat bidang air minum dan air limbah.                         | Kantor Pusat (Dep. PU) |          | Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi. | 15,000                       | 15,000           | 15,000 APBN      | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya     |                           |
|   |   | Tersedianya peralatan (WC, Knock Down, MK Mobile, Alat Berat, Pompa Banjir, Pompa lumpur untuk penanganan darurat bidang penyehatan lingkungan permukiman. | Kantor Pusat (Dep. PU) |          | Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi. | 12,000                       | 12,000           | 12,000 APBN      | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya     |                           |
|   |   | Tersedianya peralatan (tenda keluarga, hunian darurat untuk penanganan darurat bidang perumahan dan permukiman.  | Kantor Pusat (Dep. PU) |          | Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi. | 12,000                       | 12,000           | 12,000 APBN      | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya     |                           |
|   |   | Terbentuknya Satgas penanggulangan darurat dan pelatihan tenaga Satgas bidang Cipta Karya  | Kantor Pusat (Dep. PU) |          | Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi. | 1,500                        | 1,500            | 1,500 APBN       | Kem. PU, Ditjen Cipta Karya     |                           |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |   |  |                        |          |   |                              |                  |                  |                                 |                           |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |   |  |                        |          |   |                              |                  |                  |                                 |                           |
| 4   | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana | Tersedianya panduan dan petunjuk teknis pengurangan risiko bencana.  | Wilayah Jawa dan Bali. |          | Penyebarluasan Panduan dan petunjuk teknis.     | 1,000                        | -                | - APBN           | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |                           |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>                         |   |  |                        |          |   |                              |                  |                  |                                 |                           |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>                                   |   |  |                        |          |   |                              |                  |                  |                                 |                           |
| 2   | perencanaan partisipatif penanggulangan bencana     | Tersedianya model pelibatan masyarakat dalam menghadapi bencana.   | Wilayah Jawa dan Bali. |          | Model dan program pelibatan masyarakat.         | 1,000                        |                  | APBN             | Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang, |                           |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM</b>  |   |  |                        |          |   | <b>4,199,750</b>             | <b>4,340,500</b> | <b>4,910,500</b> |                                 |                           |



| No   | Kegiatan  | Sasaran   |          | Lokasi  | Indikator Kinerja |            |            | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |   | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|--|---|---|----------|---|-------------------|------------|------------|------------------------------|---|------------------|-------------------------|
|  |   | Propinsi  | Kab/Kota |   | Th 2010           | Th 2011    | Th 2012    | Th 2010                      | Th 2011   |                  |                         |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)      | (5)   | (6)               | (7)        | (8)        | (9)                          | (10)  | (11)             | (12)                    |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN SOSIAL</b>  |   |   |          |   |                   |            |            |                              |   |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |   |   |          |   |                   |            |            |                              |   |                  |                         |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                   |   |   |          |   |                   |            |            |                              |   |                  |                         |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | 33 Prov   | 33 prov  | Terselenggaranya Kegiatan dekonstruksi ditujukan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam bidang bantuan sosial sebagai upaya pengurangan risiko bencana fokus kegiatan yang bersifat non fisik seperti pelatihan SDM penanggulangan Bencana (TAGANA), Pelatihan Kemampuan Evakuasi Korban Bencana, Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Logistik bagi Korban Bencana. Sedangkan Tugas Pembantuan difokuskan pada kegiatan bantuan yang bersifat fisik, seperti bantuan lauk-pauk dan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana. | 98,137.39         | 117,764.87 | 141,317.84 | APBN                         | Kem. Sosial, Dinas Sosial/Kesos/Institusi Sosial Provinsi terkait |                  |                         |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |   |   |          |   |                   |            |            |                              |   |                  |                         |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan          | 2 kegiatan (Penyusunan Pedoman dan Perencanaan Program) | Jakarta  | Terselenggaranya kegiatan penyusunan perencanaan program dan buku pedoman yang terfokus pada Program Utama Depsos dalam sistem PB Nasional yaitu : “CCBDM” (Community Centre Based Disaster Management) atau penanggulangan bencana terpadu yang berbasis masyarakat dengan tujuan Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat secara terpadu agar lebih siapsiaga untuk menghadapi bencana yang akan datang melalui proses early warning system, rapid response dan social recovery  | 3,744.28          | 4,493.14   | 5,391.77   | APBN                         | Kem. Sosial   |                  |                         |

| No<br>(1)  | Kegiatan<br>(2)                                       | Sasaran<br>(3) |                       | Lokasi<br>(4)    |                    | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |          | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |                            |
|--|---|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  |   | Propinsi       | Kab/kota              | Th 2010          | Th 2011<br>Th 2012 |   |                                     |          |                            |                                  |                            |
| <b>PRIORITAS : PEMANFAATAN PENGETAHUAN , INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |   |                |                       |                  |                    |   |                                     |          |                            |                                  |                            |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN , PENDIDIKAN , DAN PELATIHAN</b>   |   |                |                       |                  |                    |   |                                     |          |                            |                                  |                            |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan | 40 angk        | berasal dari masy. an | Jakarta<br>Jabar |                    | Terselenggaranya kegiatan ini yang da   | 6,328.59                            | 7,594.31 | 9,113.17                   | APBN                             | Kem. Sosial                |
| <b>PRIORITAS : PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>   |   |                |                       |                  |                    |   |                                     |          |                            |                                  |                            |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |   |                |                       |                  |                    |   |                                     |          |                            |                                  |                            |
| 8  | pembangunan sarana dan prasarana                      | 33 Prov        |                       | 33 prov          |                    | Kegiatan bantuan stimulan Terselenggara   | 31,600                              | 37,920   | 45,504                     | APBN                             | Kem. Sosial                |
| <b>PRIORITAS : IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>     |   |                |                       |                  |                    |   |                                     |          |                            |                                  |                            |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>   |   |                |                       |                  |                    |   |                                     |          |                            |                                  |                            |
| 4  | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana   | 33 Prov        |                       | 33 prov          |                    | Terselenggaranya kegiatan studi kebijakan sehingga dapat terpetakan dan terdeteksinya daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi sebagai langkah antisipasi dan terselenggaranya kegiatan kampung Siaga Bencana (KSB) | 4,891.67                            | 5,625.42 | 6,750.50                   | APBN                             | Kem. Sosial, dan Akademisi |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   |   | Lokasi |     | Indikator Kinerja   |            |            | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |      |                      | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|--|--|---|---|--------|-----|---|------------|------------|------------------------------|------|----------------------|------------------|-------------------------|
|  |  | (1)   | (2)                                     | (3)    | (4) | (5)   | (6)        | (7)        | (8)                          | (9)  | (10)                 |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>                        |  |   |   |        |     |   |            |            |                              |      |                      |                  |                         |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>   |  |   |   |        |     |   |            |            |                              |      |                      |                  |                         |
| 4  | penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar      | 33 pro dan Kab/kota rawan bencana   | 33 prov dan Kab/kota rawan bencana      |        |     | Terselenggaranya kegiatan darurat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan sarana pendukungnya sehingga bantuan tersebut dapat menjangkau korban bencana berupa; Bantuan darurat, bantuan evakuasi kit serta kenderaan siaga bencana merupakan komponen kesiapsiagaan yang telah disiapkan di gudang provinsi melalui Dinas Sosial/Kesos/Institusi Sosial terkait. Khusus untuk bantuan beras dan mie instan mekanisme penyerahan bantuan melalui sistem D.O (Delivery Order) | 126,395.99 | 151,675.19 | 182,010.23                   | APBN | Kem. Sosial          |                  |                         |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN SOSIAL 271,097.93 325,072.93 390,088</b>                                 |  |   |   |        |     |   |            |            |                              |      |                      |                  |                         |
| <b>Matrik RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN ESDM</b>  |  |   |   |        |     |   |            |            |                              |      |                      |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |  |   |   |        |     |   |            |            |                              |      |                      |                  |                         |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |  |   |   |        |     |   |            |            |                              |      |                      |                  |                         |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana                        |   |   |        |     |   | 1,022      | 1,175      | 1,351                        | APBN | Badan Geologi, KESDM |                  |                         |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan | Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi untuk memudahkan Pemerintah Daerah apabila terjadi bencana | Jatim Sulut Sumbang Jabar Jateng        |        |     | Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi yang dapat diakrifkan untuk tanggap darurat bencana geologi bagi Pemerintah Daerah   | 703        | 808        | 929                          | APBN | Badan Geologi, KESDM |                  |                         |
|  |  | Meningkatnya Ketahanan dan Pengetahuan Masyarakat/Lembaga mengenai Kebencanaan Geologi            | Jabar Jateng Masyarakat/Lembaga Sumbang |        |     |   |            |            |                              | APBN | Badan Geologi, KESDM |                  |                         |

| No   | Kegiatan   | Sasaran   |   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja  |       |       | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         | Sumber Pendanaan     | Pelaksana/Koordinator |
|--|--|---|---|----------|----------|--|-------|-------|------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
|  |  | (3)   |   | Propinsi | Kab/kota | (5)  |       |       | Th 2010                      | Th 2011 |                      |                       |
| (1)  | (2)  | (6)   |   |          |          |  |       |       |                              |         |                      |                       |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |   |   |          |          |  |       |       |                              |         |                      |                       |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>  |  |   |   |          |          |  |       |       |                              |         |                      |                       |
| 3  | penyelinggaran pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan                                 | Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana   | Jabar<br>Jateng<br>Jatim<br>Sumbar                                  |          |          | Peningkatan Prosentasi kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana Geologi            |       |       |                              |         | APBN                 | Badan Geologi, KESDM  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |  |   |   |          |          |  |       |       |                              |         |                      |                       |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |   |   |          |          |  |       |       |                              |         |                      |                       |
| 1  | pengenalannya pemantauan risiko bencana  | Terpantaunya Tingkat Aktivitas Gununggapi secara menerus  | Seluruh Wilayah Indonesia   |          |          | Jumlah Terpantaunya tingkat aktivitas Gununggapi per tahun                             | 1,266 | 1,456 | 1,675                        | APBN    | Badan Geologi, KESDM |                       |
| 3  | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana | Peningkatan Kualitas pemantauan Gununggapi  | Seluruh Wilayah Indonesia   |          |          | Jumlah Terpantaunya tingkat aktivitas Gununggapi per tahun                             | 1,907 | 2,193 | 2,522                        | APBN    | Badan Geologi, KESDM |                       |
|  |  | Terseadinya informasi Kawasan Rawan Bencana Gununggapi, Gempabumi, Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah | KRB Gununggapi: NTT<br>Maluku<br>Lampung<br>Jabar<br>Jatim<br>Sumut |          |          | Tersedianya Peta KRB Gununggapi Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah sejumlah 27 Peta |       |       |                              |         | Badan Geologi, KESDM |                       |
|  |  | Gerakan tanah: Bengkulu<br>Jambi<br>NTT<br>Sulut<br>Sulteng<br>Sumsel<br>Jateng<br>Sumut<br>NAD<br>Sumbar     |   |          |          |  |       |       |                              |         |                      |                       |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)   |          | Lokasi<br>(4)  |         | Indikator Kinerja<br>(5)  |         |         | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |       |       | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|--|----------|--|---------|---|---------|---------|-------------------------------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------------|
|           |                 | Propinsi   | Kab/Kota | Th 2010  | Th 2011 | Th 2012   | Th 2010 | Th 2011 | Th 2012                             |       |       |                            |                                  |
|           |                 | Gempabumi:<br>NTB<br>Bali<br>Jabar<br>Jatim<br>Lampung<br>Jateng<br>Sulsel<br>Sulut<br>Bengkulu<br>Jabar                             |          |  |         |   |         |         |                                     |       |       |                            |                                  |
|           |                 | Tsunami:<br>Banten<br>Jateng<br>Jatim<br>Sulut<br>Sulsel<br>Bengkulu<br>Lampung<br>Sultra<br>Bali                                    |          |  |         |   |         |         |                                     |       |       |                            |                                  |
|           |                 | Tersedianya informasi<br>Analisa Risiko Gunungapi,<br>Gempabumi, Tsunami, dan<br>Gerakan Tanah untuk<br>penyusunan Tata Ruang<br>NIT |          | Banten<br>Jateng<br>Jatim<br>Lampung<br>Sumbang<br>NIT |         | Tersedianya Peta KRB Gunungapi<br>Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan<br>Tanah sejumlah 27 Peta |         |         | 1,907                               | 2,193 | 2,522 | APBN                       | Badan Geologi,<br>KESDM          |
|           |                 | Tersedianya informasi<br>Prakiraan Kejadian<br>Gerakan Tanah   |          | Seluruh Wilayah<br>Indonesia                           |         | Tersedianya Peta Prakiraan Kejadian<br>Gerakan Tanah sejumlah 396/Tahun                     |         |         | 24                                  | 24    | 24    | APBN                       | Badan Geologi,<br>KESDM          |

| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)  | Sasaran<br>(3)  |   | Lokasi<br>(4) |         | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |               | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |                         |
|---|--|---|---|---------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|   |  | Propinsi  | Kab/kota  | Th 2010       | Th 2011 |   | Th 2012                             |               |                            |                                  |                         |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |  |   |   |               |         |   |                                     |               |                            |                                  |                         |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |  |   |   |               |         |   |                                     |               |                            |                                  |                         |
| 1   | pengamatan<br>gejala<br>bencana  | Terpantaunya Tingkat<br>Aktivitas Gunungapi pada<br>level waspada                   | 10 Lokasi<br>(berdasarkan<br>data statistik)              |               |         | Jumlah Terpantaunya tingkat<br>aktivitas Gunungapi per tahun pada<br>level waspada                        | 971                                 | 1,117         | 1,285                      | APBN                             | Badan Geologi,<br>KESDM |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkat Masyarakat</b>                           |  |   |   |               |         |   |                                     |               |                            |                                  |                         |
| <b>PROGRAM F : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS Masyarakat Dalam PRB</b>                                   |  |   |   |               |         |   |                                     |               |                            |                                  |                         |
| 1   | Peningkatan<br>pemahaman<br>tentang<br>kerentanan<br>masyarakat  | Meningkatnya pemahaman<br>masyarakat/Lembaga<br>tentang mitigasi bencana<br>geologi | 14 Lokasi<br>berdasarkan<br>tingkat aktivitas<br>kegiatan |               |         | Peningkatan Prosentasi pemahaman<br>Masyarakat/Lembaga  | 1,050                               | 1,050         | 1,050                      | APBN                             | Badan Geologi,<br>KESDM |
|   | Meningkatnya<br>pengetahuan<br>Masyarakat/Lembaga<br>Penanganan Bencana<br>mengenai Kebencanaan<br>Geologi |   | -   |               |         | Tersedianya bahan untuk sosialisasi<br>dan peningkatan pengetahuan<br>masyarakat terhadap bencana geologi | 720                                 | 828           | 952                        | APBN                             | Badan Geologi,<br>KESDM |
|   | Meningkatnya pemahaman<br>masyarakat/Lembaga<br>tentang mitigasi bencana<br>geologi                        |   | 14 Lokasi<br>berdasarkan<br>tingkat aktivitas<br>kegiatan |               |         | Peningkatan Prosentasi pemahaman<br>Masyarakat/Lembaga  |                                     |               | APBN                       | APBN                             | Badan Geologi,<br>KESDM |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN ESDM</b>  |  |   |   |               |         |   | <b>9,569</b>                        | <b>10,843</b> | <b>12,309</b>              |                                  |                         |

| No<br>(1)   | Kegiatan<br>(2)                         | Sasaran<br>(3)   |  | Propinsi<br>(4)  | Lokasi<br>Kab/Kota<br>(5)   | Indikator Kinerja<br>(6)   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |              | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|---|---|--|--|--|---|--|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |   |  |  |  |   |  | Th 2010                      | Th 2011      |                            |                                  |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                     |   |  |  |  |   |  |                              |              |                            |                                  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>               |   |  |  |  |   |  |                              |              |                            |                                  |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                                |   |  |  |  |   |  |                              |              |                            |                                  |
| 6   | pengelolaan lingkungan hidup            | Pembangunan data tutupan lahan sebagai informasi dasar pengurangan bencana             |  | Seluruh kabupaten di Indonesia   |   | Data tutupan lahan dan kawasan lindung   | 1,600                        | 1,600        | 1,600 APBN                 | KLH                              |
|   |   | Pemulihan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang                         |  | NAD<br>Pantai Utara Jawa<br>Sulawesi Tengah dan Gorontalo  | Simeulue<br>Pantai Utara Jawa<br>Teluk Tomini   | Jumlah Demplot untuk Pemulihan Ekosistem   | 500                          | 500          | 500 APBN                   | KLH                              |
|   |   | Penanggulangan dampak kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di pesisir dan laut  |  | Riau   | Dumai   | Buku Pedoman   | 75                           | 75           | 75 APBN                    | KLH                              |
|   |   | Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan |  | Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan |   | Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan | 3,000                        | 3,000        | 3,000 APBN                 | KLH                              |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                        |   |  |  |  |   |  | <b>5,175</b>                 | <b>5,175</b> | <b>5,175</b>               |                                  |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b> |   |  |  |  |   |  |                              |              |                            |                                  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>               |   |  |  |  |   |  |                              |              |                            |                                  |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                                |   |  |  |  |   |  |                              |              |                            |                                  |
| 1   | pengenaln dan pemantauan risiko bencana | Pemahaman masyarakat dan ketertarikan lembaga keagamaan dalam menghadapi bencana       |  | NTT<br>SumBar<br>Bengkulu  | Manggarai, Manggarai Barat<br>Solok Selatan, Pesisir Selatan<br>Bengkulu Utara, Muko-Muko | Terbentuknya kelompok masyarakat siaga bencana dan peningkatan peran serta lembaga keagamaan   | 500                          | 500          | 500 APBN                   | KPDT                             |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi  |  | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |              |              | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator |
|---|--|--|---|--|---|------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------|
|   |  |  | Propinsi  | Kab/kota   |   | Th 2010                      | Th 2011      | Th 2012      |                  |                           |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                          | (8)          |              |                  |                           |
| 2   | penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana | Meminimalisir korban jiwa dan kerugian akibat bencana tanah longsor    | Jateng<br>NTT                                     | Banjarnegara,<br>Manggarai   | Berfungsinya peralatan early warning system   | 300                          | 400          | APBN         | KPDT             |                           |
| 6   | pengelolaan lingkungan hidup   | Kecukupan pangan, kesehatan masyarakat pada daerah rawan kekeringan    | Jateng<br>NTT<br>DIY                              | Banjarnegara, Belu,<br>Gunung Kidul                                | Terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat daerah rawan kekeringan                  | 250                          | 250          | APBN         | KPDT             |                           |
| 8   | pembangunan sarana dan prasarana                                       | Berkurangnya dampak abrasi pantai pada daerah pesisir dan lahan kritis | Sulsel<br>Gorontalo<br>Bengkulu<br>Sumatera Barat | Pinrang, Gorontalo,<br>Bulukumba, Bengkulu<br>Utara, Kep. Mentawai | Terbentuknya hutan-hutan mangrove di kawasan rawan abrasi                           | 110                          | 300          | APBN         | KPDT             |                           |
| 8   | pembangunan sarana dan prasarana                                       | Pencegahan bahaya yang ditimbulkan akibat tanah longsor                | NTT<br>SulBar                                     | Manggarai, Flores Timur<br>Polewali Mandar                         | Terbentuknya talud sebagai penahan bahaya tanah longsor                             | 500                          | 500          | APBN         | KPDT             |                           |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b> |  |  |   |  |   |                              |              |              |                  |                           |
| <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>           |  |  |   |  |   |                              |              |              |                  |                           |
| 4   | penguatan ketahanan sosial masyarakat                                  | Peningkatan ekonomi masyarakat pada daerah pasca bencana               | SulBar<br>SulBar<br>Maluku                        | Solo<br>Polewali Mandar<br>Maluku Tenggara Barat                   | Terbentuknya lahan usaha yang produktif guna menunjang pemulihan ekonomi masyarakat | 300                          | 500          | 500          | APBN             | KPDT                      |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b>          |  |  |   |  |   | <b>1,160</b>                 | <b>2,350</b> | <b>2,450</b> |                  |                           |



| No  | Kegiatan  | Sasaran   |                         | Lokasi |  | Indikator Kinerja |         |         | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |       | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|---|---|---|-------------------------|--------|--|-------------------|---------|---------|------------------------------|-------|------------------|-------------------------|
|   |   | Propinsi  | Kab/Kota                | (4)    | (5)  | Th 2010           | Th 2011 | Th 2012 | (6)                          | (7)   |                  |                         |
| (1)   | (2)   | (3)   | (3)                     | (4)    | (5)  | (6)               | (6)     | (7)     | (7)                          | (8)   | (8)              | (8)                     |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, LAPAN</b>  |   |   |                         |        |  |                   |         |         |                              |       |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |   |   |                         |        |  |                   |         |         |                              |       |                  |                         |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |   |   |                         |        |  |                   |         |         |                              |       |                  |                         |
| 1   | pengamatan gejala bencana                           | 1). Tersedianya informasi hotspot (harian)  | Sumatera dan Kalimantan |        | Informasi pemantauan hotspot, harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.  | 232.6             | 255     | 281     | APBN                         | LAPAN |                  |                         |
|   |   | 2). Tersedianya informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan/SPBK (harian)   | Sumatera dan Kalimantan |        | Informasi pemantauan SPBK harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.  |                   |         |         |                              |       |                  |                         |
|   |   | 3). Tersedianya informasi pemantauan daerah potensi banjir (harian)   | Indonesia               |        | Informasi pemantauan potensi banjir harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.  |                   |         |         |                              |       |                  |                         |
| 2   | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana  | 1). Tersedianya informasi hotspot (bulanan)   | Sumatera dan Kalimantan |        | Rekapitulasi hotspot yang dikirim dalam bentuk laporan bulanan pada instansi terkait   |                   |         |         | APBN                         | LAPAN |                  |                         |
|   |   | 2). Tersedianya informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan (bulanan)   | Sumatera dan Kalimantan |        | Rekapitulasi SPBK yang dikirim dalam bentuk laporan bulanan pada instansi terkait  |                   |         |         |                              |       |                  |                         |
|   |   | 3). Tersedianya informasi pemantauan daerah potensi banjir (bulanan)  | Indonesia               |        | Rekapitulasi kejadian banjir/longsor dan prediksi daerah banjir yang dikirim dalam bentuk laporan bulanan pada instansi terkait  |                   |         |         |                              |       |                  |                         |
| 4   | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana | Tersedianya sistem (baik hardware maupun software, an, da, at mendukung pengolahan data penginderaan jauh guna pemantauan bumi untuk mitigasi bencana | Indonesia               |        | Informasi pemantauan harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari. Sistem informasi pemantauan harian dan bulanan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis website. | 446.7             | 491     | 540     | APBN                         | LAPAN |                  |                         |

| No<br>(1)                           | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  | Lokasi   |          | Indikator Kinerja<br>(5) | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |              |              | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-------------------------------------|-----------------|---|----------|----------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                     |                 |   | Propinsi | Kab/kota |                          | Th 2010                      | Th 2011      | Th 2012      |                            |                                  |
|                                     |                 | Tersedianya informasi pemantauan cuaca dan iklim, sistem peringatan bahaya kebakaran, banjir/longsor, kekeringan, hotspot, dan ketersediaan pangan di website SIMBA                         |          |          |                          |                              |              |              |                            |                                  |
|                                     |                 | 3). Tersedianya informasi bencana alam lainnya, seperti: sebaran kabut asap, dampak letusan gunung api, dampak gempa bumi, dampak tsunami dan lain-lain di website SIMBA                    |          |          |                          |                              |              |              |                            |                                  |
|                                     |                 | Terlaksananya diseminasi informasi penginderaan jauh untuk mitigasi bencana alam melalui kerjasama antar dan inter lembaga dan instansi serta melalui website SIMBA - LAPAN dan media massa |          |          |                          |                              |              |              |                            |                                  |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB LAPAN</b> |                 |   |          |          |                          | <b>679.3</b>                 | <b>746.0</b> | <b>821.0</b> |                            |                                  |

| No   | Kegiatan  | Sasaran   |   | Lokasi | Indikator Kinerja   |         | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |       |                 | Sumber Pendanaan          | Pelaksana / Koordinator |
|--|---|---|---|--------|---|---------|------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
|  |   | Propinsi  | Kab/Kota  |        | Th 2010   | Th 2011 | Th 2012                      | (7)   | (8)             |                           |                         |
| (1)  | (2)   | (3)   |   | (4)    | (5)   |         | (6)                          |       |                 | (7)                       | (8)                     |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, LIPI</b>  |   |   |   |        |   |         |                              |       |                 |                           |                         |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan KELEMBAGAAN</b>     |   |   |   |        |   |         |                              |       |                 |                           |                         |
| <b>PROGRAM A : Penguatan PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>                                       |   |   |   |        |   |         |                              |       |                 |                           |                         |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | Penguatan kapasitas kepakaran multidisiplin di Perguruan tinggi, BPBD, lembaga riset terkait  | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu          |        | tersusun dan tersosialisasinya dokumen strategi penguatan kapasitas kepakaran dan SDM terkait PRB tingkat nasional dan daerah yang mendukung strategi PB nasional                                 | 500     | 1,000                        |       | - Bappenas/BNPB | LIPi, Puslit Oseanografi  |                         |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |   |   |   |        |   |         |                              |       |                 |                           |                         |
| 1  | Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana                         | 1. Karakteristik geologi dan daya dukung tektonikan tanah serta zonasi potensi likuifaksi   | Banten Bali   |        | Dipergunakannya peta zonasi likuifaksi oleh pemangku kepentingan  | 290     | 320                          | 350   | APBN            | LIPi, Puslit Geoteknologi |                         |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana                                 | 1. Konsep penyusunan tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana<br>2. Diketahuinya model prediksi penurunan dan amblesan<br>3. Diketahuinya parameter curah hujan sebagai pemicu longsor dan berkurangnya korban akibat bahaya tersebut | Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah       |        | Diterapkannya model/konsep penyusunan tata ruang berbasis mitigasi bencana<br>Diterapkannya konsep mitigasi thd penurunan dan amblesan<br>Berkurangnya korban dan kerugian akibat bencana longsor | 280     | 310                          | 340   | APBN            | LIPi, Puslit Geoteknologi |                         |
| 3  | Identifikasi tindakan .en_uran_risiko bencana                     | Penguatan kapasitas Peringatan Dini Bencana PDB, ada A, arat dan pelaku PRB   | Nasional Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu |        | Terlaksananya pelatihan serta penguatan kapasitas aparat dan . elaku PDB dalam PDB . an_ didukung_ perguruan tinggi dan lembaga pendidikan terkait daerah   | 1,500   | 3,000                        | 1,000 | Bappenas        | LIPi, Puslit Oseanografi  |                         |
| <b>PRIORITAS: Pemanfaatan PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |   |   |   |        |   |         |                              |       |                 |                           |                         |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |   |   |   |        |   |         |                              |       |                 |                           |                         |
| 1  | pengembangan budaya sadar bencana                                 | Didifusi Pembelajaran Kebencanaan di daerah berkenaan dampak  | NAD Jawa Tengah                                     |        | Kajian metode efektif dalam difusi pembelajaran kebencanaan   | 200     | 200                          |       | Bappenas        | LIPi, Puslit Oseanografi  |                         |

| No  | Kegiatan  | Sasaran   | Lokasi   |          | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator |
|-----|---|---|--|----------|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
|     |   |   | Propinsi   | Kab/kota |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                           |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  |          | (5)  | (6)                          |         |         | (7)              | (8)                       |
|     |   | <p>pemahaman bentuk kearifan lokal di masyarakat berisiko bencana</p> <p>Pendidikan Kebencanaan melalui Internet di Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset</p> <p>transliterasi sains ke materi pendidikan kreatif bagi masyarakat umum</p> | <p>Sulawesi NTT</p> <p>Seluruh Propinsi</p>                    |          | <p>Kajian pengalaman bencana serta kaitannya dalam pembentukan kearifan lokal</p> <p>Tersusunnya model pembelajaran E-learning</p> | 500                          | 500     | 500     | Bappenas         | LIPi, Puslit Oseanografi  |
|     |   | <p>Partisipasi pelaku PRB lembaga akademis dalam advokasi PRB</p>   | <p>Nasional NAD Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu</p> |          | <p>pengembangan alat peraga pendidikan PRB, media campaign</p>   | 800                          | 1.500   | 500     | Bappenas         | LIPi, Puslit Oseanografi  |
|     |   | <p>Partisipasi pelaku PRB lembaga akademis dalam advokasi PRB</p>   |  |          | <p>Penguatan jejaring, koordinasi dan komunikasi lembaga riset dan akademis tingkat nasional, regional/internasional</p>           | 500                          | 500     | 500     | Bappenas         | LIPi, Puslit Oseanografi  |
|     |   | <p>pameran nasional dan daerah oleh pelaku PRB bagi masyarakat umum</p>   | <p>Nasional NAD Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu</p> |          | <p>Terlaksananya pameran Siaga Bencana nasional dan daerah</p>   | 1.000                        | 1.300   | 500     | Bappenas         | LIPi, Puslit Oseanografi  |
| 2   | <p>pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana</p> | <p>1. Diketahuinya pola pergerakan dan deformasi kulit bumi berdasarkan pengukuran GPS serta diketahuinya karakteristik kegunaan</p>  | <p>Sumatra Barat Bengkulu Sumatera Utara NAD</p>               |          | <p>Diterapkannya konsep mitigasi thd pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami</p>   | 325                          | 355     | 385     | APBN             | LIPi, Puslit Geoteknologi |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  |          | Lokasi                                     | Indikator Kinerja |   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |       | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator  |
|---|--|--|----------|--|-------------------|---|------------------------------|-------|------------------|--------------------------|
|   |  | Propinsi   | Kab/Kota |  | Th 2010           | Th 2011   | Th 2012                      | (7)   |                  |                          |
| (1)   | (2)  | (3)  |          | (4)  | (5)               |   | (6)                          |       | (7)              | (8)                      |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>   |  |  |          |  |                   |   |                              |       |                  |                          |
| <b>PROGRAM D. : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |  |          |  |                   |   |                              |       |                  |                          |
| 3   | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman | Peran Gender dalam PRB di berbagai tingkat pelaku  |          | Sulawesi NTT Kaltim                        |                   |   | 500                          | 500   | 500              | LIPi, Puslit Oseanografi |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |  |  |          |  |                   |   |                              |       |                  |                          |
| <b>PROGRAM E. : PERINGATAN DINI</b>   |  |  |          |  |                   |   |                              |       |                  |                          |
| 1   | pengamatan gejala bencana  | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media |          | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu |                   | Pemanfaatan pemahaman proses alam dalam PRB                       | 500                          | 500   | 500              | LIPi, Puslit Oseanografi |
| 2   | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana                           | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media |          | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu |                   | tersusunnya indeks kapasitas rantai peringatan dini tsunami       | 500                          | 1.000 | 500              | LIPi, Puslit Oseanografi |
| 4   | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana                          | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media |          | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu |                   | tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami | 250                          | 500   | 500              | Bappenas/BNPB            |
| 5   | pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana                                | Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media |          | Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu |                   | tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami | 250                          | 500   | 500              | Bappenas/BNPB            |

| No   | Kegiatan   | Sasaran  | Lokasi                                      |          | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |               |              | Sumber Pendanaan   | Pelaksana/Koordinator                 |
|--|--|--|---|----------|---|------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
|  |  |  | Propinsi                                    | Kab/kota |   | Th 2010                      | Th 2011       | Th 2012      |                    |                                       |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   |          | (5)   | (6)                          |               |              | (7)                | (8)                                   |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>                            |  |  |   |          |   |                              |               |              |                    |                                       |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>   |  |  |   |          |   |                              |               |              |                    |                                       |
| 1  | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan an risiko bencana | Sekolah Model Siaga Bencana, komunitas sekolah dan pelaku terkait                                | Aceh<br>Lampung<br>Jakarta<br>Kalim<br>Riau |          | Kajian, Pengembangan dan Penguatan kapasitas Sekolah Model untuk menjadi sekolah Contoh Siaga Bencana   | 2,000                        | 1,300         | 1,300        | Bappenas           | LPI, Kem. Diknas, BNPB                |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB LIPI</b>   |  |  |   |          |   | <b>10,950</b>                | <b>14,100</b> | <b>8,750</b> |                    |                                       |
| <b>Matrik RAN-PRB 2010-2012, POLRI</b>   |  |  |   |          |   |                              |               |              |                    |                                       |
| <b>PRIORITAS: Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan untuk Membangun Budaya Keselamatan dan Ketahanan</b> |  |  |   |          |   |                              |               |              |                    |                                       |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |  |   |          |   |                              |               |              |                    |                                       |
| 3  | penyelenggara an pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan             | meningkatnya kemampuan personil Polri dalam hal membaca peta khususnya peta sebaran kriminalitas | Mabes Polri dan Bakosurtanal                |          | Adanya peta sebaran kriminalitas pada daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi terhadap peralatan bencana Bakosurtanal sehingga:<br>1. Polri memiliki pengetahuan pengolahan peta yg dapat dikembangkan lebih lanjut dengan asistensi dari Bakosurtanal<br>2. Bakosurtanal memiliki peta sebaran kriminalitas yg akan dibagikan ke Polres/Polsek dan Masyarakat<br>3. Perangkat Bakosurtanal lebih dapat terjaga baik dengan adanya peta yg akan disebarakan ke Polres/Polsek serta masyarakat sekitarnya karena masyarakat merasa memilikinya dan mengerti/paham akan pentingnya alat tersebut |                              |               |              | Kementerian Ristek | POLRI, Pusdalops POLRI & Bakosurtanal |

| No  | Kegiatan   | Sasaran                              |                      | Lokasi |  | Indikator Kinerja |          |          | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |          | Sumber Pendanaan       | Pelaksana / Koordinator       |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|--------|--|-------------------|----------|----------|------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|
|   |  | (1)                                  | (2)                  | (3)    | (4)  | (5)               | Th 2010  | Th 2011  | Th 2012                      | (6)      |                        |                               |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>                     |  |                                      |                      |        |  |                   |          |          |                              |          |                        |                               |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>                                      |  |                                      |                      |        |  |                   |          |          |                              |          |                        |                               |
| 3   | Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman | Pusdalops POLRI, Polres dan Polsek   | Mabes Polri dan BNPB |        | Polres/Polsek dapat membaca dan menjelaskan isi peta rawan kebencanaan kepada masyarakat di daerah rawan bencana |                   |          |          |                              |          | Kementerian Ristek     | POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada semua tingkatan masyarakat</b> |  |                                      |                      |        |  |                   |          |          |                              |          |                        |                               |
| <b>PROGRAM F : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>           |  |                                      |                      |        |  |                   |          |          |                              |          |                        |                               |
| 4   | penguatan ketahanan sosial masyarakat  | Meningkatkan kemampuan personil      | Mabes Polri          |        | Meningkatkan kemampuan personil dalam rangka Penanggulangan Bencana  | 298               |          |          |                              |          | DIPA DIT SAMAPTA POLRI | POLRI, DIT SAMAPTA POLRI      |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>  |  |                                      |                      |        |  |                   |          |          |                              |          |                        |                               |
| 2   | penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan dan kedaruratan bencana       | Personil yang mengawasi posko 24 jam | Mabes Polri dan BNPB |        | memiliki SOP Ren Kontinjensi di Bid. Kebencanaan   |                   |          |          |                              |          | BNPB                   | POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB |
| <b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB POLRI</b>   |  |                                      |                      |        |  | <b>298</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b> |                        |                               |

| No   | Kegiatan   | Sasaran  |  | Lokasi              |  | Indikator Kinerja  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana/<br>Koordinator |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
|  |  | (3)  |  | (4)                 |  |  | Th 2010                      | Th 2011 | Th 2012 |                  |                           |
| (1)  | (2)  |  |  |                     |  | (5)  | (6)                          |         |         |                  |                           |
| <b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PERTAHANAN/ TNI</b>   |  |  |  |                     |  |  |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> |  |  |  |                     |  |  |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>                                   |  |  |  |                     |  |  |                              |         |         |                  |                           |
| 1  | Melakukan koordinasi dengan BNPB dan BPBD dan instansi terkait untuk tugas, kewenangan, kerja dan merencanakan dan sumber dukungan sar-pras daya | Koordinasi dengan BNPB dan BPBD dan instansi terkait untuk tugas, kewenangan, kerja dan merencanakan dan sumber dukungan sar-pras daya |  | Mabes TNI dan Kowil |  | Terperuhnya dukungan alpal/sarana, dan kesehatan prasarana PRCPB ditingkat pusat dan daerah (secara bertahap)    | 12.650                       | 18.245  | 21.378  | APBN             | Slog TNI                  |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |  |  |  |                     |  |  |                              |         |         |                  |                           |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |  |  |                     |  |  |                              |         |         |                  |                           |
| 6  | pengelolaan lingkungan hidup   | Pelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan konservasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi di daerah rawan bencana.                       |  | 4 Kowil             |  | Terwujudnya kegiatan penghijauan pada zona penyangga kawasan lindung dan resapan air                             | 240                          | 288     | 346     | APBN             | Ster TNI                  |
|  |  |  |  | 4 Kowil             |  | Terwujudnya kegiatan pelestarian sungai akibat pendangkalan sungai   | 100                          | -       | 144     | APBN             | Ster TNI                  |
|  |  |  |  | 4 Kowil             |  | Terwujudnya kegiatan pelestarian jalur hijau berupa zona hijau bantaran sungai dan penanaman pohon penahan erosi | 100                          | 120     | 144     | APBN             | Ster TNI                  |



| No   | Kegiatan  | Sasaran   |                     | Lokasi |     | Indikator Kinerja   | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) |         |         | Sumber Pendanaan | Pelaksana / Koordinator |
|--|---|---|---------------------|--------|-----|---|------------------------------|---------|---------|------------------|-------------------------|
|  |   | (1)   | (2)                 | (3)    | (4) |   | (5)                          | Th 2010 | Th 2011 |                  |                         |
| <b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b><br><b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b> |   |   |                     |        |     |   |                              |         |         |                  |                         |
| 3  | peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana | Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana | Mabes TNI dan Kowil |        |     | Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat                  | 800                          | -       | -       | - APBN           | Slog TNI                |
|  |   | Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana | 4 Kowil             |        |     | Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat                  | -                            | 960     | -       | - APBN           | Slog TNI                |
|  |   | Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana | 4 Kowil             |        |     | Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat                  | -                            | -       | 1,152   | APBN             | Slog TNI                |
|  |   | Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana |                     |        |     | Terkoordinirnya pemanfaatan alat angkut milik swasta untuk mendukung penanganan bencana |                              |         | 115     |                  | Ster TNI                |
| 4  | penguatan ketahanan sosial masyarakat                       | Melaksanakan gladi posko penanganan bencana   | 4 Kowil             |        |     | Terlaksananya mekanisme hubungan komando dan staf PRCPB dalam penanganan bencana        | 60                           | 72      | 86      | APBN             | Ster TNI                |

| No<br>(1) | Kegiatan<br>(2) | Sasaran<br>(3)  |          | Lokasi<br>(4) |         | Indikator Kinerja<br>(5)  | Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)<br>(6) |     |     | Sumber<br>Pendanaan<br>(7) | Pelaksana/<br>Koordinator<br>(8) |
|-----------|-----------------|---|----------|---------------|---------|---|-------------------------------------|-----|-----|----------------------------|----------------------------------|
|           |                 | Propinsi  | Kab/kota | Th 2010       | Th 2011 |   | Th 2012                             |     |     |                            |                                  |
|           |                 | Melaksanakan gladi lapangan penanganan bencana secara terpadu dengan instansi terkait | 4 Kowil  |               |         | Terlatihnya prajurit PRCPB bersama instansi terkait dalam penanganan bencana secara terpadu | 95                                  | 114 | 137 | APBN                       | Ster TNI                         |
|           |                 |   | 4 Kowil  |               |         | Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam membantu proses penanganan bencana                  | 60                                  | 72  | 86  | APBN                       | Ster TNI                         |



LAMPIRAN 4. MATRIK USULAN KEGIATAN RAN-PRB  
2010-2012 YANG BELUM TERINDIKASI  
DANA DAN PELAKSANANYA



LAMPIRAN 4  
Matrik Usulan

| No   | Kegiatan  | Sasaran  | Provinsi   | Indikator Kinerja   |
|--|---|--|--|---|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b> |   |  |  |   |
| <b>PROGRAM A : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>                                   |   |  |  |   |
| 1  | Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya | Terwujudnya Koordinasi urusan pemulihan lingkungan, kesadaran dan kesiapsiagaan serta ketahanan masyarakat dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat | Sumatera Selatan, DKI Jakarta<br>Gorontalo, dan Lampung  | Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah dan masyarakat dalam urusan pemulihan lingkungan, kesadaran dan kesiapsiagaan serta ketahanan masyarakat dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat |
| <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>  |   |  |  |   |
| 1  | Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana                         | Tersusunnya peta risiko bencana gempabumi yang memenuhi kaidah pemetaan dan memiliki legitimasi  | Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat | Adanya acuan para pemangku kepentingan  |
|  |   | Tersusunnya peta risiko bencana tsunami yang memenuhi kaidah pemetaan dan memiliki legitimasi  | Pantai Barat Sumatera, Bali, Maluku dan Maluku Utara     | Adanya acuan para pemangku kepentingan  |
| 2  | Melakukan analisis risiko bencana                                 | Daerah mampu melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana serta menghitung risiko bencana   | Pesisir Sumatera Bagian Barat<br>Pesisir Selatan Jawa    | Buku Pedoman  |
| 3  | Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana                  | Teridentifikasinya tindakan pengurangan risiko bencana di sekitar gunungapi  | Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat              | Terwujudnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana di sekitar gunung api  |

| No   | Kegiatan   | Sasaran  | Provinsi  | Indikator Kinerja  |
|--|--|--|---|--|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  |
| 4  | Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan               | Tersusunnya kebijakan dalam mengurangi risiko banjir yang melibatkan beberapa provinsi                           | DKI Jakarta Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah             | Meningkatnya upaya-upaya dalam mengurangi risiko banjir  |
| <b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b> |  |  |   |  |
| <b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>   |  |  |   |  |
| 1  | pengembangan budaya sadar bencana                                      | Masyarakat akan semakin sadar terhadap bahaya bencana gerakan tanah/tanah longsor                                | Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat            | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana gerakan tanah/tanah longsor            |
| 2  | pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana | Pemanfaatan teknologi GIS dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan   | Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim | Pelatihan pengolahan data hotspot kepada aparat pemerintah daerah                                |
| 3  | penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan                  | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bencana kekeringan  | Banten, Jawa Barat, Jawa, Tengah, Jawa Timur                | Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana kekeringan                                     |
| <b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>  |  |  |   |  |
| <b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>   |  |  |   |  |
| 1  | pengenalan dan pemantauan risiko bencana                               | Menghimpun data dan informasi kebakaran hutan dan lahan dan mendistribusikannya ke daerah-daerah rawan kebakaran | Sumatera dan Kalimantan                                     | Tersedianya data hotspot pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap lintas batas |
| 2  | penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana | Terbangunnya sistem peringatan dan deteksi banjir  | Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat                    | Tersedianya sistem peringatan dan deteksi banjir   |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Provinsi  | Indikator Kinerja  |
|-----|--|--|---|--|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  |
| 3   | identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana                       | Percepatan Pembuatan Peta Dasar (Rupabumi) Skala Besar, Penyusunan Data Akurat, Informasi, dan Pemutakhiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana | Seluruh Wilayah Indonesia                                     | Tersedianya Peta Dasar yang Menjadi Acuan Pembuatan Peta Operasional Penanganan Bencana                |
| 4   | melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana | Terbangunnya sistem pengelolaan sumber daya alam   | Banten, Jawa Barat, Jawa, Tengah, Jawa Timur                  | Tersedianya sistem pengelolaan sumber daya alam  |
| 5   | Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang  | Terbangunnya sistem pengawasan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan Undang-Undang  | Seluruh daerah rawan bencana                                  | Tersedianya sistem pengawasan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan Undang-Undang |
| 6   | pengelolaan lingkungan hidup   | Indeks Kepekaan Lingkungan   |   | Buku Pedoman   |
| 7   | pengaturan pembangunan dan tata bangunan   | Tersusunnya peraturan pembangunan tata bangunan  | Seluruh daerah rawan bencana                                  | Adanya peraturan pembangunan tata bangunan   |
| 8   | pembangunan sarana dan prasarana   | Terbangunnya fasilitas umum yang tahan terhadap bencana gempabumi di daerah rawan bencana  | Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bengkulu | Tersedianya fasilitas umum yang tahan terhadap bencana gempabumi di daerah rawan bencana               |
|     |  | Terbangunnya struktur penahan gelombang laut untuk mengurangi dan menahan tekanan tsunami  | Pesisir Sumatera Bagian Barat, Pesisir Selatan Jawa, Bali     | Tersedianya struktur penahan gelombang laut untuk mengurangi dan menahan tekanan tsunami               |



| No  | Kegiatan  | Sasaran  | Provinsi  | Indikator Kinerja   |
|---|---|--|---|---|
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)   |
|   |   | Terbangunnya sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal cepat    | Seluruh daerah rawan bencana                                | Tersedianya sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal cepat        |
| <b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> |   |  |   |   |
| <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>  |   |  |   |   |
| 1   | pengamatan gejala bencana                           |  |   |   |
| 2   | melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana  |  |   |   |
| 3   | pengambilan keputusan status ancaman bencana        |  |   |   |
| 4   | penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana | membuat dan penyebarluasan potensi daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan   | Sumatera dan Kalimantan                                     | Tersedianya Peta rawan kebakaran wilayah Sumatera dan Kalimantan                      |
| 5   | pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana       |  |   |   |
| <b>PRIORITAS: PENGUATAN KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA PADA SEMUA TINGKATAN MASYARAKAT</b>                         |   |  |   |   |
| <b>PROGRAM F : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>                                   |   |  |   |   |
| 1   | Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat | Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan | Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim | Sosialisasi dan kampanye bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat           |
|   |   | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana              | Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Lampung       | Terselenggaranya sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana |

| No                               | Kegiatan   | Sasaran   | Provinsi   | Indikator Kinerja  |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| (1)                              | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  |
| 2                                | perencanaan partisipatif penanggulangan bencana                    |   |  |  |
| 3                                | peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana        | Meningkatkan ketaatan terhadap para pelaku usaha dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan | Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim      | Pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan             |
|                                  |  | Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan multi bencana | Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Lampung            | Terbangunnya Komitmen bersama antara Pemerintah dan Stakeholder untuk penanggulangan multi bencana |
| 4                                | penguatan ketahanan sosial masyarakat                              |   |  |  |
| <b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b> |  |   |  |  |
| 1                                | Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana    | Peningkatan kesiapan masyarakat   | Seluruh daerah rawan bencana                                     | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana            |
| 2                                | penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana |   |  |  |
| 3                                | pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini | Terbangunnya sistem monitoring dan peringatan terhadap ancaman gerakan tanah/tanah longsor  | Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara | Tersedianya sistem monitoring dan peringatan terhadap ancaman gerakan tanah/tanah longsor          |
| 4                                | penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan                  |   |  |  |

| No  | Kegiatan   | Sasaran  | Provinsi                                    | Indikator Kinerja   |
|-----|--|--|---|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)   |
|     | kebutuhan dasar  |  |   |   |
| 5   | pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat                 |  |   |   |
| 6   | penyiapan lokasi evakuasi  |  |   |   |
| 7   | penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana           | Memberi pemahaman pelaksanaan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api | Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat | Meningkatkan pemahaman pelaksanaan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api |
| 8   | penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana |  |   |   |